



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 terdiri atas:
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - BAB VIII. Penutup.
- (2) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari RKPD yang harus dicapai pada tahun 2025 yang diambil dari indikator tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 78,60;
 - b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,28-6,58 persen;
 - c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,05-5,67 persen;

- d. Indeks Gini pada angka 0,310-0,321;
- e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 80,19;
- f. Persentase Penurunan Emisi dari *Business As Usual* (BAU) sebesar 27,53 persen;
- g. Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 74,00 (B);
- h. Prevalensi Stunting sebesar 19,80 persen;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,60-5,14 persen;
- j. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada angka 67,64;
- k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada angka 8,38; dan
- l. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 12,39 persen.

Pasal 4

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 selanjutnya menjadi:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota Tahun 2025, dan;
- c. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 7

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

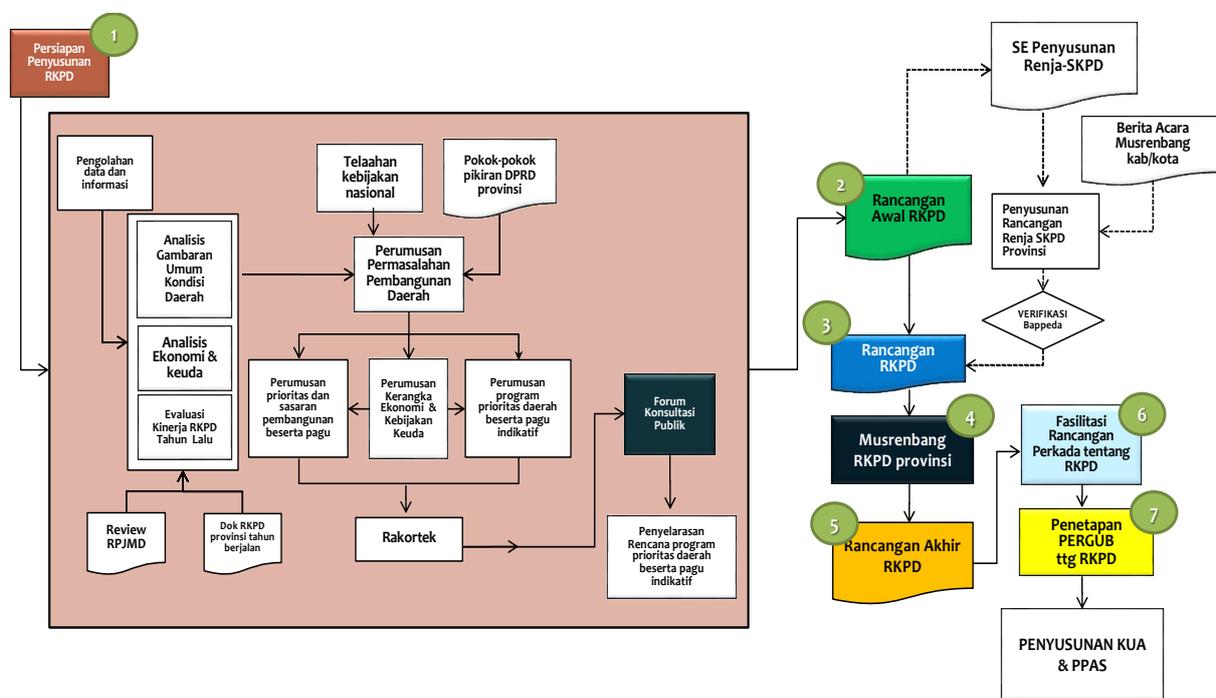
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan terdiri atas: RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) untuk jangka 20 Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka 5 Tahunan, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk jangka tahunan. Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, maka dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2025 mengacu pada dokumen RPD.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua RPD Tahun 2024-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2025 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Dalam penyusunan RKPD 2025, Provinsi Kalimantan Timur harus mengimplementasikan dan melaksanakan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) guna mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Melalui inisiatif lokal, pemerintah daerah dapat menyelaraskan kebijakan, program, dan proyek pembangunan dengan prinsip-prinsip TPB yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 8 (delapan) tahapan sebagai berikut

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
4. Penyusunan Rancangan RKPD;
5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
6. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
7. Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
8. Penetapan RKPD.

Secara rinci tahapan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disajikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar I.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Kalimantan Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Kalimantan Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Kalimantan Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Kalimantan Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Kalimantan Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Kalimantan Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Kalimantan Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Kalimantan Nomor 6781);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

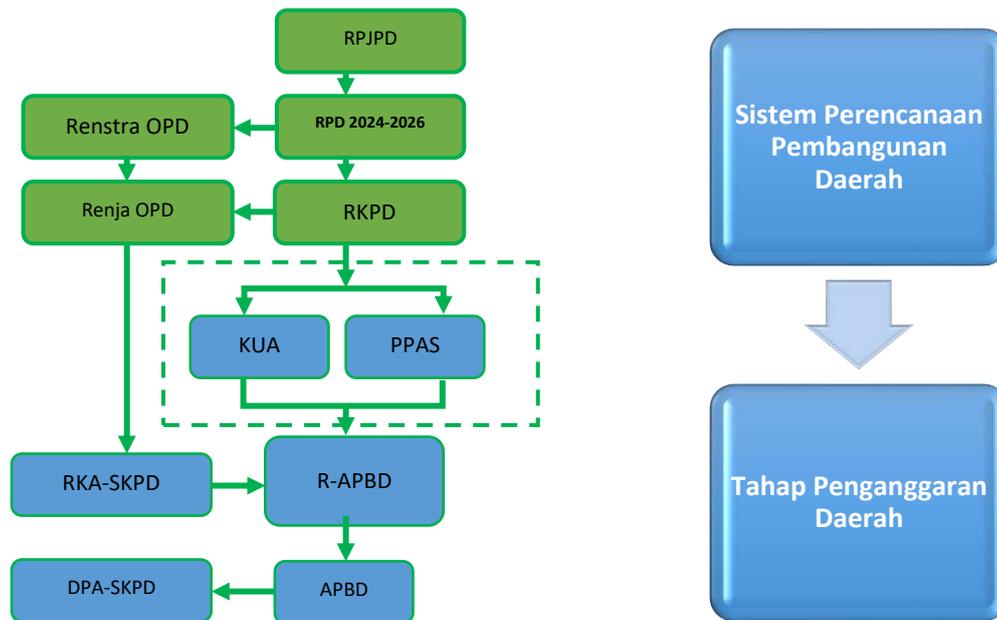
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1); dan
28. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2025 berpedoman pada :

- a. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPD 2024-2026 tahun kedua, yaitu penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;
- b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yaitu penyesuaian prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP Tahun 2025.

Selanjutnya RKPD 2025 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RENJA PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2. Sistem perencanaan pembangunan daerah dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.



Gambar I.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2024.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, yaitu:

- a. Menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.5 Sistematika Dokumen RKPDP

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penyajian indikasi kamus usulan aspirasi.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan

tahun perencanaan pembangunan RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD yang diantaranya meliputi peran dokumen RKPD dalam pelaksanaan pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula bersifat *unrenewable resources* menjadi *renewable resources* perlu mendapatkan perhatian besar. Sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian. Besarnya potensi keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

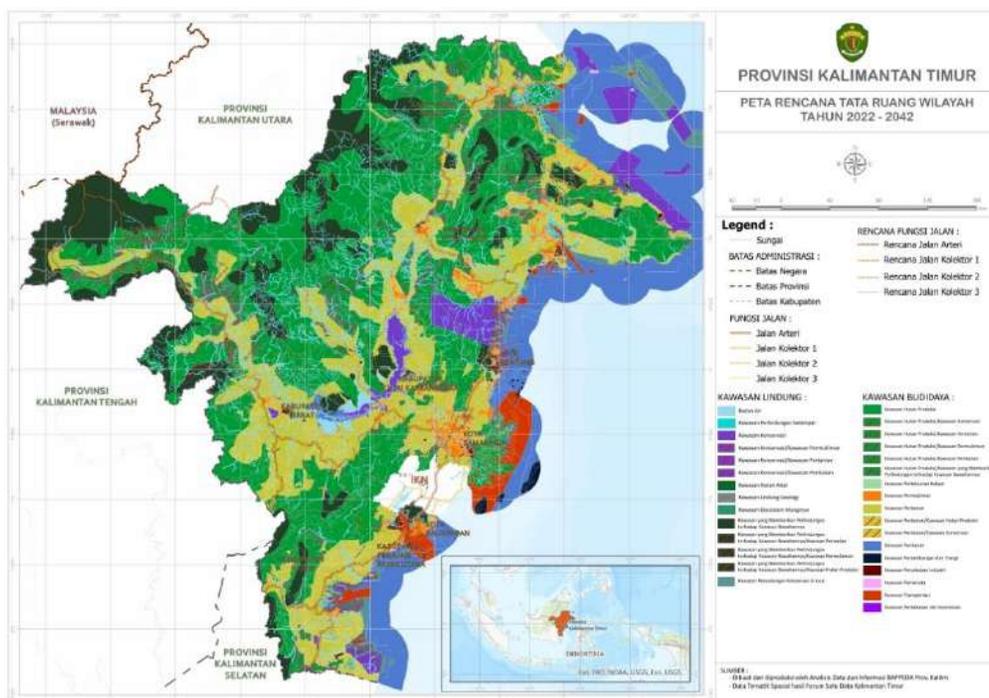
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 37' 12.99" Lintang Utara (LU) dan -2° 28' 19.31" Lintang Selatan (LS), 113° 50' 3.61-119° 14' 13.06" Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.



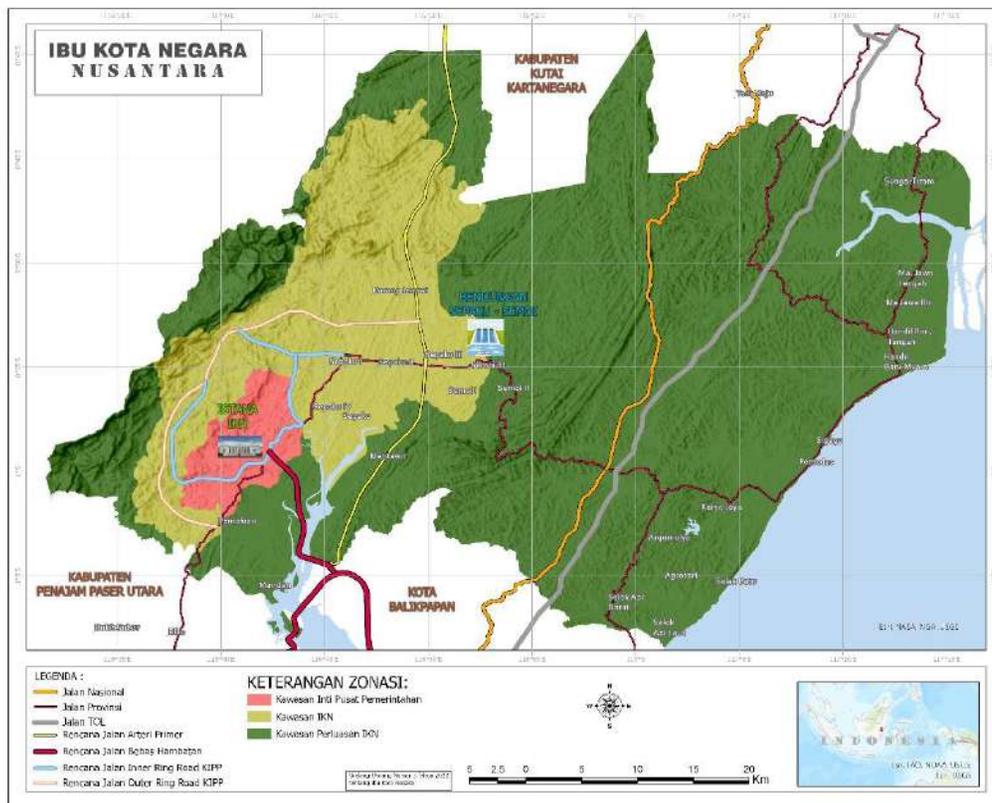
Gambar II.1

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, Kalimantan Timur terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.974.766 Ha dan Kawasan Budidaya seluas 12.369.786 Ha. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Hutan Adat, Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan

Ekosistem Mangrove sedangkan Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

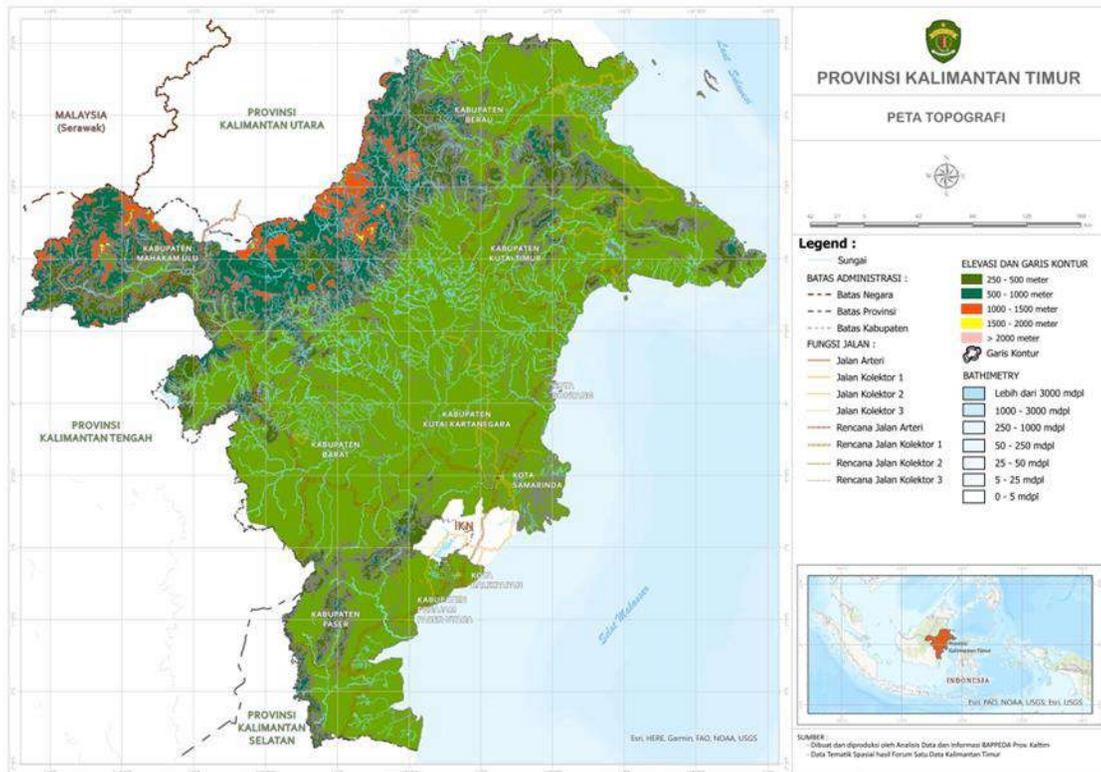
Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui undang – undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang. Luas wilayah IKN Nusantara mencapai 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha. Sehingga luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur setelah ditetapkannya IKN Nusantara mencapai 16.407.734 ha dengan luasan wilayah daratan mencapai 12.478.550 ha dan wilayah laut mencapai 3.929.184 ha.



Gambar II.2
Peta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

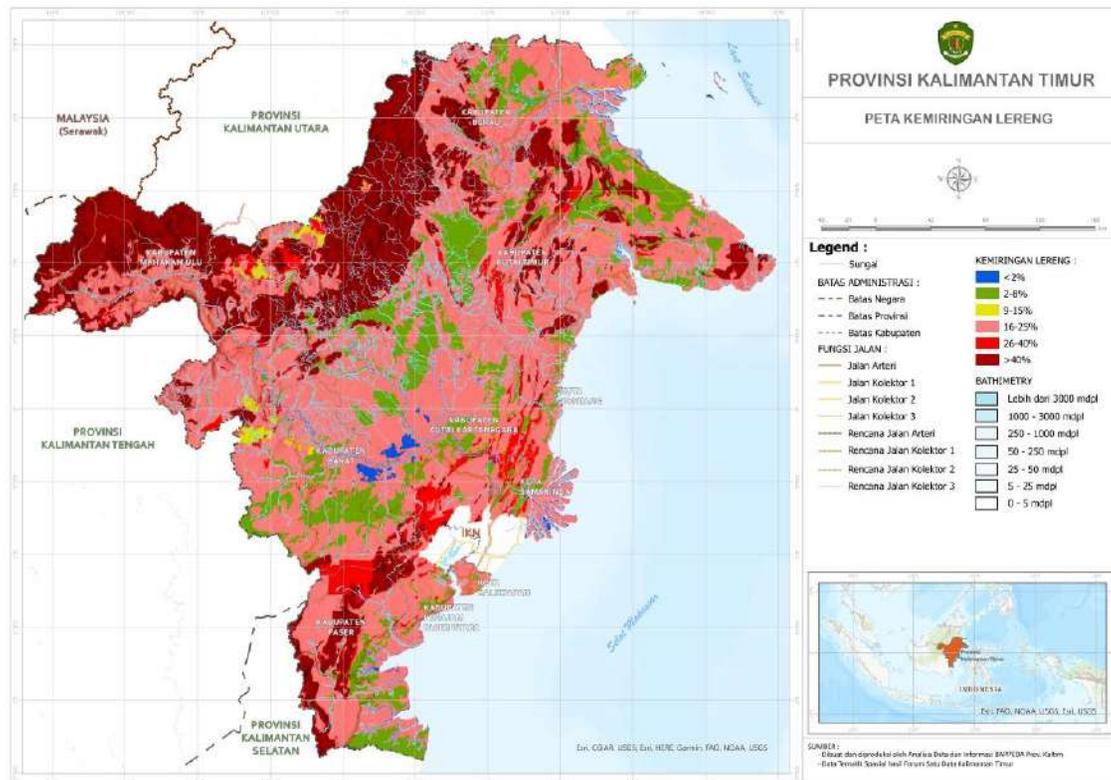
Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat

laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.



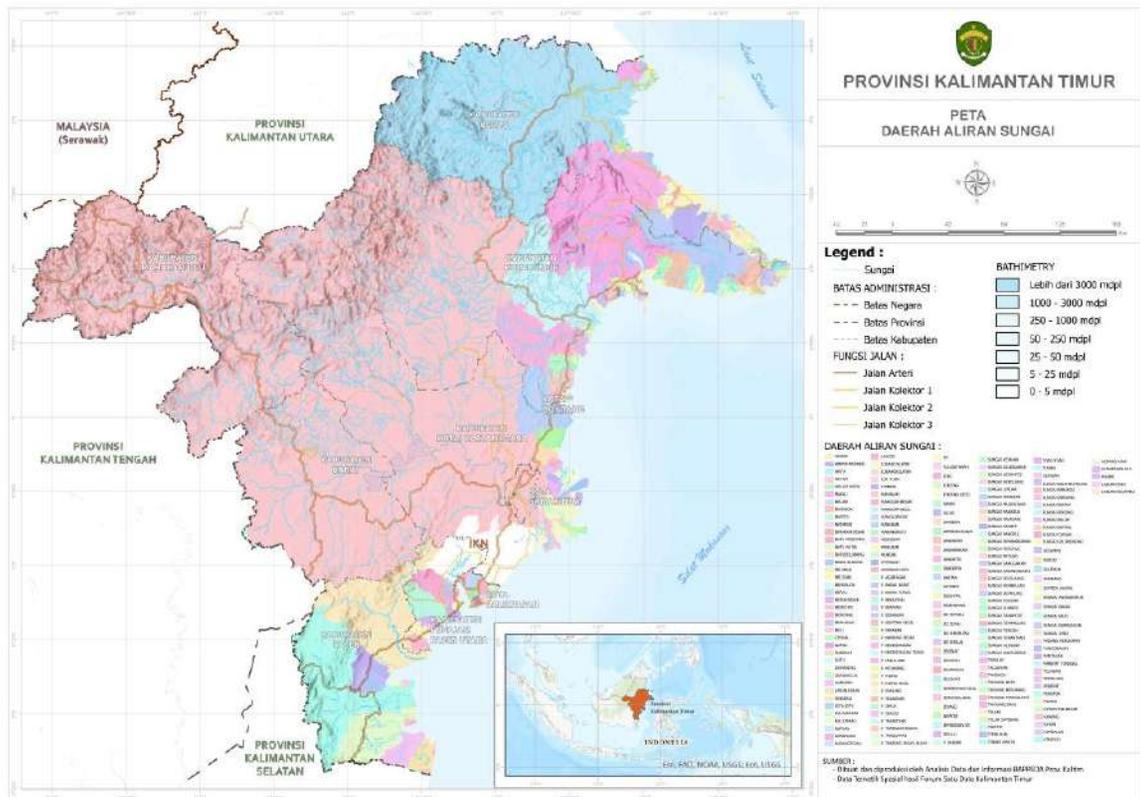
Gambar II.3
Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



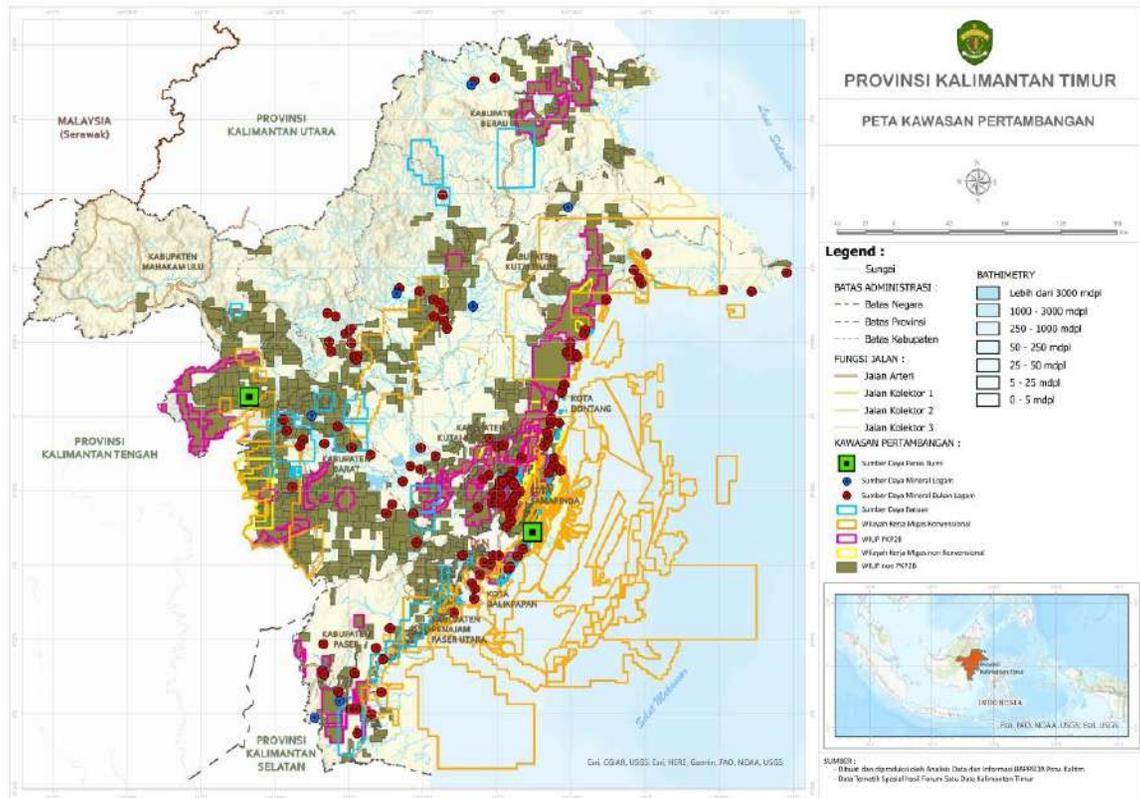
Gambar II.4
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Berau, Sungai Kelay, Sungai Dondang, Sungai Mahakam, Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur, Sungai Telen.



Gambar II.5
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah “*Good Mining Practice*” yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar II.6
 Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur
 (Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

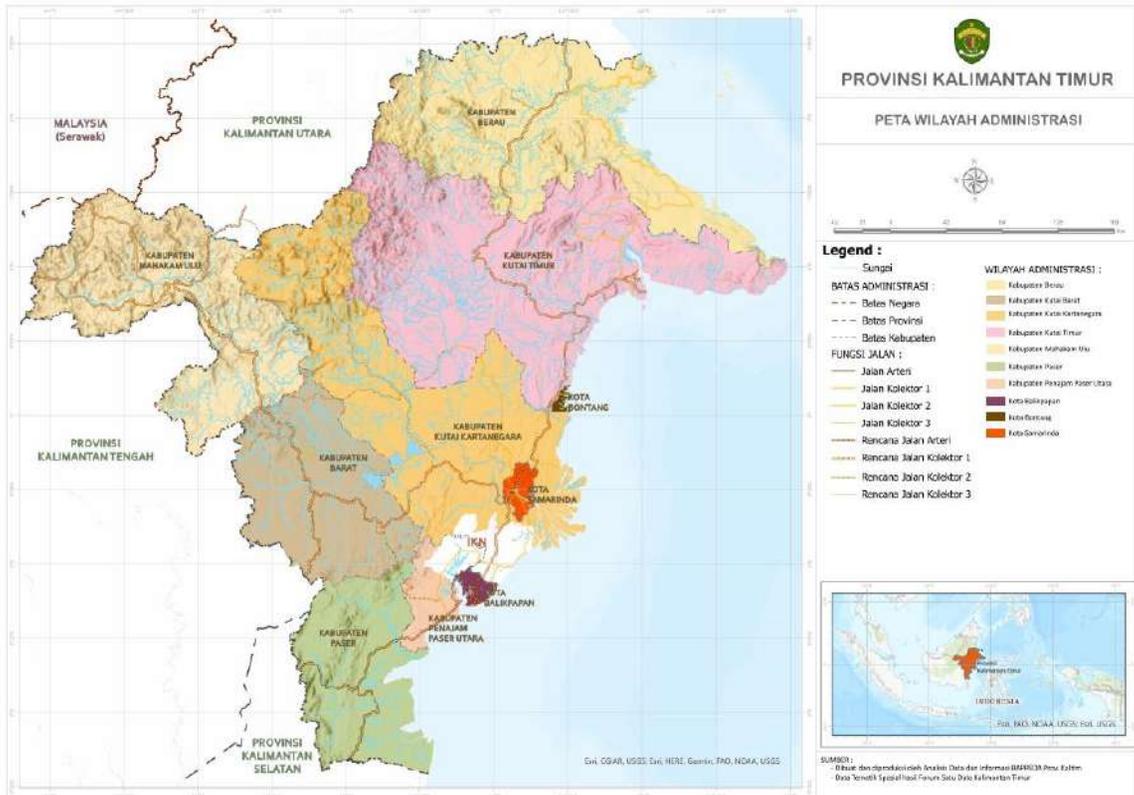
Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II.1
 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.104.644	10	144
2	KUBAR	1.361.117	16	194
3	KUKAR	2.529.239	20	237
4	KUTIM	3.122.720	18	141
5	Berau	2.137.135	13	110
6	PPU	203.254	4	54
7	MAHULU	1.849.224	5	50
8	Balikpapan	51.023	6	34
9	Samarinda	71.678	10	59
10	Bontang	16.077	3	15
Luas Wilayah Laut 12 Mil		2.898.439	-	-
Kalimantan Timur		15.344.552	105	1.038

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM 2023-2042

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar II.7.



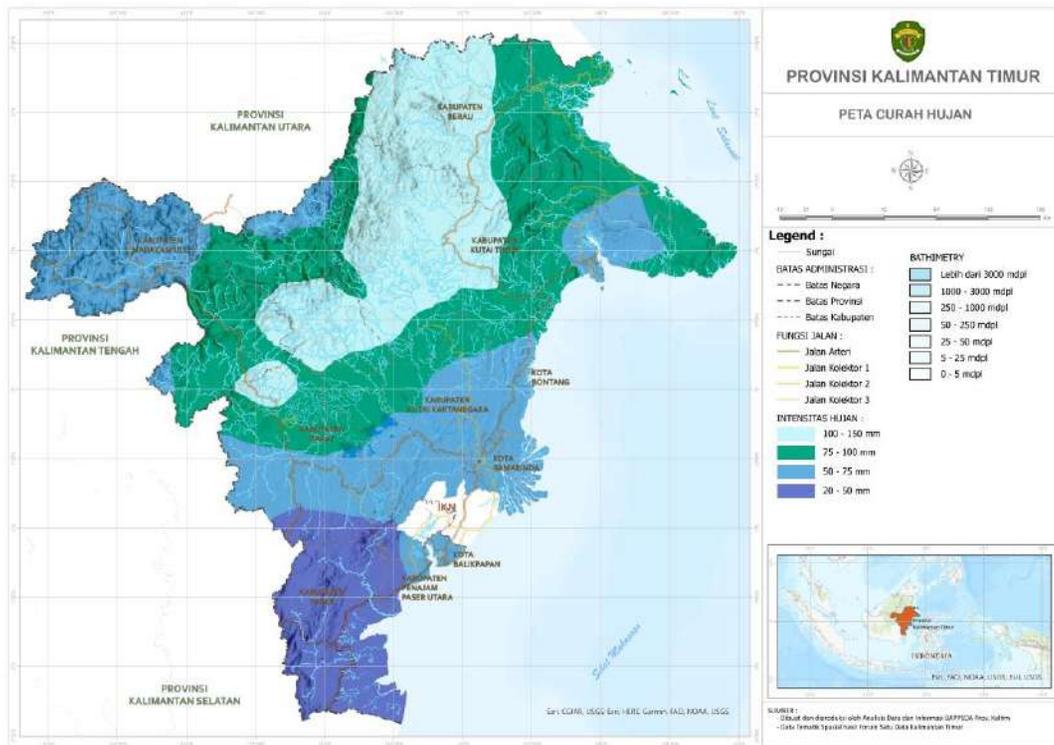
Gambar II.7
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel II.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

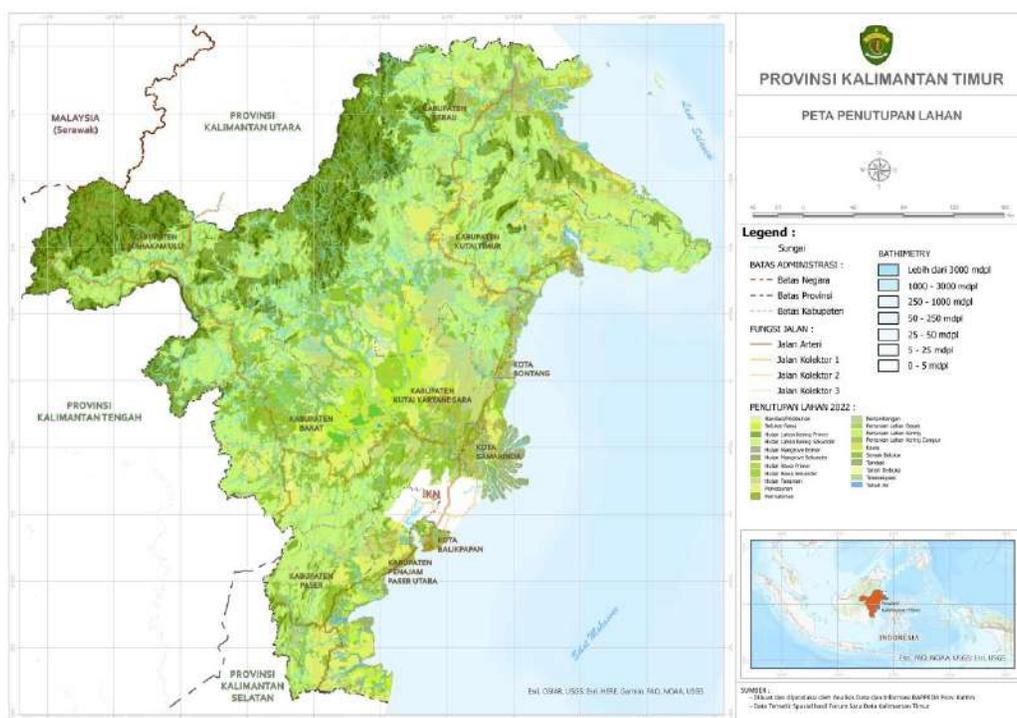
No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	24,50	24,20	23,50
	- Maksimum	32,30	31,10	32,70
2	Kelembaban (%)	82	83,30	87
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.011,60	1.010,10	1.011,50
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	3,00	3,50
5	Curah Hujan (mm)	2.599	2.947	2.312
6	Penyinaran Matahari (%)	42	46	49

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2023



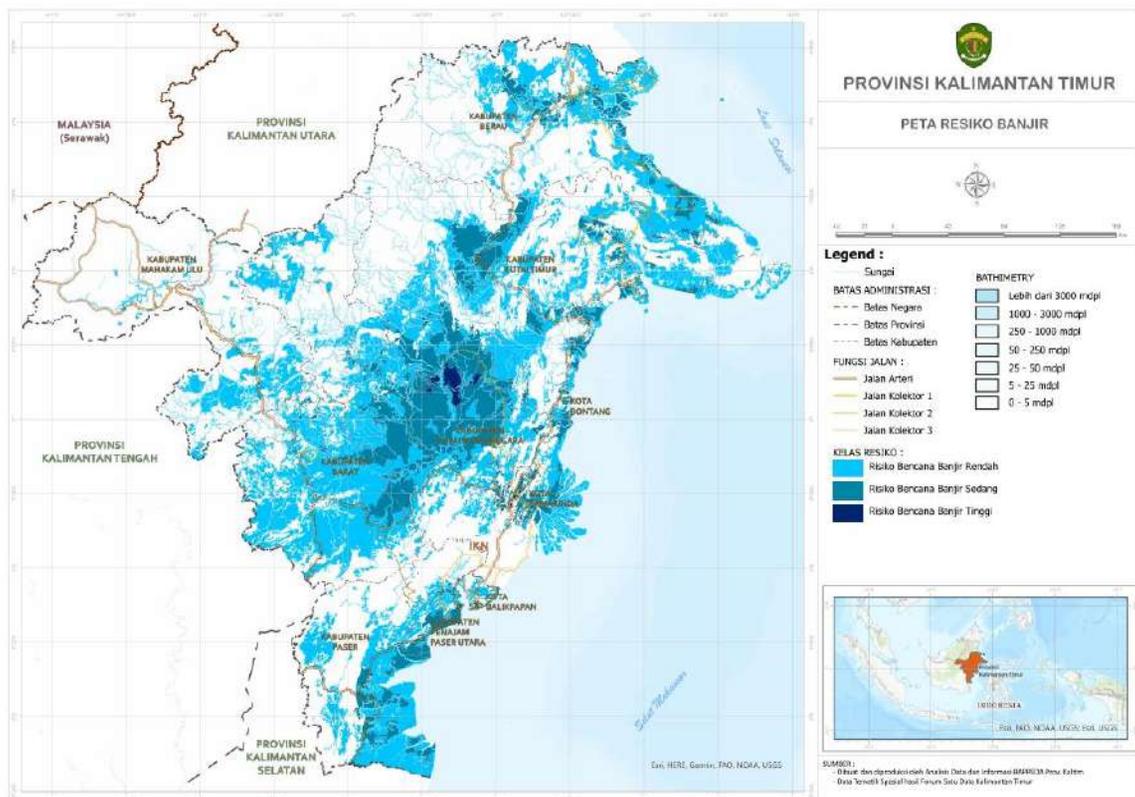
Gambar II.8
Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.9
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.



Gambar II.10

Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim, diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

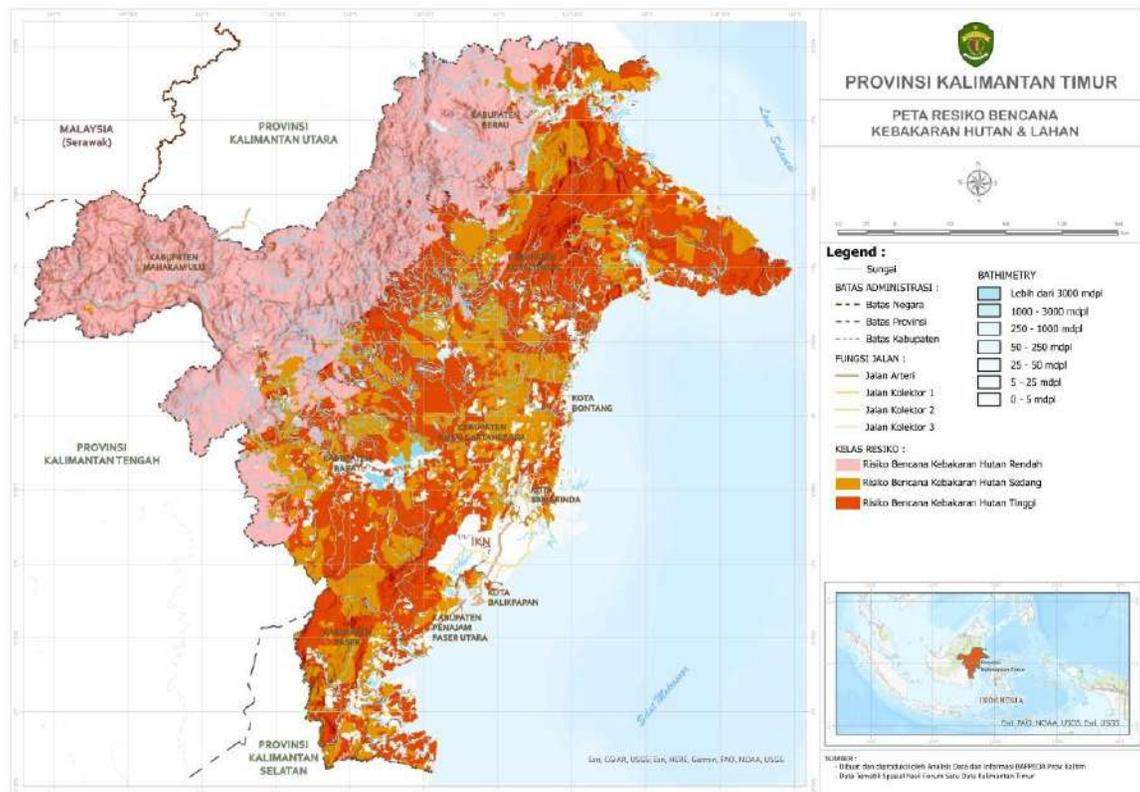
Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran Banjir; peruntukan tata ruang di dataran Banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran Banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi Banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu;

terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali Banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil Banjir.

Terjadinya bencana Banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana Banjir, antara lain:

- Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami Banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan Banjir.
- Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi Banjir.
- Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan Banjir.

Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika berbicara tentang Banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.



Gambar II.11
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi KALTIM, Diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Faktor utama penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kerawanan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat, sebagai berikut:

- Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (*surface run*

off). Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi di lahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh ke darat.

- Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan)
- Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, dan meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

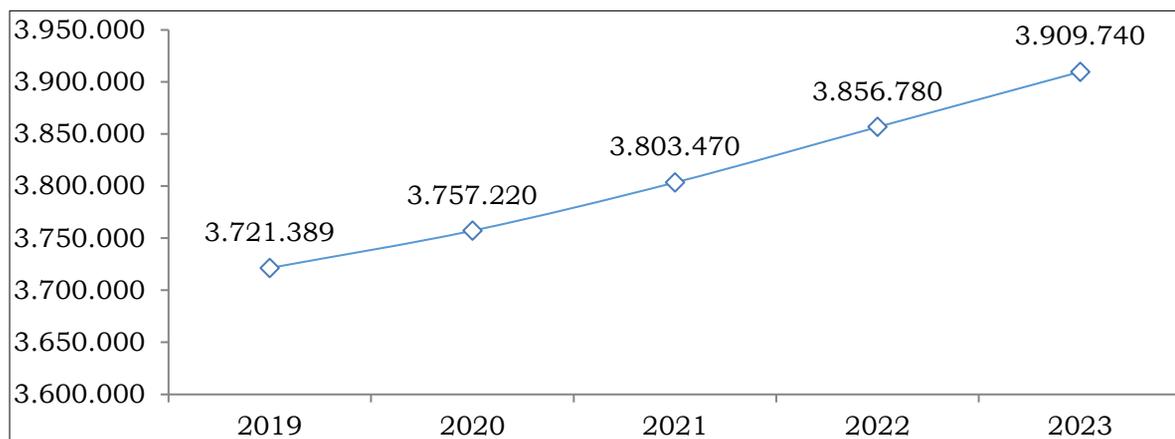
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen informasi kebencanaan dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai dokumen rencana aksi penanggulangan bencana yang menjadi salah satu parameter dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Di Tahun 2021 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki indeks 153,28 dan ditahun 2022, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 146,47, atau penurunan sebesar 6.81 poin dari tahun 2021, tetapi Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam zona yang memiliki risiko yang tinggi. Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan Ketahanan Daerah. Ketahanan Daerah merupakan sebuah ukuran keberhasilan, yang

ditandai dengan meningkatnya sebuah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan menjadi salah satu parameter penting untuk menentukan tingkat risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana; Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 3.721.389 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.909.740 jiwa pada tahun 2023.



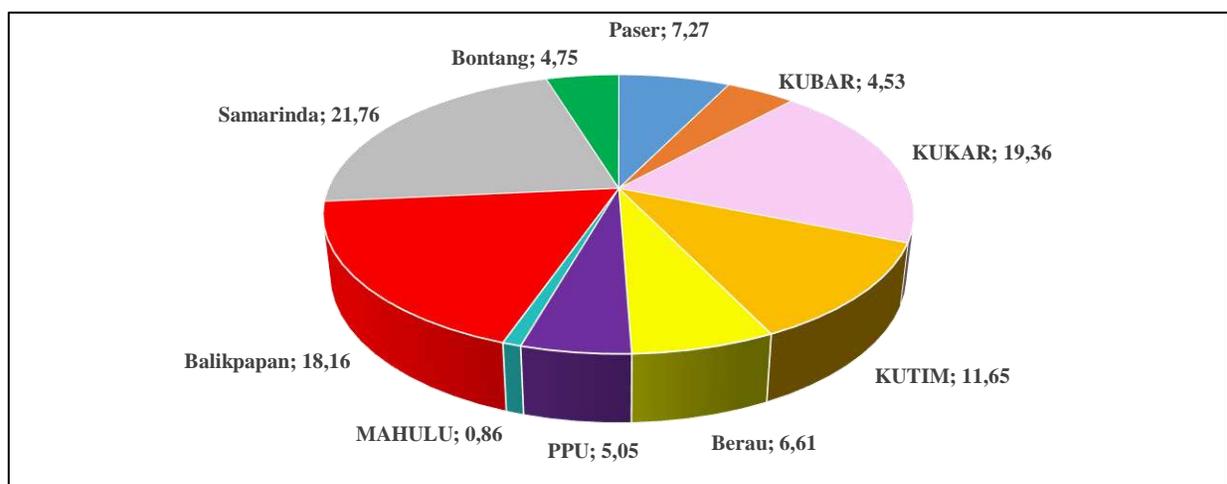
Gambar II.12

Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

(Ket : Tahun 2019: Data Proyeksi Hasil SUPAS tahun 2015; Tahun 2020-2023 : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,76 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus

perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,75%), Kabupaten Penajam Paser Utara (5,05%), Kabupaten Kutai Barat (4,53%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,86%).



Gambar II.13
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

(Ket : Tahun 2019: Data Proyeksi Hasil SUPAS tahun 2015; Tahun 2020-2023 : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 0,99 persen selama lima tahun sejak tahun 2019–2023. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya hingga mencapai 5,07 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar -0,76 persen.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2023

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan Penduduk (2019-2023) (%)
1	Paser	285.894	274.890	278.040	281.140	284.110	-0,13
2	KUBAR	148.020	171.940	173.750	175.470	177.130	3,66
3	KUKAR	786.122	727.610	735.970	746.370	756.790	-0,76
4	KUTIM	376.111	432.550	440.290	447.940	455.500	3,90
5	Berau	232.287	247.210	250.950	254.660	258.290	2,14
6	PPU	160.912	178.060	180.590	188.900	197.630	4,20

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan Penduduk (2019-2023) (%)
7	MAHULU	26.375	32.420	32.870	33.320	33.770	5,07
8	Balikpapan	655.178	687.060	694.940	702.600	710.040	1,62
9	Samarinda	872.768	827.070	835.150	843.010	850.630	-0,51
10	Bontang	177.722	178.410	180.920	183.370	185.850	0,90
Kalimantan Timur		3.721.389	3.757.220	3.803.470	3.856.780	3.909.740	0,99

Ket : Tahun 2019: Data Proyeksi Hasil SUPAS tahun 2015; Tahun 2020-2023 : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kota Balikpapan mencapai 1.393,05 per km². Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 1,83 per km². Dimana total kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 30,79 per km².

Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-108 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

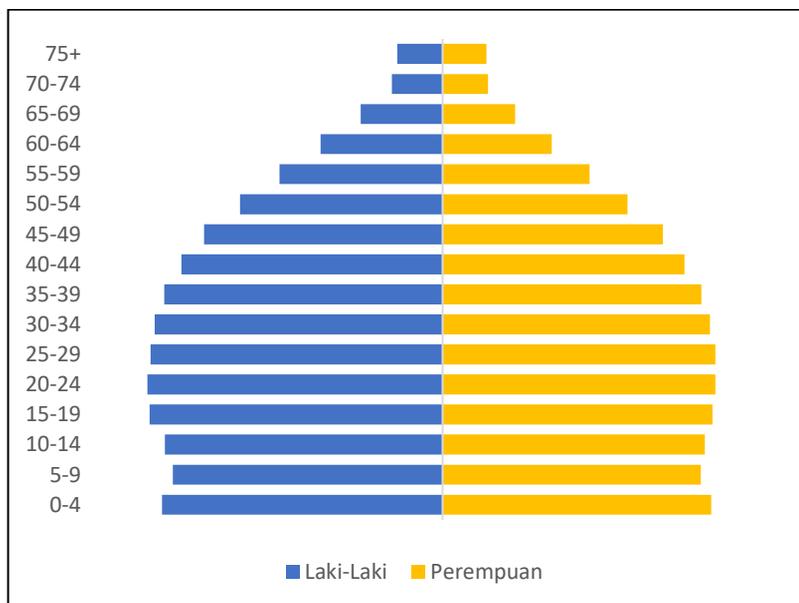
Tabel II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, *Sex Ratio* dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	147.580	136.530	284.110	108,09	25,73
2	KUBAR	93.300	83.830	177.130	111,30	13,02
3	KUKAR	393.420	363.370	756.790	108,27	29,94
4	KUTIM	244.530	210.980	455.500	115,90	14,60
5	Berau	137.760	120.540	258.290	114,29	12,09
6	PPU	101.870	95.770	197.630	106,37	97,30
7	MAHULU	17.630	16.150	33.770	109,16	1,82
8	Balikpapan	362.770	347.270	710.040	104,46	1.393,49
9	Samarinda	432.640	417.990	850.630	103,50	1.187,67
10	Bontang	95.610	90.240	185.850	105,95	1.156,86
Kalimantan Timur		2.027.110	1.882.670	3.909.740	107,67	31,43

Ket : Tahun 2019: Data Proyeksi Hasil SUPAS tahun 2015; Tahun 2020-2023 : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 70,50 persen dari total penduduk Kalimantan Timur,

sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 tercatat sebesar 41,84 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang tidak dan belum produktif.



Gambar II.14

Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

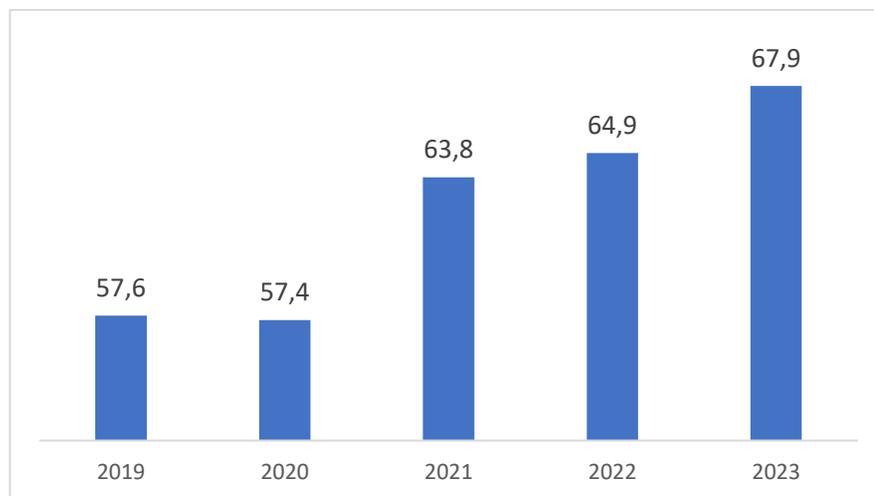
(Ket : Tahun 2019: Data Proyeksi Hasil SUPAS tahun 2015; Tahun 2020-2023 : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2023 pada laki-laki dan perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,35 persen jika dibanding dengan tahun 2022 yaitu sebesar 0,42 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,09 persen jika dibanding dengan tahun 2022 sebesar 0,05 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,15 persen jika dibanding dengan tahun 2022 sebesar 0,35 persen, dan pada kategori penduduk usia 19-24 tahun sebesar 0,28 persen pada tahun 2023 yang berarti menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,38 persen. Dengan demikian secara umum, hanya pada kategori 13-15 tahun yang sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan aspek-aspek demografi dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. IPBK dibangun dalam rangka untuk memperoleh suatu alat ukur monitoring dan evaluasi pembangunan berwawasan kependudukan itu sendiri. Dimensi yang

dirumuskan dalam IPBK dianggap mewakili pembangunan berwawasan kependudukan yaitu, Partisipasi, Keberlanjutan, Inklusivitas, Holistic Integrative dan Kesetaraan. Nilai indeks dimensi yang paling tinggi adalah dimensi Partisipasi dan Keberlanjutan, sedangkan yang terendah adalah dimensi Inklusivitas. Indeks ini diharapkan mampu memotret tantangan pembangunan kependudukan di Indonesia, sekaligus memberikan masukan yang tepat untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan di masa mendatang.

Nilai IPBK berupa angka bulat dengan skala 0-100, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pembangunan berwawasan kependudukan disuatu wilayah paling buruk, sebaliknya nilai 100 mengindikasikan tingkat pembangunan berwawasan kependudukan paling baik. Semakin tinggi IPBK suatu daerah maka akan semakin tinggi pula IPM di wilayah tersebut. Setiap dimensi membutuhkan perhatian yang sama dan harus maju bersama-sama.



Gambar II.15
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Sumber : BKKBN Kaltim, 2024)

Hasil capaian IPBK dimensi Partisipasi pada tahun 2023, Kalimantan Timur menempati posisi 3 besar, dengan capaian sebesar 76,7 (naik dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar 72,0), diatas capaian Nasional yaitu sebesar 70,7. Partisipasi ini mencerminkan upaya yang kuat terhadap pelibatan penduduk dalam pembangunan.

Pada dimensi Keberlanjutan, Kalimantan Timur konsisten berada di posisi 3 besar dan berada pada urutan tertinggi, dengan capaian sebesar 89,5 (setelah 4 tahun berturut-turut menempati posisi 3 besar) berada diatas capaian Nasional yaitu sebesar 69,6. Hal ini menunjukkan aspek penduduk sebagai

pelaku pembangunan dapat menjaga keberlanjutan pembangunan yang akan dilakukan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pada dimensi Inklusivitas, capaian Kalimantan Timur sebesar 49,1 (naik dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar 48,9) dan berada dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 49,3. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan cakupan aspek-aspek yang menyeluruh, mulai dari sarana transportasi, informasi, balita bahkan remaja sebagai wujud awal pembangunan keluarga.

Tabel II.5
 Nilai Indeks Dimensi Dan Komposit Indeks Pembangunan Berwawasan
 Kependudukan (IPBK) Tahun 2023 Kabupaten/Kota
 Di Kalimantan Timur

Kab/Kota	2023					
	Indeks Dimensi					
	Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan	IPBK
Kalimantan Timur	76,7	89,5	49,1	52,2	81,8	67,9
Paser	74,7	79,2	50,2	45,0	73,1	62,8
Kubar	80,1	75,4	52,8	42,2	65,8	61,6
Kukar	77,5	92,6	50,3	47,3	86,4	67,9
Kutim	73,5	84,9	54,5	50,2	86,4	68,2
Berau	66,9	85,3	45,5	51,1	72,7	62,7
Ppu	82,8	81,1	67,6	55,4	90,0	74,3
Mahakam Ulu	79,5	69,8	59,4	52,4	60,7	63,7
Balikpapan	78,0	89,9	54,7	76,5	78,5	74,5
Samarinda	76,2	96,7	46,7	69,0	76,0	71,0
Bontang	84,7	92,6	57,3	76,1	52,9	71,0

Sumber : Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN Tahun 2023

Pada dimensi Holistik Integratif, capaian Kalimantan Timur sebesar 52,2 (turun dari capaian tahun 2022 yaitu 53,8), tapi dalam hal ini berada diatas capaian Nasional yaitu sebesar 51,4.

Dan pada dimensi Kesetaraan, Kalimantan Timur kembali menempati urutan 3 besar, yaitu sebesar 81,8 naik dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar 70,7, dan capaian tersebut berada diatas capaian Nasional yaitu sebesar 62,9. Hal ini menunjukan perkembangan yang sangat menggembirakan, dimana Jabatan Manajerial semakin setara antara Laki-laki dan Perempuan.

Pemindahan IKN merupakan salah satu langkah pemerataan penduduk di Indonesia. Mengingat selama ini pembangunan hanya terfokus di Jawa atau sering dikenal istilah *java centris*. Setelah ditetapkan sebagai lokasi IKN, migrasi penduduk dari luar Kalimantan Timur dipastikan akan semakin besar.

Penduduk Kaltim pada 2024 diproyeksikan berjumlah 4,05 juta jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan bahwa jumlah ini merupakan yang

terbesar ketiga di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kaltim sebanyak 3,77 juta jiwa, namun, dengan pindahnya IKN, terproyeksikan bahwa jumlah penduduk akan meningkat drastis menjadi 5,74 juta pada tahun 2035. Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menjadi pusat perhatian dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang paling cepat, khususnya Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda.

Total Fertility Rate (TFR) meningkat secara signifikan di Kalimantan Timur, dari 5,41 pada tahun 70-an menjadi 2,18 pada tahun 2023. Hal ini membuat penduduk Kalimantan Timur didominasi oleh usia produktif, yang menjadi modal besar dalam meraih bonus demografi yang panjang.

Dalam tahap awal pembangunan IKN, terjadi lonjakan migrasi usia produktif yang berfokus pada sektor konstruksi. Bonus demografi yang sudah tercapai membawa tantangan baru, dan untuk itu perlu adanya strategi berkelanjutan. Strategi untuk mempertahankan pengendalian penduduk pada tingkat rendah guna memperpanjang masa bonus demografi yaitu dengan meningkatkan kualitas keterampilan, pendidikan, dan kesehatan penduduk kelompok usia produktif, yang menjadi upaya penting dalam menyongsong bonus demografi.

Tabel II.6
 Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

Kelompok Usia Sekolah	Tidak / Belum Pernah Bersekolah				
	2019	2020	2021	2022	2023
7-12	0,16	0,12	0,36	0,42	0,35
13-15	0,19	0,05	0,58	0,05	0,09
16-18	0,09	0,17	0,06	0,35	0,15
19-24	0,35	0,12	0,02	0,38	0,28
7-24	0,21	0,12	0,23	0,33	0,25
Kelompok Usia Sekolah	Masih Bersekolah				
	2019	2020	2021	2022	2023
7-12	99,68	99,73	99,60	99,57	99,64
13-15	98,83	99,07	98,90	98,74	98,71
16-18	81,81	81,88	82,01	81,43	81,50
19-24	29,89	29,71	29,86	29,33	32,33
7-24	74,34	73,63	73,88	74,02	75,05
Kelompok Usia Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi				
	2019	2020	2021	2022	2023
7-12	0,16	0,14	0,04	0,01	0,01
13-15	0,98	0,88	0,52	1,21	1,20
16-18	18,10	17,95	17,93	18,22	18,35
19-24	69,76	70,17	70,12	70,29	67,39
7-24	25,45	26,25	25,88	25,65	24,70

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional(Susenas) BPS Kalimantan Timur, 2024

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, maka mayoritas penduduk Kalimantan Timur memeluk agama Islam sebesar 87,40 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Timur.

Tabel II.7
Jumlah Penduduk Menurut Agama
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kab/Kota	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kong Huchu	Lainnya
1	Paser	303.424	10.082	9.759	518	539	0	5
2	KUBAR	86.173	56.411	37.253	147	36	0	99
3	KUKAR	727.081	42.822	15.273	2.625	239	5	68
4	KUTIM	350.567	42.026	34.378	2.504	137	8	20
5	Berau	237.159	25.653	17.272	234	648	24	8
6	PPU	186.278	7.323	2.795	124	45	0	1
7	MAHULU	9.247	5.696	23.500	51	2	0	2
8	Balikpapan	666.015	51.303	13.925	1.388	5.856	34	11
9	Samarinda	786.964	43.701	22.173	832	7.862	289	57
10	Bontang	170.641	15.571	3.344	279	133	0	0
Kalimantan Timur		3.502.646	300.588	179.672	8.702	15.497	360	271

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam mensukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan tren yang meningkat dari komposisi sektor non migas dan batubara sedangkan dari sektor dengan migas dan non migas mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Nilai PDRB dengan migas Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 607,59 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 505,55 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 314,89 triliun.

Penurunan Nilai PDRB pada tahun 2020 dikarenakan terjadi anomali dimana karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam hal ekspor. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai PDRB kembali meningkat seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur dengan berkurangnya dampak Pandemi COVID-19, nilai PDRB migas mencapai Rp 921,33 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp 792,53 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 381,97 triliun. Sampai dengan Tahun 2023 Nilai PDRB migas telah mencapai Rp 843,57 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp 798,76 triliun dan PDRB non migas dan non batubara mencapai Rp 428,24 triliun.

Tabel II.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2019	652.480.257	539.487.790	311.078.493
2020	607.744.486	505.786.456	315.126.677
2021	696.632.668	584.205.939	338.613.743
2022	921.450.986	792.531.260	381.969.993
2023	843.571.252	798.759.670	428.244.507

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2023 mengalami perbaikan ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mengalami penurunan akibat turunnya nilai PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang memperoleh Rp 364,37 triliun atau turun sekitar 126,13 triliun dari tahun sebelumnya.

Tabel II.9
 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur
 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51.567,38 (7,91)	53.455,32 (8,80)	59.089,94 (8,48)	64.891,74 (7,04)	67.688,26 (8,02)
B	Pertambangan dan Penggalian	297.371,39 (45,60)	250.845,97 (41,27)	314.198,05 (45,11)	490.501,12 (53,24)	364.365,49 (43,19)
C	Industri Pengolahan	116.204,90 (17,82)	115.564,45 (19,02)	123.816,18 (17,77)	138.636,14 (15,05)	149.526,42 (17,73)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	344,96 (0,05)	385,06 (0,06)	395,47 (0,06)	422,61 (0,05)	503,42 (0,06)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	307,67 (0,05)	326,53 (0,05)	348,38 (0,05)	379,90 (0,04)	414,92 (0,05)
F	Konstruksi	58.472,32 (8,97)	58.308,25 (9,59)	62.313,15 (8,95)	70.945,22 (7,70)	86.997,44 (10,31)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	38.245,24 (5,86)	39.053,04 (6,43)	41.474,91 (5,95)	47.547,02 (5,16)	53.183,30 (6,30)
H	Transportasi dan Pergudangan	24.172,25 (3,71)	22.067,33 (3,63)	23.218,93 (3,33)	28.980,67 (3,15)	34.239,87 (4,06)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.691,56 (1,03)	6.479,40 (1,07)	6.707,64 (0,96)	7.520,92 (0,82)	8.372,54 (0,99)
J	Informasi dan Komunikasi	8.708,38 (1,34)	9.390,81 (1,55)	10.206,75 (1,47)	11.087,18 (1,20)	11.896,25 (1,41)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.216,63 (1,57)	10.490,25 (1,73)	11.244,16 (1,61)	13.379,87 (1,45)	15.329,16 (1,82)
L	Real Estate	5.768,85 (0,88)	5.868,85 (0,97)	5.891,47 (0,85)	6.152,95 (0,67)	6.526,67 (0,77)
M,N	Jasa Perusahaan	1.346,71 (0,21)	1.334,74 (0,22)	1.384,56 (0,20)	1.516,51 (0,16)	1.703,22 (0,20)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.019,83 (2,00)	12.750,61 (2,10)	13.198,18 (1,89)	14.448,96 (1,57)	15.716,80 (1,86)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
P	Jasa Pendidikan	10.995,56 (1,69)	11.724,05 (1,93)	12.340,33 (1,77)	13.132,70 (1,43)	14.103,76 (1,67)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.289,67 (0,66)	5.331,02 (0,88)	6.205,10 (0,89)	6.692,40 (0,73)	7.294,79 (0,86)
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.434,75 (0,68)	4.368,80 (0,72)	4.551,86 (0,65)	5.097,08 (0,55)	5.708,94 (0,68)
PDRB		652.158,06 (100,00)	607.744,49 (100,00)	696.584,50 (100,00)	921.332,98 (100,00)	843.571,25 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

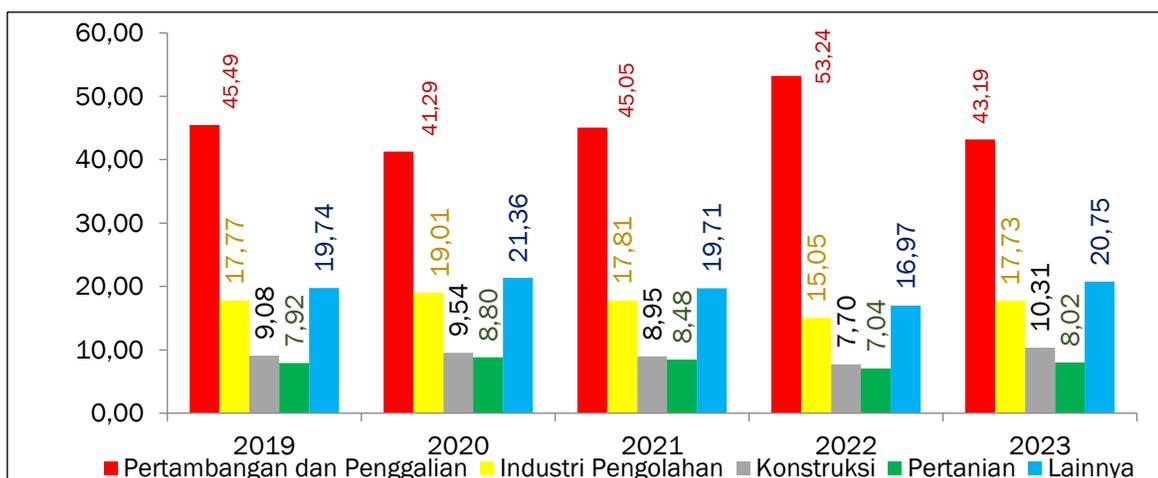
Tabel II.10
 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur
 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.396,19 (6,86)	33.026,69 (6,99)	33.001,68 (6,81)	33.649,34 (6,75)	34.552,82 (6,43)
B	Pertambangan dan Penggalian	233.762,25 (48,03)	222.909,20 (47,17)	227.991,37 (47,07)	235.949,04 (46,72)	248.204,04 (46,17)
C	Industri Pengolahan	96.824,49 (19,89)	93.909,77 (19,90)	96.208,52 (19,86)	99.651,98 (19,70)	104.339,85 (19,41)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	284,53 (0,06)	317,37 (0,07)	324,79 (0,07)	337,25 (0,06)	391,37 (0,07)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	235,44 (0,05)	247,99 (0,05)	258,50 (0,05)	278,10 (0,06)	299,36 (0,06)
F	Konstruksi	35.682,99 (7,33)	35.601,17 (7,49)	37.005,24 (7,63)	39.887,74 (7,68)	46.190,19 (8,59)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27.025,57 (5,55)	27.069,91 (5,76)	28.216,90 (5,83)	30.137,13 (5,94)	32.195,96 (5,99)
H	Transportasi dan Pergudangan	14.264,27 (2,93)	13.281,10 (2,83)	13.667,05 (2,83)	15.301,39 (3,00)	16.738,53 (3,11)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.340,12 (0,89)	4.108,42 (0,87)	4.193,40 (0,86)	4.577,47 (0,90)	4.924,09 (0,92)
J	Informasi dan Komunikasi	7.795,54 (1,60)	8.338,49 (1,76)	8.994,26 (1,86)	9.712,24 (1,92)	10.348,22 (1,92)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.966,07 (1,43)	7.137,89 (1,51)	7.320,02 (1,51)	8.012,39 (1,58)	8.951,76 (1,66)
L	Real Estate	4.316,69 (0,89)	4.321,11 (0,91)	4.290,18 (0,89)	4.397,87 (0,88)	4.590,82 (0,85)
M,N	Jasa Perusahaan	914,13 (0,19)	889,60 (0,19)	911,51 (0,19)	960,34 (0,19)	1.024,14 (0,19)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.252,79 (1,70)	7.951,12 (1,68)	8.108,29 (1,67)	8.727,05 (1,71)	9.427,89 (1,75)
P	Jasa Pendidikan	7.036,31 (1,45)	7.244,72 (1,53)	7.420,37 (1,53)	7.679,67 (1,53)	8.051,04 (1,50)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.864,49 (0,59)	3.404,05 (0,72)	3.861,22 (0,80)	4.048,70 (0,80)	4.321,49 (0,80)
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.750,36 (0,57)	2.634,73 (0,56)	2.665,59 (0,55)	2.851,23 (0,56)	3.078,44 (0,57)
PDRB		486.712,24 (100,00)	472.393,33 (100,00)	484.438,88 (100,00)	506.158,91 (100,00)	537.630,01 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 38 persen dari total PDRB Kaltim. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Dengan pulihnya perekonomian pasca Covid-19, kontribusi Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai 53,24 persen di tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga menjadi 42,83 persen. Hal yang menarik diperlihatkan dengan meningkatnya kontribusi sektor-sektor lainnya, termasuk juga Kategori Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Pertanian seiring dengan penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian tersebut.



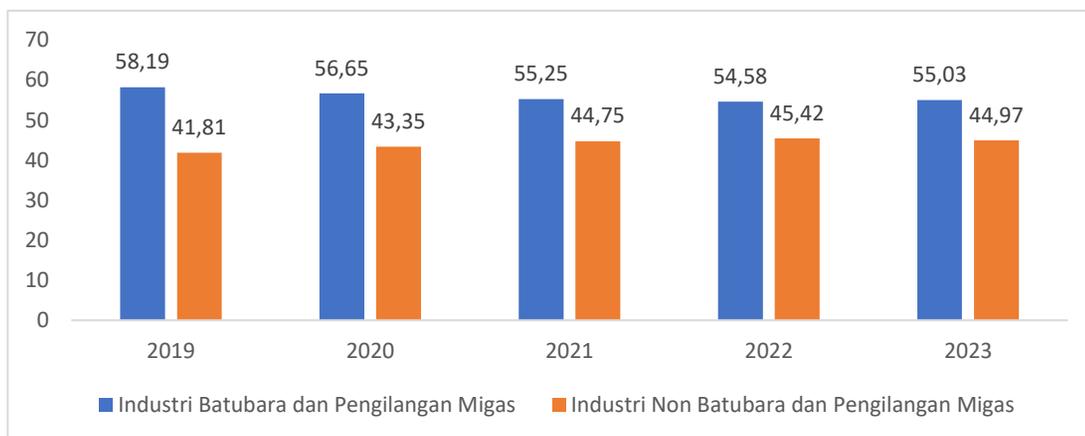
Gambar II.16
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal

melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang dapat didorong di antaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2019-2023 sebesar 8,05 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan *supporting* data yang lengkap, akurat dan valid.

Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan sub sektornya, Sub sektor industri batubara dan pengilangan migas memiliki peranan terbesar dalam sektor industri pengolahan. Selama periode 2019 – 2020 kontribusi industri pengolahan terus meningkat hingga mencapai 19,02 persen, namun pada periode 2020 – 2023 terjadi penurunan setiap tahunnya yakni menjadi 17,73 persen pada tahun 2023.



Gambar II.17
Kontribusi Industri Migas dan Industri Non Migas
Tahun 2019-2023 (persen)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Struktur yang menyusun lapangan usaha industri pengolahan migas berasal dari Industri Batubara dan Pengilangan Migas, sedangkan industri pengolahan non migas berasal dari Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Makanan dan Minuman serta Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya. Selama periode 2019 – 2023 kontribusi industri pengolahan migas maupun non migas mengalami fluktuasi, dimana Kinerja Industri Batubara dan Pengilangan Migas selama kurun waktu 5 tahun terakhir perlahan mengalami penurunan dan Kinerja industri non batubara dan pengilangan migas mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2009 mulai terlihat hasilnya.

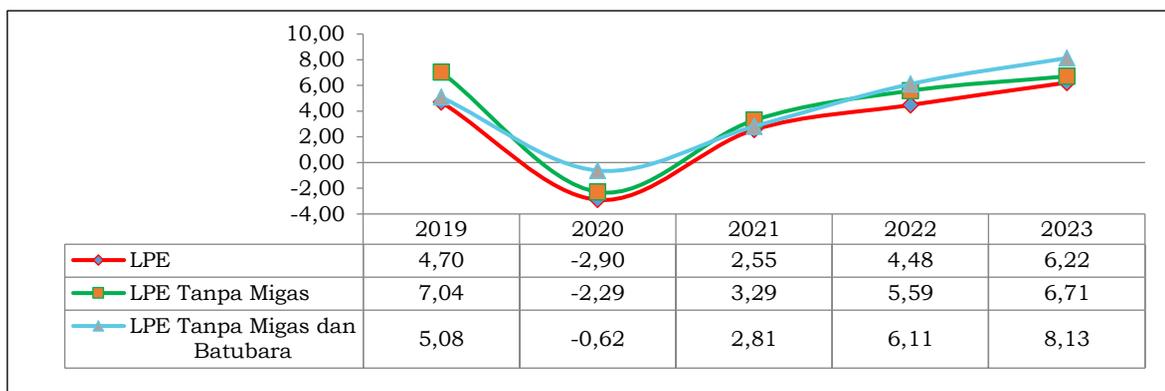
Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2023 kontribusinya hanya sebesar 5,78 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 4,70 persen pada tahun 2019, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 7,04 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,08 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,62 persen.

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 6,22 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 4,48 persen. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mencapai 6,71 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non

migas dan non batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,13 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.



Gambar II.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan banyak proyek pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendatang didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi, seiring aktivitas masyarakat yang makin menggeliat. Tenaga kerja Kaltim akan terserap, kebutuhan ribuan pekerja di IKN pasti akan berhubungan dengan petani dan pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk akomodasi baik hotel maupun penginapan juga akan laku karena banyak tamu untuk berbisnis maupun dinas, bahkan pelaku UMKM juga terkena dampak dalam penjualan produk.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dimana terlihat pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19 dan di tahun 2023 seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan seluruh sektor lapangan usaha.

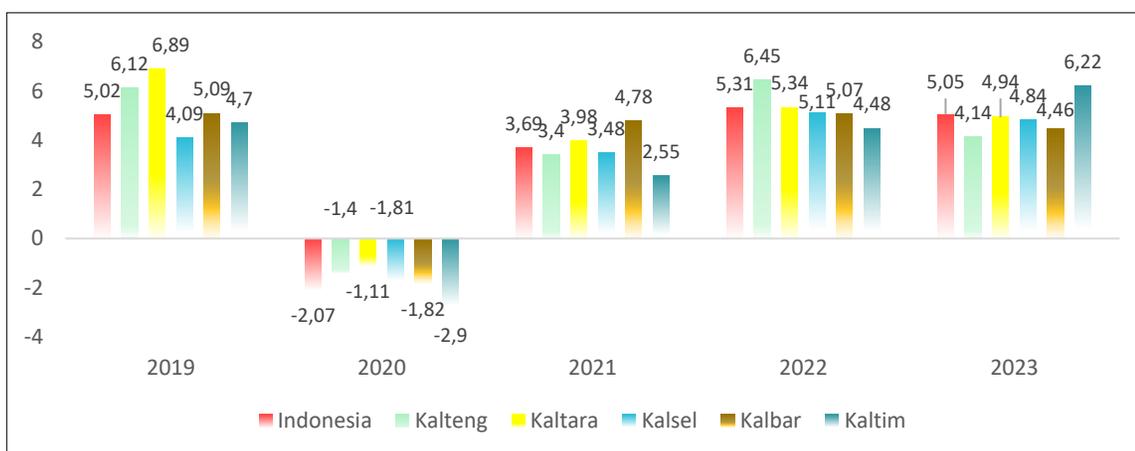
Tabel II.11

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,78	-0,98	-0,07	2,15	2,49
B	Pertambangan dan Penggalian	6,86	-4,61	2,28	3,50	5,18
C	Industri Pengolahan	0,01	-2,99	2,45	3,57	4,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,74	11,47	2,34	3,84	16,05
E	Pengadaan Air	4,84	5,33	4,24	7,58	7,64
F	Konstruksi	6,39	-0,87	3,94	7,77	15,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,82	0,57	4,24	6,79	6,85
H	Transportasi dan Pergudangan	2,00	-6,58	2,91	11,76	9,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,37	-5,34	2,07	9,04	7,69
J	Informasi dan Komunikasi	6,27	7,56	7,86	7,65	6,88
K	Jasa Keuangan	3,17	2,47	2,55	9,46	11,72
L	<i>Real Estate</i>	1,52	0,69	-0,72	2,51	4,39
M,N	Jasa Perusahaan	2,48	-3,14	2,46	5,36	6,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,11	-3,83	1,98	7,63	8,03
P	Jasa Pendidikan	3,78	2,96	2,42	3,49	4,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,20	20,22	13,43	4,70	6,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,57	-3,01	1,17	6,96	7,97
Laju Pertumbuhan Ekonomi		4,70	-2,90	2,55	4,48	6,22

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Secara regional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,22 persen, lalu diikuti Kalimantan Utara sebesar 4,94 persen, Kalimantan Selatan sebesar 4,84 persen, Kalimantan Barat sebesar 4,46 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 4,14 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 5,05 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga telah melampaui nilai tersebut.



Gambar II.19

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Tabel II.12

Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	109.767,66	110.821,28	115.605,20	125.884,68	137.324,91
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.239,36	3.248,32	3.419,27	3.689,59	4.063,77
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	26.360,55	27.129,17	28.670,66	32.010,22	45.261,36
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	188.079,94	188.258,10	209.951,00	233.091,11	274.469,61
5	Perubahan Inventori	768,36	1.228,65	383,61	401,29	562,28
6	Net Ekspor Barang & Jasa	324.264,39	277.058,96	338.602,93	526.374,10	381.889,32
	PDRB	652.480,26	607.744,49	696.632,67	921.450,99	843.571,25

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2019-2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan

Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun. Pada tahun 2022 Ekonomi Kalimantan Timur mulai mengalami perbaikan ekonomi yang mencapai Rp 921,33 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2023, nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran telah mencapai Rp 843,57 triliun, dengan net ekspor barang dan jasa yang menjadi komponen pengeluaran terbesar.

Tabel II.13
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16,82	18,23	16,52	13,66	16,28
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,50	0,53	0,49	0,40	0,48
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,04	4,46	4,06	3,48	5,36
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,83	30,98	30,14	25,30	32,54
5	Perubahan Inventori	0,12	0,20	0,06	0,04	0,07
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	49,70	45,59	48,73	57,12	45,27

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019-2023 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel II.14
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,15	(0,43)	1,23	3,41	4,99
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,77	(0,99)	0,66	3,03	5,63
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,11	(1,95)	3,03	8,48	36,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,81	(1,06)	7,74	5,47	11,48

No	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	5,05	(4,61)	0,64	4,05	3,59
PDRB		4,70	-2,90	2,55	4,48	6,22

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2023 mencapai 6,22 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Net Ekspor Barang & Jasa sebesar 3,59 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 36,40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur dari sisi pertumbuhannya meningkat dikarenakan kegiatan Pemerintah.

Tabel II.15
Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Miliar Rp)

No	KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	35.734,75	34.712,07	36.582,32	36.985,15	37.493,83
2	KUBAR	21.253,83	20.644,38	21.509,05	22.536,42	23.848,65
3	KUKAR	126.272,37	120.953,68	124.197,10	128.798,43	135.406,05
4	KUTIM	95.815,41	92.868,68	92.039,29	97.173,42	104.663,19
5	Berau	28.275,57	27.337,09	28.802,65	29.940,84	31.570,05
6	PPU	6.762,58	6.604,62	6.492,68	7.433,57	9.652,65
7	MAHULU	1.767,80	1.763,93	1.786,29	1.802,46	1.852,96
8	Balikpapan	83.793,41	83.034,71	86.831,69	91.142,16	97.060,15
9	Samarinda	45.491,36	45.041,33	46.294,41	49.349,59	53.604,33
10	Bontang	40.427,70	39.320,23	39.949,08	40.930,98	42.633,63

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2023 mencapai Rp 135,41 triliun disusul perekonomian Kutai Timur dan Kota Balikpapan yang masing-masing dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar Rp 104,66 triliun dan Rp 97,06 triliun. Ketiga daerah ini memang layak memiliki kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah

Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawit dan minyak kelapa sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sehingga terdapat peningkatan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

Tabel II.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (%)

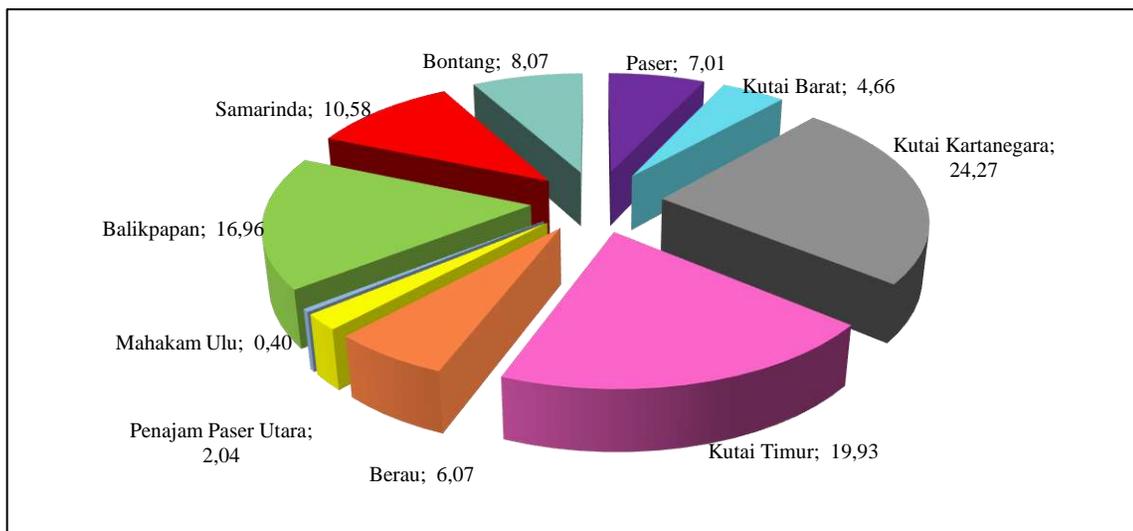
No	KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	3,99	-2,86	5,39	1,10	1,38
2	KUBAR	5,69	-2,87	4,19	4,78	5,82
3	KUKAR	3,92	-4,21	2,68	3,70	5,13
4	KUTIM	8,17	-3,08	-0,89	5,58	7,71
5	Berau	5,63	-3,32	5,36	3,95	5,44
6	PPU	2,61	-2,34	-1,69	14,49	29,85
7	MAHULU	5,52	-0,22	1,27	0,91	2,80
8	Balikpapan	4,99	-0,91	4,57	4,96	6,49
9	Samarinda	5,00	-0,99	2,78	6,60	8,62
10	Bontang	-2,15	-2,74	1,60	2,46	4,16

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Rata-rata kabupaten/kota mengalami pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan yang cepat adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan capaian 29,85 persen dan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan adanya pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga sektor konstruksi di Kab PPU mengalami peningkatan.

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 24,27 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 19,93 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 16,96 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak dan Kota Samarinda

memberikan peran sebesar 10,58 persen sebagai pusat perdagangan dan jasa. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 10 persen.



Gambar II.20
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Pada tahun 2023, terdapat 5 (lima) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 79,67 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel II.17
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	67,00	Pertanian	13,56	Industri	5,67
KUBAR	Pertambangan	49,28	Pertanian	13,98	Konstruksi	12,13
KUKAR	Pertambangan	62,55	Pertanian	13,12	Konstruksi	8,89
KUTIM	Pertambangan	79,67	Pertanian	7,60	Industri	3,22
Berau	Pertambangan	58,27	Pertanian	11,26	Perdagangan	6,48
PPU	Konstruksi	40,32	Pertambangan	17,02	Pertanian	15,25
MAHULU	Pertanian	73,56	Konstruksi	7,37	Pertambangan	6,27
Balikpapan	Industri	47,26	Konstruksi	15,67	Transportasi	11,60
Samarinda	Konstruksi	23,10	Perdagangan	16,85	Pertambangan	10,66
Bontang	Industri	78,37	Konstruksi	7,37	Perdagangan	3,39

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 67,00 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 62,55 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II.18
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2023

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	62,42	PMTB	19,71	K. Ruta	13,49
KUBAR	Net Ekspor	42,32	PMTB	34,57	K. Ruta	14,22
KUKAR	Net Ekspor	43,17	PMTB	41,52	K. Ruta	11,17
KUTIM	Net Ekspor	70,99	PMTB	20,13	K. Ruta	6,07
Berau	Net Ekspor	64,40	PMTB	19,26	K. Ruta	10,89
PPU	PMTB	72,25	K. Ruta	28,53	K. Pemerintah	12,57
MAHULU	PMTB	31,27	K. Ruta	24,94	Net Ekspor	24,86
Balikpapan	PMTB	37,47	Net Ekspor	35,40	K. Ruta	22,81
Samarinda	PMTB	46,91	K. Ruta	45,16	K. Pemerintah	17,77
Bontang	Net Ekspor	72,17	PMTB	14,53	K. Ruta	10,40

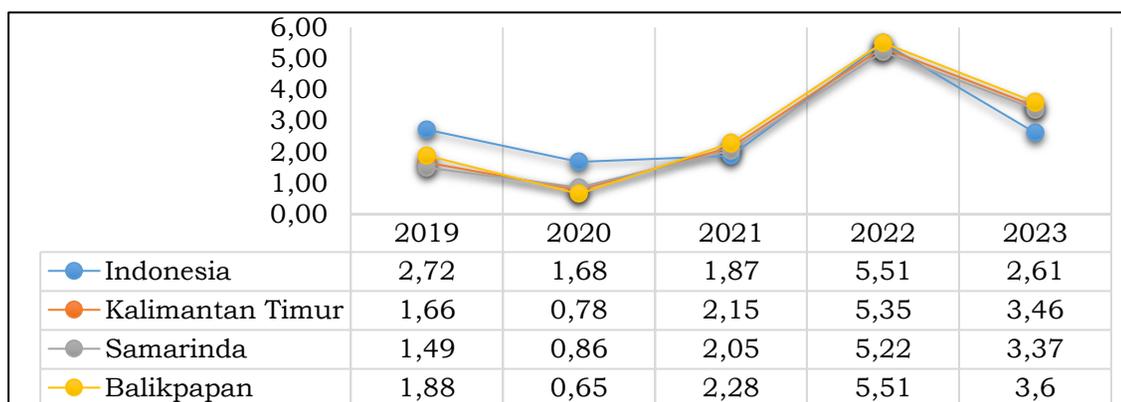
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Pada tahun 2023, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak enam kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh komponen PMTB (investasi) dengan *share* sebesar 72,25 persen.

Kabupaten/kota yang porsi terbesarnya merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 72,17 persen. Kabupaten/Kota lain yang perekonomiannya didominasi olehn komponen Net Ekspor adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 5,35 persen. Hal ini karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Namun begitu, terjadi penurunan laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menjadi 3,46 persen, utamanya didorong oleh adanya normalisasi harga komoditas beras pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta normalisasi permintaan angkutan udara pada kelompok transportasi.



Gambar II.21

Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (%)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih disumbang secara dominan oleh bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi umum yang berpotensi meningkatkan kemiskinan mengingat alokasi makanan dalam *budget* rumah tangga miskin cenderung lebih besar ketimbang alokasi makanan dalam *budget* rumah tangga non miskin karena harga

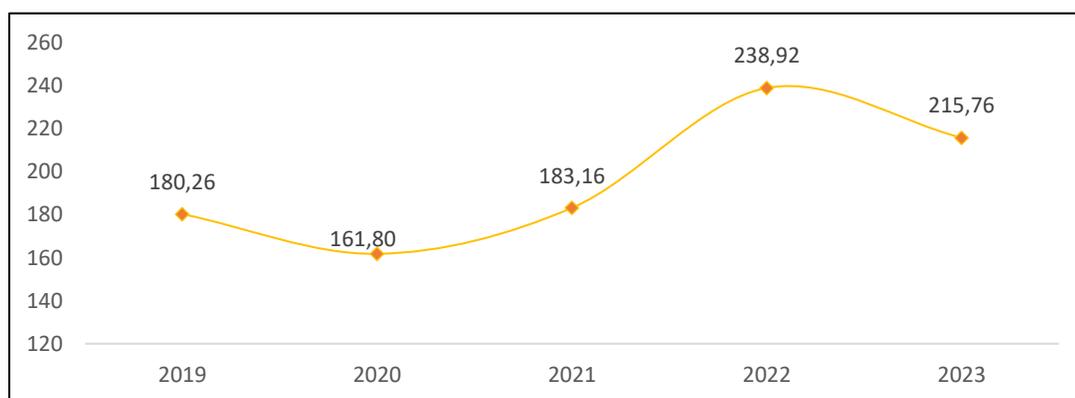
barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Meningkat. Peningkatan inflasi pada tahun 2022 terjadi seiring dengan membaiknya optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian seiring semakin terkendalinya kasus COVID-19 yang mendorong normalisasi permintaan masyarakat.

Kota Balikpapan pada tahun 2023 mengalami inflasi lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 3,60 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 3,37 persen. Secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di atas inflasi nasional sebesar 2,61 persen.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRB-nya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dari sebesar Rp 238,92 juta menjadi Rp 215,76 juta. Salah satu sebab turunnya nilai PDRB Per Kapita adalah turunnya nilai harga batu bara dunia.



Gambar II.22

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

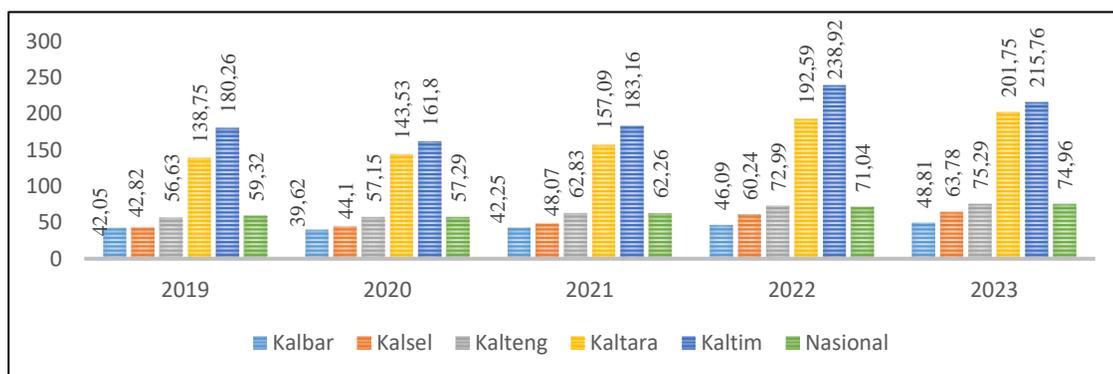
Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2023 yakni di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 369,42 juta, Kota Bontang sebesar Rp 366,46 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 270,72 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 87,26 juta dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 100,94 juta.

Tabel II.19
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	173,34	157,18	193,82	271,26	208,43
2	KUBAR	195,40	158,03	184,71	247,40	222,08
3	KUKAR	212,76	204,50	241,07	322,08	270,72
4	KUTIM	367,11	268,80	310,29	471,27	369,42
5	Berau	173,83	143,67	171,49	236,23	198,53
6	PPU	57,76	50,78	55,87	69,50	87,26
7	MAHULU	102,46	85,38	90,43	95,12	100,94
8	Balikpapan	165,69	151,31	160,30	181,29	201,64
9	Samarinda	79,95	80,36	85,22	98,88	104,97
10	Bontang	327,06	311,88	320,30	344,15	366,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2023 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 215,76 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Gambar II.23
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2024)

D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,11 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sebanyak 231,07 ribu jiwa dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 236,25 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 790.186 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Penurunan angka kemiskinan terjadi karena mulai pulihnya perekonomian sehingga memberikan pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha.

Tabel II.20
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230,26	6,10
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241,77	6,54
Maret 2022	513.874	214.334	728.208	236,25	6,31
Maret 2023	560.368	229.818	790.186	231,07	6,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kaltim juga tercermin dari peningkatan Garis Kemiskinan (GK) Kaltim dengan peningkatan GK di perdesaan yang lebih besar dibandingkan di perkotaan. GK meningkat dari Rp728.208/kapita/bulan pada bulan Maret 2022 menjadi Rp790.186/kapita/bulan pada Maret 2023. Peningkatan garis kemiskinan Kaltim bersumber dari peningkatan garis kemiskinan baik dari perkotaan maupun perdesaan. Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan perdesaan utamanya disebabkan oleh komoditas beras dan rokok kretek filter. Komoditas beras merupakan penyumbang terhadap GKM di perkotaan dan perdesaan dengan masing-masing tercatat sebesar 15,65% dan 17,01%. Selanjutnya, rokok kretek filter merupakan komoditas yang menyumbang GKM terbesar kedua yang tercatat sebesar 11,54% di perkotaan dan 14,89% di perdesaan. Komoditas lainnya yang memberi sumbangan GKM adalah daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, ikan tongkol, kue basah, kopi bubuk & kopi instan, bawang merah, ikan kembung, dan susu bubuk.

Tabel II.21
Persentase Pengeluaran Komoditi Makanan dalam Pembentukan Garis
Kemiskinan Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	15,65	Beras	17,01
2	Rokok Kretek Filter	11,54	Rokok Kretek Filter	14,89
3	Daging ayam ras	5,04	Telur ayam ras	4,09
4	Telur ayam ras	4,15	Daging Ayam Ras	3,82
5	Mie Instan	2,91	Mie Instan	3,17
6	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,54	Gula Pasir	2,46
7	Kue Basah	2,37	Kopi Bubuk & Kopi Instan (sachet)	2,09
8	Bawang Merah	1,87	Bawang merah	2,03
9	Gula Pasir	1,86	Tongkol/Tuna/Cakalang	1,98
10	Susu Bubuk	1,85	Bandeng	1,84
11	Tempe	1,84	Tempe	1,55
12	Tahu	1,57	Cabe Rawit	1,55
13	Roti	1,56	Kue Basah	1,37

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Bila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2023 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,38 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,31 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, perkembangan positif selalu ditunjukkan dari hasil pembangunan daerah hingga Pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

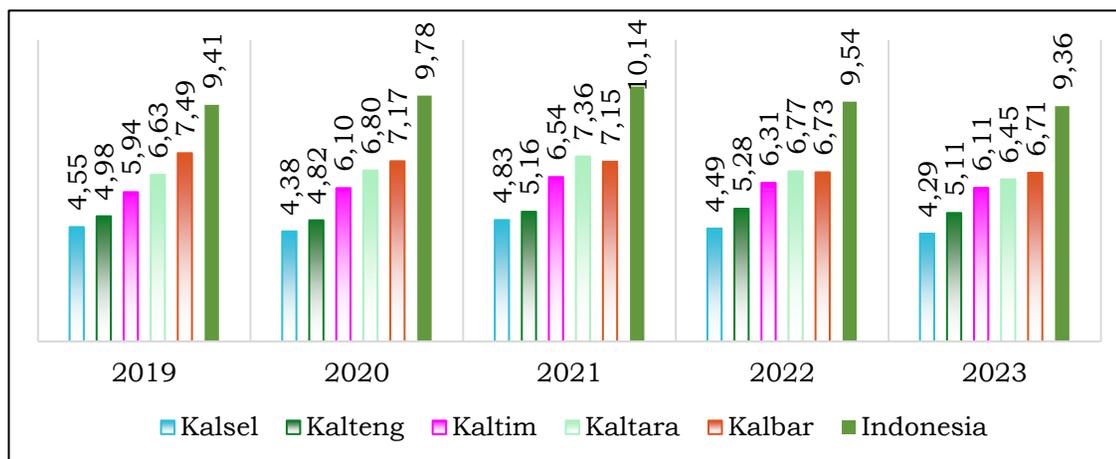
Tabel II.22
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (persen)

No	KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	8,95	9,23	9,73	9,43	9,11
2	KUBAR	9,09	9,29	10,24	10,20	9,72
3	KUKAR	7,20	7,31	7,99	7,96	7,61
4	KUTIM	9,48	9,55	9,81	9,28	9,06
5	Berau	5,04	5,19	5,88	5,65	5,54
6	PPU	7,18	7,36	7,61	7,25	6,97
7	MAHULU	11,25	11,44	11,90	11,55	11,38
8	Balikpapan	2,42	2,57	2,89	2,45	2,31
9	Samarinda	4,59	4,76	4,99	4,85	4,81
10	Bontang	4,22	4,38	4,62	4,54	4,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Di samping itu, pada tahun 2023 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di

provinsi Regional Kalimantan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,36 persen.



Gambar II.24
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional
Tahun 2019-2023

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 60.860 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 41.890 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 37.040 jiwa. Di sisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah *share* PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel II.23
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (jiwa)

No	KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	25.450	26.770	27.560	27.020	26.390
2	KUBAR	13.450	13.780	15.380	15.380	14.690
3	KUKAR	56.340	58.420	62.360	62.870	60.860
4	KUTIM	35.310	36.980	37.780	36.840	37.040
5	Berau	11.620	12.300	13.620	13.310	13.260
6	PPU	11.520	11.930	12.130	11.590	11.190
7	MAHULU	3.190	3.260	3.180	3.100	3.060
8	Balikpapan	15.780	17.020	18.530	15.830	14.990
9	Samarinda	39.800	41.920	42.840	41.950	41.890
10	Bontang	7.470	7.910	8.410	8.390	7.710

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel II.24
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2019	0,610	1,530	0,910
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Maret 2021	1,017	1,673	1,223
Maret 2022	0,672	1,687	0,989
Maret 2023	0,602	1,150	0,771
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)			
Maret 2019	0,130	0,380	0,210
Maret 2020	0,157	0,412	0,240
Maret 2021	0,303	0,413	0,337
Maret 2022	0,149	0,395	0,226
Maret 2023	0,113	0,199	0,140

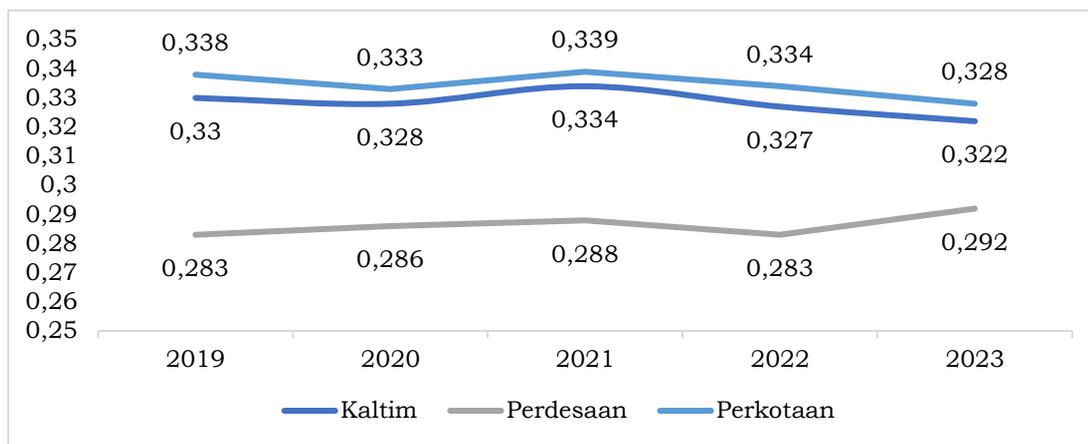
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan begitu juga Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 0,989. Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,337 menjadi 0,226 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2022, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,672 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,687. Nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,149 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,395. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan terus meningkat dari tahun 2019-2021 dalam 3 tahun ini (2019, dengan nilai 0,910 di tahun 2021 tercatat berada pada nilai 1,223. Sempat menyentuh nilai 1,015 (2020) dan 1,223

(2021) yaitu pada masa Pandemi COVID-19. Serupa dengan Tingkat Keparahan kemiskinan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kalimantan Timur. Sejak tahun 2019 dengan nilai 0,197 meningkat menjadi 0,337 di tahun 2021. Bahkan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan pernah berada di nilai 0,303 di tahun 2021, yaitu pada masa Pandemi COVID-2019. Kondisi yang tidak baik tersebut akan dipadukan dengan Program Pemerintah Pusat yaitu Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tahun 2023 dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah Perkotaan dan wilayah perdesaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Timur menurun 0,989 dan 0,226. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati batas garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin kecil.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang diukur dengan Indeks Gini, selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pengalaman performa baik pada tahun 2018 ke 2020 yaitu kondisi penurunan pernah ditunjukkan pada nilai 0,342 menjadi 0,328. Pada tahun 2021 Indeks Gini mengalami peningkatan menjadi 0,334, namun menunjukkan penurunan hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,322 yang menunjukkan tumbuhnya geliat usaha yang semakin adaptif pasca Pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi faktor utama membaiknya kinerja aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perputaran roda perekonomian sehingga terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kalimantan Timur. Akan tetapi, capaian indeks gini tahun 2023 masih sedikit berada di bawah target sebesar 0,320. Sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan ketimpangan pendapatan penduduk.



Gambar II.25

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang. Kabupaten Kutai Barat memiliki indeks gini paling rendah dengan capaian 0,277. Kabupaten Timur memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,336.

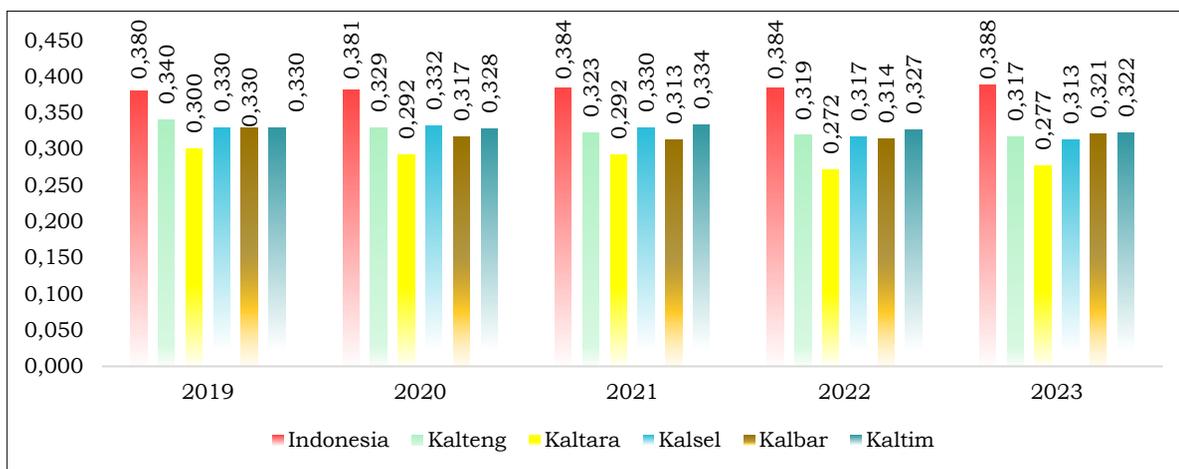
Tabel II.25

Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 (jiwa)

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	0,262	0,290	0,288	0,282	0,292
2	KUBAR	0,334	0,338	0,317	0,300	0,277
3	KUKAR	0,278	0,294	0,283	0,269	0,284
4	KUTIM	0,346	0,325	0,328	0,304	0,336
5	Berau	0,345	0,300	0,377	0,352	0,327
6	PPU	0,322	0,292	0,263	0,274	0,299
7	MAHULU	0,302	0,259	0,270	0,288	0,330
8	Balikpapan	0,302	0,311	0,325	0,334	0,323
9	Samarinda	0,341	0,324	0,322	0,346	0,323
10	Bontang	0,338	0,405	0,340	0,324	0,299

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2023 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,277. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,322 pada tahun 2023. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.

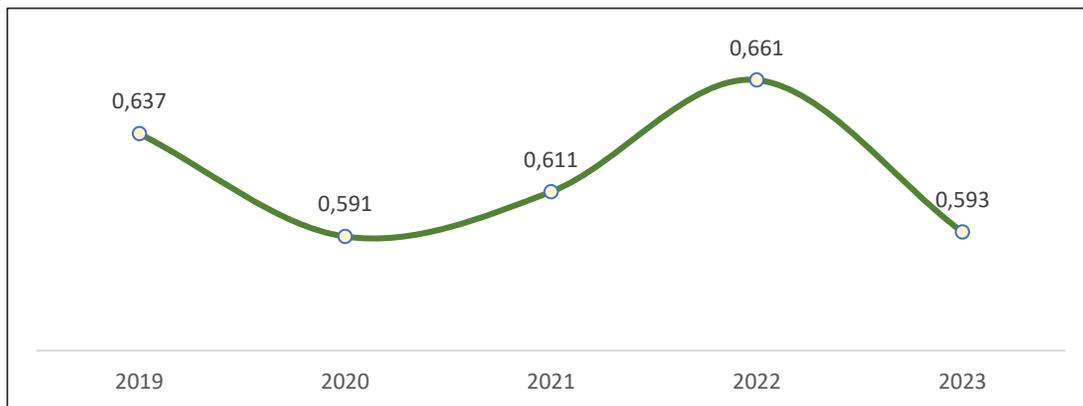


Gambar II.26

Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

E. Ketimpangan Antar Wilayah

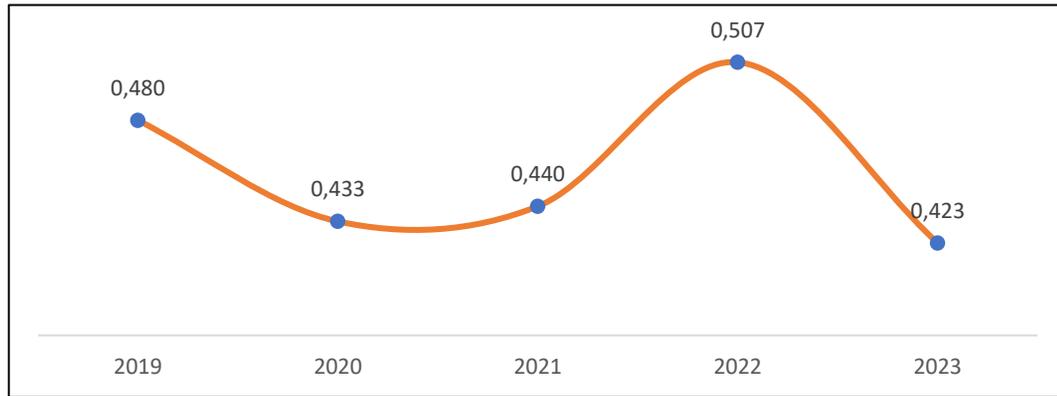
Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, namun di tahun 2023 angka Indeks Williamson mengalami penurunan yang mencapai 0,593.



Gambar II.27
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)
Regional Kalimantan Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.



Gambar II.28

Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

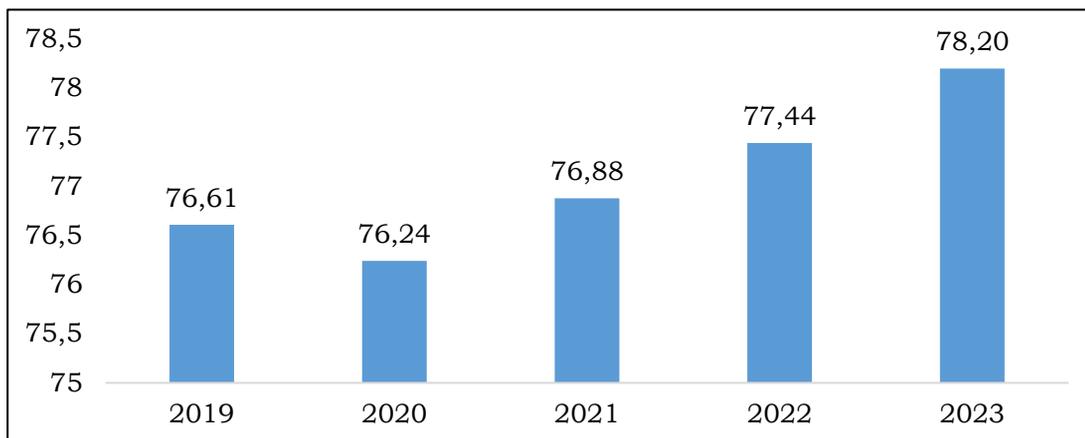
Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2019-2023, angka IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada rumusan IPM Kalimantan Timur. Pada tahun 2021-2023 IPM Kalimantan Timur kembali mengalami peningkatan masing-masing mencapai 76,88; 77,44; dan 78,20. Capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur

masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi keempat di Nasional setelah DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau.



Gambar II.29
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

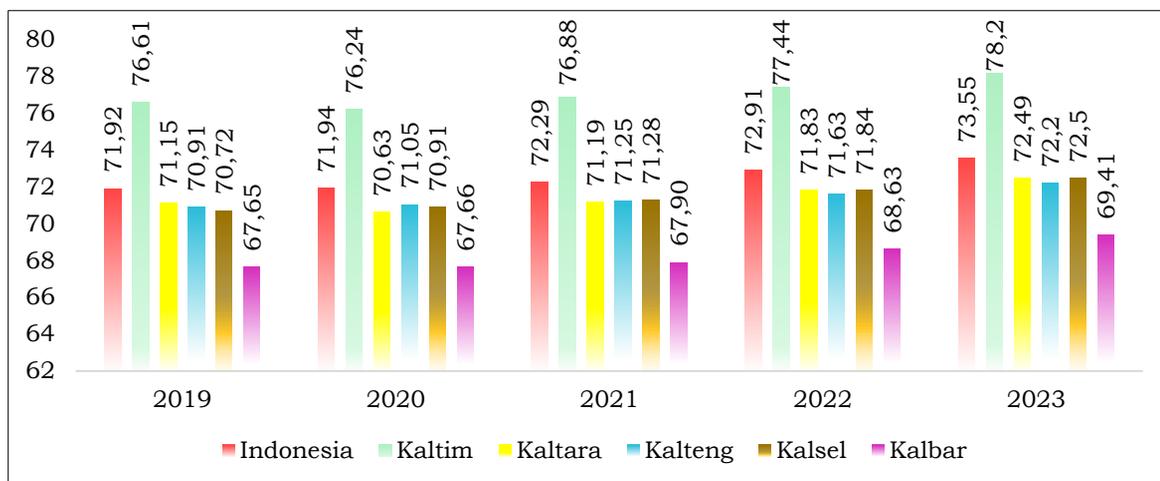
Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2023, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi naik. Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan terbesar adalah Kota Samarinda sebesar 0.89 persen dari 81,72 di tahun 2022 menjadi 82,61 di tahun 2023. Selain Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu juga mengalami peningkatan angka IPM yang signifikan yaitu masing-masing sebesar 0,81 persen dan 0,85 persen dari 73,16 dan 69,17 di tahun 2022 menjadi 73,97 dan 70,02 di tahun 2023.

Tabel II.26
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	72,29	72,43	73,34	73,85	74,56
2	KUBAR	71,63	71,42	72,31	73,16	73,97
3	KUKAR	73,78	74,19	74,69	75,31	75,95
4	KUTIM	73,49	73,32	74,15	74,69	75,33
5	Berau	74,88	75,19	75,69	76,24	76,71
6	PPU	71,64	72,40	73,01	73,56	74,33
7	MAHULU	67,58	67,50	68,36	69,17	70,02
8	Balikpapan	80,11	80,35	81,07	81,49	82,03
9	Samarinda	80,20	80,39	81,05	81,72	82,61
10	Bontang	80,09	80,06	80,65	81,00	81,63

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 69,41 – 78,20. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.



Gambar II.30

Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

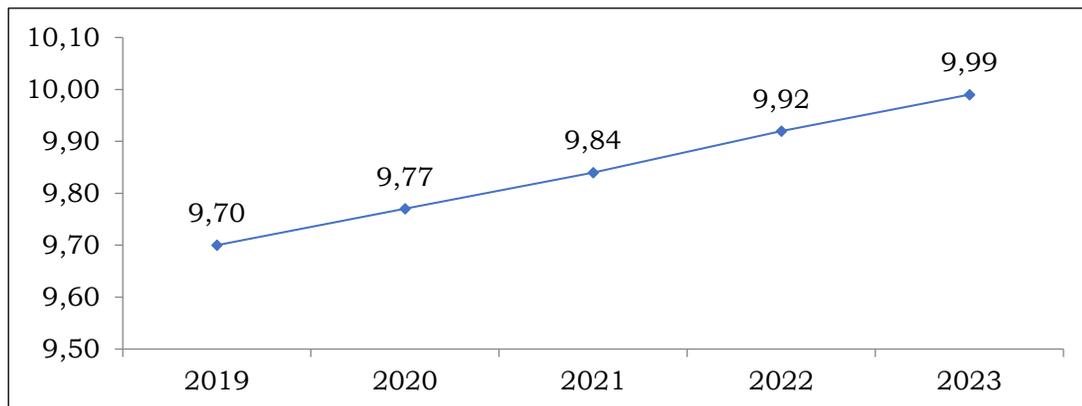
Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM diuraikan sebagai berikut:

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2023 mencapai 9,99 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian

Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 10,00 tahun.



Gambar II.31

Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (Tahun)

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi di atas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Balikpapan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,93 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,49 tahun pada tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII hingga IX (SMP Kelas II hingga III). Angka ini masih-belum mencapai target pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Tabel II.27

Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (tahun)

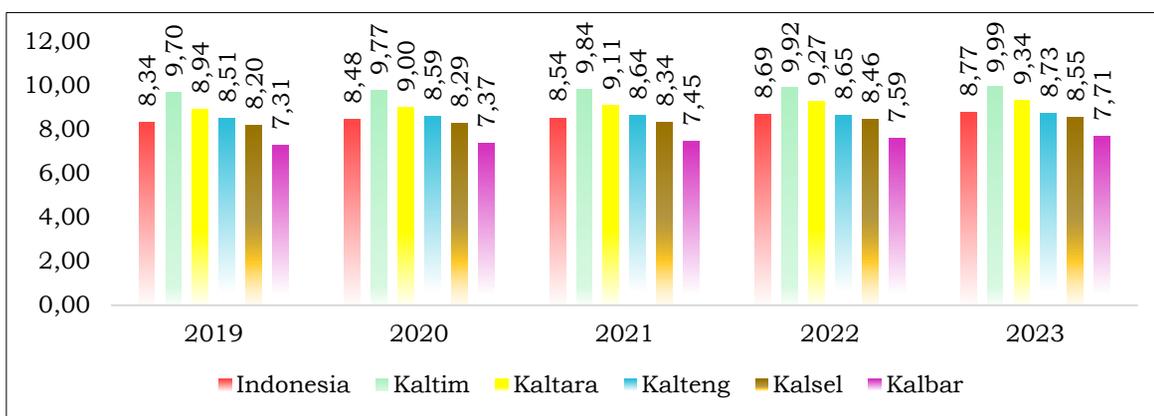
No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	8,54	8,55	8,79	8,80	8,91
2	KUBAR	8,34	8,47	8,70	8,78	8,85
3	KUKAR	9,10	9,22	9,23	9,24	9,26
4	KUTIM	9,18	9,19	9,43	9,44	9,45
5	Berau	9,25	9,52	9,53	9,54	9,56
6	PPU	8,16	8,28	8,36	8,51	8,53
7	MAHULU	7,89	7,97	8,18	8,36	8,49
8	Balikpapan	10,67	10,68	10,91	10,92	10,93
9	Samarinda	10,47	10,48	10,49	10,71	10,93
10	Bontang	10,73	10,79	10,80	10,81	10,92

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Seperti data yang tersaji pada tabel di atas, sampai dengan tahun 2023 masih terdapat empat Kabupaten yaitu Kabupaten Mahulu, PPU, Kubar dan Paser yang memiliki angka rata-rata lama sekolah cukup jauh di bawah angka rata-rata lama sekolah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya. Namun demikian, dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 terlihat adanya tren kenaikan angka rata-rata lama sekolah pada keempat Kabupaten tersebut walaupun tidak signifikan.

Jika dilihat berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah yang tertinggi di tahun 2023, Kota Balikpapan menduduki peringkat pertama rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana pendidikan yang sudah lengkap ataupun memadai di semua jenjang Pendidikan di Kota Balikpapan, sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah adalah Kab. Mahulu dengan capaian tahun 2023 sebesar 8,49 tahun, hal ini dimungkinkan antara lain karena infrastruktur pendidikan di Kab. Mahulu masih perlu mendapat perhatian khusus baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,99 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan pada tahun 2023, bahkan lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,77 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,34 tahun dan 8,73 tahun.



Gambar II.32

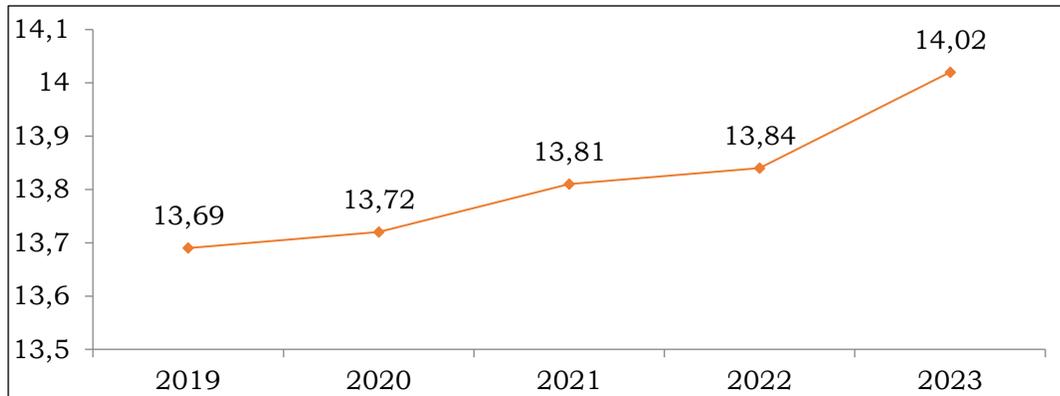
Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2023, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 14,02 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Hal ini

sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.



Gambar II.33
Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (Tahun)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,39 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,63 tahun pada tahun 2023 merupakan capaian harapan lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tabel II.28
Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (tahun)

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	13,00	13,10	13,25	13,27	13,37
2	KUBAR	12,89	12,90	13,02	13,09	13,25
3	KUKAR	13,58	13,59	13,60	13,63	13,64
4	KUTIM	12,78	12,89	12,90	13,00	13,01
5	Berau	13,31	13,32	13,33	13,35	13,36
6	PPU	12,55	12,56	12,57	12,70	12,86
7	MAHULU	12,50	12,51	12,61	12,62	12,63
8	Balikpapan	14,13	14,14	14,22	14,23	14,24
9	Samarinda	14,70	14,89	15,09	15,10	15,39
10	Bontang	12,90	13,03	13,17	13,18	13,43

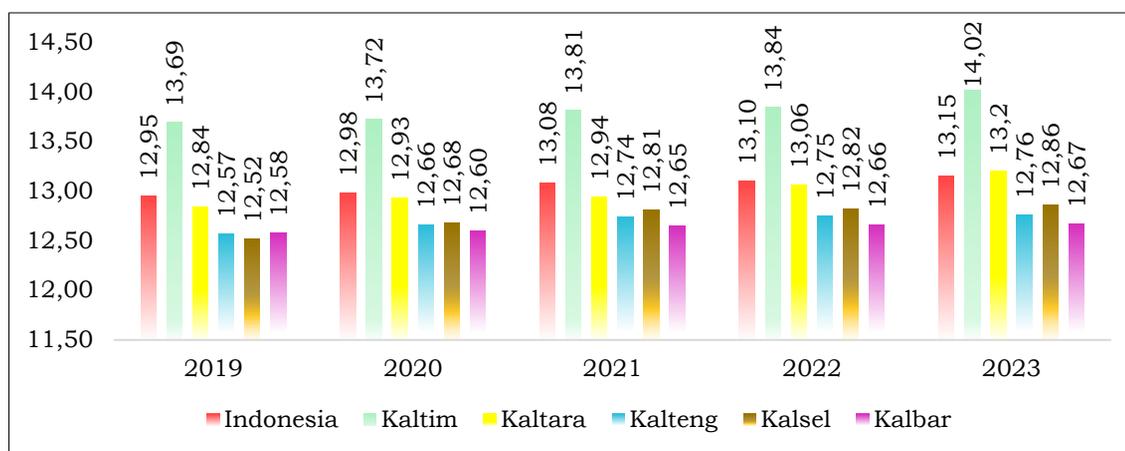
Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023

Secara umum Harapan Lama Sekolah pada kabupaten/kota mengalami tren kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2023 meskipun

kenaikan harapan lama sekolah di kabupaten/kota belum menunjukkan kenaikan secara signifikan. Sebagai upaya pemerintah terhadap peningkatan harapan lama sekolah di delapan kabupaten dengan angka harapan lama sekolah masih berada dibawah provinsi khususnya Kabupaten Mahulu dengan angka harapan lama sekolah yang paling rendah, maka diperlukan adanya langkah konkret sebagai upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama sekolah dapat segera diwujudkan.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen ini (2019-2023) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

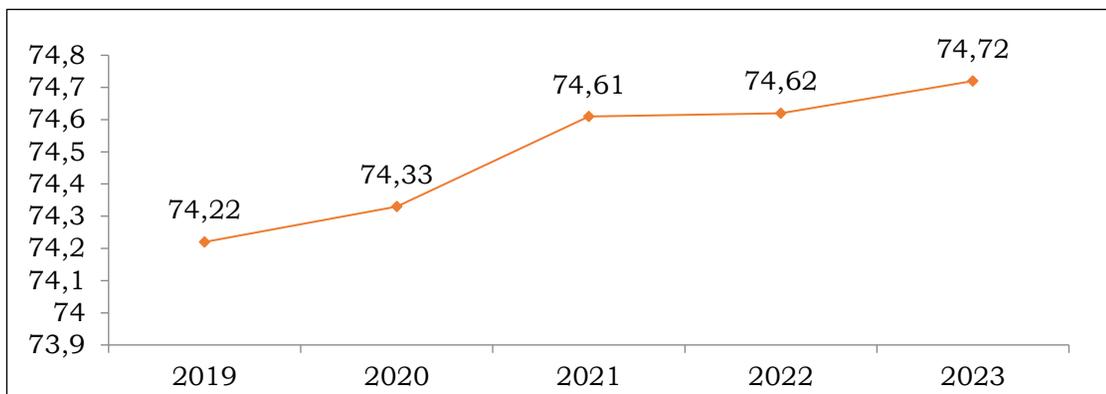
Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.



Gambar II.34
Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

3) Umur Harapan Hidup

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 73,96 tahun dan pada tahun 2023 menjadi 74,72 tahun. Selama periode tersebut secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen per tahun atau secara kumulatif terdapat peningkatan 1,34 poin. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun. Dari sisi preventif Keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal dan penyakit-penyakit terkait gizi. Sedangkan dari sisi kuratif tergambar upaya pemerintah dan swasta di kabupaten/dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.



Gambar II.35

Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

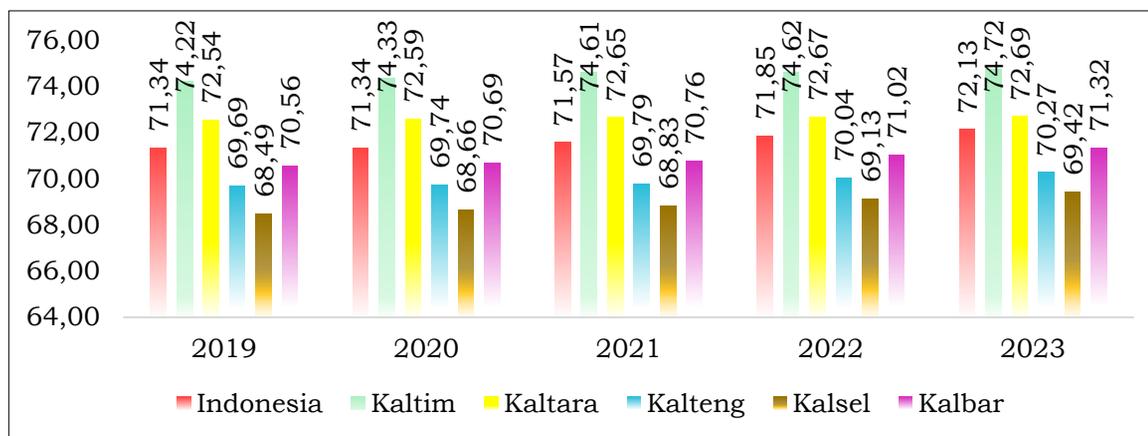
Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 75,64 tahun dan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai usia harapan hidup 73,44 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2023 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73 tahun.

Tabel II.29
Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (tahun)

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	72,52	73,48	73,77	73,78	73,89
2	KUBAR	72,79	73,37	73,63	73,63	73,73
3	KUKAR	72,21	73,64	73,99	74,00	74,12
4	KUTIM	73,03	73,86	74,21	74,22	74,33
5	Berau	71,94	73,06	73,35	73,35	73,45
6	PPU	71,30	73,57	73,87	73,90	74,03
7	MAHULU	71,90	73,06	73,30	73,32	73,44
8	Balikpapan	74,41	75,20	75,50	75,52	75,64
9	Samarinda	74,17	74,83	75,12	75,15	75,27
10	Bontang	74,18	74,37	74,67	74,69	74,81

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

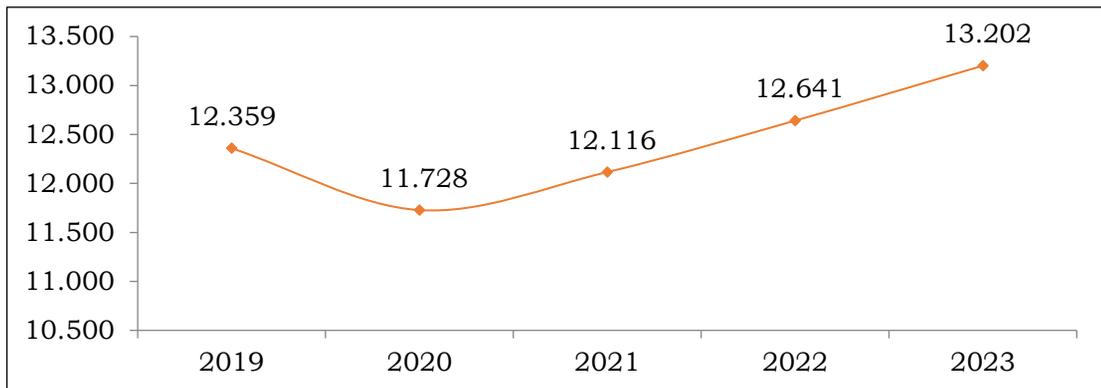
Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional yang sebesar 72,13 tahun.



Gambar II.36
Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia
Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 4,34 persen per tahun. Pada tahun 2023, Pengeluaran per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 13,20 juta per tahun, atau naik Rp 561 ribu dibandingkan tahun 2022.



Gambar II.37

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Ribuan Rp)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021–2023 merupakan dampak dari adanya pemulihan pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya beli masyarakat meningkat karena pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat.

Sedangkan jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara kabupaten/kota lainnya mencapai 17.659 ribu rupiah dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 8.696 ribu rupiah merupakan pengeluaran per kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan pemulihan pandemi COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang telah vaksin di tahun 2022.

Tabel II.30

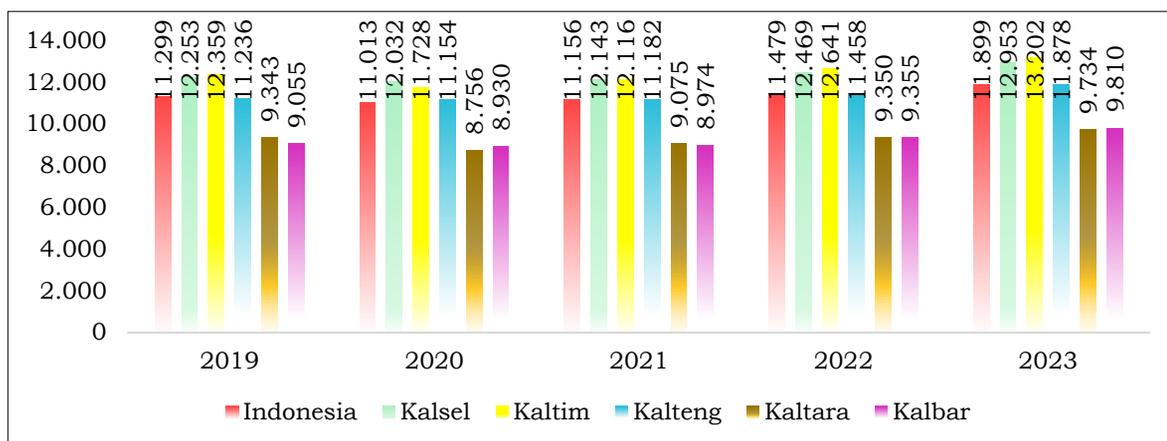
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	10.767	10.344	10.673	11.181	11.651
2	KUBAR	10.338	9.712	10.062	10.740	11.291
3	KUKAR	11.152	10.720	11.048	11.677	12.323
4	KUTIM	11.196	10.485	10.868	11.322	11.961
5	Berau	12.726	12.018	12.435	13.095	13.620
6	PPU	11.750	11.231	11.651	11.890	12.517
7	MAHULU	8.008	7.524	7.802	8.215	8.696
8	Balikpapan	14.791	14.549	14.862	15.455	16.195

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
9	Samarinda	14.613	14.135	14.582	15.162	15.610
10	Bontang	16.843	16.278	16.765	17.327	17.659
Kalimantan Timur		11.917	12.359	11.728	12.116	12.641

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

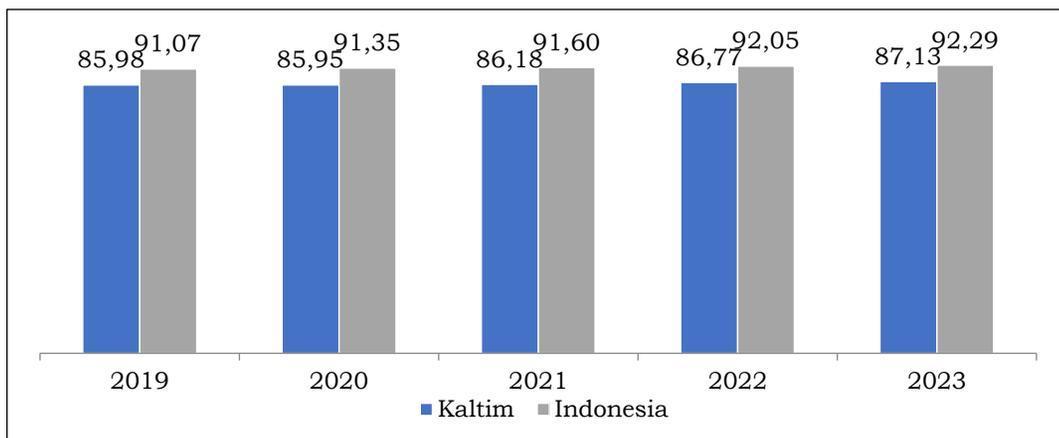
Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2023, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi dan diikuti oleh Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.



Gambar II.38
 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
 Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribuan Rupiah)
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

B. Indeks Pembangunan Gender

Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Gambar II.39
 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2019-2023 (tahun)
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2023 sebesar 87,13. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki yaitu untuk Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki tahun 2023 sebesar 10,26 tahun sedangkan perempuan 9,79 tahun, Adapun dari sisi pengeluaran per kapita untuk Laki-laki sebesar 19,88 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,76 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

Tabel II.31
 Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi
 Kalimantan Timur, Tahun 2023

No	Komponen	Laki-Laki	Perempuan
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,96	76,62
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,87	14,19
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,26	9,79
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	19,88	7,76

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 90,80 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender

terendah yaitu 73,15 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Tabel II.32
Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (tahun)

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	71,41	71,35	71,49	72,27	73,15
2	KUBAR	83,84	84,09	84,67	85,02	85,73
3	KUKAR	79,14	79,20	79,61	80,30	81,08
4	KUTIM	76,51	76,63	76,95	77,67	78,46
5	Berau	87,93	87,71	88,08	88,08	88,43
6	PPU	86,22	86,68	86,97	87,23	87,41
7	MAHULU	80,89	81,07	81,92	82,60	83,28
8	Balikpapan	89,71	90,24	90,48	90,59	90,80
9	Samarinda	89,41	89,82	89,90	90,40	90,68
10	Bontang	86,72	87,29	87,66	88,05	88,34
Kalimantan Timur		85,98	85,95	86,18	86,77	87,13

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

C. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel II.33
Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	62,76	66,20	65,66	65,67	64,94
2	KUBAR	63,68	61,14	60,60	65,34	66,01
3	KUKAR	56,44	63,74	61,43	62,76	63,40
4	KUTIM	55,72	56,35	53,77	53,78	51,55
5	Berau	50,55	57,66	57,91	56,48	58,17
6	PPU	50,02	50,36	49,75	49,85	50,58
7	MAHULU	76,04	80,61	80,41	80,43	81,11
8	Balikpapan	66,33	69,11	68,97	68,62	69,27
9	Samarinda	69,61	66,29	70,65	67,54	68,63
10	Bontang	46,36	51,99	51,97	45,67	46,12
Kalimantan Timur		57,53	65,65	65,54	66,64	66,89

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dengan capaian 57,53 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 66,89. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 20,00 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,02 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 49,78 persen.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 81,11 sedangkan Bontang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 46,12 yang artinya bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

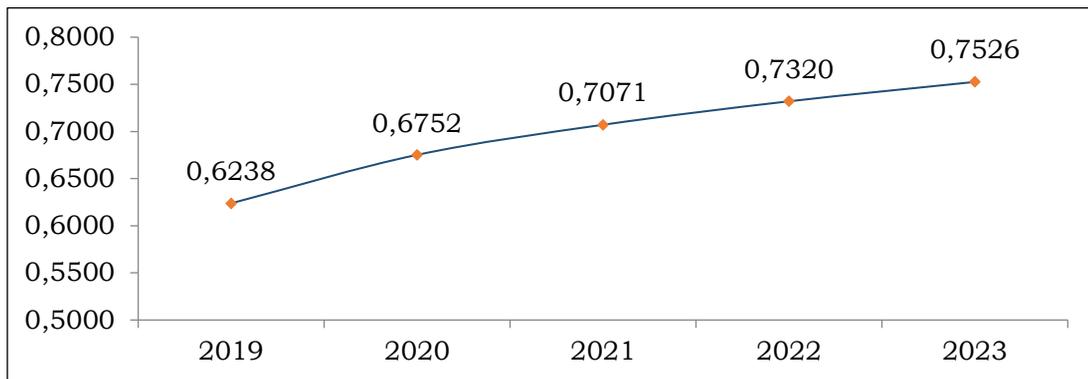
D. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun merupakan cerminan status kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri ($IDM > 0.8155$), Desa Maju ($0.7072 < IDM \leq 0.8155$), Desa Berkembang ($0.5989 < IDM \leq 0.7072$), Desa Tertinggal ($0.4907 < IDM \leq 0.5989$) dan Desa Sangat Tertinggal ($IDM \leq 0.4907$).

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir IDM Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun 2023 telah mencapai 0,7526. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat ke 9 di antara seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan ini

tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi terkecil di Kalimantan Timur.



Gambar II.40
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 - 2023

(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023)

Capaian IDM pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir seiring berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa dan bantuan keuangan spesifik ke seluruh desa. Capaian IDM terendah pada tahun 2023 terdapat pada Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 0,6968 dengan status Berkembang, dan capaian tertinggi pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai capaian sebesar 0,8052.

Tabel II.34
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 – 2023

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	0,6092	0,6664	0,7240	0,7500	0,7690
2	KUBAR	0,5900	0,6660	0,6953	0,7298	0,7504
3	KUKAR	0,6415	0,6846	0,7128	0,7465	0,7759
4	KUTIM	0,6378	0,6782	0,7119	0,7305	0,7323
5	Berau	0,6539	0,6999	0,7177	0,7261	0,7294
6	PPU	0,6905	0,7085	0,7340	0,7769	0,8052
7	MAHULU	0,5862	0,6181	0,6318	0,6646	0,6968
Kalimantan Timur		0,6238	0,6752	0,7071	0,7320	0,7526

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2024

Pada tahun 2023, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di tujuh kabupaten tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan hanya tersisa 5 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Berau sebanyak 1 desa dan Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 desa. Untuk

mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu upaya pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa terutama dalam meningkatkan pencapaian indeks ketahanan ekonomi yang masih rendah daripada 2 komponen lainnya.

Tabel II.35
Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kab/Kota	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal
1	Paser	31	78	30	0	0
2	KUBAR	47	79	60	4	0
3	KUKAR	76	70	47	0	0
4	KUTIM	19	69	51	0	0
5	Berau	17	39	43	1	0
6	PPU	18	12	0	0	0
7	MAHULU	1	17	32	0	0
Kalimantan Timur		209	364	263	5	0

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2024

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mencapai 54,81. Capaian IPK Kalimantan Timur berada bawah capaian IPK Nasional yaitu sebesar 55,13. Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam IPK, Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Pendidikan 76,55, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 74,40 dan dimensi budaya literasi.

Tabel II.36
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	14,75	26,88
Pendidikan	76,55	72,53
Ketahanan Sosial Budaya	74,40	69,25
Warisan Budaya	43,86	48,92
Ekspresi Budaya	28,51	31,48
Budaya Literasi	64,95	57,40
Gender	56,65	59,30
IPK	54,81	55,13

Sumber: KEMENDIKBUD, 2023

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif dikarenakan capaian berada diatas capaian IPK nasional. Capaian ini patut diapresiasi dalam

pengembangan budaya dan seni serta pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Meskipun beberapa dimensi IPK terus mengalami peningkatan, namun masih diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

B. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2017 IPP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 53,50 pada tahun 2017 menjadi 54,83 pada tahun 2020. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat 7 secara nasional meningkat dari tahun 2017. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja.

Tabel II.37
Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Domain: Pendidikan	73,33	73,33	73,33	76,67	76,67
1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,72	11,24	11,28	11,44	11,41
2. APK Sekolah Menengah	94,35	93,00	93,96	93,85	93,28
3. APK Perguruan Tinggi	35,64	37,78	39,16	40,21	40,62
Domain: Kesehatan dan Kesejahteraan	72,50	70,00	57,50	67,50	65,00
1. Angka Kesakitan Pemuda	5,37	6,52	4,07	6,31	8,43
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	0,93	1,37	1,67	0,23	0,50
3. Pemuda Merokok	20,80	20,82	20,39	19,14	17,07
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil	7,99	2,52	25,55	26,88	26,88
Domain: Lapangan dan Kesempatan Kerja	35,00	45,00	50,00	35,00	45,00
1. Pemuda Berwirausaha Kerah Putih	0,24	0,48	0,70	0,38	0,56
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	15,21	12,80	13,94	16,01	12,35
Domain: Partisipasi dan Kepemimpinan	43,33	43,33	43,33	30,00	30,00
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	70,55	70,55	70,55	50,56	50,56
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi	4,87	4,87	4,87	4,15	4,15
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat	5,12	5,12	5,12	2,62	2,62
Domain: Gender dan Diskriminasi	50,00	50,00	50,00	53,33	53,33
1. Angka Perkawinan Usia Anak	11,54	12,36	11,79	8,64	8,64
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	44,39	46,10	45,88	46,76	46,76
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	25,29	27,96	24,48	25,17	26,99
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim	54,83	56,33	54,83	52,50	54,00
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia	51,50	52,67	51,00	53,33	55,33

Sumber: BAPPENAS, 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Wajib

A. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (APS) di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur ternyata belum capai 100 persen, terbukti pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami penurunan (81,50) tahun 2023, artinya Masih ada anak belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal bahkan pada tahun 2020 akibat pandemi Corona angkanya mengalami penurunan (81,88). Penyebab tersebut mungkin dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan berdasarkan kewenangannya lebih memfokuskan/melaksanakan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 106,46. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 6,46 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun masih bersekolah di tingkat SD, hal ini disebabkan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Sebenarnya wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya namun tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang

pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian. APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan terkecuali jenjang SLTA mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari meningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur. Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Tabel II.38
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

Usia Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Sekolah					
7-12	99,68	99,73	99,60	99,57	99,64
13-15	98,21	99,07	98,90	98,75	98,71
16-18	82,07	81,88	82,10	81,43	81,50
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	106,84	105,75	105,26	105,21	106,46
SLTP	91,03	92,17	92,03	91,47	92,28
SLTA	94,96	95,23	95,52	95,09	95,16
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	98,41	98,44	98,36	98,45	98,53
SLTP	80,42	81,28	81,30	82,65	83,36
SLTA	68,55	69,00	69,29	69,10	69,89

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel II.39
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

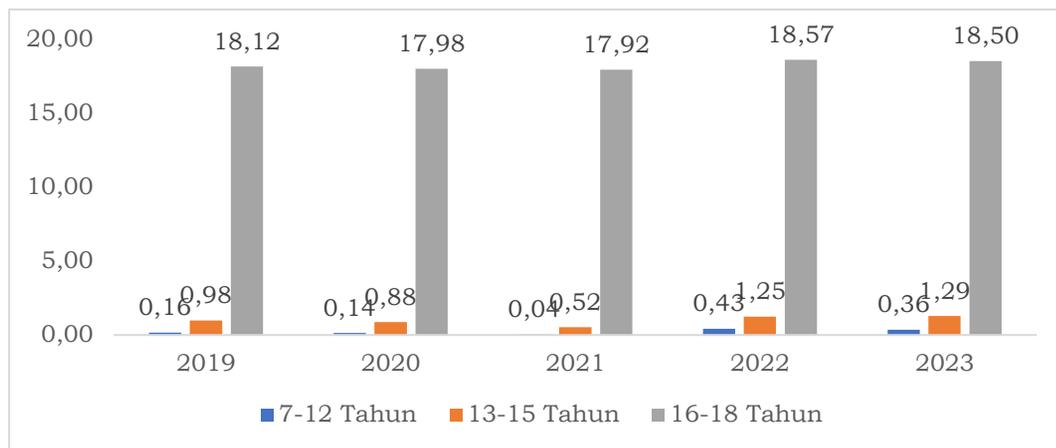
Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.676	367.363	23.050	15,94	219,19
Swasta	253	52.109	3.366	15,48	205,96
MI	149	33.396	2.326	14,36	224,13
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	458	129.945	8.681	14,97	283,72
Swasta	239	31.929	2.269	14,07	133,59
MTs	182	31.833	2.998	10,62	174,91
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	145	68.792	4.290	16,04	474,43
Swasta	92	13.541	1.105	12,25	147,18
MA	92	12.138	1.512	8,03	131,93
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	88	54.574	3.481	15,68	620,16
Swasta	129	28.536	1.850	15,42	221,21

Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2023

Pada tahun 2023, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,10 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13-15 tahun turun 0,36 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,06 poin. Angka Putus Sekolah kembali meningkat pada tahun 2023 untuk masing-masing kelompok umur menjadi 0,36 untuk kelompok usia 7-12 tahun, 1,29 untuk kelompok usia 13-15 tahun, dan 18,50 untuk kelompok usia 16-18 tahun.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.



Gambar II.41
 Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2019-2023 (persen)
 (Sumber: BPS Kaltim, 2024)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, jumlah mahasiswa mencapai 96.091 dengan jumlah dosen sebanyak 4.424 orang.

B. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

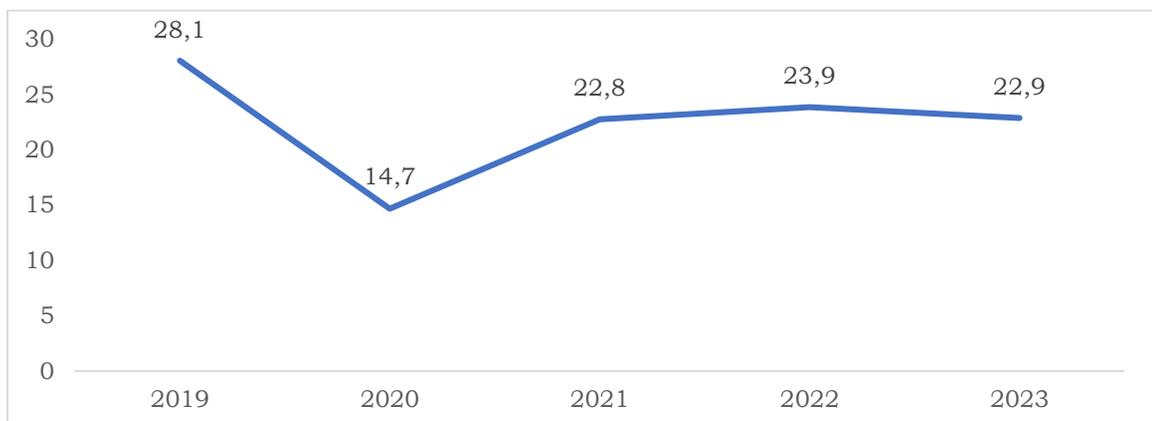
Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2019–2020 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah terjadi penurunan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0–11) bulan juga mengalami penurunan.

Tabel II.40
 Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Persen)

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	32,20	15,50	23,60	24,90	22,40
2	KUBAR	35,70	16,60	15,80	23,10	22,00
3	KUKAR	36,50	14,30	26,40	27,10	17,60
4	KUTIM	39,40	16,10	27,50	24,70	29,00
5	Berau	24,70	17,60	25,70	21,60	23,00
6	PPU	27,00	11,40	27,30	21,80	24,60
7	MAHULU	36,60	9,60	20,30	14,80	N/A
8	Balikpapan	14,00	13,30	17,60	19,60	21,60
9	Samarinda	24,70	11,90	21,60	25,30	24,40
10	Bontang	29,00	20,90	26,30	21,00	27,00

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2023

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9, namun sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 mencapai 22,90. Angka ini diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5. Secara regional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan ke enam belas. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 17,60 persen.



Gambar II.42

Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 berdasarkan Hasil Survei SSGI

(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2023)

Untuk wasting sendiri hasil SSGI Tahun 2022 menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9,1. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wasting nasional yang mencapai 7,7. Wasting di Kalimantan Timur dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan berada pada posisi ketiga terendah setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam

rangka percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi dan stunting serta wasting di Provinsi Kalimantan Timur.

2) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Terdapat penambahan sebanyak 5 Rumah Sakit Umum, 3 Rumah Sakit Swasta, 1 Puskesmas, sampai dengan bertambahnya 50 Puskesmas Pembantu sehingga terlihat persebaran fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota sudah cukup merata. Dengan jumlah 58 Rumah Sakit Umum dan 22 Rumah Sakit Swasta di Kalimantan Timur pada tahun 2023, terdata pada Mahulu dan Bontang sudah memiliki masing-masing 2 dan 5 unit RS. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

Tabel II.41
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum	53	57	59	59	58
2	Rumah Sakit Swasta	19	22	22	22	22
3	RS Bersalin	9	7	10	10	8
4	Puskesmas	187	187	188	188	188
5	Puskesmas Pembantu	716	730	742	745	766
6	Pedagang Besar Farmasi	49	52	52	52	52
7	Apotek	704	759	745	745	745

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2023

Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan atau tetap (puskesmas) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Seluruh jenis fasilitas kesehatan mengalami penurunan, kecuali jumlah apotek meningkat dari 745 menjadi 826.

Tabel II.42
Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan					
		RS. Umum	RS. Swasta	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pedagang Besar Farmasi	Apotek
1	Paser	2	0	19	123	0	38
2	Kutai Barat	2	1	19	84	0	36
3	Kutai Kartanegara	3	0	32	175	0	122
4	Kutai Timur	3	5	21	116	1	51
5	Berau	2	0	21	112	0	71
6	Panajam Paser Utara	2	0	11	43	0	34
7	Mahakam Ulu	2	0	6	30	0	6
8	Balikpapan	11	4	27	14	19	165
9	Samarinda	14	3	26	0	32	285
10	Bontang	1	4	6	2	0	18
JUMLAH		42	17	188	699	52	826

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel II.43
Jumlah Tenaga Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	1.024	1.106	1.046	1.488	2.103
2	Dokter Gigi	314	320	326	327	454
3	Dokter Spesialis	597	649	999	1.174	843
4	Perawat	6.524	7.510	9.468	9.627	11.006

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2023

Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak 2019 sampai dengan 2023 penambahan Dokter umum bertambah 989 orang, Dokter gigi 140 orang, Dokter spesialis 246 orang, dan perawat

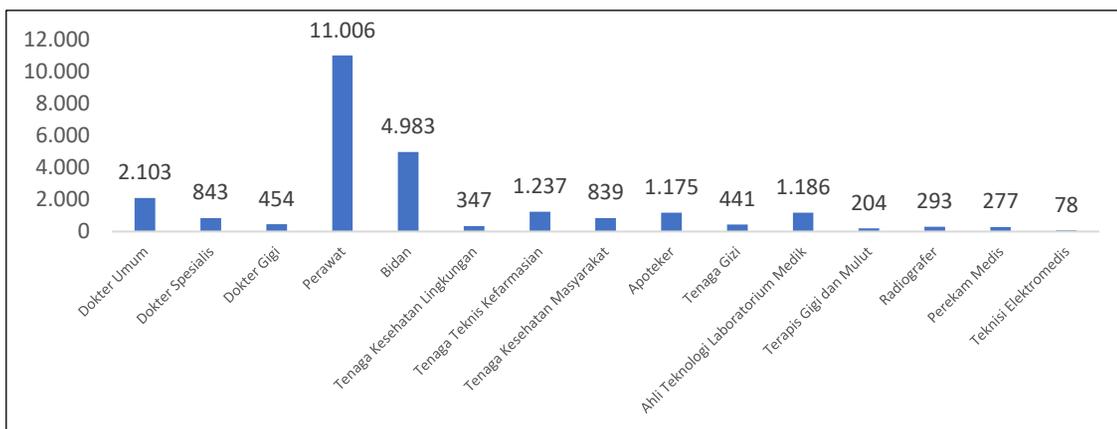
sejumlah 4.482 orang. Persebaran tenaga Kesehatan di Kabupaten Kota sudah merata walaupun perlu di akurasi sampai pada kebutuhan di tingkat kecamatan. Dengan jumlah 11.976 tenaga Kesehatan utama pada tahun 2022, yang terdiri dari Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan Perawat menggambarkan persebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota upaya pemenuhan pelayanan pada masyarakat sudah terpenuhi.

Tabel II.44
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan			
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat
1	Paser	61	23	32	543
2	Kutai Barat	62	16	18	611
3	Kutai Kartanegara	111	33	68	1.096
4	Kutai Timur	113	34	50	858
5	Berau	108	23	25	665
6	Penajam Paser Utara	39	13	23	287
7	Mahakam Ulu	24	2	1	211
8	Balikpapan	368	89	393	1.974
9	Samarinda	305	112	302	2.438
10	Bontang	163	35	104	763
JUMLAH		1.354	380	1.016	9.226

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



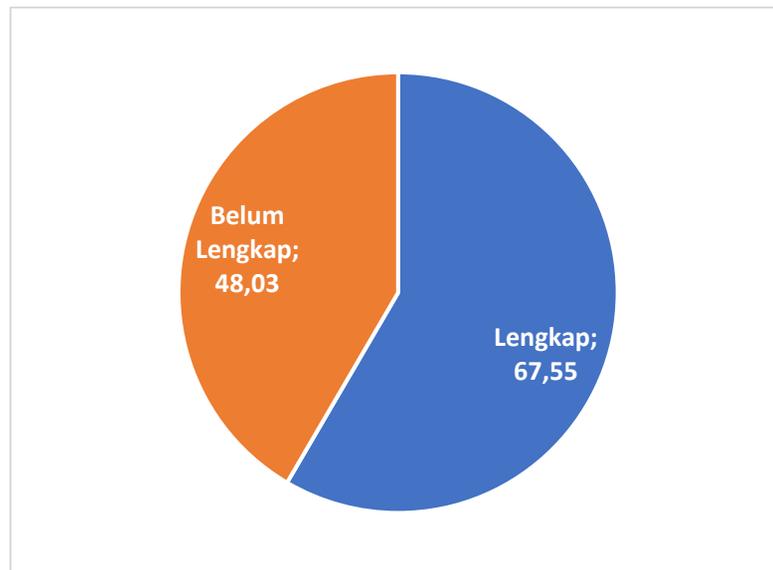
Gambar II.43
 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2023
 (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024)

Tabel II.45
 Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lengkap	Belum Lengkap	% Pemenuhan
1	Paser	19	17	2	89,47
2	Kutai Barat	19	5	14	26,32
3	Kutai Kartanegara	32	21	11	65,63
4	Kutai Timur	21	9	12	42,86
5	Berau	21	16	5	76,19
6	Penajam Paser Utara	11	6	5	54,55
7	Mahakam Hulu	6	2	4	33,33
8	Kota Balikpapan	27	25	2	92,59
9	Kota Samarinda	26	21	5	80,77
10	Kota Bontang	6	5	1	83,33
Jumlah		188	127	61	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.



Gambar II.44

Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024)

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

Tabel II.46

Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan
3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur

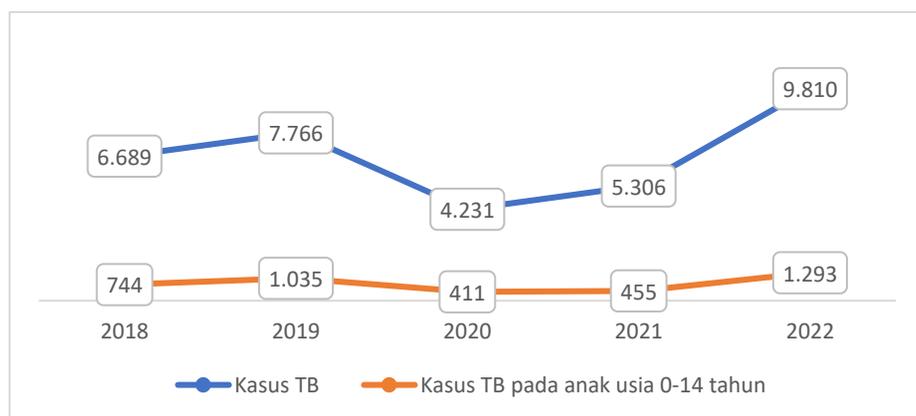
No.	Kab/Kota	Milik	Tipe	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
					Sp.A	Sp.B	Sp.OG	Sp.PD	Sp.An	SP.PK	Sp.Rad
1.	Kabupaten Berau	Kab/Kota	RSUD	RSUD Talisayan		1	1	1	1		
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dr. Abd. Rival berau	3	2	3	3	1	1	2
2.	Kota Balikpapan	Kab/Kota	RSUD	RSUD Balikpapan	2	2	3	4	3	2	
3.	Kota Bontang	Kab/Kota	RSUD	RSUD Taman Husada	3	2	4	3	3	2	2
4.	Kota Samarinda	Kab/Kota	RSUD	RSUD Inche Abdoel Moeis	3	3	3	4	3	2	2
5.	Kabupaten Kutai Barat	Kab/Kota	RSUD	RSUD Harapan Insan Sendawar	2	3	2	3	1	3	1
6.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab/Kota	RSUD	RSUD AM Parikesit Tenggarong	4	3	5	6	4	2	2

No.	Kab/Kota	Milik	Tipe	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
					Sp.A	Sp.B	Sp.OG	Sp.PD	Sp.An	SP.PK	Sp.Rad
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dayaku Raja	1	1		1			
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2	1	1	3	1	1	1
7.	Kabupaten Kutai Timur	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sangkuliran g		1	1	1		1	
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kudungga	1	3	3	4	3	2	1
8.	Kabupaten Paser	Kab/Kota	RSUD	RSUD Panglima Sebaya	3	4	4	3	3	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kerang			1				
9.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sepaku	1		1				
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1	3	2	2	1	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

3) Penyakit menular

Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit Tuberkulosis (TBC) atau TB, hal ini dikarenakan jumlah kasus TBC dan Jumlah kematian selama pengobatan Tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya.



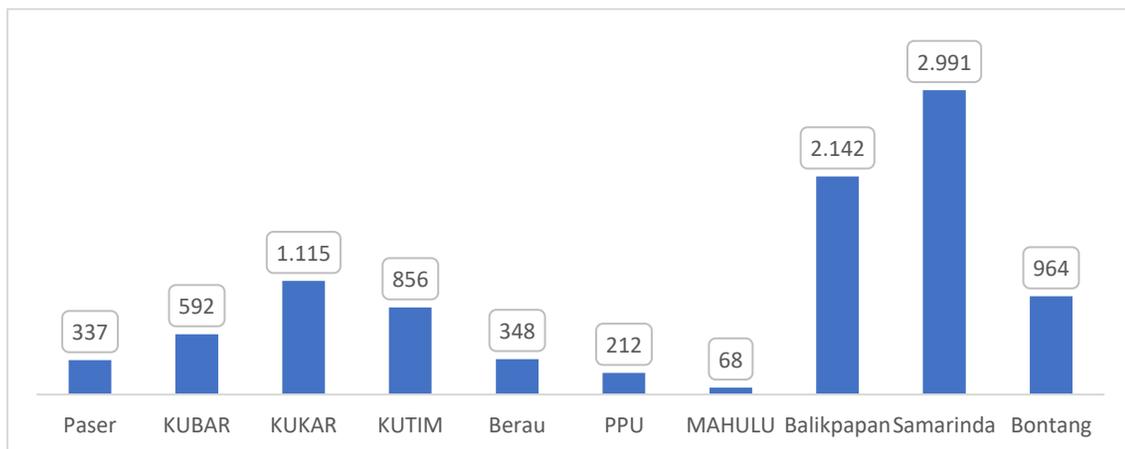
Gambar II.45

Kasus TB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Kaltim, 2023)

Jumlah kasus TB mengalami peningkatan di tahun 2017 – 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2021 meningkat kembali hingga mencapai 5.306 kasus sama halnya juga dengan

kasus TB pada anak usia 0-14 tahun sedikit mengalami peningkatan tahun 2021 mencapai 455 kasus.



Gambar II.46
 Jumlah Kasus TB menurut Kabupaten/Kota
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
 (Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Kaltim, 2023)

Kota Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara berada di urutan tertinggi untuk kasus TB, hal ini juga terkait dengan lebih banyak fasilitas Kesehatan yang aktif melapor dan besarnya jumlah penduduk di ketiga wilayah tersebut.

Tabel II.47
 Jumlah Kasus Penyakit Menular Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2019 - 2023

No	Penyakit/Kasus	2019	2020	2021	2022	2023
1.	CNR Seluruh Kasus TBC (Per 100.000 Penduduk Kalimantan Timur)	206	123	140	203	299
2.	Jumlah Kematian selama Pengobatan Tuberkulosis (Kab/Kota)	207	210	281	382	498
3.	Jumlah Kasus HIV (Kab/Kota)	1.369	1.023	1.143	1.354	1.194
4.	Jumlah Kasus Baru AIDS (Kab/Kota)	381	179	364	453	253
5.	Jumlah Kematian akibat AIDS (Kab/Kota)	31	24	33	62	31

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

TBC (Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.

Tabel II.48
 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022

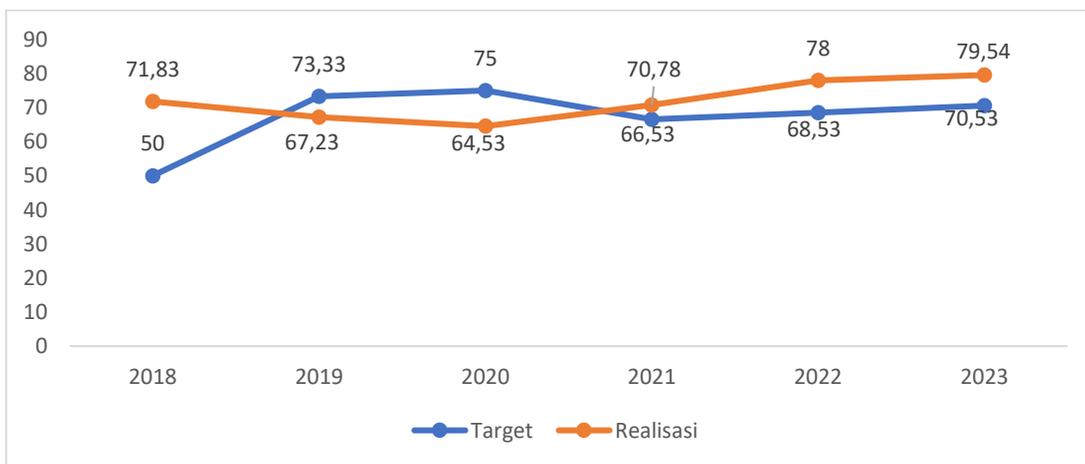
No	Penyakit/Kasus	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Kab/Kota)	207.231	239.736	245.676	206.848	467.415
2.	Deteksi Dini Kanker (Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Iva & Sadanis*)	122	151	110	130	170

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Selain upaya pencapaian target SPM air minum (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal), Kalimantan Timur memiliki target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak. Akses air minum layak merupakan kemudahan/kemampuan penduduk memperoleh kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dari sumber terlindungi baik dari jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Persentase akses air minum layak merupakan rasio antara jumlah penduduk yang telah memperoleh suplai air minum dengan total jumlah penduduk. Dalam 6 tahun terakhir, capaian akses air minum layak menunjukkan kinerja yang baik. Walaupun target tidak tercapai pada awal dan pertengahan tahun perencanaan (2019-2020), namun sejak tahun 2021, realisasi pemenuhan akses air minum layak telah melampaui target yang ditetapkan. Grafik target dan realisasi direpresentasikan pada gambar dibawah ini.



Gambar II.47
 Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2018-2023 (%)
 (Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2024)

Angka capaian merupakan agregat dari pencapaian 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki capaian di atas 50% kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu yang aksesnya baru mencapai 23,35% dan 14,40%. Sementara capaian tertinggi berada di Kota Balikpapan. Walaupun secara cakupan Kalimantan Timur menunjukkan layanan yang baik, perhatian perlu diberikan pada aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku. Hampir seluruh area perkotaan, terutama tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) utama, memiliki cakupan di atas 80%. Sayangnya, suplai air baku yang mendukung tingginya capaian ini masih berasal dari air tanah, terutama di Kota Bontang dan Balikpapan. Kondisi ini dapat dikatakan tidak ideal dan tidak berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya untuk menyediakan air baku yang memenuhi standar keandalan, yakni bersumber dari air permukaan.

Tabel II.49

Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023

No	Kabupaten/Kota	2022	2023
1	Balikpapan	99.25	98,99
2	Penajam Paser Utara	30.90	23,35
3	Paser	70.14	84,25
4	Bontang	83.55	83.55
5	Kutai Timur	51.73	55,03
6	Berau	82.16	81,55
7	Samarinda	87.27	87,27
8	Kutai Kartanegara	72.85	78,33
9	Kutai Barat	86.02	86,02
10	Mahakam Ulu	66.06	14,40
Provinsi		78.00	79,54

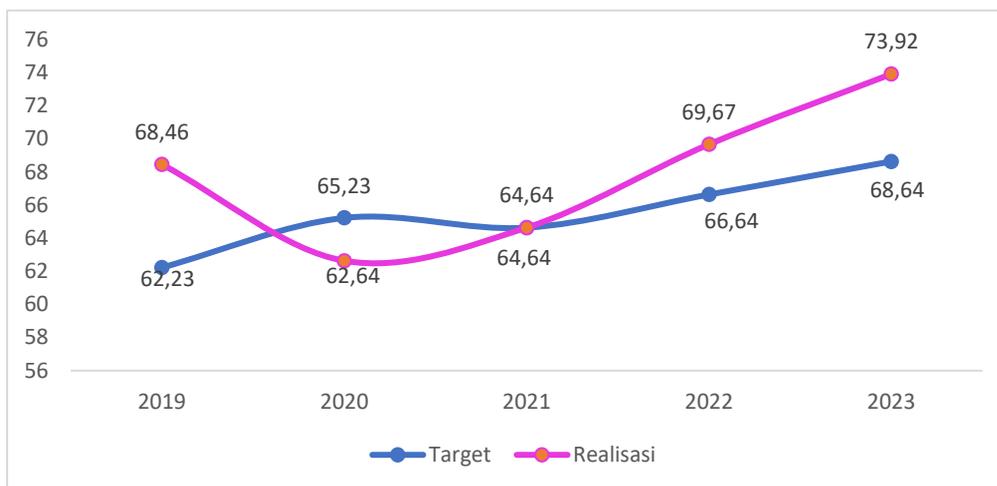
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Data Susenas Kor (Maret 2022) menunjukkan bahwa terdapat 17.118 Rumah Tangga di Kaltim (1,3%) yang sumber air minumnya berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung. Sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara untuk keperluan domestik lainnya (memasak, mandi, mencuci, dll), terdapat sekitar 5.55% Rumah Tangga yang menggunakan air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak

terlindung dan sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Hal ini mengartikan bahwa terdapat penduduk yang sumber air bersihnya memiliki potensi terkontaminasi dengan air buangan/limbah domestik (termasuk tangki septik). Kondisi ini dapat membawa risiko negatif bagi kesehatan karena masyarakat berpotensi terpapar bakteri dari buangan air limbah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target akses air minum layak secara nasional adalah 100% pada tahun 2024. Hingga tahun 2023, capaian air minum layak di Kaltim baru mencapai 79,54%. Oleh karena itu, masih terdapat gap yang cukup besar antara capaian Kalimantan Timur dengan target nasional. Pemerintah Provinsi tidak dapat sepenuhnya mengejar target tersebut mengingat kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada suplai air baku untuk air minum pada cakupan regional atau lintas kabupaten/kota. Dari 841 desa & kelurahan yang ada di Kaltim, rencana SPAM regional diperkirakan hanya mampu menyuplai air minum curah untuk kurang lebih 260 desa/kelurahan. Oleh karena itu, untuk mencapai target 100% cakupan layanan, diperlukan strategi penanganan khusus, salah satunya melalui mekanisme bantuan keuangan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terutama untuk kompilasi data capaian di setiap kabupaten/Kota yang akan diagregat menjadi capaian provinsi.

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 73,92% dari jumlah penduduk Kaltim. Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM. Dalam konteks capaian berdasarkan dokumen RPJMD Kaltim 2019 – 2023, capaian air minum layak perpipaan tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 68,64%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, air minum layak perpipaan di Kaltim ditargetkan mencapai 73,92% pada tahun 2024, sehingga terdapat *gap* antara target nasional dengan kondisi saat ini, yakni berkisar 2,17%.



Gambar II.48

Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2024)

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur air limbah oleh provinsi yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian SPM air limbah skala provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Tahun 2022, pendampingan dilakukan untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Berau sementara tahun 2023, pendampingan akan dilakukan untuk Kabupaten Paser, Mahulu, dan Kota Bontang. Nilai capaian sektor sanitasi yang digunakan sebagai indikator merupakan nilai capaian agregat 10 Kabupaten/Kota. Pada dimensi layak, sudah 81,79% penduduk mendapat layanan sanitasi. Namun, capaian masih sangat minim pada dimensi aman, yakni baru mencapai kurang dari 5%.

Tabel II.50
Capaian Sektor Air Limbah 2023

Kabupaten/Kota	Air Limbah	
	Layak (%)	Aman (%)
Balikpapan	91,40	9,18
Penajam Paser Utara	95,68	3,70
Paser	92,75	0,71
Bontang	100,00	7,63
Kutai Timur	89,10	2,70
Berau	90,55	3,35
Samarinda	78,02	7,95
Kutai Kartanegara	75,02	0,32
Kutai Barat	61,11	1,59

Kabupaten/Kota	Air Limbah	
	Layak (%)	Aman (%)
Mahakam Ulu	52,50	2,91
Kaltim 2022	83,84	4,71

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023. Agregasi capaian Kabupaten/ Kota

Walaupun belum mencapai kondisi ideal dan masih jauh dari kondisi aman, secara nasional Kaltim memperlihatkan kemajuan penanganan sanitasi yang baik, terutama dari sisi tempat pembuangan tinja. Pada tahun 2022 (Maret), hampir seluruh Rumah Tangga di Kaltim atau 92,83 persen terlayani oleh tangki septik. Kondisi ini sudah berada di atas rata-rata nasional yakni 82,56 persen. Walaupun secara persentase terlihat baik, angka absolut untuk Rumah Tangga yang membutuhkan perhatian dapat dikatakan cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 75.956 Rumah Tangga yang masih membuang tinja secara langsung ke berbagai obyek geografis lingkungan alam, seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun/dan lainnya.

3) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 938,85 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2023 mencapai 764,35 km atau 81,41 persen. Berdasarkan jenis permukaan jalan yaitu aspal mencapai 467 km, kerikil 83,51 km, tanah 1,38 km, dan lainnya 386,96 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 227,51 km, kondisi sedang 536,84 km, kondisi rusak ringan 75,72 km, dan kondisi rusak berat 98,78 km.

Tabel II.51
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.710,96	1.442,02	0,20	0	364,55
2	Provinsi	938,85	467,00	83,51	1,38	386,96

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Data jalan kewenangan provinsi pada Tahun 2023 menunjukkan cukup rendahnya panjang jalan yang dalam kondisi rusak sedang dan berat. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk pemeliharaan, sehingga

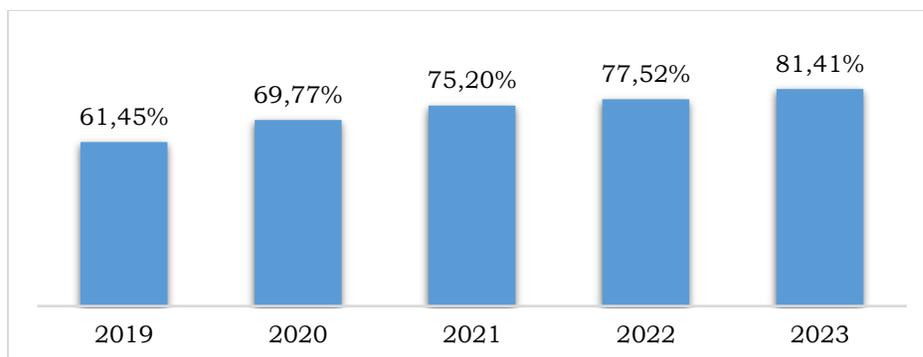
dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

Tabel II.52
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	285,30	1.284,46	136,41	100,58
2	Provinsi	227,51	536,84	75,72	98,78

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

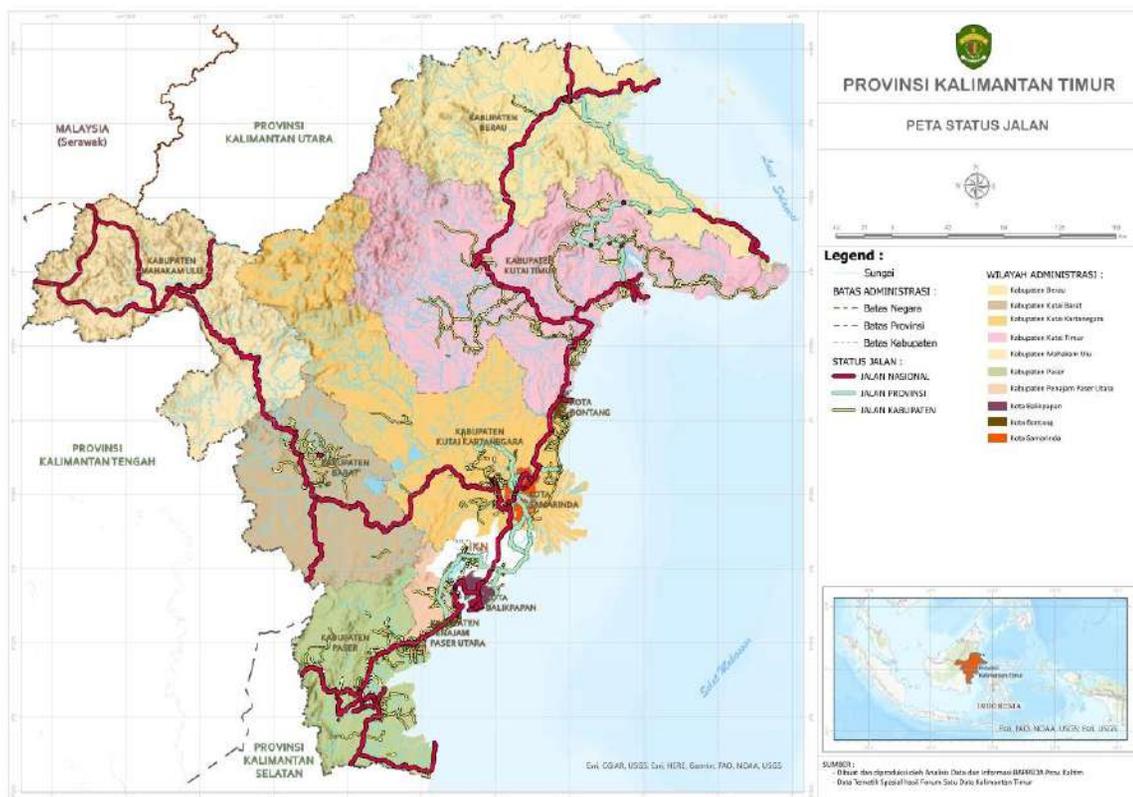
Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 yang hanya mencapai 473,05 km, meningkat 220,81 km sehingga pada tahun 2023 telah mencapai 764,35 km. faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh UPTD Pemeliharaan Dinas PUPR PERA untuk menjaga kemantapan jalan dan alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap tahunnya untuk menambah proporsi jalan mantap yang ada di Provinsi Kaltim. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan mantap adalah ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung sektor perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb–Talisayan yang mendukung Pariwisata dan ruas jalan Patung Lembuswana – Sebulu yang mendukung Pertanian.



Gambar II.49
Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2019-2022
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
- 2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas Kalimantan;
- 4) Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- 5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
- 6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal; dan
- 7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor



Gambar II.50
Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

4) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian

daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius penyediaan kapasitas air baku.

Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku saat ini adalah sebesar 7.922 liter/detik. Hal ini masih jauh dari kebutuhan air baku yang diharapkan, kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pembangunan Bendungan Marangkayu dan Sukarahmat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kota Bontang terkendala dalam pelaksanaannya yaitu pembebasan lahan, tumpang tindih dengan HGU, dan lokasi bendungan yang berada di kawasan lindung.

Pemenuhan kebutuhan air baku masih perlu untuk ditetapkan menjadi prioritas daerah, utamanya pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang masih sangat bergantung pada penggunaan air tanah. Pemenuhan air baku dengan mengandalkan air permukaan sangat diperlukan untuk jangka panjang, sementara untuk pemenuhan air baku untuk jangka pendek masih tetap mengandalkan penggunaan air tanah dengan pembangunan sumur dalam. Penambahan kapasitas air baku juga dianggap sangat penting, terutama dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Dengan penetapan IKN di Kalimantan Timur maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan air baku sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk dan tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dalam mendukung IKN.

Kalimantan Timur mempunyai garis pantai sepanjang 3.925 Km yang terbentang dari Kabupaten Berau di bagian Utara dan Kabupaten Paser di wilayah Selatan. Dengan garis pantai yang sangat panjang maka potensi terjadinya pengikisan akibat gelombang dan arus laut yang bersifat destruktif atau merusak menjadi cukup tinggi. Sementara pembangunan infrastruktur pengaman pantai masih rendah capaiannya, tidak berbanding lurus dengan panjang pantai kritis yang ada. Berdasarkan data perhitungan tahun 2019 terdapat 13.600 meter pantai kritis yang berada di dalam WS. Kewenangan Provinsi (Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau), sementara itu pembangunan infrastruktur pengaman pantai sampai dengan tahun 2022, baru mencapai 455 meter. Sehingga kedepannya penanganan pantai kritis harus dilanjutkan setiap tahunnya, agar dapat meminimalisir daya rusak air terhadap pantai. Namun penanganan ke

depan perlu juga dipikirkan penanganan alternatif selain pembangunan fisik seperti konservasi/vegetasi.

Berdasarkan hasil laporan capaian terhadap Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan erosi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi tahun 2021 sebesar 35,29% dan tahun 2022 sebesar 46,47%.



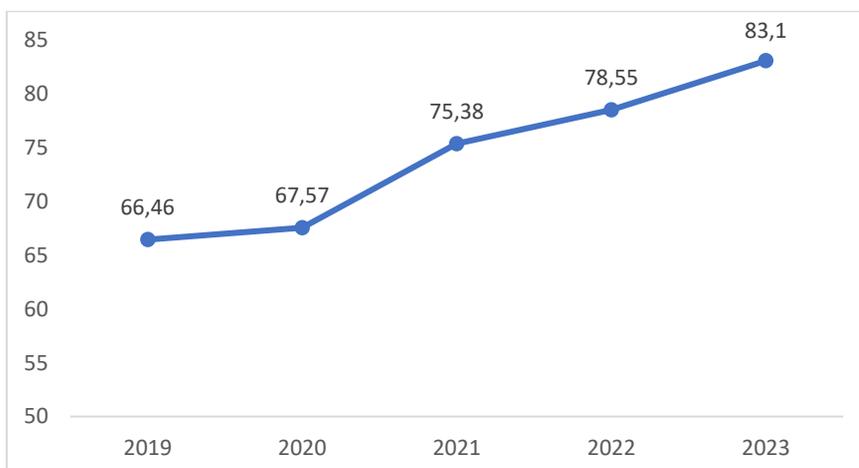
Gambar II.51
Penanganan Pantai Kritis
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

Pengelolaan pantai dan penanganan pantai kritis menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan daerah pesisir yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kemandirian dan pertumbuhan perekonomian berbasis non migas. Pantai merupakan potensi pariwisata yang menjadi salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Berau menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya Pulau Derawan yang mengedepankan pembangunan di sektor pariwisata. Penanganan pantai juga dilaksanakan dalam rangka mendukung masyarakat pesisir dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, yang mayoritas bergantung pada pemanfaatan hasil laut.

5) Penataan Ruang

Dalam perwujudan penyelenggaraan penataan ruang, skoring penyelenggaraan penataan ruang menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan kinerja penataan ruang. Realisasi capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2019 sebesar 66,46 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 67,57 persen.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi ditetapkan dengan Perda RRTR melainkan menjadi bagian dari substansi Perda RTRW itu sendiri, sehingga hal ini mempengaruhi indikator pada aspek pelaksanaan penataan ruang. Sehingga, pada tahun 2021 - 2023, terdapat peningkatan skoring menjadi 83,10 persen dikarenakan progres revisi RTRWP telah berjalan sesuai dengan target.



Gambar II.52

Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang

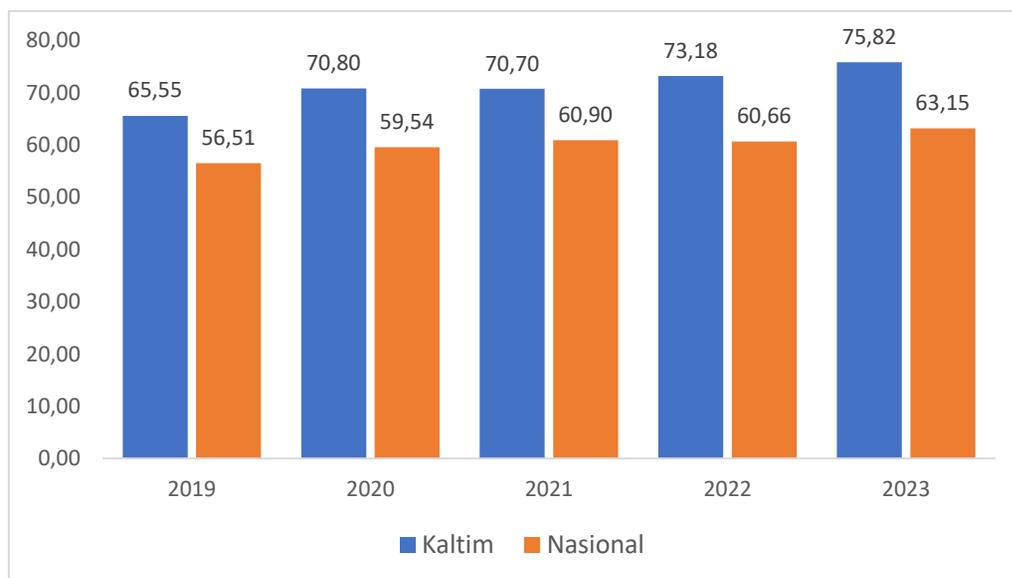
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Pada tahun 2023 ditargetkan pencapaian Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang mencapai 83,10% dimana diperlukan peningkatan sebesar 4,53%. Adapun target ini didasarkan kepada peningkatan kinerja dari masing-masing aspek yaitu Aspek Pembinaan Penataan Ruang (38,30), Aspek Pengaturan Penataan Ruang (23,50) dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang (23,10). Selain itu diharapkan pada awal tahun 2023, Revisi RTRWP sudah dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan peninjauan kembali dan proses revisi perda dapat mengacu perda RTRWP.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Tidak Layak Huni

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Data SUSENAS tahun 2023 menunjukkan bahwa Rumah Tangga di Kalimantan Timur yang telah menempati rumah layak huni mencapai 75,82%. Kondisi ini naik sekitar 2,64% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar karena masih terdapat 345.031 Rumah Tangga (24,18%) yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni.



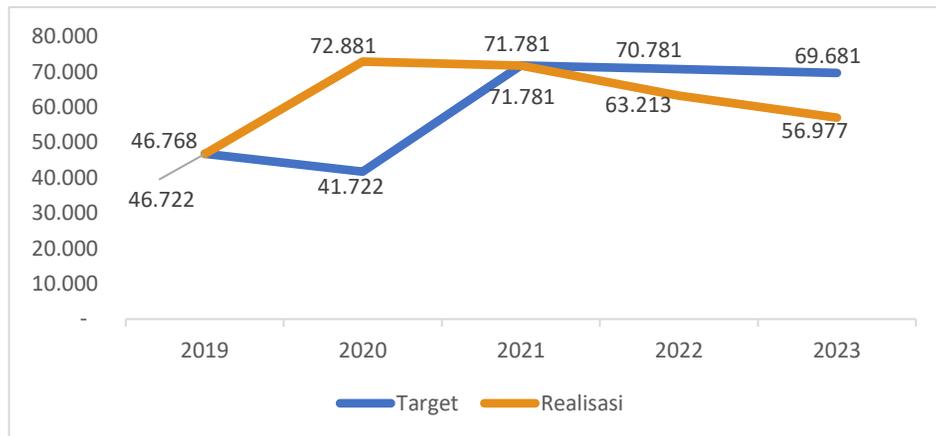
Gambar II.53

Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Kaltim Tahun 2019 – 2023

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah tahun 2019 – 2023. Dalam rentang waktu tersebut, pengurangan ditargetkan mencapai 25.000-unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dana APBN, APBD Provinsi Kaltim, serta APBD kabupaten/kota. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2023, terdapat setidaknya 56.977 RTLH di Kaltim yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Dari sisi pelaksanaan, penanganan melalui Dana APBD dilakukan dengan berpedoman pada kriteria penentuan kelayakan hunian

bangunan. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui perbaikan atap, lantai, serta dinding pada bangunan-bangunan yang telah terdata dan terverifikasi.



Gambar II.54

Target dan Realisasi Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Gambar diatas menunjukkan jumlah rumah layak huni tahun 2019 hingga 2023, yakni target dan capaian. Kinerja dikalkulasi melalui pengurangan RTLH setiap tahun, sehingga semakin kecil nilai RTLH maka kinerja dikatakan semakin baik. Kenampakan visual grafik memiliki sedikit anomali. Hal ini juga menunjukkan salah satu kendala atau kesulitan dalam perhitungan capaian kinerja penanganan RTLH, yakni inkonsistensi data *baseline* yang menyebabkan perubahan basis perhitungan. Kelemahan pada kondisi data *baseline* ini akan menjadi perhatian dalam proses perencanaan program penanganan RTLH tahun-tahun berikutnya.

2) Kawasan Kumuh

Kalimantan Timur memiliki 1,881.67 Ha area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Secara lebih detail, Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 menjabarkan aspek yang menjadi penentu dalam penetapan kawasan kumuh, yakni meliputi tujuh aspek dan 16 variabel. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, pengaruh kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, kondisi pengelolaan persampahan, aspek pengelolaan air limbah, aspek drainase lingkungan, serta kondisi jalan lingkungan.

Tabel II.53
Target dan Realisasi Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019-2023

Uraian	Luas kawasan kumuh (Ha)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Target	620,06	1.287,82	1.237,82	1.187,82	1.137,82
Realisasi	645,47	1.287,82	1,190.14	1.185,14	1.143,89

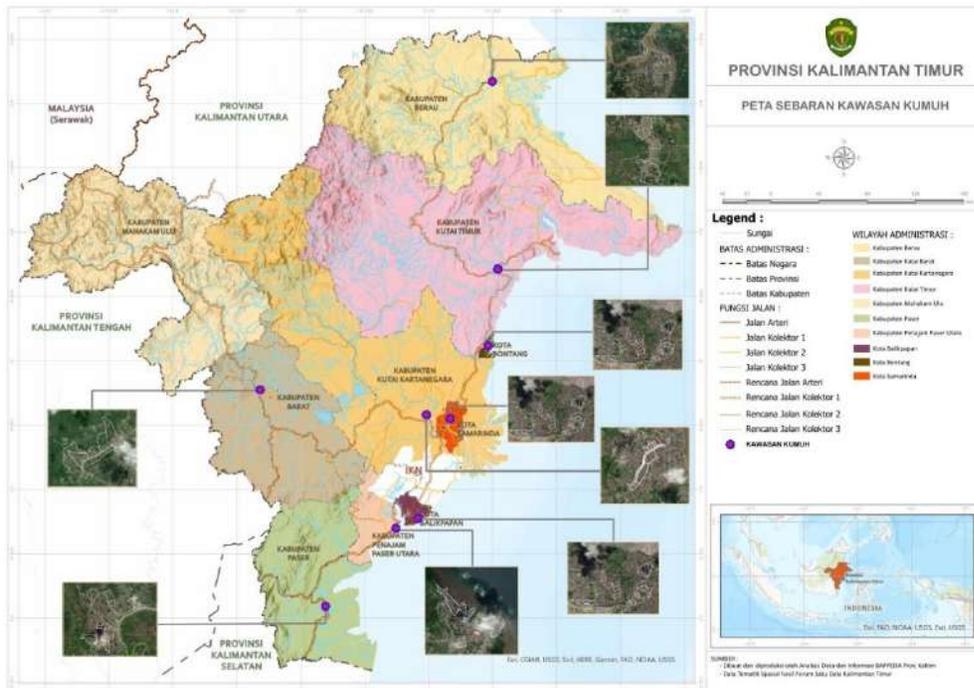
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Lokasi kawasan kumuh ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh dengan luasan 10-15 Ha, pemerintah pusat untuk luasan di atas 15 Hektar, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menangani areal di bawah 10 Ha. Hingga tahun 2023, luas kawasan kumuh tersisa 1.143,89 Ha. Capaian penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi penanganan antara berbagai sumber pendanaan.

Tabel II.54
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	
1	Paser	180,74	35,06	8,72	No. 653/KEP-116/2021
2	KUBAR	969,43	37,5	38,69	No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	122,99	37,51	7,61	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	783,73	0	0	No. 050/KK.268/2016
5	Berau	0	25,79	2,47	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	0	0	No. 593.33/270/2017
7	MAHULU	37,15	0	2,45	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	137,51	10,39	5,4	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kaltim		2.334,85	203,85	97,58	

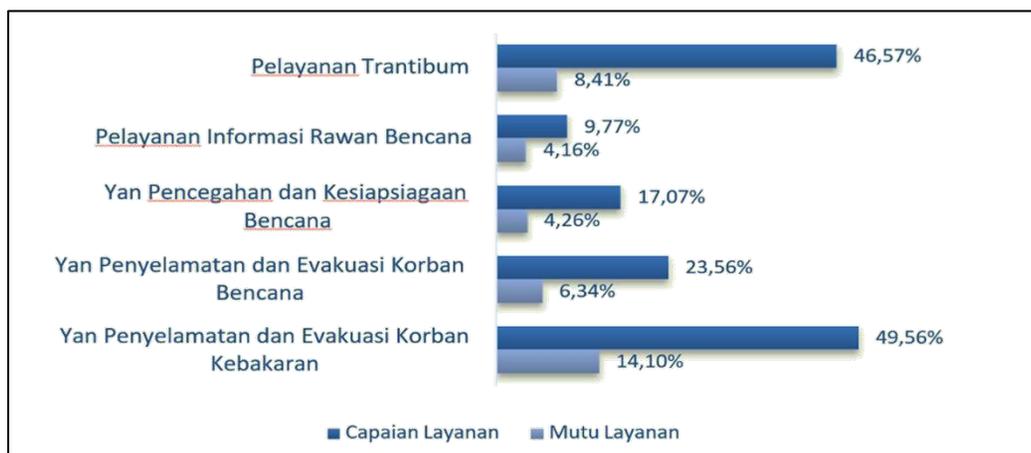
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022



Gambar II.55
Peta Sebaran Kawasan Kumuh
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan pelaporan Standar Pelayanan Minimal ada Sekretariat Bersama SPM Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada triwulan III (tiga) tahun 2022, bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 46,57% pada pelayanan dasar trantibum dengan kualitas pelayanan 8,41%. Hal ini disebabkan belum dialokasikan anggaran terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal terkhusus bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Linmas Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.56
Capaian SPM Trantibum Tahun 2022
(Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri)

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketenteraman sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparatur pemerintah dan aparatur keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kejahatan dan pelanggaran saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kejahatan dan pelanggaran sebesar 31 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11 persen, hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14 persen.

Tabel II.55
Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Aparat Satpol PP dan Linmas	23.028	23.811	23.812	24.038	24.030	Orang
Jumlah Aparat Satpol PP	441	1.224	1.225	1.448	1.443	Orang
a. Provinsi	145	172	173	173	168	Orang
b. Kab/Kota	1.502	1.052	1.052	1.275	1.275	Orang
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	22.587	22.587	22.587	22.590	22.587	Orang
a. Provinsi	30	30	30	33	30	Orang
b. Kab/Kota	22.557	22.557	22.557	22.557	22.557	Orang
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	2.793	2.793	2.793	2.903	2.627	Kali
Jumlah Pos Siskamling	1.927	1.927	12.293	10.449	11.749	Unit
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	2	2	16	85	112	
Jumlah Pelanggaran K3	138	138	5.157	5.958	5.377	Kasus
Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3	365	365	4.508	5.823	5.365	Kasus
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	264	264	41	47	44	%
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	4	3	0,01	0	9	

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 2.242. Angka ini mengalami penurunan menjadi 1927 pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai upaya penurunan angka kriminalitas untuk jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 63 kali, tahun 2017 sebanyak 211 kali, tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 2.793 kali.

Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 30 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan Pilkada. Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari Permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

F. Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tergambarkan pada peningkatan jumlah PMKS yang harus menerima bantuan dengan puncak jumlah tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 81.247 orang.

Tabel II.56
Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Jumlah PMKS	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PMKS	Orang	251.234	251.234	249.892	246.144	424.201
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	26	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	1,34	1,40	1,08	1,70	1,04

Jumlah PMKS	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	78.387	81.247	2.671	4.231	4.440
PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	1.052	1.134	2.671	4.231	4.440
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	1,34	1,40	1.08	1.7	1.04
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	0,22	0,22	0,22	0,22	6,43
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	46.510	46.510	46.510	46.490	778
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	100	100	100	100	50

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2024

Penanganan dan pemberdayaan PPKA dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curative*), pemulihan (*rehabilitative*) dan pengembangan (*promotive*) seperti meningkatkan jumlah Keluarga miskin dan PPKS yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan melibatkan multi program dan lintas sektor.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 251.234 orang menjadi 424.201 orang pada tahun 2023, atau bertambah sebanyak 172.967 orang. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

G. Ketenagakerjaan

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMA/SMK dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma I/II/III. Pada tahun 2023 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah tercatat 25,18 persen, sedikit menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai 25,98 persen. Sementara persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma I/II/III sekitar 3,69 persen, meningkat dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 3,26 persen.

Tabel II.57
Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023

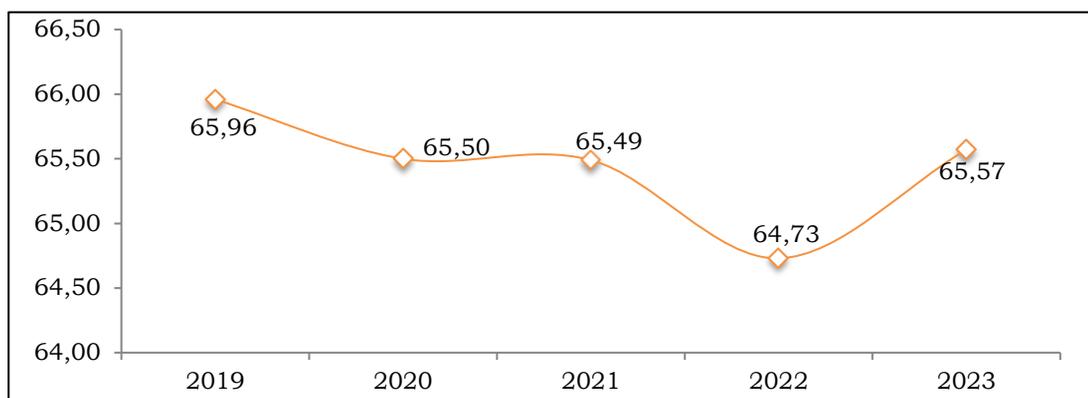
No	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD ke Bawah	482.844	493.889	491.456	453.853	465.175
		(28,51)	(29,18)	(28,57)	(25,98)	(25,18)
2	SMP	273.257	267.721	260.789	259.693	279.689
		(16,14)	(15,82)	(15,16)	(14,87)	(15,14)
3	SMA/SMK	659.047	643.105	666.878	760.250	804.339
		(38,92)	(37,99)	(38,76)	(43,52)	(43,54)
4	Diploma I/II/III	57.174	64.507	64.906	56.923	68.139
		(3,38)	(3,81)	(3,77)	(3,26)	(3,69)
5	Universitas/DIV	221.159	223.574	236.332	216.201	229.953
		(13,06)	(13,21)	(13,74)	(12,38)	(12,45)
Kalimantan Timur		1.693.481	1.692.796	1.720.361	1.746.920	1.847.295
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja selama tahun 2019-2023 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun dari 1.693.481 orang di tahun 2019 menjadi 1.692.796 orang di tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk yang bekerja tersebut merupakan salah satu dampak pandemi COVID- 19 yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaannya atau usahanya, pengurangan jam kerja ataupun pemberhentian kerja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu serta program pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dilaksanakan pemerintah, jumlah penduduk yang bekerja telah kembali meningkat. Kondisi itu tercermin pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.720.361 orang di tahun 2021 kemudian menjadi

sebanyak 1.746.920 orang di tahun 2022 dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.847.295 orang.

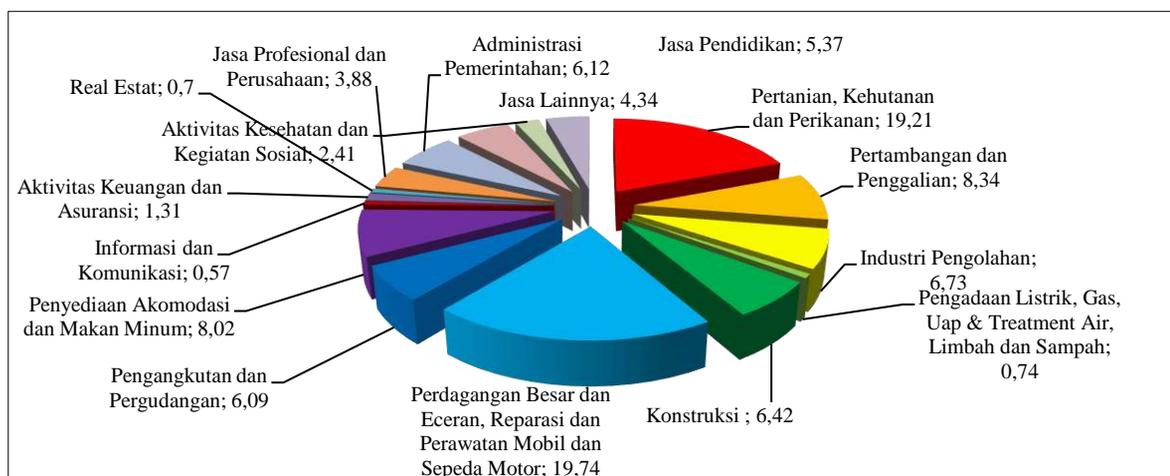
Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi Diploma dan Sarjana ke atas. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi SMA dan SMK. Kedua hal ini juga dapat mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih untuk bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi yang dominan menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur tidak memerlukan kompetensi/keahlian pada jenjang Diploma dan Universitas. Jika melihat fakta, penduduk paling banyak bekerja di wilayah perkotaan dengan lapangan usaha dominan di sektor perdagangan dan jasa (20,06%). Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa para pekerja sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan peluang kesejahteraan yang lebih baik apabila berpendidikan lebih tinggi yang didukung dengan kebutuhan perkembangan sektor ekonominya.



Gambar II.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

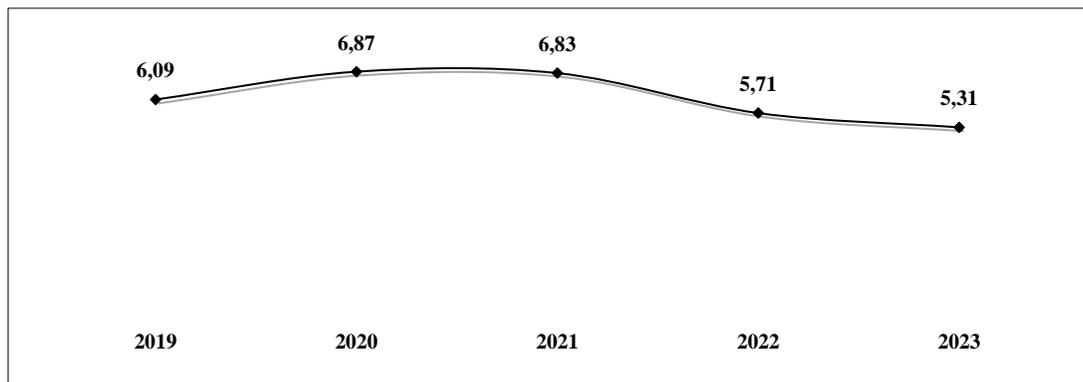
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun dari 65,49 persen menjadi 64,73 persen. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja. Membaiknya kinerja ekonomi turut berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja yang tersedia dan hal tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran, tercermin dengan meningkatnya kembali angka TPAK pada tahun 2023 menjadi 65,57 persen.



Gambar II.58
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Tahun 2023, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 19,74 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai

19,21 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor informasi dan komunikasi mencapai 0,57 persen.



Gambar II.59

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (persen)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

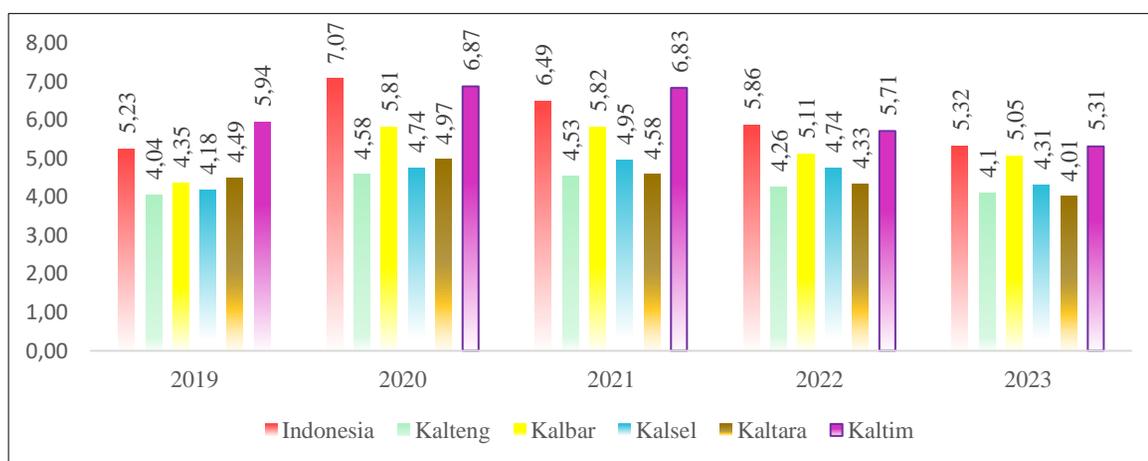
Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang mencapai 6,87 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,94 persen. Peningkatan ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate* dan jasa perusahaan. Namun, sampai dengan tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan mencapai 5,31 persen, penurunan terjadi dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 yang telah berkurang ditandai dengan kinerja perekonomian yang meningkat.

Tabel II.58
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (persen)

No	KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	4,55	4,52	5,70	4,88	4,72
2	KUBAR	5,08	4,97	5,14	4,62	6,16
3	KUKAR	5,98	5,70	5,66	4,14	4,05
4	KUTIM	5,53	5,45	5,35	6,48	5,93
5	Berau	5,08	5,08	5,82	5,02	4,95
6	PPU	6,26	6,22	2,95	2,12	2,07
7	MAHULU	3,69	3,49	3,14	2,44	2,09
8	Balikpapan	7,29	9,00	8,94	6,90	6,09
9	Samarinda	5,87	8,26	8,16	6,78	5,92
10	Bontang	9,19	9,46	9,92	7,81	7,74

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Pada tahun 2023 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 7,74 persen, Kabupaten Kutai Barat sebesar 6,16 persen dan Kota Balikpapan sebesar 6,09 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah ditorehkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,07 persen. Jika dilihat dari perbandingan regionalnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2023 masih menjadi yang tertinggi di antara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada sedikit di bawah tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,32 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



Gambar II.60
Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS RI, 2023)

Meskipun TPT Kaltim mengindikasikan penurunan, namun peringkat TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini

mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada Februari 2023 sebesar 6,37% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Secara nasional, Kaltim menempati 5 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 5,45%

Salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada pencari kerja terutama yang telah mendaftarkan ke dalam database pada Disnakertrans. Untuk kemudian akan disesuaikan dengan data yang bersumber dari perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya.

Tabel II.59
Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (persen)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	26.148	30.719	22.358	47.254	37.992
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	7.690	5.538	3.531	12.334	10.438
3	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	29,41	18,03	15,79	26,10	27,47

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2024

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2023 adalah Kota Samarinda mencapai 56,45 persen dan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 45,62 persen.

Tabel II.60
 Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	2.555	515	20,16
2	KUBAR	3.293	26	0,79
3	KUKAR	2.922	1.333	45,62
4	KUTIM	4.103	1.151	28,05
5	Berau	6.857	1.588	23,16
6	PPU	1.159	252	21,74
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	4.421	815	18,43
9	Samarinda	4.138	2.336	56,45
10	Bontang	8.544	2.422	28,35

Sumber: *Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2023*

H. Transmigrasi

Kondisi transmigrasi di Kalimantan Timur tersebar pada beberapa daerah di Kalimantan Timur. Pada Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 104 Tahun 2017 ditetapkan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur seluas 152,76 Ha kemudian pada tahun 2017 Kawasan Transmigrasi ditetapkan di Kerang Kabupaten Paser seluas 125,30 Ha. Tahun 2019 melalui keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 87 Tahun 2019 ditetapkan kawasan transmigrasi di daerah Muara Koman Kabupaten Paser.

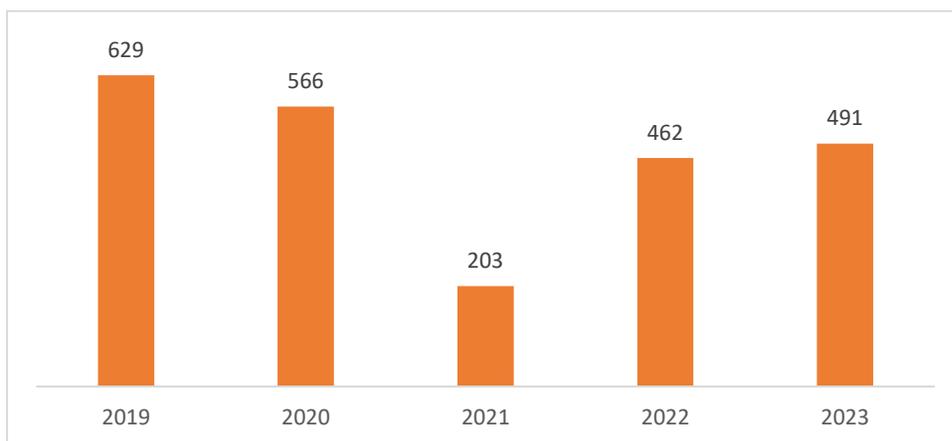
Perkembangan penempatan transmigran sejak tahun 2018 mencapai 40 Kepala Keluarga yang ditempatkan di Kladen, kemudian pada tahun 2021 terdapat penambahan 15 kepala Keluarga, serta pada tahun 2023 sebanyak 5 Kepala Keluarga.

I. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 629 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 491 kasus

di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Gambar II.61
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2024)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data simfoni tahun 2023 terdapat jumlah kekerasan pada anak sebanyak 491 kasus.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup

tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut.

Tabel II.61
Jumlah penduduk disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Disabilitas Fisik	Disabilitas Fisik Mental	Disabilitas Netra/Buta	Disabilitas Mental Jiwa	Disabilitas Rungu/Wicara	Disabilitas Lainnya
1	Paser	54	13	27	179	80	12
2	Kukar	443	110	182	579	330	111
3	Berau	44	13	24	229	69	21
4	Kubar	88	16	44	160	112	62
5	Kutim	99	13	56	201	89	47
6	PPU	128	37	55	132	105	32
7	Mahakam Ulu	52	11	5	34	30	15
8	Balikpapan	146	23	44	574	211	66
9	Samarinda	108	21	69	716	184	40
10	Bontang	90	16	26	276	79	45
JUMLAH		1.252	273	532	3.080	1.289	451

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2024

Disabilitas/kecacatan merupakan bagian dari keberagaman. Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

J. Pangan

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel II.62
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Paser	72,25	82,26	80,48	81,76	83,70
2.	KUBAR	66,85	54,98	57,76	66,94	58,39
3.	KUKAR	84,51	84,28	84,73	84,44	85,53
4.	KUTIM	57,58	73,13	66,19	60,09	65,76
5.	Berau	84,19	85,34	86,77	86,16	85,33
6.	PPU	84,26	86,20	86,24	85,51	87,40
7.	MAHULU	58,73	63,17	52,75	53,29	57,68
8.	Balikpapan	88,74	87,66	88,68	89,47	91,40
9.	Samarinda	85,19	80,75	83,72	84,66	88,97
10.	Bontang	85,34	84,59	87,24	84,21	88,76
Kalimantan Timur		76,90	78,24	77,46	77,65	79,29

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 77,65 mengalami peningkatan dari IKP Tahun 2021 yang sebesar 77,46. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, dari 7 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu dengan indeks ketahanan pangan 57,68 menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang tergolong sebagai wilayah rentan, dimana suatu kabupaten dinilai rentan mengalami kerawanan pangan apabila memperoleh skor indeks dibawah 59,98. Dengan kondisi seperti ini maka diperlukan pendalaman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi terutama di Kabupaten Mahakam Ulu.

Seiring dengan meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, apabila dilihat hingga level desa ternyata terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk jumlah desa rawan pangan. Pada Tahun 2022 desa di Kalimantan Timur yang masih termasuk dalam kategori rawan pangan sebanyak 411 desa, namun di Tahun 2023 hanya tersisa 229 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sudah baiknya intervensi pemerintah terutama dalam menangani kerentanan pangan di desa-desa rawan pangan.

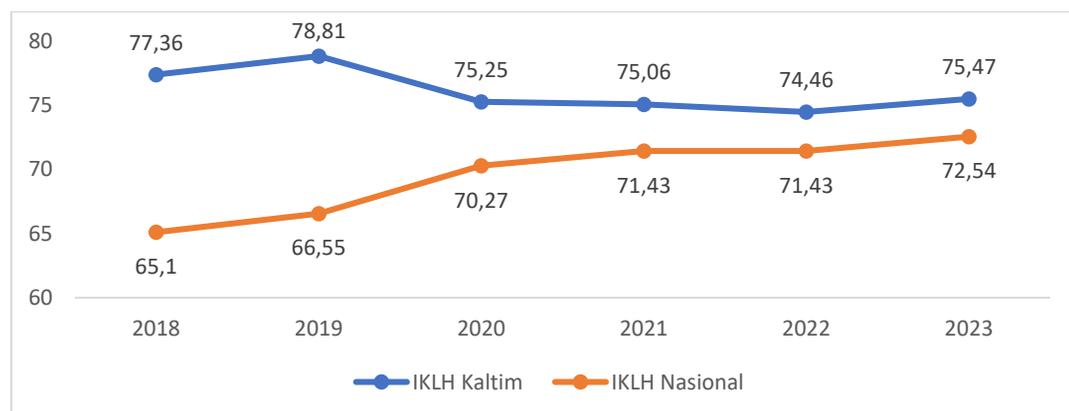
Tabel II.63
Jumlah Desa Rawan Pangan Berdasarkan Hasil FSVA Kabupaten/Kota
Tahun 2022 dan 2023

No	Kab/Kota	Jumlah		2022			2023		
		Kecamatan	Desa	Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi	Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi
1.	Paser	10	144	24	16,67	5,84	22	15,28	9,61
2.	KUBAR	16	194	62	31,96	15,09	48	24,74	20,96
3.	KUKAR	18	237	85	35,86	20,68	21	8,86	9,17
4.	KUTIM	18	141	96	68,09	23,36	72	51,06	31,44
5.	Berau	13	110	56	50,91	13,63	22	20,00	9,61
6.	PPU	4	54	20	37,04	4,87	1	1,85	0,44
7.	MAHULU	5	50	21	42,00	5,11	9	18,00	3,93
8.	Balikpapan	6	34	18	52,94	4,38	11	32,35	4,80
9.	Samarinda	10	59	23	38,98	5,60	13	22,03	5,68
10.	Bontang	3	15	6	40,00	1,46	0	00,00	0,00
Kalimantan Timur		103	1.038	411	39,60	100,00	229	22,06	100,00

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi KALTIM, 2022

K. Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.



Gambar II.62
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2023)

Pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami kenaikan angka indeks dari 77,36 di tahun 2018 menjadi 78,81 (predikat baik, $70 < \text{IKLH} \leq 80$) dan terus menurun pada tahun 2022 menjadi 74,46. Menurunnya IKLH tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas

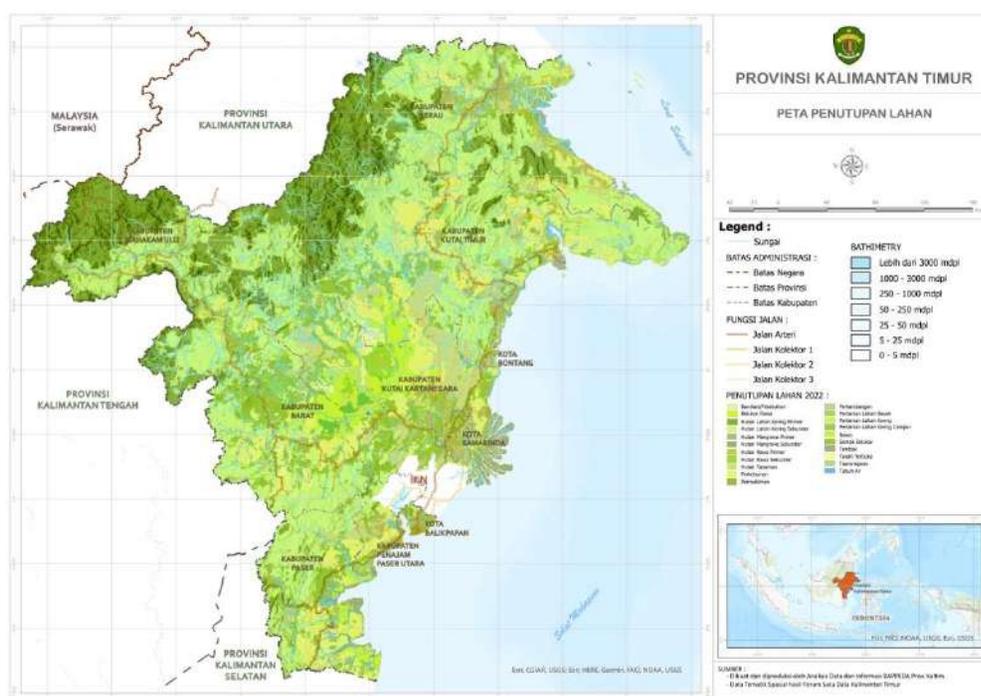
Air Sungai. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 kemudian menurun menjadi 74,46, namun kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 75,47. Capaian kedua tahun ini berada di bawah Target P-RPJMD Kaltim 2019-2023 pada tahun bersangkutan yakni masing-masing, 76,05 dan 76,15. Adapun penurunan capaian IKLH pada tahun 2022 disebabkan adanya penurunan angka indeks pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kaltim masih belum tercapai apabila dibandingkan dengan target di P-RPJMD.

Tabel II.64
Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

INDEKS	2019	2020	2021	2022	2023
IKA	77,09	53,7	51,92	53,02	52,64
IKU	89,42	89,06	88,84	87,59	89,64
IKL	72,12	79,76	82,21	81,85	83,86
IKAL	-	83,51	85,4	81,45	81,36

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2023

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar II.63
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak hanya diukur di tingkat Nasional dan Provinsi saja namun juga ada pada tingkat Kabupaten/Kota. Jika dilihat melalui capaian IKLH dari 10 Kabupaten/Kota di Tahun 2023 yang ada di Kalimantan Timur, Capaian IKLH Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan capaian terbaik, yakni 83,19 dengan Rating Baik. Capaian ini didukung oleh Capaian Indeks Kualitas Lahan yang sempurna yakni 100 Indeks. Sementara Kabupaten/Kota dengan capaian Rating Sedang adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda. Selengkapnya dapat terlihat di tabel berikut:

Tabel II.65
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	Paser	54,09	90,46	71,20	72,57	BAIK
2	KUBAR	53,08	91,80	70,30	72,53	BAIK
3	KUKAR	50,53	91,53	74,62	72,41	BAIK
4	KUTIM	49,47	87,00	83,48	72,12	BAIK
5	Berau	53,33	85,17	93,76	75,08	BAIK
6	PPU	50,95	90,96	65,10	70,25	BAIK
7	MAHULU	61,28	94,43	100	83,19	BAIK
8	Balikpapan	54,50	89,98	48,91	67,64	SEDANG
9	Samarinda	50,00	85,31	29,92	59,90	SEDANG
10	Bontang	52,22	89,74	49,44	66,81	SEDANG

Sumber: ppkl.menlhk.go.id/iklh

Kabupaten/kota yang memiliki capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang baik adalah kabupaten/kota yang menghasilkan capaian Indeks Kualitas Lahan yang baik pula. Hal ini disebabkan porsi perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang lebih besar dalam rumus perhitungan IKLH, yakni 40%.

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64%), energi (17%), limbah (17%) dan pertanian (2%).

Strategi transformasi ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan pembangunan dengan cara meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sumber daya alam yang ada selama ini. Dengan melihat semakin menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan, maka Pemprov Kaltim melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih

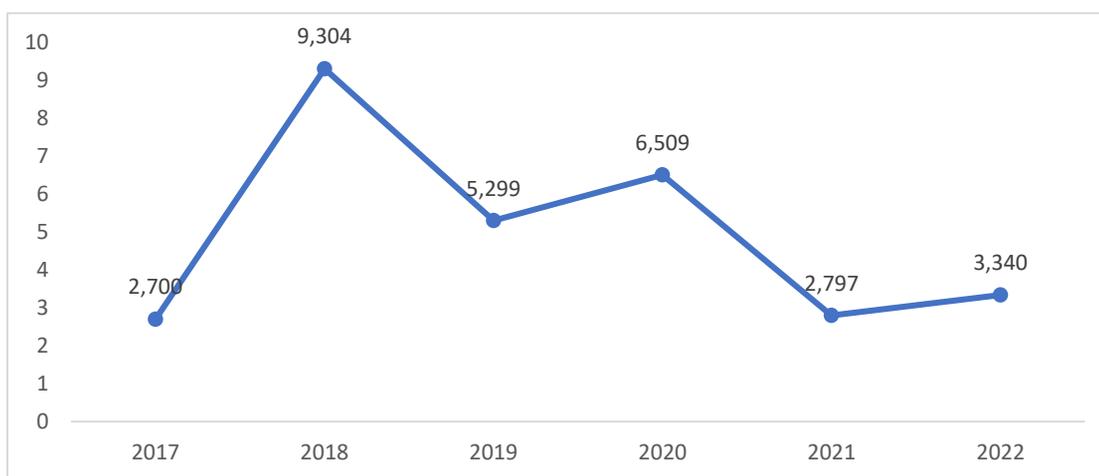
seimbang, antara berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam yang terbarukan, yang dilakukan secara sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengarahkan rencana pembangunan di Kalimantan Timur sejalan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan strategi pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan disertai upaya mengarusutamakan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota di Kaltim.

Dalam Konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) adalah suatu keharusan untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar Pemerintah Daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK, meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi dan penyerapan GRK. Selain itu, tahapan PEP ini dapat menjadi momentum untuk penyiapan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan/Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan RAD GRK di tahun-tahun berikutnya. Sejak Tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2022 total aksi yang sudah disetujui dan final di PEP/Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 836 aksi.

Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga memiliki masalah yang populer terjadi di Provinsi yang memiliki kota besar lainnya di Indonesia, yakni permasalahan pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak agar penanganannya dilakukan secara serius dan cepat tanggap. Maka dari itu dalam menentukan tingkat pencemaran lingkungan dilakukan pengukuran Indeks Pencemaran Lingkungan. Indeks Pencemaran Lingkungan adalah Indeks Pencemaran (IP) dari pemantauan Kualitas Air yang kemudian dilakukan penghitungan indeks pencemarannya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Tahun 2021 capaian Indeks Pencemaran 2,797 (Status Cemar Ringan) dari rata-rata 27 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target yang ditetapkan adalah 8 (Status Cemar Sedang) artinya Indeks Pencemaran pada tahun 2021 masih dibawah status cemar sedang, yaitu cemar ringan. Tahun 2022 data Indeks Pencemar yang dihitung adalah 3,34

(Cemar ringan) dari 179 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target tahun 2022 yang ditetapkan adalah 8 (cemar sedang) artinya capaian sementara tahun 2022 masih dibawah status mutu air cemar sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IP tahun 2021 (2,797) dan IP sementara tahun 2022 (3,34) terdapat selisih nilai yaitu 0,543, hal ini disebabkan adanya pada Tahun 2022 nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 179 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemar pada Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.64
 Indeks Pencemaran Lingkungan
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022
 (Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022)

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF *Carbon Fund* dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Tabel II.66
 Angka Penurunan Emisi
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	11,76	10,21	27,73	25,22	26,24

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2023

Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 26,24 Juta Ton CO₂ eq atau sebanyak 49,46 persen pada tahun 2023. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) di P-RPJMD Kaltim 2019-2023, yakni 29,33. Fluktuatif capaian penurunan emisi disebabkan tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

L. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD di Tahun 2023 bernilai 100 persen yang didapat dari Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun dengan realisasi dan target sebanyak 2 kali. Pada Indikator Pemanfaatan data kependudukan LPPD OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian 6 kerja sama sebanyak 10 kabupaten/kota.

Tabel II.67

Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (persen)	84,83	-	-	-	-
2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (persen)	92,69	-	-	-	-
3	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk (kebijakan)	0	0	6	6	-
4	Kebijakan terkait pencatatan sipil (kebijakan)	0	0	6	6	-
5	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan (kebijakan)	0	0	5	5	-
6	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD (kali)	-	-	2	2	2
7	Pemanfaatan data kependudukan lppd (%)	-	-	18,92	26,47	60

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

M. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki target sasaran desa prioritas sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN sebanyak 62 kawasan dan 30 sasaran Kawasan perdesaan non KPPN yang sudah memiliki indeks perkembangan kawasan perdesaan. Dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Pada Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan berupa potensi wisata terpadu, sedangkan pada Kabupaten Berau memiliki potensi Minapolitan (Udang dan Bandeng). Juga potensi Padi yang terdapat terdapat Pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II.68
Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
Provinsi Kalimantan Timur

NO	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kawasan Perdesaan	Potensi
1.	Kutai Timur	Sangatta Selatan	- Sengata Selatan - Sangkima - Teluk Sangkima	Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 050/K.433/2018 dan Perbup No 27 Tahun 2018 tentang RPKP	Wisata Terpadu
		Kecamatan Teluk Pandan	- Kandolo - Teluk Pandan		Wisata Terpadu
2.	Berau	Pulau Derawan	- Pulau Derawan - Teluk Semanting	Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb yang ditetapkan	Minapolitan (Udang, Bandeng)

			<ul style="list-style-type: none"> - Pegat Bertumbuh - Kasai - Tanjung Batu 	dalam Kep. Bupati Berau Nomor 227 tahun 2017 dan Nomor 236 tahun 2017	
3.	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	<ul style="list-style-type: none"> - Perjiwa - Embalut - Manunggal Jaya - Kerta Buana - Karang Tunggal - Bukit Raya - Bukit Pariaman - Bangun Rejo 	Kawasan Pedesaan PKP Agromina Pastoral yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2017 dan Keputusan Bupati No. 310/SK-BUP/HK/2017	Agromina Pastoral Pertanian, Peternakan dan Perikanan)

Sumber: Renstra Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT 2021

Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.69

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	-	90,00	68,52	70,58
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	-	0,66	92,25	28,02
3	Indeks Desa Membangun	0,6238	0,6752	0,7071	0,7320	0,7526
4	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	35	35	30	35	45
5	Jumlah Bumdes Yang Aktif	304	323	353	388	433
6	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80	80	80	80	80
7	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	1	1	-	-	-
8	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	18	18	10	10	10
9	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan	150	165	150	150	150

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
	masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan					
10	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	1	1	-	-	-
11	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	15	363	30	35	45
12	Jumlah Desa berkembang	15	329	-	339	263
13	Jumlah Kampung/Desa Iklim	-	40	30	35	45
14	Desa Tertinggal (Desa)	285	128	78	17	5
15	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	-	-	30	35	45
16	Desa yang telah melaksanakan Penataan	-	-	7	7	7
17	Kampung/Desa Iklim + (Desa	-	-	25	27	27
18	Meningkatnya Desa Berkembang (Desa)	285	128	30	35	30
19	Desa Berkembang	-	-	30	30	30
20	Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes)	304	323	353	388	433
21	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	-	-	30	30	30

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

N. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Indikator kinerja lainnya pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.70

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

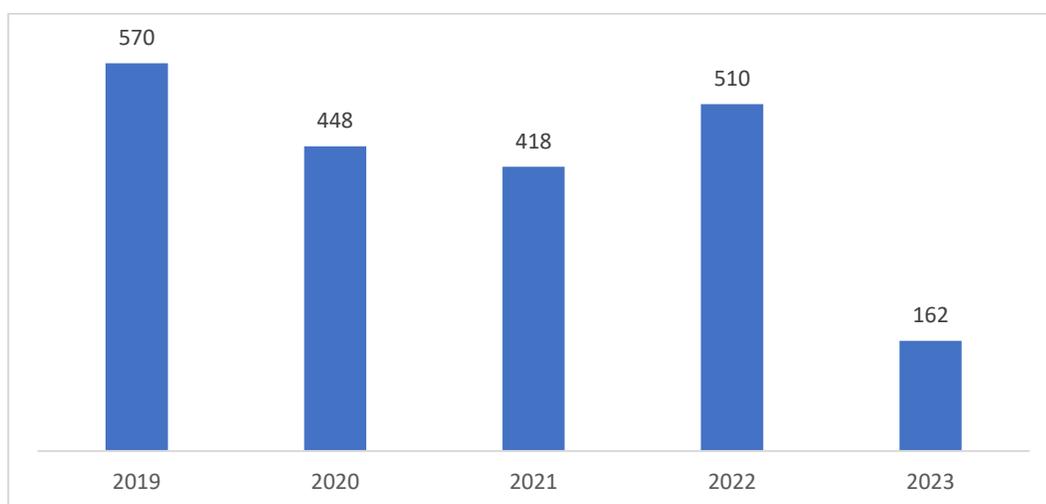
No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	-	-	1	1	1
2	Jumlah dokumen grand desain pembangunan Kab/Kota dalam 5 aspek (5 Pilar)	-	-	1	-	-

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
3	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	160	-	-
4	Peningkatan jumlah peserta KB	-	-	160	-	-
5	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	140	-	-
6	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	-	140	-	-
7	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	-	2,51	2,16	2,18
8	Kampung KB	160	175	-	-	-
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	-	-	50,82	55,50	62,46
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	-	-	22,18	29,70	14,06

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

O. Perhubungan

Terjadi penurunan jumlah kecelakaan di Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data kecelakaan pada tahun 2019 mencapai 570 kasus kecelakaan, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 162 kasus kecelakaan. Hal yang mengakibatkan penurunan kasus kecelakaan adalah pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas-ruas jalan provinsi di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sinergitas dan koordinasi antar *stakeholders* untuk menurunkan angka kasus kecelakaan semakin baik. Hal tersebut dicapai melalui rapat – rapat koordinasi secara berkala antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Polda Kaltim dan *Stakeholders* lainnya.



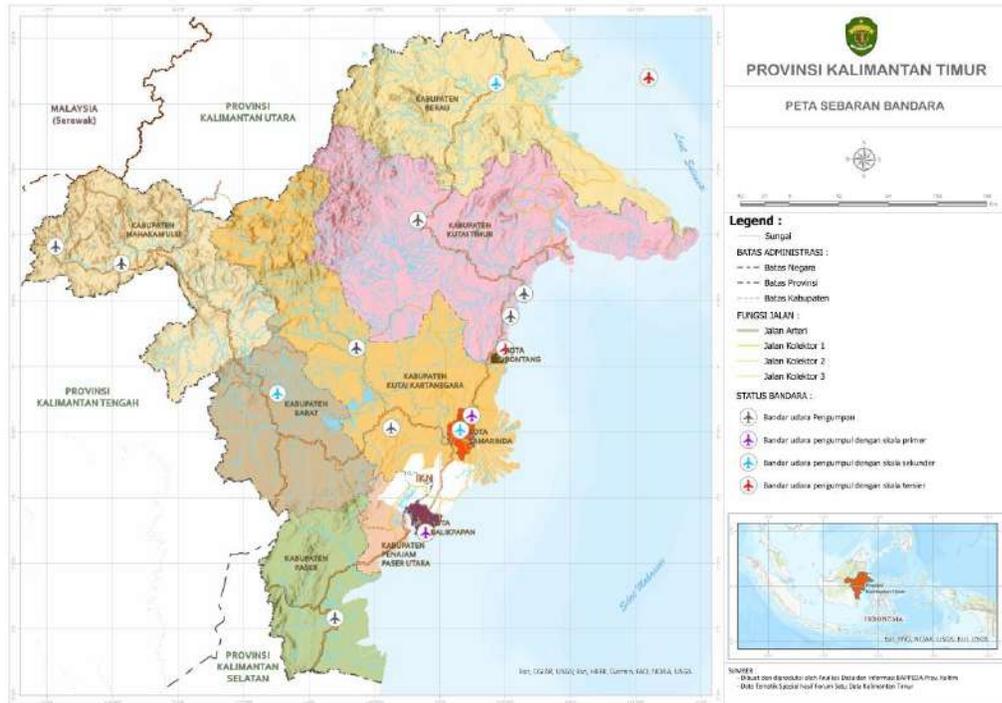
Gambar II.65
 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019 – 2023
 (Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2024)

Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian yang terletak di Kota Balikpapan. Selain itu layanan transportasi udara yang cukup memadai juga difasilitasi oleh Bandara Kalimantan di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017, namun kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datar Dawai.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang *runway* 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di daerah perbatasan, dan Bandara Paser di Kabupaten Paser pada wilayah Selatan Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.66
Peta Bandara Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021)

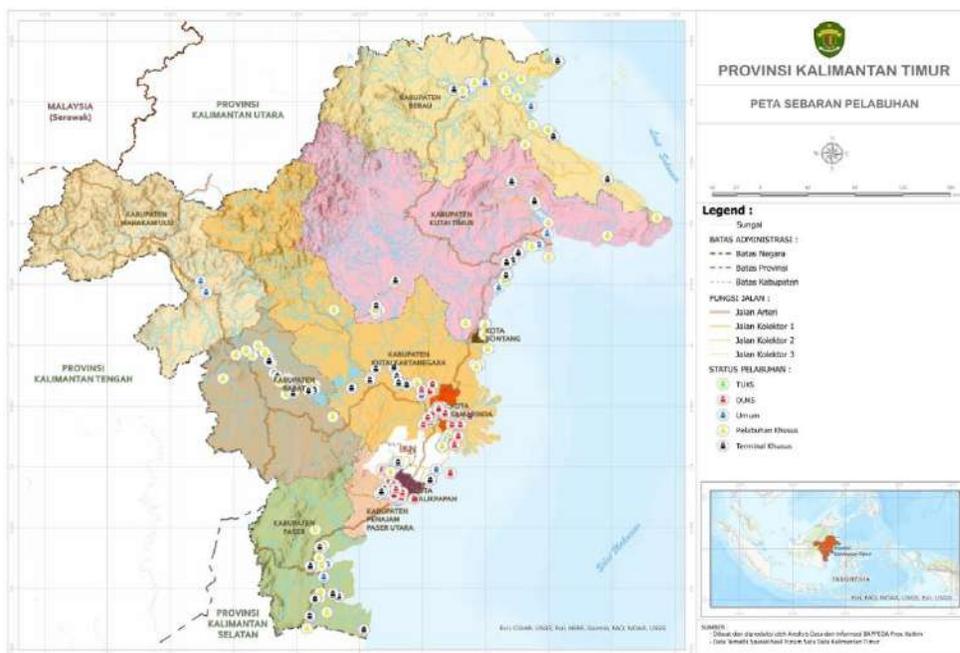
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal (*reliable*) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hierarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional. Selanjutnya pada tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut mengalami perubahan menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel II.71
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: Kementerian Perhubungan Provinsi KALTIM

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggara, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.



Gambar II.67
Peta Pelabuhan Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.

P. Komunikasi Dan Informatika

1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada tahun 2022 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,11 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 2,22. Hal ini disebabkan karena perubahan aspek penilaian dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2018 hingga 2020 pedoman evaluasi yang dilakukan menggunakan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan tahun 2021 hingga saat ini menggunakan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel II.72
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	3,04	3,14	2,22	2,11	2,91

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Pelaksanaan SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga diikuti dengan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data 2023, terdapat 3 (enam) daerah yang memiliki SPBE dengan predikat Cukup, sedangkan 1 (satu) daerah masih berpredikat Kurang. Ini menunjukkan masih perlunya penyiapan dan peningkatan penerapan SPBE baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Tabel II.73
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

INSTANSI	INDEKS SPBE	PREDIKAT
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,91	BAIK
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2,54	CUKUP
Pemerintah Kab. Paser	2,90	BAIK
Pemerintah Kab. Berau	2,02	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Barat	2,50	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Timur	3,20	BAIK
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,85	BAIK
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1,11	KURANG
Pemerintah Kota Samarinda	3,14	BAIK
Pemerintah Kota Balikpapan	3,75	SANGAT BAIK
Pemerintah Kota Bontang	2,83	BAIK

Sumber : Kepmenpan RB No. 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pentingnya peran koperasi dan UKM Koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha mikro kecil dan menengah. Pembangunan dan pembinaan Koperasi dan UKM telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum optimal mengubah struktur perekonomian daerah. Pentingnya peran koperasi dan UKM di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Koperasi dan UKM merupakan bentuk perekonomian kerakyatan di Kalimantan Timur. Adapun jumlah koperasi aktif tahun 2023 adalah sebanyak 2.995 Koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 6.197 Koperasi. Secara rinci perkembangan aktivitas koperasi dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel II.74
Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023

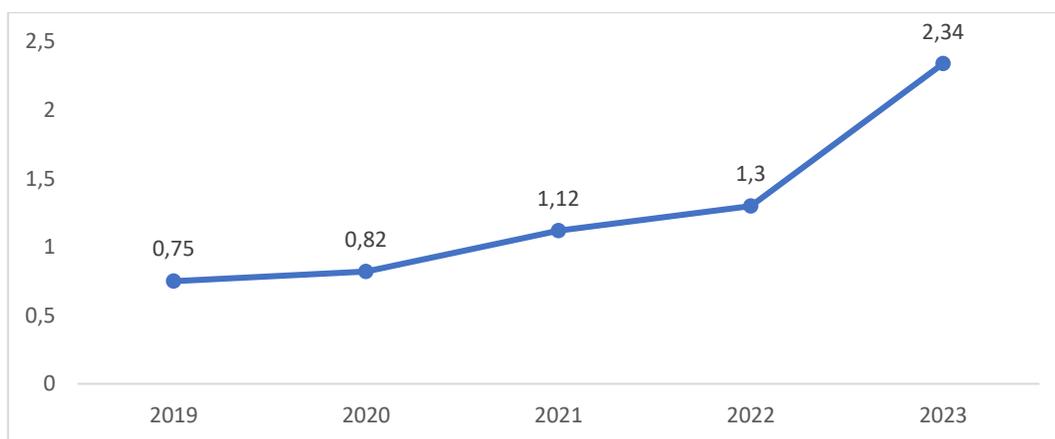
No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	2.832	2.751	2.844	2.885	2.995
2	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	583	351	457	446	646
3	Jumlah Seluruh Koperasi	5.664	5.619	5.676	5.809	6.197
4	Jumlah Anggota Koperasi	82.054	57.381	89.465	94.882	164.451

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024

Pada tabel diatas terlihat jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan jumlah seluruh koperasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan kurangnya

pemahaman para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi. Disamping itu masih rendahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi syarat untuk menjadi koperasi yang bisa dikatakan aktif dan sehat.

Jumlah anggota koperasi di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kondisi tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggota yakni 57.381 orang. Secara umum kendala penurunan di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, namun kendala lain yang dihadapi adalah berkurangnya modal, berkurangnya pelanggan, dan harga produk yang menurun. Hal ini juga memberi pengaruh pada jumlah volume usaha koperasi yang tergambar pada gambar berikut.



Gambar II.68

Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019–2023 (Triliun Rupiah)

(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024)

Jumlah volume usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah volume usaha koperasi tahun 2019 dan 2020 berada di bawah 1 Triliun Rupiah. Tahun 2023 jumlah volume usaha koperasi kembali pulih mencapai 2,34 Triliun Rupiah yang diikuti dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, jumlah anggota koperasi, dan koperasi yang melaksanakan RAT.

Sementara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pergerakan perekonomian daerah khususnya perekonomian masyarakat. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu bertahan lebih baik di saat pandemi COVID-19. Secara rinci jumlah UKM berdasarkan jenis usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel II.75
Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten/Kota
Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Industri			Dagang	Jasa	Total
		Kuliner	Industri Pengolahan	Kerajinan			
1	Paser	10.331	702	47	28.161	6.430	45.671
2	KUBAR	1.348	-	1.164	9.022	2.443	13.977
3	KUKAR	12.852	934	130	45.998	514	60.428
4	KUTIM	11.221	1.204	30	336	875	13.666
5	Berau	4.509	62	53	9.467	851	14.942
6	PPU	3.806	489	38	7.017	1.879	13.229
7	MAHULU	37	-	13	446	60	556
8	Balikpapan	8.528	2.488	121	15.297	10.341	36.775
9	Samarinda	45.653	1.522	591	44.851	11.107	103.724
10	Bontang	8.558	3.788	115	15.905	4.711	33.077
	Jumlah	106.843	11.189	2.302	176.500	39.211	336.045

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sebanyak 336.045 UMKM. Jumlah terbanyak berada di Kota Samarinda yakni 103.724 UMKM, sedangkan terbanyak kedua adalah Kabupaten Paser sebanyak 45.671 UMKM. Jenis usaha UMKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur beragam, mulai dari kuliner, industri pengolahan, industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Jenis usaha didominasi pada usaha dagang sebanyak 176.500 UMKM dan usaha kuliner sebanyak 106.843 UMKM. Banyaknya usaha dagang dan kuliner ini tidak dipungkiri karena kemudahan dalam penyediaan modal dan banyak peminat. Sedangkan jenis usaha paling sedikit adalah industri kerajinan yakni 2.302 UMKM.

M. Penanaman Modal

1) Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel II.76
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tahun	PMDN	PMA	Total
2019	2.227	903	3.130
2020	3.924	778	4.702
2021	9.291	1.034	10.325
2022	6.706	1.055	7.711
2023	15.490	1.991	17.481

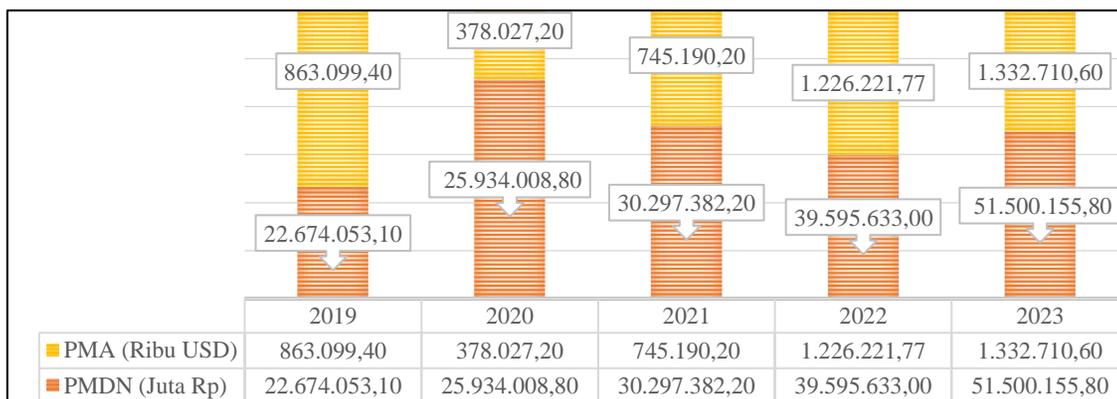
Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2024

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah proyek PMDN/PMA di Kalimantan Timur sebanyak 10.325 proyek, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 4.702 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 5.367 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 256 proyek. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Total proyek pada tahun 2022 menurun menjadi 7.711 proyek, namun kembali meningkat pada tahun 2023 dengan 15.490 proyek PMDN dan 1.991 proyek PMA. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 4.812 proyek dan di Kota Samarinda dengan jumlah 3.856 proyek. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 802 proyek.

2) Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri pada tahun 2023 mencapai Rp 51,5 triliun dengan 5 (lima) sektor utama yakni Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi (36,52%), Pertambangan (31,62%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (8,98%), Industri Makanan (4,88%), dan Transportasi, Gudang & Komunikasi (3,42%). Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai US\$ 1.332,71 juta dengan 5 (lima) sektor utama yaitu Pertambangan (29,42%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (14,63%), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (12,95%), Industri Mineral Non Logam (11,63%), dan Transportasi, Gudang & Komunikasi (10,53%). Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa pengaruh yang

baik terhadap nilai investasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.



Gambar II.69
Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023
(Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2024)

Kalimantan Timur telah dikenal sebagai provinsi yang punya banyak kekayaan alam, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, maupun sektor lainnya seperti Agrikultur, Pariwisata dan Industri pengolahan. Hal ini menjadi daya tarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Di samping itu, kehadiran IKN Nusantara tentu menjadi potensi yang baik untuk investasi ke depan.

Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, mulai tahun 2019-2023 sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, namun sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sektor yang paling dominan di tahun 2020 adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi yang mencapai Rp 7.965,22 miliar dan meningkat tajam di tahun 2021 hingga mencapai Rp 15.145,34 miliar. Investasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai Rp 5.859,33 miliar meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3.818,59 miliar diikuti sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 4.828,00 miliar. Mulai pada tahun 2022 sektor pertambangan kembali menjadi sektor paling dominan mencapai Rp 15.012,38 miliar dan terus meningkat dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri mencapai yakni Rp 16.497,94 miliar. Sektor lain yang juga berkontribusi cukup besar adalah sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mencapai

Rp 19.052,13 miliar, serta sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan mencapai Rp 4.686,63 miliar. Sektor Pertambangan kembali mendominasi dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di tahun 2023 mencapai Rp 16,50 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya momentum membaiknya harga komoditas batubara pada level tinggi dan menjadi faktor pendorong investasi di sektor pertambangan.

Tabel II.77
Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

No.	Sektor Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	4.278.148,30	4.738.083,60	4.828.002,20	3.650.817,60	4.686.630,20
2.	Kehutanan	283.625	125.549,60	73.973,60	346.853,60	996.226,90
3.	Perikanan	.	3,00	0,50	2,00	-
4.	Pertambangan	8.712.257,70	3.818.587,60	5.859.330,30	15.012.379,10	16.497.941,30
II.	Sektor Sekunder					-
1.	Industri Makanan	569.890,60	1.397.339,40	671.841,30	2.390.781,50	2.545.477,20
2.	Industri Tekstil	.	-	2,00	431,00	848,00
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	-	-	-	-
4.	Industri Kayu	350.224	97.509,90	5.996,00	24.001,70	356.202,10
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	0	5,00	500,00	-
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	444.145,60	7.965.221,90	15.145.338,40	14.914.625,40	19.052.132,50
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	9.000	70,80	-	7.209,90	2.301,40
8.	Industri Mineral Non-Logam	292.133,10	95,00	2.351	18.184,90	48.549,30
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	.	5.000	10,30	521.796,50	1.013.785,00
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	0	39,50	4.381,50	69.421,90
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	151.706,50	3.626,30	9.221,80	21.487,30	329.353,20
12.	Industri lainnya	509,50	70.348,60	5.200,50	48.889,00	14.923,00
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	2.021.363,60	759.122,70	298.896,80	165.780,50	713.903,90
2.	Konstruksi	1.223.384,70	5.777.776,90	113.413,70	55.394,60	460.326,10
3.	Perdagangan dan Reparasi	341.327,60	218.379,90	295.260,00	687.631,40	937.115,20
4.	Hotel dan Restoran	1.086.261,80	25.127	55.384,90	199.549,50	356.393,40
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	940.606,30	459.299,20	1.503.072,30	573.564,20	1.785.135,10
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	345.944,10	53.687,40	840.351,30	286.654,80	1.168.443,70
7.	Jasa Lainnya	1.623.524,70	419.150	589.690,80	664.717,90	1.136.586,30
Total		22.674.053,10	25.934.008,80	30.297.382,20	39.595.633,00	52.171.695,70

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2024

Di samping itu pada realisasi investasi PMA, meskipun lapangan usaha pertambangan yang memiliki peranan terbesar di Kalimantan Timur tahun 2019-2023, namun justru mengalami penurunan nilai investasi PMA menjadi US\$ 392.072,60 Ribu dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 515.919,94. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan tahun 2021 yaitu sektor Industri Makanan yang mencapai US\$ 242.430,00 Ribu. Kondisi ini merupakan posisi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2023 yang hanya mencapai US\$ 119.900,40 Ribu.

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan masuknya investasi asing ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi baru yang dikembangkan serta tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerja sama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.

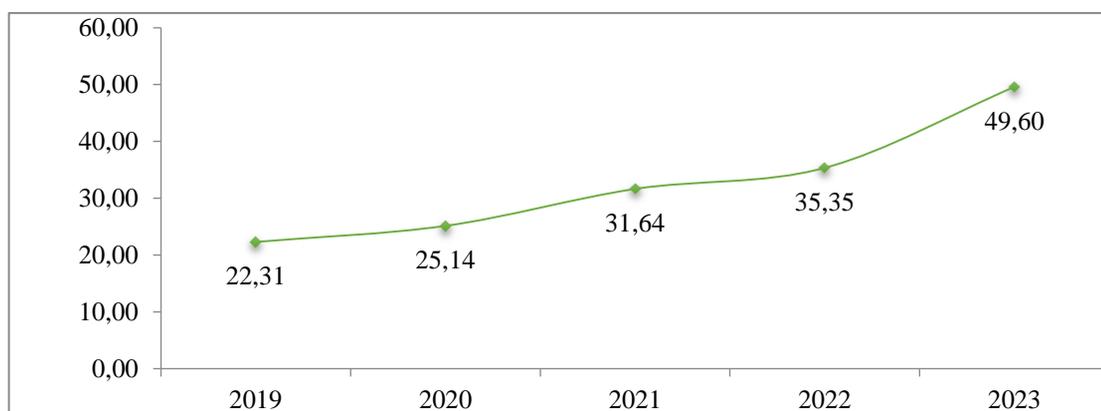
Tabel II.78
Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (US\$)

No	Sektor Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	185.796.300	67.781.500	58.097.000	190.013.892	195.033.000
2.	Kehutanan	2.751.700	2.071.400	2.330.000	37.276.491	46.304.700
3.	Perikanan	.	-	-	-	-
4.	Pertambangan	306.457.800	167.858.400	252.125.200	515.919.940	392.072.600
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri Makanan	14.264.600	41.235.500	242.430.000	96.106.592	119.900.400
2.	Industri Tekstil	.	-	-	-	-
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	-	-	-	-
4.	Industri Kayu	33.300	-	15.291.200	1.811.899	7.703.400
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	-	-	-	13.500
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	60.000	32.861.600	66.411.000	60.176.592	59.777.400
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	561.100	986.400	990.600	136.400	128.200

No	Sektor Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
8.	Industri Mineral Non-Logam	15.809.600	24.840.000	40.020.700	216.016.282	155.023.600
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	1.879.400	276.400	24.600	93.934.693	172.595.100
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	1.533.400	3.550.700	1.084.700	1.967.500	1.455.400
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	43.800	-	-	10.091.596	54.300
12.	Industri lainnya	134.600	-	-	-	285.800
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	280.607.900	278.800	-	-	2.274.400
2.	Konstruksi	.	-	-	-	177.900
3.	Perdagangan dan Reparasi	4.258.100	5.618.500	3.804.800	9.497.500	15.375.800
4.	Hotel dan Restoran	1.297.000	791.000	586.000	3.682.299	7.105.400
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	14.847.700	29.415.000	52.588.300	16.726.698	140.322.000
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	146.900	221.300	9.379.800	6.288.898	5.266.000
7.	Jasa Lainnya	32.616.200	240.700	26.300	6.574.500	11.841.700
Total		863.099.400	378.027.200	745.190.200	1.266.221.770	1.332.710.600

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang mencapai Rp 11,42 triliun dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya hingga mencapai Rp 49,60 triliun pada tahun 2023.



Gambar II.70

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Triliun Rp)

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2021 yang mencapai Rp 31,64 triliun ini terdiri dari investasi PMDN sebesar Rp 24,44

triliun dan PMA sebesar Rp 7,2 triliun. Peningkatan nilai investasi ini dipengaruhi oleh masih tingginya angka kasus Covid-19 di tahun 2021 sehingga kontribusi sektor usaha Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai Rp 15,145 triliun. Tahun 2023 Nilai Investasi sektor non migas dan batubara ditargetkan mencapai Rp 49,60 triliun.

N. Kepemudaan Dan Olah Raga

Setelah sukses meraih peringkat 7 besar pada PON XX Tahun 2021, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. dari hasil capaian tersebut Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam *Event* berskala nasional maupun internasional. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam *Event* berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Pada urusan kepemudaan dan olahraga ada 2 (dua) indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian serius dalam menunjang peningkatan sumber daya pemuda yaitu :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, indikator ini cukup menggambarkan tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, indikator ini mewakili peningkatan pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat.

Pemuda Kaltim diharapkan mampu memberikan dampak serta solusi ke depan dengan menjawab segala tantangan pembangunan di era revolusi industri 4.0 dan era *society* 5.0.

Pemuda Kaltim harus mampu bersaing dalam kepemimpinan dan kepeloporan ditingkat nasional agar memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang saat ini

masih belum optimal. Tingkat kepercayaan diri pemuda Kaltim harus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam kebebasan berpendapat yang bertujuan terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dan maju.

Tabel II.79
Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	305	1.280	305
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	45	45	57	23	21
Jumlah Klub Olahraga	1.109	1.109	1.112	1.087	1.087
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	105	105	105	205	205
Jumlah Kegiatan Olahraga	161	161	120	61	40
Jumlah Organisasi Olahraga	63	63	63	63	63

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2024

O. Statistik

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah bernilai 100 persen pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah berjumlah 37 OPD dari 37 OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja urusan statistik lainnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.80
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Tersedianya buku profil daerah	1	-	-
2	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	1	-	-
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	-	-
4	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	-	-
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	-	-
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan Statistik sektoral	100	-	-
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	-	-

No	Indikator	2021	2022	2023
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%
10	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	50	-	70
11	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Lingkup Daerah Provinsi	50	-	70

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

P. Persandian

Pada Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun 2023 bernilai 64,34, dimana didapat dari jumlah area penilaian sebanyak 645 dan jumlah nilai per area keamanan informasi sebanyak 415. Sedangkan untuk Indikator yang lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.81

Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	40	-	-
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	63,28	-	-
3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah	54,69	-	-
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	84,33	-	-
5	Tingkat keamanan informasi pemerintah	173,33	38,76	64,34
6	Indeks keamanan informasi	Level 2	-	Level 3
7	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Level 2	-	Level 3

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

Q. Kebudayaan

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
		Nutuk Beham	Nasional Nasional Nasional Nasional	
4.	Paser	Tari Ngarang Petis Udang Paser Ronggeng Paser Pentengan Gambus Paser	Nasional Nasional Nasional Nasional	
5.	Kutai Timur	Lom Plai Blontang Bekenjong Mandau	Nasional Nasional Nasional Nasional	
6.	Provinsi			1. Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkuliran Mangkalihat 2. Situs Penguburan Gunung Selendang

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel II.83
Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/Tradisi
1	Paser	83	1	58	9	7
2	Kubar	13	1	81	31	19
3	Kukar	187	2	69	39	8
4	Kutim	57	0	7	10	7
5	Berau	167	3	7	7	2
6	PPU	33	0	24	12	7
7	Mahulu	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	75	1	29	29	29
9	Samarinda	32	1	222	93	0
10	Bontang	4	0	40	6	0
	Kalimantan Timur	698	9	537	245	216

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2024

R. Perpustakaan

Perkembangan Indikator Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (*online* dan *onsite*) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuatif, dimana di tahun 2019 berjumlah 145.731 orang, meningkat di tahun 2022 menjadi 276.759 orang, namun menurun kembali di tahun 2023 menjadi 92.054 orang. Sedangkan untuk Indikator yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.84
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	-	-	8,1	-	11,98
2	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat	-	-	100	-	100
3	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	-	-	2	-	95,91
4	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (<i>online</i> dan <i>onsite</i>) (orang)	145.731	77.884	115.348	276.759	92.054
5	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (skor)	-	-	60,85	46,27	68,46
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	-	-	17,74	34,16	68,77

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

S. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan. Indikator kinerja bidang Kearsipan, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.85
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	64.30%	74,65%	74,88%
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 7.39 %	7,39	3,34	6,55

No	Indikator	2021	2022	2023
	111 kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
3	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	90	-	100
4	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	10	-	16
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip yang Autentik dan Terpercaya	125	-	100
6	Pelaksanaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 OPD	-	8 OPD
7	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	200	-	100
8	Penyelamatan Arsip OPD akibat Penggabungan, Pembubaran dan Pemekaran Organisasi	2 OPD	-	1 OPD

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

T. Kepegawaian

Peningkatan penerapan sistem merit yang menjadi salah satu prioritas kerja nasional Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan SDM. BKD Prov Kaltim telah mengikuti penilaian mandiri dalam penerapan sistem merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 mendapatkan poin sebesar 271 atau berada pada kategori “III” (Baik) dan belum mencapai pada kategori ke IV “Sangat Baik”.

Tabel II.86
Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim

No.	Aspek Skor Sistem Merit	2021	2022	2023
1.	Perencanaan Kebutuhan	35	35	35
2.	Pengadaan	32	36	38
3.	Pengembangan Karier	62,5	67,5	57,5
4.	Promosi dan Mutasi	17,5	17,5	20
5.	Manajemen Kinerja	45	42,5	52,5
6.	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	30	30	30
7.	Perlindungan dan Pelayanan	16	16	16
8.	Sistem Informasi	18	19	22
	Jumlah Nilai	256	263,5	271

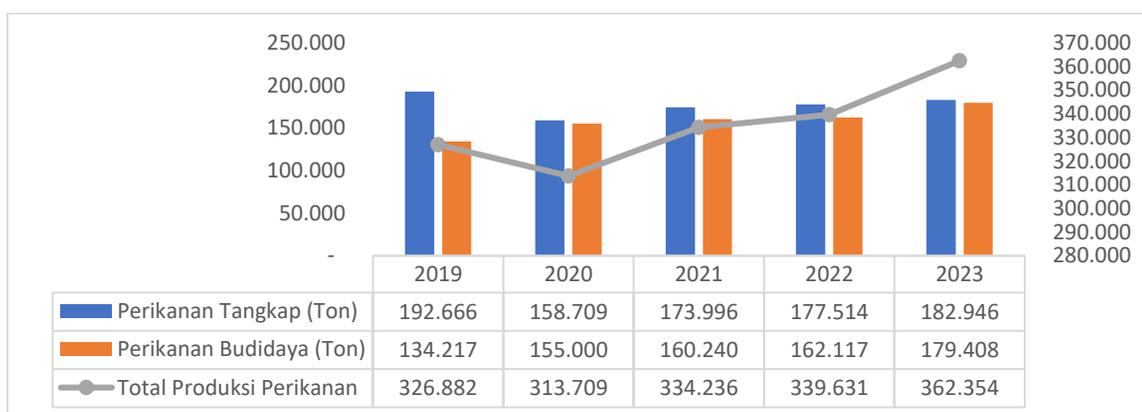
Sumber: KASN, 2024

2.1.3.1 Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan. lpe

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu, masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, serta sistem pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.



Gambar II.71
Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019–2023

(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2024)

B. Pariwisata

Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 - 2023 mulai mengalami peningkatan setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat terjadinya wabah COVID – 19 yang masuk ke Indonesia tahun 2020. Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara terjadi karena pulihnya perekonomian, banyaknya pelaksanaan event, dan pembangunan IKN. Untuk capaian jumlah kunjungan wisatawan (wisman – wisnus) pada tahun 2023 sebanyak 9.242.912 orang. Berdasarkan hasil evaluasi masih

terdapat hambatan dalam analisis pasar promosi pariwisata. Diharapkan dengan analisis tersebut promosi pariwisata bisa lebih terarahkan.

Tabel II.87
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2019–2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Balikpapan	2.878.561	1.072.569	1.431.862	1.748.085	2.534.015
2	Kota Samarinda	1.643.536	654.984	1.119.174	2.338.341	3.119.213
3	Kota Bontang	472.037	215.029	156.212	270.167	305.924
4	Kab Paser	7.501	32.965	89.931	118.045	105.838
5	Kab Penajam Paser Utara	57.576	20.263	114.869	164.532	859.041
6	Kab Kutai Kartanegara	1.394.171	692.689	617.018	1.041.254	1.530.444
7	Kab Kutai Timur	70.560	40.129	72.438	107.006	212.959
8	Kab Kutai Barat	56.125	25.929	10.871	103.435	145.795
9	Kab Mahulu	3.058	2.596	5.590	7.789	8.757
10	Kab Berau	292.692	127.176	141.398	397.054	420.926
Jumlah Se-Kalimantan Timur		6.875.817	2.884.329	3.759.363	6.295.708	9.242.912

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM, 2024

Tabel II.88
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2019–2023

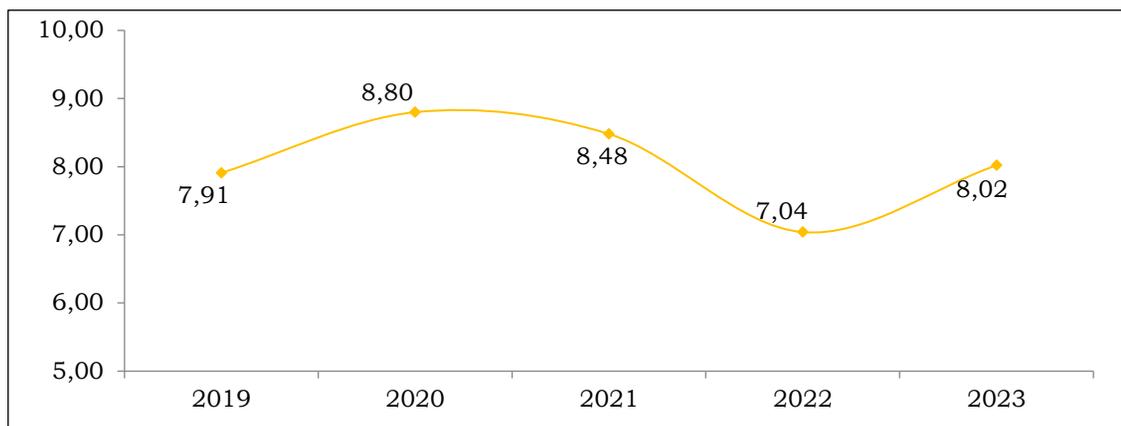
No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Balikpapan	56.577	16.510	17.458	11.704	24.511
2	Kota Samarinda	2.735	2.075	444	1.418	6.818
3	Kota Bontang	168	-	-	1.450	1.564
4	Kab Paser	-	-	1	1	28
5	Kab Penajam Paser Utara	8	26	-	2	40
6	Kab Kutai Kartanegara	3.872	557	46	632	1.530
7	Kab Kutai Timur	345	365	6	152	805
8	Kab Kutai Barat	273	28	5	243	158
9	Kab Mahulu	-	5	-	622	708
10	Kab Berau	8.323	220	85	283	1.666
Jumlah Se-Kalimantan Timur		72.301	19.786	18.045	16.507	37.828

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM, 2024

C. Pertanian

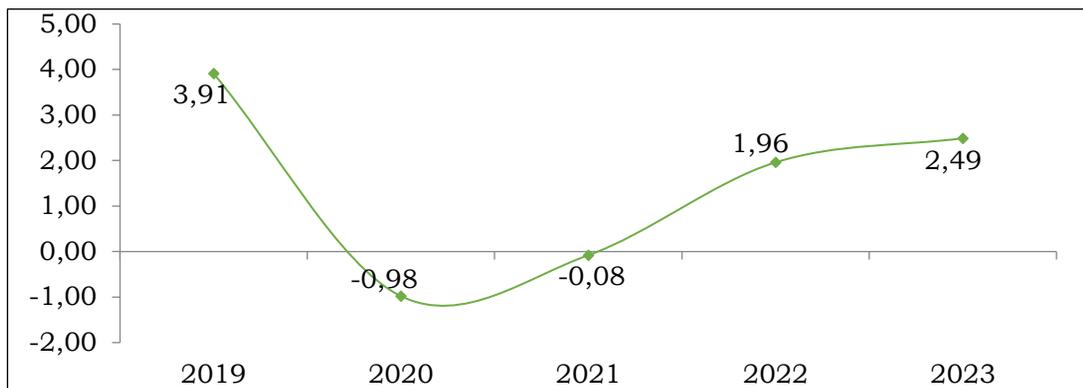
Kontribusi sektor Pertanian Arti Luas Tahun 2019-2023 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada Tahun 2023 kontribusi sektor mencapai 8,02%. Kontribusi sektor pertanian arti luas di Kaltim didominasi oleh kinerja sub sektor Tanaman Perkebunan dan sub sektor Perikanan. Kedua kontributor tersebut sangat dipengaruhi oleh harga komoditi di pasar dan biaya produksi. Sub sektor Tanaman Perkebunan pada tahun 2023 terjadi penurunan pendapatan di tingkat petani dikarenakan adanya pelarangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO)

yang mengakibatkan hasil panen petani tidak terserap dan berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani turun signifikan. Untuk Sub sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh biaya produksi dan iklim. Selain itu usaha pertambangan batu bara sejak 2021 sudah kembali bangkit, yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB belum dapat menyaingi kecepatan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan. Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertanian di Kalimantan Timur masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian.



Gambar II.72
Kontribusi Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Dari sisi Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian Arti Luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Sub sektor Pertanian Arti Luas mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada angka $-0,98$ dan $-0,08\%$. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang berkontraksi cukup pada tahun 2020 yaitu sebesar $-6,28$ dan kontraksi yang cukup dalam juga terjadi pada sub sektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar $-4,48$. Namun hal menggembirakan terjadi pada tahun 2022, dimana Laju Pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian telah mampu tumbuh positif sebesar $1,96$ persen dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi $2,49$ persen, dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.



Gambar II.73

Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum, terjadi penurunan produktivitas padi selama lima tahun terakhir dimana pada tahun 2019 mencapai 3,64 ton per hektar dan menurun hingga 3,77 ton/ha pada tahun 2023. Selain karena penurunan produksi, menurunnya produktivitas ini juga ternyata dikarenakan fluktuasinya luas panen secara umum. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi salah satunya adalah pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Namun program tersebut belum terlalu efektif untuk mewujudkan swasembada pangan.

Tabel II.89

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2019	69.708	253.818	3,64
2020	73.568	262.435	3,57
2021	66.269	244.678	3,69

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2022	64.970	239.425	3,69
2023	57.143	215.291	3,77

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,35 juta Ha dengan tingkat produksi mencapai 21,03 juta ton. Kemudian komoditas yang juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian adalah tanaman karet dengan luas tanam saat ini mencapai 125.258 Ha dan produksi sebesar 55,50 ribu ton pada Tahun 2023. Luasan dan Produksi ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada Tahun 2023 sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya. Namun peningkatan produksi perkebunan di Kalimantan Timur masih dihadapkan pada tantangan berupa mahalnya harga pupuk yang berpengaruh pada produksi tanaman. Serta masih adanya tanaman tua/rusak belum dilakukan peremajaan maupun rehabilitasi.

Tabel II.90
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	125.258	55.552	1,04
2.	Kelapa	19.806	7.520	0,49
3.	Kopi	1.278	154	0,32
4.	Lada	8.111	5.188	0,88
5.	Kakao	7.806	2.542	0,62
6.	Kelapa Sawit	1.359.531	21.036.260	18,04

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2023

Secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dengan Kabupaten Kutai Timur sebagai kabupaten yang memiliki produksi terbanyak yaitu sebanyak 7,87 juta ton pada tahun 2023, Sedangkan Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet terbesar di Kalimantan Timur sebanyak 35,10 Ribu Ton. Untuk tanaman lada, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kabupaten dengan

penghasil kelapa terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi sebesar 2.619 ton dan Kabupaten Kutai Timur dengan produksi tanaman kakao terbesar yaitu 1.456 ton. Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi sehingga kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir. Dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Tabel II.91

Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), Tahun 2023

No	Kab/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
1	Paser	2.606.069	622	9.705	54	6
2	KUBAR	1.233.998	218	35.107	28	21
3	KUKAR	4.295.829	2.619	1.100	-	41
4	KUTIM	7.876.111	679	1.557	59	1.456
5	Berau	3.941.991	1.794	100	9	725
6	PPU	561.087	1.022	2.157	1	1
7	MAHULU	178.881	4	-	-	289
8	Balikpapan	212	562	3.626	3	1
9	Samarinda	16.360	306	599	-	1
10	Bontang	440	17	-	-	-

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2024

Namun jika dilihat dari pola pengelolaannya dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih jauh jika dibandingkan dengan produktivitas komoditi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan/swasta. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pendampingan pemerintah terhadap petani terutama pada aspek akses terhadap benih unggul, sarana dan prasarana produksi, serta akses modal dan pasar.

Tabel II.92

Data Perbandingan Produktivitas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta (Ton/Ha)

Kabupaten / Kota	Kelapa Sawit		Karet	
	Swasta	Rakyat	Swasta	Rakyat
1. Kutai Kartanegara	15,330	14,025	1,383	1,006
2. Kutai Timur	20,066	15,704	0,125	0,774
3. Kutai Barat	20,861	1,806	0,783	1,351

Kabupaten / Kota	Kelapa Sawit		Karet	
	Swasta	Rakyat	Swasta	Rakyat
4. Penajam Paser Utara	14,356	7,634	-	0,321
5. Paser	15,184	13,663	0,750	1,277
6. Berau	26,826	25,545	-	0,62
7. Mahakam Ulu	7,351	-	-	-
8. Samarinda	-	19,951	-	1,356
9. Balikpapan	-	9,217	-	0,899
10. Bontang	19,100	1,450	-	-
Kalimantan Timur	18,736	14,362	0,789	1,059

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2024 (diolah)

Disamping itu, guna meningkatkan daya saing hasil komoditi perkebunan diperlukan upaya hilirisasi hasil produk perkebunan. Dengan adanya upaya hilirisasi maka geliat produksi pada sektor hulu akan semakin meningkat dan harga komoditi perkebunan di tingkat pasar akan cenderung stabil. Terdapat 109 Perusahaan Besar Sawit (PBS) di Kalimantan Timur dimana perusahaan tersebut mengolah dari produk mentah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi produk setengah jadi berupa *Crude Palm Oil* (CPO). Diperlukan upaya pemerintah untuk menarik investor untuk membangun industri pengolahan berupa turunan produk rumah tangga, membentuk korporasi pekebun serta penyediaan infrastruktur pendekat dari kebun menuju pabrik pengolahan guna meningkatkan geliat perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel II.93
Jumlah Perusahaan Besar Sawit (PBS)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kabupaten / Kota	Perusahaan Besar Sawit	Kapasitas Produksi TBS (ton/jam)	
		Terpasang	Terpakai
1. Kutai Kartanegara	19	1.090	938
2. Kutai Timur	38	2.040	1.828,56
3. Kutai Barat	12	690	653
4. Penajam Paser Utara	7	360	299
5. Paser	18	940	791,53
6. Berau	13	745	713
7. Mahakam Ulu	2	90	96
8. Samarinda	0	0	0
9. Balikpapan	0	0	0
10. Bontang	0	0	0
KALIMANTAN TIMUR	109	5.955	5.319

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2024

3) Peternakan

Populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 61,41 juta ekor, ayam buras 5,18 juta ekor dan ayam ras petelur 1,34 Juta ekor. Sedangkan untuk populasi sapi potong hanya sebesar 108,61 ribu ekor, populasi kambing 58,52 ribu ekor dan babi sebanyak 45,83 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Tabel II.94
Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (ekor)

No	Hewan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi Potong	117.504	119.485	119.974	121.290	108.613
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68
3	Kambing	66.378	67.892	69.929	68.997	58.522
4	Domba	439	590	635	694	642
5	Babi	78.968	82.546	83.652	76.292	45.839
6	Kerbau	6.157	6.194	6.552	6.539	6.490
7	Kuda	97	102	95	143	95
8	Kelinci	14.189	8.859	10.830	9.462	7.931
9	Ayam Buras	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.815.976	5.183.873
10	Ayam Ras Pedaging	66.672.445	67.886.566	59.402.832	55.877.917	61.412.191
11	Ayam Ras Petelur	1.055.432	853.693	1.218.994	2.263.835	1.340.217
12	Itik	248.978	254.683	254.749	261.263	269.564

Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2022

Untuk mendukung program pemerintah berupa swasembada dan ketahanan pangan, maka jumlah ketersediaan daging sapi harus mampu mengimbangi jumlah kebutuhan daging sapi masyarakat di Kalimantan Timur dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau sehingga kebutuhan akan daging sapi terpenuhi. Ketersediaan daging sapi sampai saat ini belum bisa mengimbangi kebutuhan akan daging sapi setiap tahunnya untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan hanya mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan. Hal ini dikarenakan populasi sapi di Kalimantan Timur masih tergolong sedikit, sehingga masih harus memasok dari luar daerah seperti dari Sulawesi Selatan, NTT, NTB. Keterbatasan fasilitas yang pada umumnya menimbulkan efek langsung untuk usaha peternakan juga mempengaruhi produksi daging sapi, serta adanya kecenderungan peternak berusaha sendiri. Sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan konsumsi daging sapi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi pengembangan peternakan

sapi pada lahan bekas tambang melalui fasilitasi *miniranch* dan areal kebun sawit melalui Program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA).

Tabel II.95
Jumlah *Miniranch* di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	1	2	3	9	5
2	KUBAR	1	2	3	6	3
3	KUKAR	-	3	5	12	9
4	KUTIM	2	-	4	5	5
5	Berau		1	5	8	3
6	PPU	1	2	3	4	3
7	MAHULU	-	2	-	2	-
8	Balikpapan	-	-	-	2	-
9	Samarinda	-	-	-	1	1
10	Bontang	-	-	1	1	1
Kalimantan Timur		5	12	24	49	30

Sumber: *Siranch, DPKH Provinsi KALTIM, 2023*

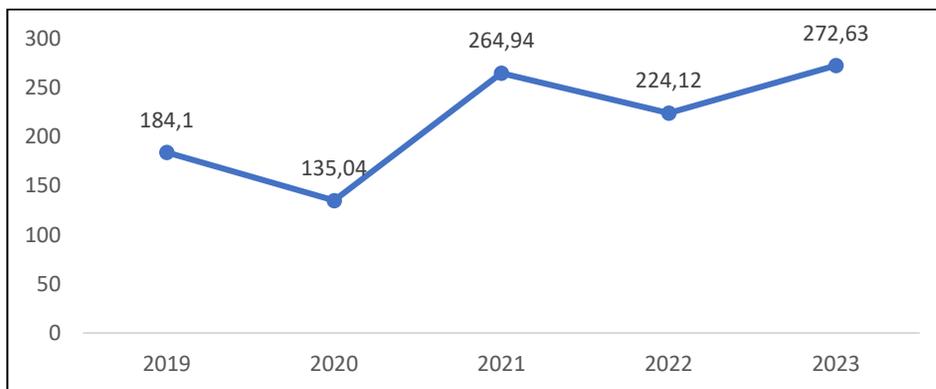
D. Kehutanan

Sebagaimana sasaran pembangunan daerah dalam peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kemasyarakatan. Secara konvensional, Produk Domestik regional Bruto (PDRB) sering digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai rupiah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian daerah untuk waktu satu tahun. Dalam kaitannya dengan PDRB, pengelolaan sumberdaya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumberdaya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Namun saat ini, kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Timur telah diduduki oleh sumberdaya lainnya yakni minyak dan gas bumi, batubara dan perkebunan kelapa sawit.

Menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumberdaya hutan seluas lebih dari 8 juta hektar hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kerakyatan sebagaimana juga dirumuskan pada Misi 2, melalui peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.

Dari pemanfaatan hutan tersebut, realisasi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan adalah dari tahun ke tahun

cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi penurunan. Dalam lima tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi sub sektor kehutanan sebesar Rp. 184,10 Milyar, lalu terjadi penurunan dengan kontribusi terendah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 135,04 Milyar. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 264,94 Milyar sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 224,12 Milyar. Kontribusi terbesar sub sektor kehutanan terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 272,63 Milyar.

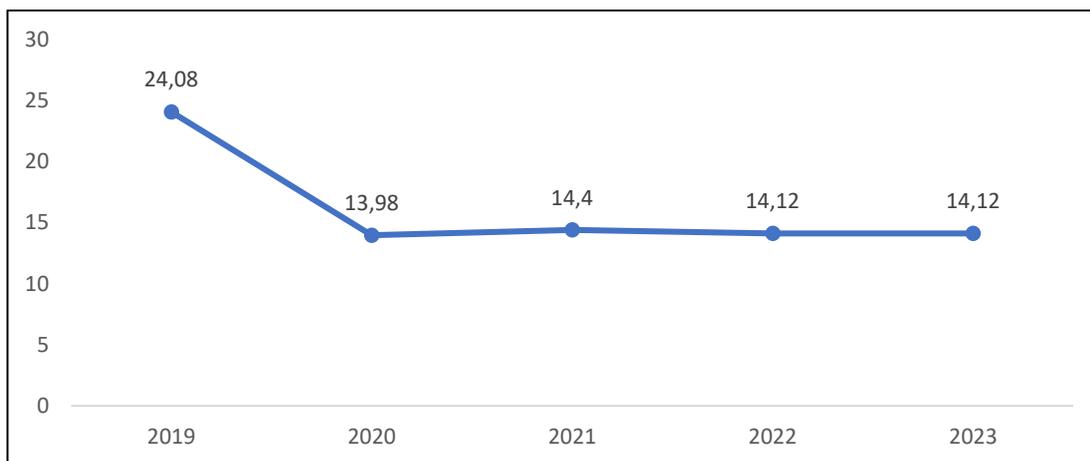


Gambar II.74

Realisasi PNPB Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Perubahan tutupan lahan di Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami perubahan tutupan lahan dari satu tipe menjadi tipe lainnya, dengan laju perubahan Persentase Tutupan Lahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 24,08%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan terendah yakni 13,98%, pada tahun 2021 meningkat sebesar 14,40%, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 14,12%, sedangkan pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Umumnya hal ini dipicu oleh berkurangnya luasan hutan alami karena perluasan hutan tanaman, perkebunan, pertanian, pertambangan, serta meningkatnya lahan-lahan tidur seperti tanah terbuka dan semak belukar.



Gambar II.1
Persentase Tutupan Lahan Di Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 (%)
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur seluas 8.371.478,05 hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA.

Tabel II.96
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

No	Tahun	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)
1.	2018	38.771,77
2.	2019	66.302,27
3.	2020	38.737,80
4.	2021	39.900,80
5.	2022	1.144,00
6.	2023	38.861,16
TOTAL		223.717,80

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Hektar (diperbaharui setiap 5 tahun). Pada tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.771,77 Hektar. Pada tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan seluas 66.302,27 hektar. Pada tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan seluas 38.737,80 hektar. Pada tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 39.900,80 hektar dan pada tahun 2022 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.866,17 hektar.

Jumlah total lahan kritis yang direhabilitasi hingga tahun 2022 adalah 222.578,81 hektar dengan persentase 80,86%.

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas dan fungsi untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut. Hal lain yang juga penting adalah bagaimana mendorong SDM untuk lebih cerdas dan profesional dalam menangani perkara-perkara ilegal *logging*/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Tabel II.97
Jumlah Luas Hutan yang Rusak/Terbakar/Perambahan/Ilegal Logging
Tahun 2023

No	Kab/Kota	Luas Areal Terbakar (Ha)	Illegal Logging (Ha)	Perambahan (Ha)	Total
1.	Berau	1.935	57,41	590,16	2.582,57
2.	Kutai Timur	2.157	83,91	10.000,36	12.241,27
3.	Bontang	17	-	56	73
4.	Kutai Kartanegara	2.518	-	460	2.978
5.	Kutai Barat	495	120,63	477,31	1.092,94
6.	Mahakam Ulu	64	-	2	66
7.	Balikpapan	25,84	-	2,94	28,78
8.	Penajam Paser Utara	1.136	4,70	859	1.999,7
9.	Paser	2.054	-	213,32	2.267,32
TOTAL		10.402,84	266,65	12.661,08	23.329,58

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Guna optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari ilegal *logging* dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan. Melalui Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya di tahun 2022 berorientasi pada menurunnya intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, ilegal *logging*/perambahan, dan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, *drone* pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m³ menjadi 4.471.286,16 m³ di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendukung yaitu 1). Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial; 2.) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan; 3). Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui sistem. Namun demikian, adapun yang menjadi penghambat pada pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu: 1). Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu menurun karena adanya beberapa faktor: a). Curah hujan tinggi menyebabkan produksi

terganggu; b). Peralatan Produksi yang sudah berumur sehingga produktivitas alat rendah; c). Harga kayu yang menurun cukup tajam (terutama pada bulan – bulan terakhir) karena lesunya permintaan pasar dunia sementara biaya operasional meningkat karena kenaikan bbm, kenaikan biaya perawatan, biaya *sparespart*, dll

Sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami Penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 826,05 ton di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap sadap.

Tabel II.98
Data Rekapitulasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO	Kab/Kota	Status dan Fungsi Kawasan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Paser	6.952,35	11.243,83	342,53	23.585,25	41.781,43
2	Kutai Barat	13.671,95	7.003,03	-	2.960,47	23.635,45
3	Kutai Kartanegara	13.040,23	2.941,81	1.551,37	27.996,96	42.588,56
4	Kutai Timur	11.544,32	14.235,65	849,62	9.100,05	35.729,64
5	Berau	37.091,91	1.863,03	193,69	3.920,97	43.069,60
6	Penajam Paser Utara	-	1.874,35	-	-	1.874,35
7	Mahakam Ulu	12.412,48	4.889,82	318,77	26.737,27	44.358,34
8	Balikpapan	-	-	-	-	-
9	Bontang	-	-	62,03	-	62,03
TOTAL		94.713,24	41.109,71	2.975,48	94.300,97	233.099,40

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, menurunkan pengangguran dan memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, maka Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi lahan kawasan hutan dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar dari total kawasan hutan Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat setempat, dan Kalimantan Timur mendapatkan luas kawasan yang dikelola sebesar 250 ribu hektar. Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan ini, pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang

kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS). Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dibawah skema Perhutanan Sosial tersebut. Namun Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat memiliki kendala yaitu Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur dan Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman.

Tabel II.99
Data Rekapitulasi Perkembangan Perhutanan Sosial
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah					Luas (Ha)					Total Per Kab/Kota	
		HD	HKm	HTR	Kem it raan	HA	HD	HKm	HTR	Kemit raan	HA	Juml ah	Luas (Ha)
1	Balikpapan	-	11	-	-	-	-	1.897	-	0	-	11	1.897
2	Berau	17	1	1	3	-	97.287	119,21	1.096	425	-	22	98.927
3	Kutai Timur	5	6	10	1	-	24.945	3.162	10.556	109	-	22	38.772
4	Kutai Kartanegara	16	30	4	-	-	55.004	8.575	3.574	-	-	50	67.153
5	Kutai Barat	8	-	3	-	1	27.204	-	989	-	48,85	12	28.242
6	Mahakam Ulu	12	-	-	1	-	40.743	-	-	96	-	13	40.839
7	Paser	2	3	-	-	1	1.550	361	-	-	7.722	6	9.633
8	Penajam Paser Utara	-	1	-	-	-	-	1.605	-	-	-	1	1.605
TOTAL		60	52	18	5	2	246.733	15.719, 21	16.215	630	7.770,85	137	287.068

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat.

Realisasi laporan perkembangan perhutanan sosial sampai dengan bulan desember tahun 2023 sebesar 287.068 hektar yang dikelola oleh 137

unit pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial) dimana unit pengelola sebelumnya sejumlah 89 unit, dengan jumlah penambahan sebanyak 48 unit, dimana luas sebelumnya adalah sebesar 210.924 hektar bertambah menjadi 287.068 hektar. Sampai dengan saat ini Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari : Hutan Desa (HD) semula seluas 183.310 hektar dikelola sebanyak 42 unit pengelola bertambah menjadi seluas 246.733 hektar dikelola oleh 60 unit pengelola; Hutan Kemasyarakatan (HKm) semula seluas 5.877 hektar dikelola sebanyak 13 unit pengelola bertambah menjadi seluas 15.719,21 hektar dikelola oleh 52 unit pengelola; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) semula seluas 13.445 hektar dikelola sebanyak 16 unit pengelola bertambah menjadi 16.215 hektar dikelola oleh 18 unit pengelola; Kemitraan semula seluas 521 hektar dikelola sebanyak 4 unit pengelola bertambah menjadi seluas 630 hektar dikelola oleh 5 unit pengelola; dan realisasi Hutan Adat seluas 7.771 hektar dikelola sebanyak 2 unit pengelola belum ada penambahannya.

Perhutanan Sosial (*social forestry*) sebagai program pemerintah pada dasarnya sudah dimulai sekitar 4 (empat) dasawarsa lalu, namun baru menjadi program utama Kementerian LHK pada 4 (empat) tahun terakhir. Perhutanan Sosial secara resmi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sangat penting diketahui karena berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar hutan. Desa yang memiliki hutan memiliki potensi membentuk KUPS. KUPS sendiri merupakan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Desa yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepemilikan areal hutan didorong untuk membentuk KUPS. Namun, terlebih dahulu membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

KLHK membuat tingkatan kemandirian KUPS dengan beberapa kategori. Pertama adalah kategori Biru, yaitu baru mendapatkan izin/hak pengelolaan hutan sosial, Kedua adalah kategori Perak/Silver, yang berarti

sudah menyusun Rencana Kerja Usaha dan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya Ketiga adalah Kategori Emas/Gold, yaitu yang telah memiliki unit usaha dan memasarkan produk, dan terakhir, Kategori keempat adalah Platinum, yang berarti KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas, baik nasional maupun internasional. Di Kalimantan Timur hingga tahun 2023 telah berhasil menghasil 2 KUPS dengan kategori Platinum, dan 5 KUPS dengan Kategori Gold.

Tabel II.100
Perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Di Kalimantan Timur Tahun 2023

Kabupaten/Kota	HUTAN DESA						HUTAN KEMASYARAKATAN						HUTAN TANAMAN RAKYAT						HUTAN ADAT					
	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	
		Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue		Platinum	Gold	Silver	Blue		
Berau	97.287	2	-	4	29	35	119,21	-	-	-	-	-	1.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kutai Barat	27.204	-	-	15	6	21	-	-	-	-	-	-	989	-	-	-	1	1	48,85	-	-	-	1	1
Kutai Kartanegara	59.952	-	-	6	7	13	8.575,30	-	3	8	23	34	3.574	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Kutai Timur	24.944,75	-	-	4	7	11	3.162	-	-	3	3	6	10.556,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mahakam Ulu	40.966,19	-	-	15	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paser	6.108	-	1	1	3	5	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.722	-	-	-	-	
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	1.897,30	-	1	8	32	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	256.461,94	2	1	45	60	108	14.114,81	0	4	19	58	81	16.215,48	0	0	0	2	2	7.770,85	0	0	0	1	1

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

E. Energi Dan Sumber Daya Mineral

1) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala, lokasi sebagian besar berada di kawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, *bioenergy*, panas bumi, gelombang laut dan lahan bekas tambang.

Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (*Solar Cell*) merupakan pembangkit listrik yang mampu mengonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan (*sustainable*) serta jumlahnya yang sangat besar. Untuk wilayah khatulistiwa seperti Kalimantan Timur, potensi radiasi sinar matahari mencapai 1000 Watt Peak (Wp) per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya 20%, maka dapat diperoleh daya listrik sebesar 200 Wp per meter persegi. Bila diasumsikan daya yang dapat diperoleh dari sistem tenaga surya sebesar 1 MWp per Hektar, maka apabila luasan void tambang yang dibangun dengan sistem tenaga surya terapan seluas 1000 Ha akan diperoleh daya listrik sebesar 1 GWp.

Tabel II.101

Rincian data Kualitatif/Absolut Terkait Presentasi Pemanfaatan EBT
(Realisasi Capaian 11,44)

JENIS ENERGI	UNIT	2023	KONVERSI KE BOE	BOE	TOE
Minyak Bumi					
Avgas	KL	24	16.59	132.72	18.5808
Avtur	KL	96016	17.6721	565601.4512	79184.2032
MFO 180/380	KL	186487.91	20.8836	1298179.639	181745.1495
RON 95/98	KL	3327	17.4825	19388.0925	2714.333
RON 88	KL	0	17.4825	0	0
RON 89/90	KL	639649	17.4825	3727554.548	521857.6367
RON 92	KL	110805	17.4825	645716.1375	90400.2593

JENIS ENERGI	UNIT	2023	KONVERSI KE BOE		BOE	TOE
IDO	KL	0	19.8234		0	0
CN 48 (murni)	KL	0	19.4613		0	0
CN 51 (murni)	KL	65695	19.4613		426170.0345	59663.8048
CN 53 (murni)	KL	28382	19.4613		184116.8722	25776.3621
Kerosene	KL	837	17.7822		4961.2338	694.5727
Biogasoil (B20/B30)	KL	5628515.634	19.4613		25558920.64	3578248.889
LPG	MT	146279	25.5738		1246969.963	174575.7949
					33677711.33	4714879.586
Batu Bara						
Bahan Bakar Pembangkit	TON	2715309.172	29.4		11404298.52	1596601.793
Bahan Bakar Industri	TON	0	29.4		0	0
					11404298.52	1596601.793
Gas Bumi						
Bahan Bakar Pembangkit	mmscf	14777438.79	0.5388		2654028.007	371563.9209
Bahan Bakar Industri	mmscf	92261333	0.5388		16570135.41	2319818.957
Jargas Rumah Tangga	sambungan RT/mmscf	62735	0.5388		11267.206	1577.4088
Sektor Komersial	mscf	0	0.5388		0	0
					19235430.62	2692960.287
EBT						
FAME	KL	1235882.1	32.4355		8017290.771	1122420.708
Etanol	KL	0	11.4895		0	0
Biomassa	TON	0	16.4895		0	0
Kapasitas Biogas RT	m3/tahun	0	0.0317		0	0
			Cf	Eff		
PLTA	MV	0	3	1.65	0	0
PLTB	MV	0	2.5	1.25	0	0
PLT BIOGAS	MV	4	4	1.25	68734.464	9622.825
PLT Biomassa	MV	6.3	4	1.25	108256.7808	15155.9493
PLTM	MV	0	3	1.25	0	0
PLTMH	MV	0	3	1.25	0	0
PLTP	MV	0	7.5	2.9	0	0
PLTS/PLTS ATAP	MV	14	1	0.65	115658.9538	16192.2535
PLTS Hybrid	MV	0	0.85	0.65	0	0
PLT Sampah	MV	0	4	1.25	0	0
PJUTS	MV	0	0		0	0
LTHSE	MV	0	0		0	0
					8309940.97	1163391.736

Tabel II.102
BAURAN ENERGI DAERAH -- PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2023

		BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	8,309,940.97	1,163,391.74	1.16	11.44%
2	Minyak Bumi	33677711.33	4,714,879.59	4.71	46.37%
3	Gas Bumi	19,235,430.62	2,692,960.29	2.69	26.49%
4	Batubara	11,404,298.52	1,596,601.79	1.60	15.70%
Total		72,627,381.44	10,167,833.40	10,17	100.00%

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2024

Bio-energi yang berasal dari biomassa, baik dalam bentuk cair, gas atau padat yang didukung oleh:

- a. limbah ternak seperti kotoran sapi perah, potong, kambing dan unggas.
- b. limbah industri seperti tahu, kelapa sawit (POME), dan tapioka.
- c. limbah rumah tangga dan perkotaan seperti kotoran manusia, sampah industri dan rumah tangga, *biomass* seperti hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, limbah kayu, sekam padi, tongkol jagung, cangkang sawit, tangkos sawit.

Tabel II.103
Potensi Bioenergi dari Pome

No	Nama Perusahaan	Teknologi Pengelolaan POME	Output	Jumlah dari Pemanfaatan POME (Ton/ Thn)
1	PT REA Kaltim Plantations	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 3 MW	297,435.89
2	PT REA Kaltim Plantations	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 4 MW	376,761.89
3	PT Dharma Satya Nusantara (PKS 3)	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 1,2 MW	253,843.20
4	PT Hutan Hijau Mas	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 1,2 MW	408,345.84
5	PT Prima Mitrajaya Mandiri	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 1,2 MW	300,218.40
6	PT Telen Prima Sawit	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 1,2 MW	317,304.00
7	PT Teguh Jayaprima Abadi	Bio Gas/ Flaring	Gas dibakar	219,672.00
8	PT Jabontara Eka Karsa	Belt Pres	Pupuk organik (Amelioran)	291,626.78
Total Keseluruhan				2,173,581.22

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, 2024

Tabel II.104
Potensi Bioenergi dari Biomass Hutan Energi

Kabupaten/ Perusahaan	Cangkang (Ton/Thn)	Fiber (Ton/Thn)	Kapasitas Pembangkit Listrik Bio Massa(KvA)
Berau	368,838.24	131,727.94	25,905.20
PT Anugerah Agung Prima Abadi	27,382.52	9,779.47	1,923.20
PT Berau Sawit Sejahtera	33,926.31	12,116.54	2,382.80
PT Dwiwira Lestari Jaya	33,060.64	11,807.37	2,322.00
PT Gunta Samba Jaya	27,336.96	9,763.20	1,920.00
PT Hutan Hijau Mas	47,640.35	17,014.41	3,346.00
PT Jabontara Eka Karsa	34,023.12	12,151.12	2,389.60
PT Mulia Inti Perkasa	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Natura Pacific Nusantara	19,528.84	6,974.59	1,371.60
PT Satu Sembilan Delapan	34,011.73	12,147.05	2,388.80
PT Sentosa Kalimantan Jaya	25,457.54	9,091.98	1,788.00
PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation	34,797.67	12,427.74	2,444.00
PT Yudha Wahana Abadi	26,044.15	9,301.48	1,829.20
Kutai Barat	256,517.50	91,613.39	18,016.40
PT Agro Manunggal Selaras	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Citra Agro Kencana	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Farinda Bersaudara	29,210.68	10,432.39	2,051.60
PT Ketapang Agro Lestari	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Kruing Lestari Jaya	45,561.60	16,272.00	3,200.00
PT Kutai Agro Lestari	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT London Sumatera (Isuy Makmur POM)	24,552.01	8,768.57	1,724.40
PT London Sumatera (Pahu Makmur POM)	29,051.22	10,375.43	2,040.40
Kutai Kartanegara	476,500.30	170,178.68	33,516.80
PT Agrieast Borneo Kencana	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Alam Jaya Persada	21,641.76	7,729.20	1,520.00
PT Cahaya Anugerah Plantation	17,450.09	6,232.18	1,225.60
PT Jaya Mandiri Sukses	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Karya Teknik Plantation	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Mahakam Sawit Plantation (SBSL-M)	24,267.25	8,666.87	1,704.40
PT Maju Kalimantan Hadapan	51,256.80	18,306.00	3,600.00
PT Niagamas Gemilang	16,373.70	5,847.75	1,200.00
PT Perkebunan Kaltim Utama	12,529.44	4,474.80	880.00
PT Prima Mitrajaya Mandiri	35,025.48	12,509.10	2,460.00
PT REA Kaltim Plantations	78,656.41	28,091.57	5,524.40
PT Sasana Yudha Bhakti	26,112.49	9,325.89	1,834.00
PT Sawit Kaltim Lestari	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Sawit Unggul Agro Niaga	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Teguh Jayaprima Abadi	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Tritunggal Sentra Buana	20,348.95	7,267.48	1,429.20
PT Tunas Prima Sejahtera	19,067.53	6,809.83	1,339.20
Kutai Timur	1,054,363.77	376,558.49	74,052.80
PT Anugerah Energitama	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Bima Agri Sawit	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Bima Palma Nugraha	24,489.36	8,746.20	1,720.00
PT Bumi Mas Agro	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Dharma Satya Nusantara (PKS 2)	23,919.84	8,542.80	1,680.00
PT Dharma Satya Nusantara (PKS 3)	29,615.04	10,576.80	2,080.00
PT Dharma Satya Nusantara (PKS 4)	29,615.04	10,576.80	2,080.00
PT Dharma Satya Nusantara (PKS 6)	34,171.20	12,204.00	2,400.00

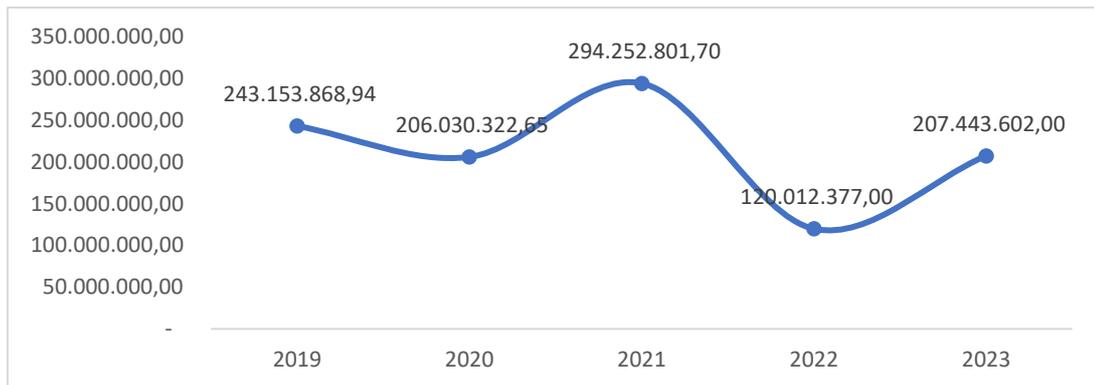
Kabupaten/ Perusahaan	Cangkang (Ton/Thn)	Fiber (Ton/Thn)	Kapasitas Pembangkit Listrik Bio Massa(KvA)
PT Dharma Satya Nusantara (PKS 7)	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Dinamika Prima Artha	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Etam Bersama Lestari	25,058.88	8,949.60	1,760.00
PT Fairco Agro Mandiri	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Gunta Samba	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Hampanan Perkasa Mandiri	36,449.28	13,017.60	2,560.00
PT Hanusentra Agro Lestari	22,780.80	8,136.00	1,600.00
PT Indonesia Plantation Sinergy	8,542.80	3,051.00	600.00
PT Kalimantan Agro Nusantara	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Karyanusa Eka Daya 1	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Karyanusa Eka Daya 2	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Kemilau Indah Nusantara	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Kresna Duta Agroindo (GKMM)	8,542.80	3,051.00	600.00
PT Kresna Duta Agroindo (MWHM)	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Kresna Duta Agroindo (RPNM)	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Kutai Balian Nauli	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Long Bagun Prima Sawit	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Multi Pacific International	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Nala Palma Cadudasa	32,644.89	11,658.89	2,292.80
PT Nusaraya Agro Sawit	51,256.80	18,306.00	3,600.00
PT Sawit Sukses Sejahtera	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Sima Agung Prima Sawit	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Sinergi Agro Industri	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Sumber Kharisma Persada	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Swakarsa Sinarsentosa	26,767.44	9,559.80	1,880.00
PT Tapan Nadenggan (JLYM)	45,561.60	16,272.00	3,200.00
PT Telen	71,190.00	25,425.00	5,000.00
PT Telen Prima Sawit	37,018.80	13,221.00	2,600.00
PT Wira Inova Nusantara	34,171.20	12,204.00	2,400.00
Mahulu	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Borneo Bhakti Sejahtera	17,085.60	6,102.00	1,200.00
Paser	344,998.13	123,213.62	24,230.80
PT Agro Inti Kencana Mas	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Borneo Indah Marjaya	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Buana Wira Subur Sakti	16,134.50	5,762.32	1,133.20
PT Cahaya Bintang Sawit Sejati 1	28,367.79	10,131.35	1,992.40
PT Cahaya Bintang Sawit Sejati 2	28,282.36	10,100.84	1,986.40
PT Gawi Makmur Kalimantan	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Harapan Sawit Sejahtera	14,961.29	5,343.32	1,050.80
PT Muaratoyu Sumber Lestari	31,574.19	11,276.50	2,217.60
PT Multi Jayantara Abadi	28,595.60	10,212.71	2,008.40
PT Multi Makmur Mitra Alam	27,336.96	9,763.20	1,920.00
PT PN XIII Long Pinang (PALPI)	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Pradiksi Gunatama	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Pucuk Jaya	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Saraswanti Sawit Makmur	15,975.04	5,705.37	1,122.00
PPU	157,415.33	56,219.76	11,056.00
PT Agro Indomas	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Alam Permai Makmur Raya	17,911.40	6,396.93	1,258.00
PT Kebun Mandiri Sejahtera	25,822.04	9,222.16	1,813.60
PT Megah Hijau Lestari	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Sumber Sawit Bunga Lestari	28,253.89	10,090.67	1,984.40

Kabupaten/ Perusahaan	Cangkang (Ton/Thn)	Fiber (Ton/Thn)	Kapasitas Pembangkit Listrik Bio Massa(KvA)
PT Waru Kalimantan Plantation	34,171.20	12,204.00	2,400.00
Total Keseluruhan	2,675,718.86	955,613.88	187,978.00

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, 2024

2) Pertambangan

Produksi batubara tahun 2023 adalah sebesar 207,44 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 72,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.



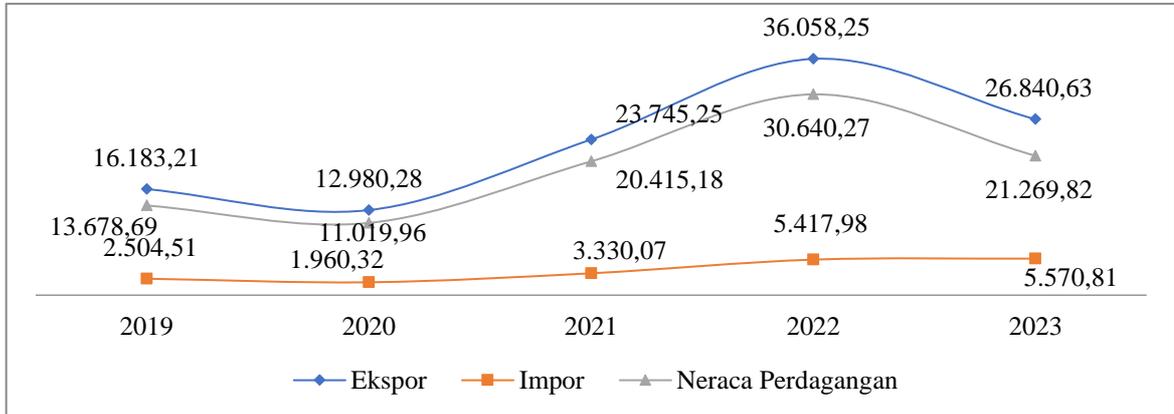
Gambar II. 2
Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (Ton)
(Sumber: DESDM Kalimantan Timur, 2024)

Pada tahun 2023 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

F. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan

ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.



Gambar II. 3
 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerja sama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2019-2023, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

Tabel II.105
 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2019 – 2023 (Juta US\$)

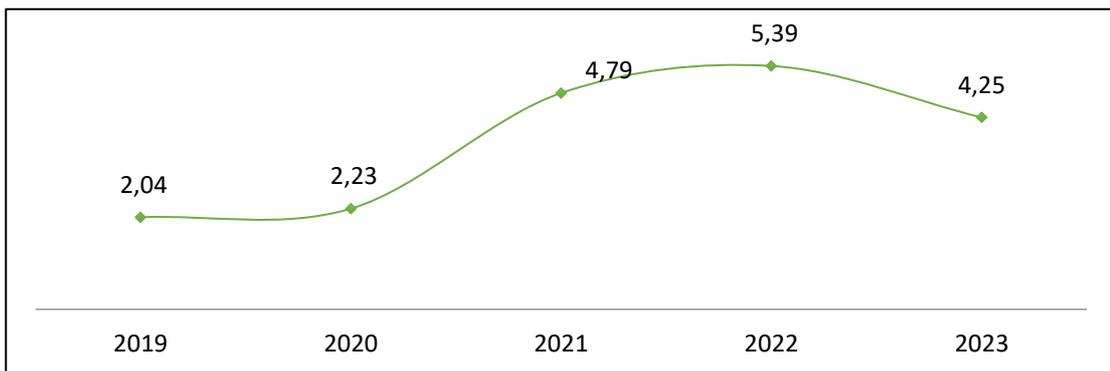
No	Golongan Barang	2019	2020	2021	2022	2023
Migas		3.356,38	2.068,20	1.605,15	2.998,12	2.612,66
1	Minyak Mentah	12,63	7,27	-	8,48	-
2	Hasil Minyak	224,05	108,64	7,40	763,12	683,52
3	Gas	1.831,52	1.032,38	1.597,75	2.226,52	1.929,13
Non Migas		15.029,36	14.113,59	22.554,76	33.052,95	24.228,07
1	Hasil Tambang	12.408	9.600,36	17.767,61	27.665,96	19.981,65
2	Hasil Industri	1.696,72	2.222,52	4.780,52	5.377,14	4.224,58

No	Golongan Barang	2019	2020	2021	2022	2023
3	Hasil Pertanian	8,87	9,11	6,63	9,85	21,84
Total Ekspor		16.183,21	12.980,28	24.159,90	36.051,07	26.840,72

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -25,56 persen dibanding tahun 2022 yaitu dari US\$ 36,05 miliar menjadi US\$ 26,84 miliar. Penurunan ekspor tahun 2023 disebabkan oleh turunnya nilai ekspor barang migas maupun non migas. Ekspor barang migas tahun 2023 mencapai US\$ 2,61 miliar turun sebesar -12,88 persen dibanding tahun 2022. Sementara ekspor barang non migas mencapai US\$ 24,23 miliar turun sebesar -26,71 persen dibanding tahun 2022.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 5,39 miliar US\$ pada tahun 2022 dengan peningkatan 12,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 miliar US\$. Namun, nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara menurun 21,15 persen pada tahun 2023 hingga mencapai 4,25 miliar US\$.

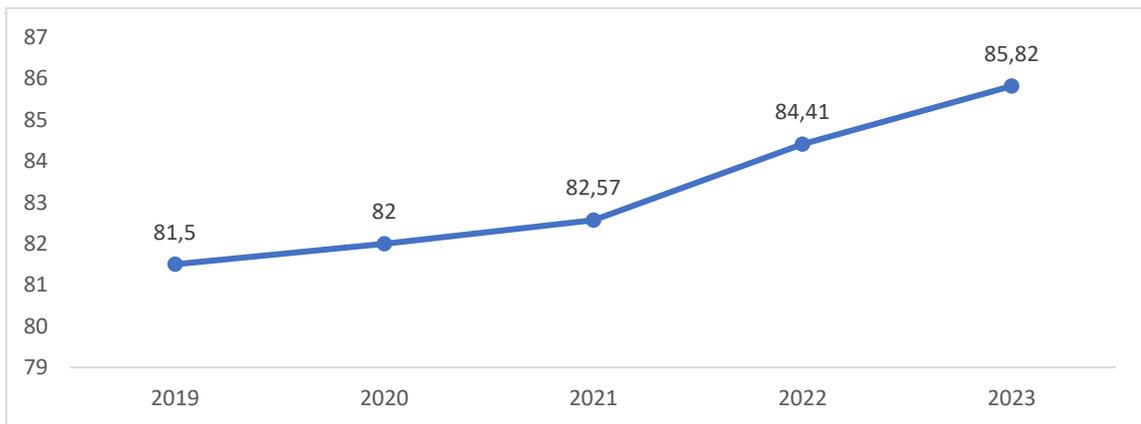


Gambar II.4
Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Miliar US\$)
(Sumber: BPS Prov KALTIM, 2024)

2.1.3.2 Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2023 meningkat di angka 85,82 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 84,41. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Gambar II. 5
Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

(Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM)

2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai sebesar 77,89 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja,

serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel II.106
Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI				
			2019	2020	2021	2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	25.59	25.92	25.94	26,06	25,89
b.	Pengukuran Kinerja	30	18.77	18.97	18.99	22,50	22,48
c.	Pelaporan Kinerja	15	12.54	12.75	12.76	12,84	12,76
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	5.91	6.21	6.21	16,70	16,76
e.	Capaian Kinerja	-	13.74	13.82	13.92	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,50	74,89	76,55	78,10	77,89
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/497/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mendapat predikat BB dengan skor 77,89. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

2.1.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan

Pemerintah daerah telah menyusun dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan periodesasinya. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan RKPD, maka perangkat daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen perencanaan yang disusun melalui proses penyelarasan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perencanaan di bawahnya. Terdapat beberapa capaian kinerja pada unsur Perencanaan yang telah baik namun masih terdapat yang belum optimal. Beberapa kinerja yang belum optimal ditunjukkan oleh indikator Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota, Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, dan Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data. Indikator kinerja unsur Perencanaan dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.107
 Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82,3	43,33	79,30		
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur (%)		83	75,00		
3	Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data (%)		80	81,48		
4	Persentase prioritas pembangunan daerah yang mencapai target (%)				43,09	93,75
5	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran (%)				96,97	99,61

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

B. Keuangan

Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk

melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah 55,20 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel II.108
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Ribuan Rupiah)	Total Pendapatan (Ribuan Rupiah)	DOF (Persen)
2019	6.555.852.805,00	11.775.086.446,00	55,68
2020	4.116.573.388,00	8.763.476.903,00	46,97
2021	6.111.918.272,28	10.220.142.967,27	59,80
2022	8.997.262.537,26	16.804.693.776,01	53,54
2023	10.653.844.690,25	17.750.987.305,17	60,02
Rata-rata	7.287.090.338,56	13.062.877.479,49	55,20

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2024

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2023. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi

Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

C. Penelitian dan Pengembangan

Walaupun nilai capaian kinerja kelitbangan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah mencapai target bahkan melampaui target yang dimuat dalam Renstra PD, namun masih perlu dilakukan perbaikan karena indikator tersebut belum mengukur kebermanfaatannya. Selanjutnya, pada tahun 2021 telah dilakukan perbaikan terhadap indikator kinerja sasaran yang lebih berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan, sehingga dibuatlah pemetaan pemanfaatan terhadap hasil kelitbangan.

Tabel II.109
Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2020-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (%)	26	57	-	102
2	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN (%)	9	27	-	182

Sumber: LkjIP BALITBANGDA Kaltim Tahun 2021

2.1.3.4 Pengawasan

1. Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktik secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai *pilot project* Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada perangkat daerah yang pemangku penanggung jawab atas pencapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana dari hasil *Quality Assurance* tersebut hasil sama dengan seperti pada tahun 2021 yang pada level 3 atau pada tingkat maturitas Terdefinisi. Penilaian Maturitas pada Tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan

adanya perubahan atas peraturan Perka BPKP menggunakan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Penilaian Maturitas New SPIP Terintegrasi yang bertujuan agar penilaian Maturitas SPIP lebih berkaitan dengan Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap: (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Aset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
5. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan.
6. Pemprov Kaltim belum mempunyai Sistem Pengendalian Froud (*Fraud Control System*) dan Implementasinya.

Tabel II.110
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	2	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Provinsi KALTIM, 2023

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam laporan tersebut ditemukan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obrik/entitas. Selama lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2021 sempat sedikit mengalami penurunan akibat ada rekomendasi yang belum atau sulit dilaksanakan. Secara umum, peningkatan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan APIP semakin banyak yang ditindaklanjuti.

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada tahun 2022 memang belum 100% sebab jumlah rekomendasi setiap tahun yang selalu bertambah sesuai laporan hasil pemeriksaan, masih terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untuk ditindaklanjuti. Selain itu, faktor lainnya adalah masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa ditindaklanjuti selama 60 hari setelah menerima LHP, masih kurangnya pemahaman obrik terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, serta belum ada *reward and punishment*.

Tabel II.111
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%)	75	80	81	80	85

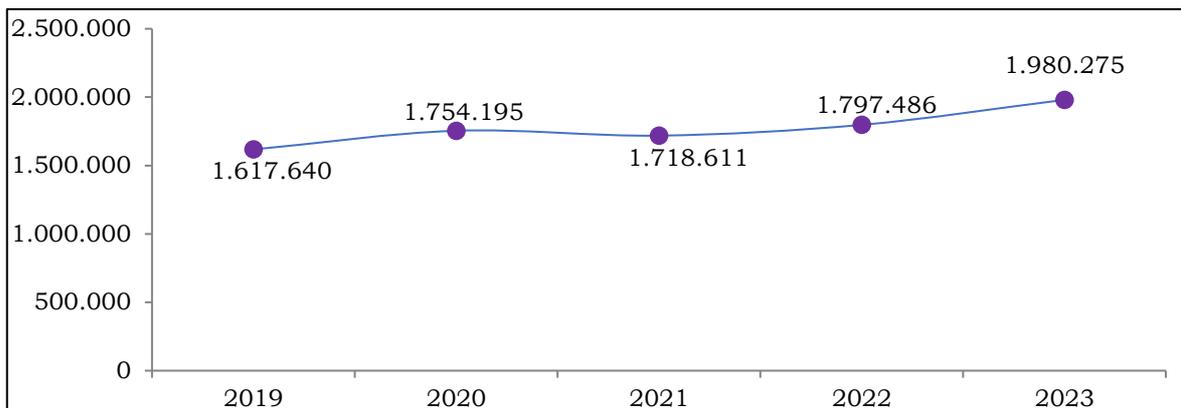
Sumber: LkJP Inspektorat Provinsi KALTIM Tahun 2019-2022

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama 5 tahun terakhir, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang mencapai Rp. 1.718.611,- per bulan. Namun di tahun 2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami meningkat mencapai Rp. 1.980.275,-. Penyebab naiknya pengeluaran rata-rata per kapita adalah meningkatnya pengeluaran konsumsi makanan di tahun 2023 yang mencapai Rp 885.069 (44,69 persen) dimana pengeluaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 736.465 (45,06 persen).



Gambar II. 6

Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Rupiah) (Sumber: BPS
Kalimantan Timur, 2023)

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

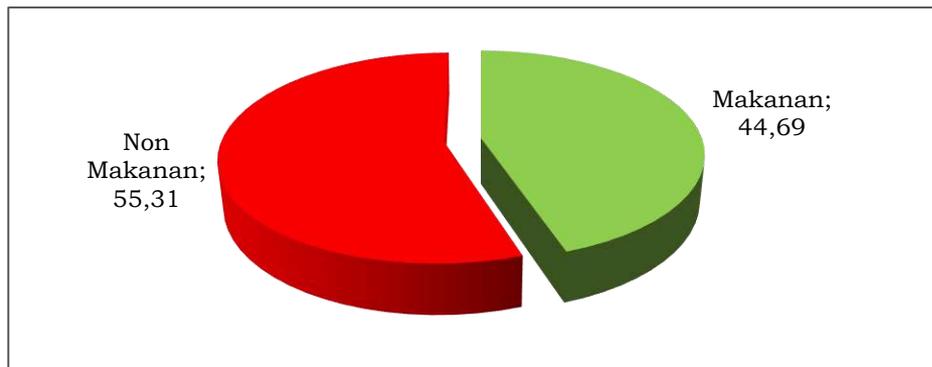
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun

tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel II.112
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	893.217	963.725	982.146	984.038	885.069
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.617.640	1.754.195	1.718.611	1.797.486	1.980.275
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	55,22	54,94	57,15	54,75	55,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023



Gambar II. 7
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

C. Nilai Tukar Petani

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan tahun 2019 – 2023 selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.113
Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	107,91	116,96	128,25	139,73	149,24
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	102,41	104,76	106,05	110,87	115,65
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,38	111,65	120,94	126,03	129,04

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Peningkatan NTP tahun 2023 disebabkan meningkatnya NTP pada hampir seluruh sub sektor, kecuali sub sektor tanaman pangan dan perikanan yang mengalami penurunan. Selanjutnya, ada tiga sub sektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu sub sektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Penurunan NTP sub sektor Tanaman Pangan disebabkan menurunnya indeks harga yang diterima petani (It) sejak bulan Februari dan terus menurun hingga bulan Mei tahun 2023 dan mulai sedikit meningkat pada bulan Juni tahun 2023. Bahkan pada bulan Mei tahun 2023 angka indeks harga yang diterima petani dibawah 100. Artinya pada bulan Mei tersebut, harga produk pertanian tanaman pangan yang diterima petani nilainya dibawah harga tahun dasar 2018. Sedangkan penyebab menurunnya nilai NTP tahun 2023 sub sektor perikanan adalah karena sejak bulan Juli hingga Oktober, indeks harga yang diterima petani perikanan lebih rendah daripada yang harus dibayarkan. Sehingga menyebabkan NTP bulan Juli hingga Oktober tahun 2023 berada dibawah 100 yang artinya pada bulan-bulan tersebut petani perikanan merugi.

Diantara kelima sub sektor dalam pembentukan NTP, petani pada sub sektor perkebunan rakyat adalah petani yang paling sejahtera dibandingkan dengan sub sektor yang lain karena rata-rata NTP tiap tahun sudah diatas 150 artinya bahwa nilai yang diterima dari hasil produksi perkebunannya sudah 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal untuk proses produksi

perkebunannya. Untuk sub sektor yang lain masih belum aman karena nilai NTP masih berfluktuasi disekitaran angka 100.



Gambar II.8
Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Ternyata fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur, juga terjadi di wilayah lain di pulau Kalimantan, bahwa petani sub sektor perkebunan rakyat lebih sejahtera dibandingkan dengan sub sektor yang lain. Sementara sub sektor tanaman pangan dan perikanan merupakan sub sektor yang masih rentan berfluktuasi nilai NTP-nya berada dibawah 100.

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 105,38. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi kedua sebesar 129,04, dibawah Kalimantan Barat sebesar 139,03.

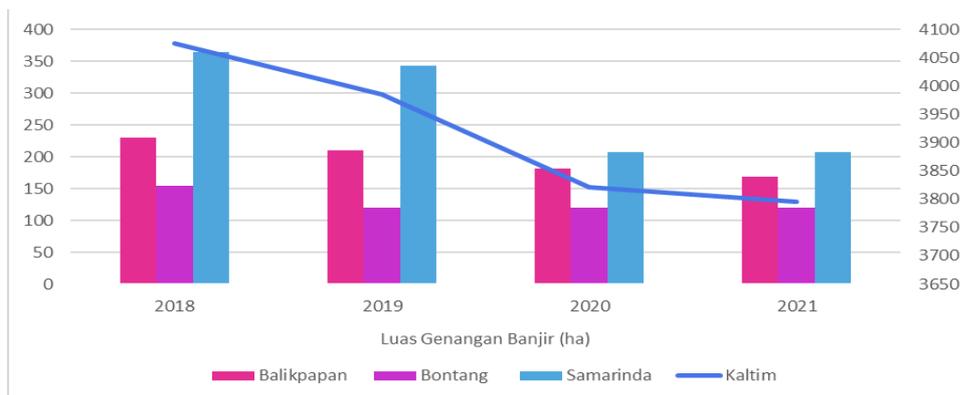
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Genangan Banjir

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengurangan luas genangan banjir dan penanganan pantai kritis. Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, baik karena faktor alam maupun manusia. Faktor alam terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kondisi topografi,

pasang surut dan kondisi geografis DAS yang luas. Sedangkan faktor manusia disebabkan oleh daerah tangkapan air (DTA) yang berubah fungsi, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai serta sistem drainase yang tidak tertata dan berfungsi dengan baik. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir.

Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. 3 Kota tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur yang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan, capaian kinerja pengurangan luas genangan banjir selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun demikian kendala yang dihadapi dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan pembebasan lahan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem pengendali luapan air sungai, adanya utilitas terbangun (jalur pipa PDAM, Listrik, Telekomunikasi dan kabel optik), lokasi penanganan banjir yang merupakan daerah padat penduduk, serta faktor cuaca yang tidak menentu. Selain permasalahan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum optimal.



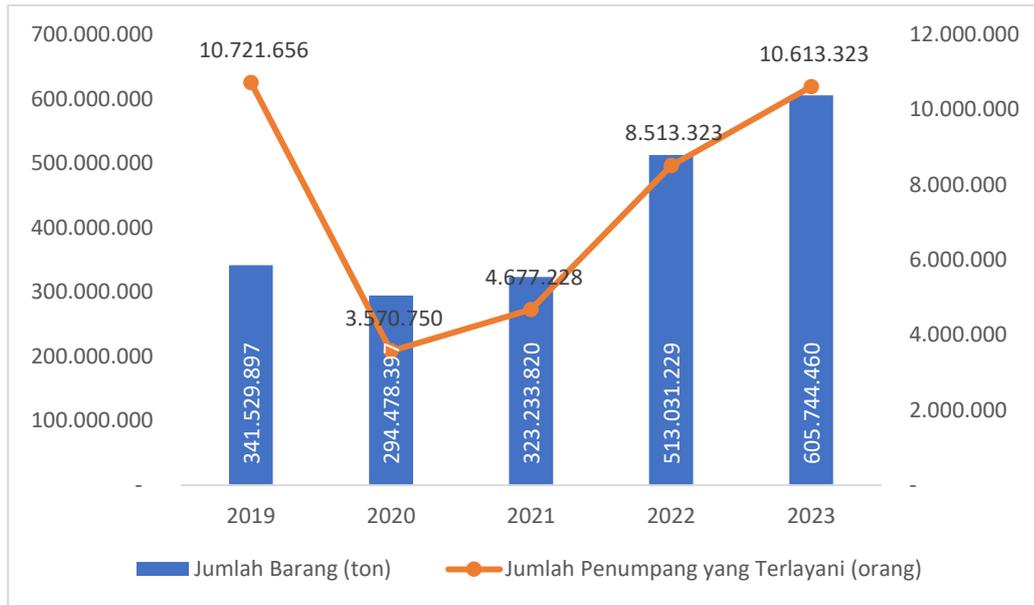
Gambar II. 9
Luas Genangan Banjir 3 Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2021 (Ha)

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menurunkan luas genangan banjir seluas 279 Ha dalam kurun waktu 4 tahun. Meskipun capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan, namun penanganan banjir masih perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat pada awal periode RPJMD (Tahun 2018) Provinsi Kalimantan Timur, luas genangan banjir masih 4.075 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

B. Jumlah penumpang yang terlayani dan barang yang terangkut

Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 orang penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.150.906 orang penumpang sehingga menjadi 3.570.750 orang penumpang, kemudian mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 4.667.228 orang penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 ton sehingga menjadi 294.487.397 Ton. Hal ini disebabkan beberapa negara telah melakukan pembatasan penerbangan untuk mencegah wabah pandemi COVID-19 masuk ke negara tersebut. Pada tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dikarenakan telah berkurangnya pandemi COVID-19 dan telah dilaksanakannya vaksinasi sehingga jumlah penumpang dan barang yang diangkut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4.667.228 orang dan 323.233.820 ton. Pada tahun 2022 jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan, untuk jumlah penumpang menjadi 8.513.323 orang dan jumlah barang menjadi 513.031.229 ton. Pada tahun 2023 jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan, untuk jumlah penumpang menjadi 10.613.323 orang dan jumlah barang menjadi 605.744.460 ton.



Gambar II.75
Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang
Tahun 2019-2023
(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2024)

C. Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Tabel II.114
Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	NON PLN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=3-8	10	11	12=10+11	14=(12/4)*100%
I	Balikpapan	34	249,748	733,396	34	0	34	0	246,002	416	246,418	98.67%
II	Berau	110	95,064	276,241	86	24	110	0	74,605	10,966	85,571	90.01%
III	Kutai Kartanegara	237	254,404	782,634	227	10	237	0	217,483	10,043	227,526	89.43%
IV	Samarinda	59	282,192	856,360	59	0	59	0	298,067	0	298,067	100.00%
V	Kutai Timur	141	144,745	427,492	107	34	141	0	98,983	29,307	128,290	88.63%
VI	Bontang	15	59,587	187,446	15	0	15	0	54,910	1,123	56,033	94.04%
VII	Penajam Paser Utara	54	63,226	193,554	54	0	54	0	56,319	1,871	58,190	92.03%
VIII	Paser	144	98,146	298,997	135	9	144	0	83,975	5,418	89,393	91.08%
IX	Kutai Barat	194	58,628	177,007	143	51	194	0	48,749	5,312	54,061	92.21%
X	Mahulu	50	12,880	37,637	26	24	50	0	6,290	5,174	11,464	89.01%
TOTAL	KALTIM	1,038	1,318,620	3,970,764	886	152	1,038	0	1,185,383	69,630	1,255,013	95.18%

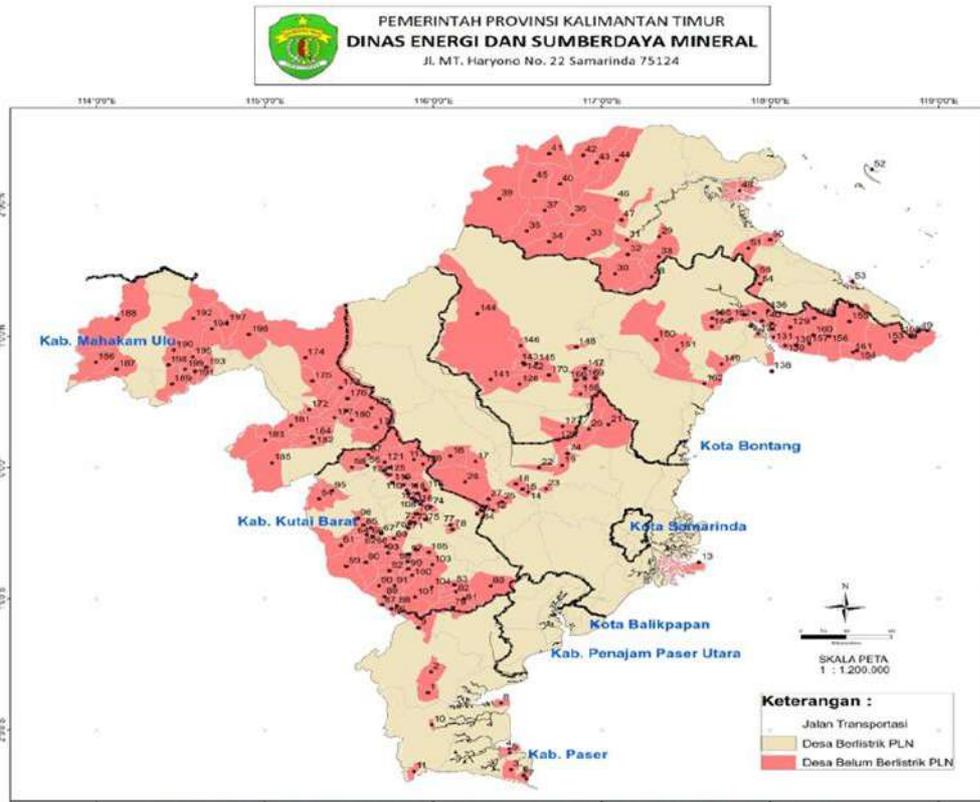
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2024

Dari total 1.318.620 jumlah KK dan 3.970.764 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 85,75 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,53 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2023 masih terdapat 152 Desa Berlistrik Non PLN dan 69.630 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2023, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 91,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,29 persen pada tahun 2022.

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 152 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan

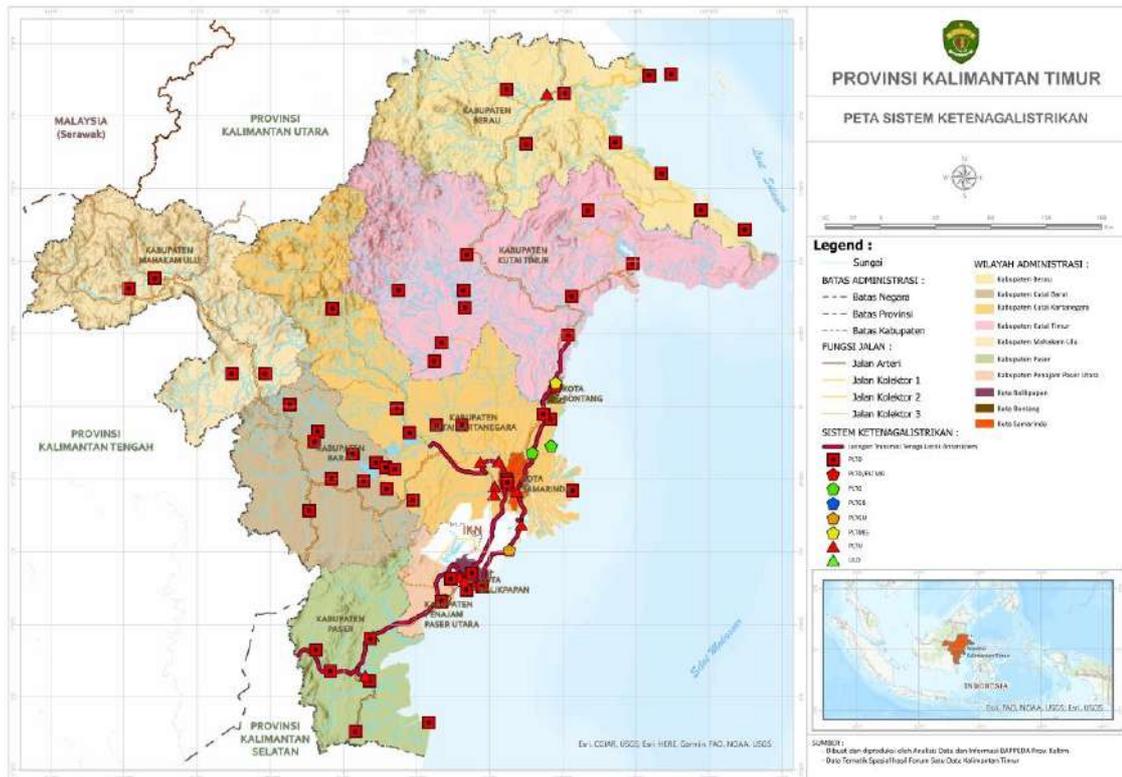
ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.



DESA BERLISTRIK NON PLN DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021									
Kab. Paser (11 Desa)	Kab. Berau (28 Desa)	Kab. Kutai Barat (70 Desa)						Kab. Mahulu (29 Desa)	
1 Desa Rantau Buta	28 Desa Merabu	57 Desa Ujoh Halang	86 Desa Randa Empas	115 Desa Abit	143 Desa Long Lees	171 Desa Long Hurai			
2 Desa Rantau Layung	29 Desa Panaan	58 Desa Kelian Luar	87 Desa Tukuq	116 Desa Rambayan	144 Desa Mekar Baru	172 Desa Long Melaham			
3 Desa Keladen	30 Desa Merapun	59 Desa Besiq	88 Desa Tende	117 Desa Gunung Rambah	145 Desa Rantau Sentosa	173 Desa Memahak Besar/Ilir			
4 Desa Labuangkallo	31 Desa Muara Le-san	60 Desa Bermai	89 Desa Sambung	118 Desa Jenqan	146 Desa Long Nyelong	174 Desa Memahak Ulu			
5 Desa Selengot	32 Desa Lesan Dayak	61 Desa Muara Nilq	90 Desa Artan Jaya	119 Desa Muara Kalaq	147 Desa Long Noran	175 Desa Batu Majang			
6 Desa Random	33 Desa Long Belu	62 Desa Mantar	91 Desa Jelmu Sibak	120 Desa Tondoh	148 Desa Rantau Panjang	176 Desa Long Merah			
7 Desa Senpah	34 Desa Long Duhung	63 Desa Muara Bombo	92 Desa Suakong	121 Desa Tukul	149 Desa Sekerat	177 Desa Rukun Damai			
8 Desa Harapan Baru	35 Desa Long Lamcin	64 Desa Lumpat Dahug	93 Desa Penarung	122 Desa Muyub Ulu	150 Desa Tepian Langsat	178 Desa Matalibaq			
9 Desa Kepala Telake	36 Desa Long Keluh	65 Desa Muara Tokong	94 Desa Intu Lingau	123 Desa Muyub Aket	151 Desa Tebangun Lembak	179 Desa Tri Panig Makmur			
10 Desa Luan	37 Desa Long Pelay	66 Desa Muara Nyahing	95 Desa Lakan Bilem	124 Desa Linggang Muyub Ilir	152 Desa Muara Bengalon	180 Desa Wana Pariq			
11 Desa Muara Andeh	38 Desa Mapulu	67 Desa Kelian Luar	96 Desa Sentalar	125 Desa Gabung Baru	153 Desa Sandaran	181 Desa Laham			
Kab. Kukar (16 Desa)	39 Desa Long Sului	68 Desa Muara Begai	97 Desa Betung	Kab. Kutai Timur (45 Desa)	154 Desa Manubar	182 Desa Long Gelawang			
12 Desa Tanjung Batuq Hara	40 Desa Long Lafai	69 Desa Lotaq	98 Desa Kiaq	126 Desa Long Poq Baru	155 Desa Tadoan	183 Desa Muara Ratah			
13 Desa Sepatin	41 Desa Punan Segah	70 Desa Jerang Dayak	99 Desa Tendiq	127 Desa Senambah	156 Desa Marukangan	184 Desa Danum Paroy			
14 Desa Muhuran	42 Desa Long Avag	71 Desa Mendung	100 Desa Penawang	128 Desa Mulupan	157 Desa Susuk Luar	185 Desa Njaribunan			
15 Desa Sembelmbingan	43 Desa Long Avag	72 Desa Jerang Melayu	101 Desa Lendan Liang Naju	129 Desa Kerayaan	158 Desa Susuk Dalam	186 Desa Naha Tfab			
16 Desa Lamin Telihan	44 Desa Punan Malinau	73 Desa Dasaq	102 Desa Kenyarian	130 Desa Tanjung Manis	159 Desa Tanjung Mangkalat	187 Desa Naha Slat			
17 Desa Lamin Pulut	45 Desa Punan Mahaka	74 Desa Tanjung Pagai	103 Desa Rikong	131 Desa Peridan	160 Desa Susuk Tengah	188 Desa Long Apati			
18 Desa Teluk Muda	46 Desa Baru Rajang	75 Desa Gunung Bayar	104 Desa Kendisq	132 Desa Saka	161 Desa Manubar Dalam	189 Desa Delang Kerohong			
19 Desa Tunjungan	47 Desa Sidurung Indah	76 Desa Muara Belolan	105 Desa Muara Ponaq	133 Desa Mandu Dalam	162 Desa Kadungan Jaya	190 Desa Long Pakaq			
20 Desa Menamang Kiri	48 Desa Pegat Batumbi	77 Desa Muara Ohong	106 Desa Sakaq Lotog	134 Desa Sempayau	163 Desa Pengadan Baru	191 Desa Long Lunuk			
21 Desa Menamang Kanan	49 Desa Teluk Sumban	78 Desa Tanjung Jone	107 Desa Sakaq Tada	135 Desa Pelawan	164 Desa Mata Air	192 Desa Long Isun			
22 Desa Kupang Baru	50 Desa Tabalar Muara	79 Desa Genungq	108 Desa Gemuruh	136 Desa Tepian Terap	165 Desa Bukit Permata	193 Desa Naha Aru			
23 Desa Bukit Jering	51 Desa Tabalar Ulu	80 Desa Pereng taliq	109 Desa Karangan	137 Desa Kolek	166 Desa Beno Harapan	194 Desa Datab Naha			
24 Desa Liang Buaya	52 Desa Teluk Alulu	81 Desa Tanjung Soke	110 Desa Merayaq	138 Desa Pulau Miang	167 Desa Muq Rahayu	195 Desa Lirung Ubinq			
25 Desa Melintang	53 Desa Balikpapan	82 Desa Deraya	111 Desa Linggang Marimun	139 Desa Perupuk	168 Desa Mawai Indah	196 Desa Long Tuyuq			
26 Desa Enggelam	54 Desa Biatan Ulu	83 Desa Lempur	112 Desa Gadur	140 Desa Mandu Pantai Sejar	169 Desa Himba Lestari	197 Desa Liu Mulang			
27 Desa Muara Enggelam	55 Desa Bukit Makmur	84 Desa Loa Deras	113 Desa Linggang Muara Bar	141 Desa Long Bantuq	170 Desa Melan	198 Desa Long Pakaq Baru			
	56 Desa Kelwai	85 Desa Minta	114 Desa Muara Jawaq	142 Desa Long Pejeng		199 Desa Long Lunuk Baru			

Gambar II. 10
Data Desa Berlistrik Non PLN
(Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022)

Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi yang disebut Sistem Mahakam yang terkoneksi dengan Sistem Barito Kalimantan Selatan. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur namun juga Kalimantan Selatan.



Gambar II. 11
Peta Sistem Ketenagalistrikan
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal, potensi energi matahari selalu ada setiap perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur ditambah dengan luasan wilayah merupakan Provinsi Peringkat 2 di NKRI sehingga dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari sangat lebih baik. Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 7 Kabupaten (Paser, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, & Mahakam Ulu dan 3 Kota (Samarinda, Balikpapan & Bontang) dengan desa/kelurahan sebanyak

1.038 desa/kelurahan. Desa Belum Berlistrik PLN tahun 2021 sebanyak 199 desa yang mana diantaranya desa-desa tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun pelaksanaan program unggulan pembangunan PLTS Terpusat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.115
Data Listrik di Seluruh Desa Berbasis Potensi Lokal

No.	Lokasi	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Rumah/ Fasum/ Pelanggan	Kapasitas (kWp)
1	Desa Rantau Buta	Batu Sopang	Paser	51	24.00
2	Desa Sandaran	Sandaran	Kutai Timur	130	65.34
3	Dusun Labuan Bili Desa Sandaran	Sandaran	Kutai Timur	54	27.72
Jumlah Tahun 2020				235	117.06
4	Desa Tadoan	Sandaran	Kutai Timur	203	58.80
5	Desa Enggelam	Muara Wis	Kutai Kartanegara	201	83.16
6	Dusun Ketibeh Desa Enggelam	Muara Wis	Kutai Kartanegara	91	47.04
7	Desa Long Lamcin	Kelay	Berau	67	29.40
8	Desa Rantau Layung	Batu Sopang	Paser	79	33.60
9	Desa Tanjung Soke	Bongan	Kutai Barat	49	29.40
Jumlah Tahun 2021				690	281.40
10	Desa Selengot	Tanjung Harapan	Paser	293	73.65
11	Desa Pegat Batumbuk	Pulau Derawan	Berau	139	40.45
12	Desa Menamang Kanan	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	208	65.54
13	Desa Menamang Kiri	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	141	37.45
14	Desa Long Duhung	Kelay	Berau	69	21.89
Jumlah Tahun 2022				850	238.98
15	Desa Pegat Betumbuk	Pulau Derawan	Berau	63.00	30.00
16	Desa Long Sului	Kelay	Berau	91.00	50.00
17	Desa Lemper & Desa Deraya	Bongan	Kutai Barat	156.00	100.00
18	Desa Mata Libaq	Long Hubung	Mahakam Ulu	218.00	130.00
19	Desa Ujoh Halang	Long Iram	Kutai Barat	97.00	50.00
20	Dusun Muluy Desa Swan Slutung	Muara Komam	Paser	51.00	30.00
21	Desa Labuan Kallo	Tanjung Harapan	Paser	204.00	76.20
Jumlah Tahun 2023				880	466.20

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2024

Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 pembangunan PLTS Terpusat berlokasi di Paser dengan jumlah 51 pelanggan dan Kutai Timur dengan jumlah 184 pelanggan dengan jumlah pembangunan 235 Pelanggan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Kutai Timur dengan jumlah 203

pelanggan, Kutai Kartanegara dengan jumlah 292 pelanggan, Berau dengan jumlah 67 pelanggan, Paser dengan jumlah 79 pelanggan, dan Kutai Barat dengan jumlah 49 pelanggan dengan jumlah pembangunan 690 pelanggan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Paser dengan jumlah 293 pelanggan, Berau dengan jumlah 208 pelanggan, dan Kutai Kartanegara dengan jumlah 349 pelanggan dengan jumlah pembangunan 850 Pelanggan pada tahun 2022, Pada tahun 2023 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Berau dengan jumlah 154 pelanggan, Kutai Barat dengan jumlah 253 pelanggan, Mahakam Ulu dengan jumlah 218 pelanggan, Paser dengan jumlah 51 pelanggan dan revitalisasi 204 pelanggan dengan jumlah pembangunan 880 Pelanggan pada tahun 2023.

Infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 886 Desa dan yang bersumber dari non-PLN sebanyak 152 Desa, sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 92,29 persen pada tahun 2022 menjadi 95,18 persen pada tahun 2023.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2019 terdapat 5.253 tindak pidana, yang turun menjadi 3.270 tindak pidana pada tahun 2023.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada semester I tahun 2023 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 60,24 persen, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 80,63 persen.

Tabel II.116
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2019	5.253	670	4.583	87,25	14,47
2020	4.368	506	1.696	87,00	6,01
2021	4.184	506	3.577	85,00	6,01
2022	4.945	958	3.987	80,63	12,82
2023*)	3.270	1.300	1.970	60,24	8,36

*) Data Sementara; Sumber: POLDA KALTIM, 2024

B. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2018 s/d Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2022, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 115 dimana 20,00% (23 demonstrasi) terkait Ekonomi; 10,43% (12 demonstrasi) terkait Politik; 13,04% (15 demonstrasi) terkait Sosial; 46,09% (53 demonstrasi) terkait Hukum; 0,87% (1 demonstrasi) terkait Agama; 9,57% (11 demonstrasi) terkait Kamtibmas.

Tabel II.117
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Jenis Demo	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Ekonomi	9	9	1	8	23	65
Politik	2	0	6	5	12	36
Sosial	22	15	14	15	15	119

Jenis Demo	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Budaya	4	0	0	0	0	5
Pendidikan	0	0	0	0	0	2
Hukum	33	18	32	34	53	202
Agama	6	0	1	1	1	13
Hankam	0	0	0	0	0	1
Tapal Batas	0	0	0	0	0	0
Sengketa Lahan	0	8	14	2	0	24
Kamtibmas	0	4	2	2	11	19
Lingkungan	0	0	0	3	0	3
Jumlah	76	54	70	70	115	489

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi KALTIM, 2023

B. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2019-2023, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan *skill* tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat lokal melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.118
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

No	Uraian	PMDN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	20.837	19.952	21.596	24.829	36.977
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	2.227	3.924	9.291	4.938	15.490
3	Rasio daya serap tenaga kerja	9,36	5,08	2,32	5,03	2,39
No	Uraian	PMA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	15.166	5.868	5.650	11.609	13.330
2	Jumlah proyek seluruh PMA	903	778	1.034	742	1.991
3	Rasio daya serap tenaga kerja	16,80	7,54	5,46	15,65	6,70

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024

Sektor usaha tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2023 pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) paling banyak diserap oleh sektor pertambangan sebesar 41,03 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28,88 persen. Hal ini terjadi dikarenakan nilai realisasi investasi dan jumlah proyek terbesar pada PMDN adalah sektor pertambangan. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) paling banyak diserap oleh sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan menyerap 50,59 persen tenaga kerja, sedangkan sektor pertambangan menyerap tenaga kerja sebanyak 26,13 persen. Sama halnya seperti pada PMDN, pada PMA penyerapan tenaga kerja sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan terbanyak juga dipengaruhi dengan nilai investasi dan jumlah proyek yang tinggi pada sektor tersebut. Kemudian dengan berkembangnya investasi, efek yang akan diperoleh yakni terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

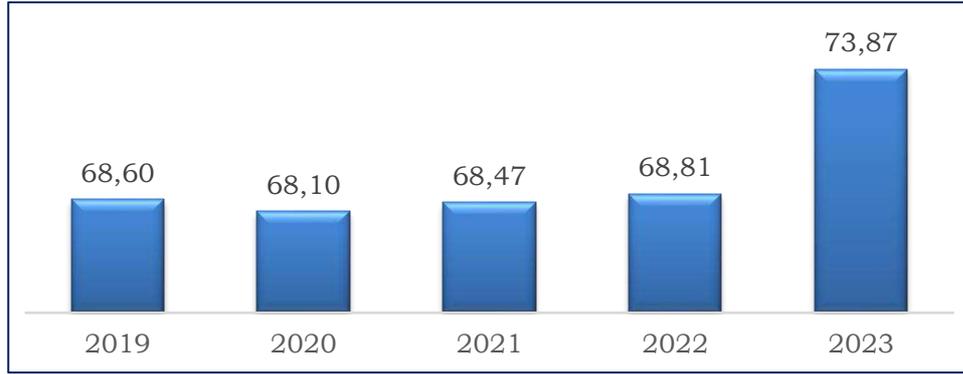
C. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Pembangunan.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy).

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kota.

Progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Secara umum, Indeks RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan berada di angka 73,87 dengan predikat BB (**Sangat Baik**).



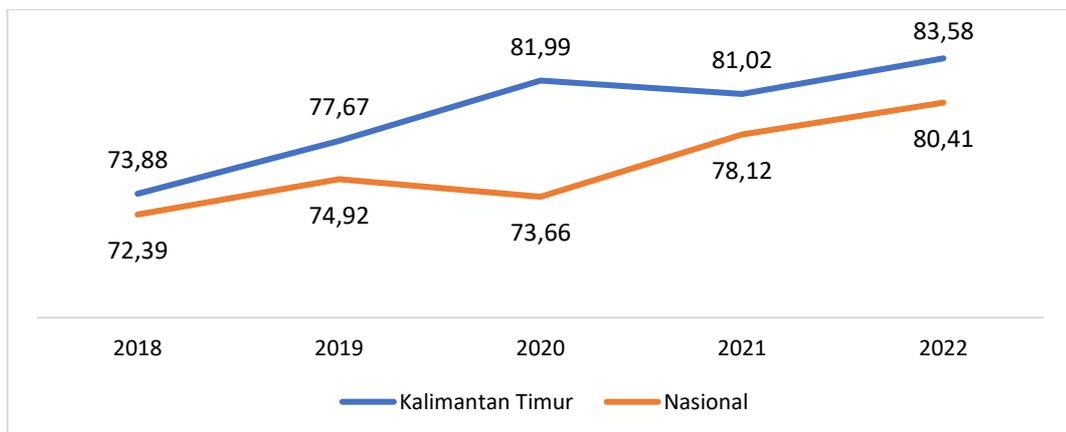
Gambar II. 12

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2024)

D. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 83,58 persen pada tahun 2022 dan di level nasional berada pada peringkat keempat, nilai indeks ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori “*high performing democracy*”. IDI Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 80,41.



Gambar II. 13

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Perkembangan IDI Kalimantan Timur dari 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi, Capaian IDI terendah pada tahun 2018 sebesar 73,88 sedangkan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 83,58. Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada *institutional democracy* seperti Lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll sedangkan pada metode baru fokus pada demokrasi yang lebih luas dimana mengurangi porsi ukuran *institutional democracy* dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator sedangkan pada metode baru hanya ada 3 aspek dan 22 indikator.

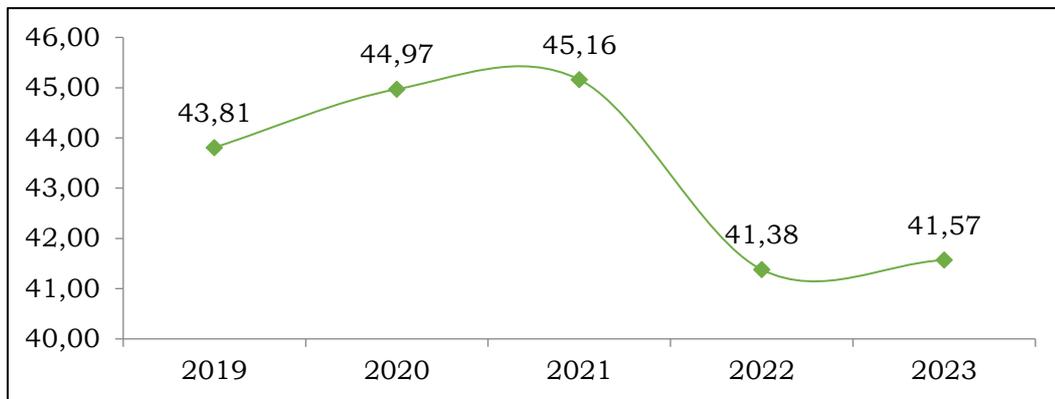
Berdasarkan capaian IDI Tahun 2022 di Kalimantan Timur, masih terdapat 1 indikator yang nilainya masih di bawah 60, yaitu Indikator Lembaga Kinerja Legislatif yang diperoleh dari persentase perda yang disahkan terhadap target Propemperda. Berdasarkan data dari sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh terdapat 8 perda yang disahkan dari 15 target yang masuk di Propemperda pada tahun 2022.

2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif dalam lima tahun terakhir relatif mengalami penurunan, meski pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun

2022 menjadi sebesar 41,57 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 41–42 orang penduduk usia non produktif. Bila disandingkan dengan tingkat kemiskinan dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan dipengaruhi oleh rasio ketergantungan, dimana pengeluaran per kapita usia produktif harus menanggung biaya hidup kelompok usia non produktif. Upaya mengurangi angka ketergantungan usia non produktif dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendidikan dan keterampilan kelompok usia produktif serta menciptakan kesempatan lapangan kerja yang melibatkan usia non produktif.



Gambar II. 14

Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2024)

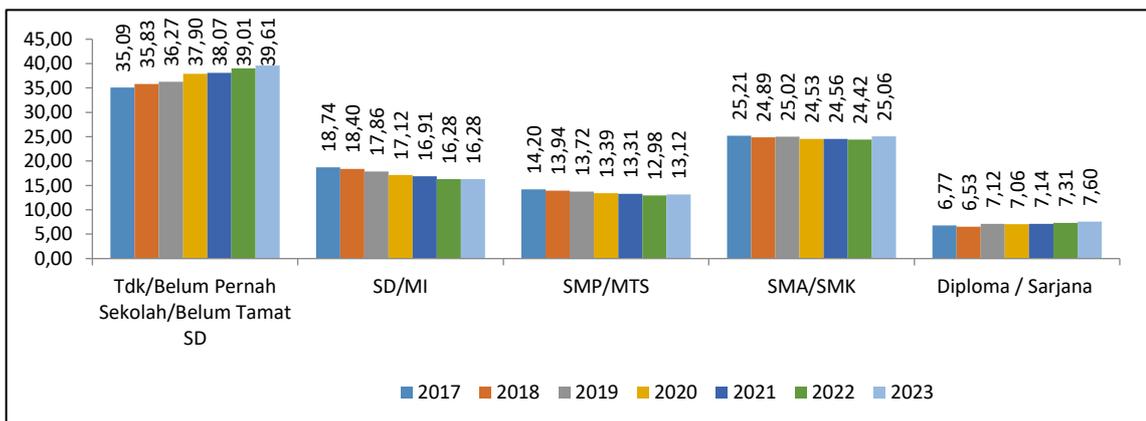
B. Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2023 hanya sebesar 7,60 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (25,06 persen), SLTP/MTs (13,12 persen) dan SD/MI (16,28 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 39,61

persen, persentase ini meningkat dibandingkan persentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II 92.

Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2023

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2024

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan

perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2023 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2025. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel II.119
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
					Pendidikan																	
1	1	01	002	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	%	83,30	763.661.010.906	83,30	763.661.010.906	85	2.121.286.644.382	86,3	1.764.510.682.259	101,53	83,18	169,60	2.528.171.693.165	203,60	331,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Kesehatan																	
2	1	02	002	[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	%	100	388.527.545	100	388.527.545	100,00	341.316.264.762	100	208.811.603.144	100,00	61,18	200	209.200.130.689	200,00	538,435	Dinas Kesehatan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
3	1	0	2	0	0	3	[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	%	67,02	62.420.498.641	67,02	62.420.498.641	50,00	5.465.364.672	70	4.316.043.475	140,00	78,97	137,02	66.736.542.116	204,45	106,91	Dinas Kesehatan
4	1	0	2	0	0	5	[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melakukan PHBS	Kab/Kota	3	8.942.326.376	3	8.942.326.376	3,00	3.461.999.000	6	4.283.096.714	200,00	123,72	9	13.225.423.090	300,00	147,90	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																								
7	1	0	3	0	0	2	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	%	76,95	79.106.639.213	76,95	79.106.639.213	78,91	193.253.006.007	92,33	159.547.226.409	117,01	82,56	169,28	238.653.865.622	219,99	301,69	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
																						Ruang dan Perumahan Rakyat
6	1	03	003	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	%	69,67	136.777.317.877	69,67	136.777.317.877	68,64	32.020.221.608	73,92	13.278.135.471	107,69	41,47	143,59	150.055.453.348	206,10	109,71	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
5	1	03	006	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	meter	2.723,70	7.768.724.512	2.723,70	7.768.724.512	3.455,00	35.289.332.326	3.977,70	21.311.627.357	115,13	60,39	670,14	29.080.351.869	246,04	374,33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tenaga Kerja																	
12	2	07	003	[PROGRAM] PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	%	62,22	832.889.618	62,22	832.889.618	70,00	1.964.336.500	88,94	1.921.990.201	127,06	97,84	151,16	2.754.879.819	242,94	330,76	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	2	07	004	[PROGRAM] PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	34,88	716.846.853	34,88	716.846.853	31,00	2.405.519.600	27,2	2.429.352.388	87,74	100,99	62,08	3.146.199.241	177,98	438,89	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
14	2	08	002	[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	Kebijakan	1	1.524.154.513	1	1.524.154.513	1	1.700.000.000	1	813.798.362	100,00	47,87	2	2.337.952.875	200,00	153,39	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Administrasi Kependudukan dan Capil																	
					Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																	
17	2	13	003		[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	Desa	38	14.814.563.403	38	14.814.563.403	30,00	16.967.095.000	30	32.547.017.292	100,00	19,82	68	47.361.580.695	178,95	319,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
16	2	13	004		[PROGRAM] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	Desa	35	2.137.318.302	35	2.137.318.302	45,00	6.749.132.300	45	7.164.084.923	100,00	106,15	80	9.301.403.225	228,57	435,19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
				Perhubungan																	
19	2	15	002	[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	kasus	195	13.615.817.387	195	13.615.817.387	342	45.981.698.840	162	15.660.218.958	152,63	34,06	357	29.276.036.345	183,08	215,01	Dinas Perhubungan
18	2	15	003	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	85	3.090.171.936	85	3.090.171.936	88,00	5.733.228.500	87	5.629.254.336	98,86	98,19	172	8.719.426.272	202,35	282,17	Dinas Perhubungan
				Komunikasi dan Informatika																	
20	2	16	003	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informa	%	97,84	7.203.081.824	97,84	7.203.081.824	70	19.579.510.680	85	18.390.102.338	121,43	93,93	182,84	25.593.184.162	186,88	355,31	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					si dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi (%)																
				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	
21	2	17	003	[PROGRAM] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	%	13	705.461.493	13	705.461.493	10	583.040.000	9,3	581.817.900	93,00	99,79	22,3	1.287.279.393	17,154	182,47	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
24	2	18	004		[PROGRAM] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	Hari	5	1.372.443.216	5	1.372.443.216	6	3.724.370.000	10	3.493.553.516	33,33	93,80	15	4.865.996.732	300,00	354,55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	2	18	005		[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	%	100	1.514.309.436	100	1.514.309.436	100	3.575.025.600	100	2.422.036.402	100,00	67,75	200	3.936.345.838	200,00	259,94	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Kepemudaan dan Olah Raga																	
26	2	19	002		[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasit	%	0,88	8.942.326.376	0,88	8.942.326.376	1,2	25.785.000.000	1,74	25.635.141.278	145,00	99,42	2,62	34.577.467.654	297,73	386,67	Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					as daya Saing Kepemu daan																	
27	2	1	0	0	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Present ase Pengem bangan Daya Saing Keolahr agaan	%	71,74	120.431 .597.84 3	71,74	120.431 .597.84 3	80	126.199. 108.400	80,3	156.846. 899.145	10 0,3 8	12 4,2 9	152, 04	277.278. 496.988	21 1,9 3	230, 24	Dinas Pemud a dan Olah Raga
					Kebudayaan																	
					Perpustakaan																	
28	2	2	0	0	[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persent ase Peningk atan Jangkau an dan Kapasit as Perpust akaan yang	%	10,64	13.499. 680.760	10,64	13.499. 680.760	11,49	12.360.8 78.308	11,98	32.730.4 80.057	10 4,2 6	26 4,7 9	22,6 2	46.230.1 60.817	21 2,5 9	342, 45	Dinas Perpust akaan dan Kearsip an Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			terakreditasi																
		Kearsipan																	
		Urusan Pilihan																	
		Kelautan dan Perikanan																	
29	32502	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Ha	293.031	3.855.107.558	293.031	3.855.107.558	297.806	6.492.268.400	293.030,79	6.225.211.732	98,40	95,89	586.061,6	10.080.319.290	200,00	261,48	Dinas Kelautan Dan Perikanan
30	32503	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	160.593	21.251.309.706	160.593	21.251.309.706	182.730	36.610.615.500	182.946	27.353.647.505	100,12	74,72	343.539	48.604.957.211	213,92	228,72	Dinas Kelautan Dan Perikanan
31	32504	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN	Jumlah Produksi	ton	161.051	6.065.065.353	161.051	6.065.065.353	178.961	7.273.735.065	179.408	6.914.006.792	100,25	95,05	340.459	12.979.072.145	211,40	214,00	Dinas Kelautan Dan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				PERIKANAN BUDIDAYA	Perikanan Budidaya																Perikanan
32	3	256	00	[PROGRAM] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Jenis	3	1.447.597.872	3	1.447.597.872	4	3.567.233.900	4	2.692.040.608	100,00	75,47	7	4.139.638.480	233,33	285,97	Dinas Kelautan Dan Perikanan
				Pariwisata																	
33	3	262	00	[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di	Destinasi	3	4.763.794.929	3	4.763.794.929	3	10.939.562.437	3	10.281.325.420	100,00	93,98	6	15.045.120.349	200,00	315,82	Dinas Pariwisata

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					kembangkan																	
34	3	2	0	0	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	%	23,53	2.535.799.565	23,53	2.535.799.565	23,5	7.213.299.000	23,53	8.085.493.278	100,13	112,09	47,06	10.621.292.843	200,00	418,85	Dinas Pariwisata
					Pertanian																	
35	3	2	0	0	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi ;	Ton	280.665	38.729.839.200	280.665	38.729.839.200	289.846	42.247.243.130	215.290	39.249.999.706	74,28	92,91	495,955	77.979.838.906	176,71	201,34	Dinas Pangan / Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	380.283		380.283		292.383,00		352.160,53		120,44		732.443,5		192,60		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Jumlah				249,00		285		114,46		285					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	Kali					50		50			100,00		50			Dinas Pangan / Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	%					82		110,21			134,40		110,21			Dinas Pangan / Tanaman Pangan dan Hortikultura
36	3	27	002	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	Ton	17.022.588	11.156.061.775	17.022.588	11.156.061.775	18.313.874,25	7.122.478.500	19.206.915	6.851.745.460	104,88	96,20	362.29503	18.007.807.235	212,83	161,42	Dinas Perkebunan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
37	3	2	002	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	%	21	2.975.608.741	21	2.975.608.741	22	13.042.871.695	22,06	12.422.896.770	100,27	95,25	43,06	15.398.505.511	205,05	517,49	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
38	3	2	003	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ;	Ha	8.000		8.000		8.500		8.500		100,00	94,38	16500	5.519.753.723	206,25	191,99	Dinas Pangan , Tanaman Pangan dan Hortikultura
					2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	Unit	7	2.875.053.809		2.875.053.809		2.802.118.570		2.644.699.914		100,00		14		200,00	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
39	3	27	003	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ;	Kelompok	36	6.037.862.000	36	6.037.862.000	30,00	9.053.510.000	33	8.324.913.700	110,00	91,95	69	14.362.775.700	191,67	237,88	Dinas Perkebunan
					2) Luas Kebun yang dibangun	Ha	1.575.966	1.575.966	1.500.674	1.575.177	104,96	3151143	199,95								
40	3	27	003	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	49	7.757.188.752	49	7.757.188.752	30	5.309.353.900	30	5.288.661.726	100,00	99,61	79	13.045.850.478	161,22	168,18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
41	3	27	005	[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	Juta Ton CO2e q	7,92	1.181.406.320	7,92	1.181.406.320	4,044	5.081.550.200	8,59	5.000.043.084	212,41	98,40	16,51	6.181.449.404	208,46	523,23	Dinas Perkebunan
42	3	27	006	[PROGRAM] PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	Perusahaan	36	583.449.050	36	583.449.050	35	1.247.873.900	35	1.233.298.575	100,00	98,83	71	1.816.747.625	197,22	311,38	Dinas Perkebunan
43	3	27	007	[PROGRAM] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina ;	Orang	333	3.522.700.804	333	3.522.700.804	441	5.445.100.400	546	5.374.904.520	123,81	98,71	879	8.897.605.324	263,96	252,58	Dinas Pangan / Tanaman Pangan dan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																						Hortikultura
					2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koperasi yang dibangun	Lembaga	4		4		4		4		100,00		8		200,00			Dinas Pangan / Tanaman Pangan dan Hortikultura
44	3	2	0	0	[PROGRAM] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	lembaga	1	2.131.689.820	1	2.131.689.820	1	4.002.247.100	1	3.893.699.032	100,00	97,29	2	6.025.388.852	200,00	282,66		Dinas Perkebunan
					Kehutanan																	
45	3	2	0	0	[PROGRAM] PROGRAM	M3	4.471.286,16	15.163.952.667	4.471.286,16	15.163.952.667	5.050.000,00	244.466.926.072	5.549.203,21	38.053.144.588	109,89	15,57	10020489	53.217.097.255	224,11	350,94		Dinas Kehutanan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					PENGLOLAAN HUTAN	Hutan Kayu;																
						2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	826,05		826,05	730		1.078,00		147,67		190,405		23,050			Dinas Kehutanan
46	3	28	005		[PROGRAM] PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	48.258	25.806.300.490	48.258	25.806.300.490	32.000	79.319.157.333	32.441	29.343.229.867	101,38	36,99	806,99	55.149.530.357	167,22	213,71	Dinas Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral																						
47	3	29	005		[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	%	7,27	2.003.793.750	7,27	2.003.793.750	11,6	5.795.245.500	11,44	5.581.072.328	98,62	96,30	18,71	7.584.866.078	257,36	378,53	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
48	3	29	006		[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.197.475	41.149.510.955	1.197.475	41.149.510.955	1.230.000	60.248.834.460	1.255.013	57.822.634.877	102,03	95,97	245,2488	98.972.145.832	204,80	240,52	Dinas Energi dan Sumber

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																						Daya Mineral
					Perdagangan																	
49	33005			[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	%	15,85	556.639.658	15,85	556.639.658	5,00	1.671.425.175	-25,09	1.627.880.804	-50,180	97,39	-9,24	2.184.520.462	-58,30	392,45		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Perindustrian																	
50	33102			[PROGRAM] PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan	Industri	2	3.818.212.642	2	3.818.212.642	3,00	1.958.039.000	4	1.929.378.779	133,33	98,54	6	5.747.591.421	300,00	150,53		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			peruntukan industri																
		Transmigrasi																	
		Urusan Pendukung																	
		Sekretariat Daerah																	
51	401002	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	81,03	3.386.637.313	81,03	3.386.637.313	89	7.065.124.500	100	5.622.942.081	112,36	79,59	181,03	9.009.579.394	223,41	266,03	Biro Organisasi
			Persentase Perangkat Daerah Nilai	%	89,19		89,19		81		97,3		120,12		186,49		209,09		Biro Organisasi

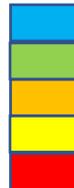
No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Keuangan																	
52	5	02	002	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	%	144,72	879.861.347	144,72	879.861.347	1.292.370.000	1.126.641.699		87,18	144,72	2.006.503.046	100,00	228,05			Badan Pendapatan Daerah
					Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	Wajib Pajak	697		697	777		520	66,92	1217		174,61				Badan Pendapatan Daerah	
53	5	02	004	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target	%	127,19	8.768.789.802	127,19	8.768.789.802	100	21.231.997.300	117,72	14.565.568.846	117,72	68,60	244,91	23.334.358.648	192,55	266,11	Badan Pendapatan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			pendapatan asli daerah																
			Kepegawaian																
			Pendidikan dan Pelatihan																
			Penelitian dan Pengembangan																
			Penghubung																
			Pengawasan Urusan Pemerintah																
			Inspektorat																
54	6012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akunta	%	90	9.872.851.607	90	9.872.851.607	95	13.690.565.500	100	11.884.352.644	105,26	86,81	190	21.757.204.251	211,11	220,37	Inspektorat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			nsi Pemerintah (SAP)																
		Urusan Pemerintahan Umum																	
		Kesatuan Bangsa dan Politik																	

Keterangan :

- Sangat Tinggi : $\geq 90,01$
- Tinggi : 75,01 - 90
- Sedang : 65,01 - 75
- Rendah : 50,01 - 65
- Sangat Rendah : ≤ 50



Dari total 54 (lima puluh empat) program prioritas yang ditetapkan dalam P-RKPD tahun 2023, terdapat sebanyak 68 (enam puluh delapan) indikator yang menjadi target kinerja pembangunan yang harus dicapai agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai berhasil. Dari total indikator yang telah ditentukan tersebut, sebanyak 53 (lima puluh tiga) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, dan sebanyak 15 (lima belas) masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2023.

Tabel II. 120
 Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
[MISI] 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas						
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,44	77,75	77,75	78,20	100,58
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,92	10,17	10,17	9,99	98,23
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,84	14,13	14,13	14,02	99,22
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,88	0,4	0,88	0,88	100,00
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,62	74,75	74,75	74,72	99,96
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	66,64	65,7	66,97	66,89	99,88
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,31	5,90	5,90	6,11	96,44
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,71	6,5	6,00	5,31	111,50
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,732	0,69	0,74	0,7526	101,70
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	25,08	40,00	40,00	27,47	68,68
[MISI] 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan						
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,48	3,5±1	4,30-5,10	6,22	144,65

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	PDRB per Kapita (Juta Rp)	238,7	175	235-265	215,76	91,81
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	6,11	2,50	5,80-6,60	8,13	140,17
	Nilai Tukar Petani	126,03	120,00	128,00	129,04	100,81
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	15.909	12.122	18.698	17.981	96,17
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	5,05	1,89	1,89	4,25	224,87
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	8,24	9,86	9,86	7,98	80,93
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,43	0,65	0,65	0,49	75,38
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,27	0,37	0,37	0,31	83,78
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,22	5,30	5,30	4,74	89,43
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,28	1,72	1,72	1,48	86,05
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,81	1,08	1,08	0,96	88,89
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	36,17	35,67	40	49,6	124,00
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,13	13,50	15,13	14,86	98,22
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	8,58	9,91	9,91	9,16	92,43
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	14,38	15,68	15,68	5,61	35,78
[MISI] 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan						

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKPDP Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,327	0,308	0,308	0,322	95,45
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	8.513.323	8.100.000	10.613.323	10.049.451	94,69
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	513.031.229	370.000.000	605.744.460	584.819.416	96,55
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	5	7	7	7	100,00
	Capaian akses air minum layak (%)	77,56	70,53	78	79,54	101,97
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14108,5	14.778,50	14.778,50	14.797,50	100,13
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1185,14	1137,82	1137,82	1174	96,82
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	318,9	329,00	250	209,5	116,20
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	78,57	83,1	83,1	83,1	100,00
	Rasio elektrifikasi (%)	93,09	95	94,87	95,18	100,33
[MISI] 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan						
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,46	76,15	76,15	75,47	99,11
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	70,68	29,33	29,33	49,46	168,63
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	146,67	150,49	150,49	150,49	100,00
[MISI] 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih profesional dan berorientasi pelayanan publik						
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,81	B (72,00)	B (68,81)	BB (73,87)	107,35
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	83	85,00	85,82	100,96
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,44	3,3	3,3	2,91	88,18
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,1	78	77,89	77,89	100,00
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	100,00

Dari 6 tujuan dan 19 sasaran yang ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2023, terdapat 44 (empat puluh empat) indikator tujuan dan sasaran. Dari total indikator tersebut, sebanyak 20 (dua puluh) indikator telah melampaui target di tahun 2023, dan sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator masih belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2023.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Indikator Makro Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi.

Pada wilayah Kalimantan Timur masih terdapat indikator yang memiliki kinerja belum optimal. Adapun permasalahan pembangunan tersebut diidentifikasi berdasarkan analisis konsisi perekonomian dan sosial daerah secara makro, serta hasil capaian pada tujuan/sasaran pembangunan daerah berdasarkan evaluasi RKPD Tahun 2023.

Berdasarkan hasil capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, maka secara umum permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 4 (empat) Aspek permasalahan yaitu (1) Aspek Sumber Daya Manusia, (2) Aspek Ekonomi Wilayah, (3) Aspek Lingkungan Hidup, dan (4) Aspek Tata Kelola.

Pada **Aspek Sumber Daya Manusia**, pembangunan di Kalimantan Timur menghadapi tantangan kompleks yang secara langsung terkait dengan beberapa permasalahan utama yaitu:

1. Belum Optimalnya Kualitas dan Akses Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Secara Merata

Permasalahan dalam akses dan kualitas pendidikan merupakan hambatan utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Keterbatasan infrastruktur pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana, serta ketidakmerataan distribusi guru berkualifikasi menciptakan kesenjangan dalam pendidikan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan dasar di kalangan masyarakat, yang menghambat potensi ekonomi dan perkembangan sosial.

Secara keseluruhan, hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur memiliki IPM di atas rata-rata nasional (74.39) pada tahun 2023, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa kabupaten/kota yang memiliki IPM di atas rata-rata nasional disebabkan adanya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan dan perbaikan ekonomi di wilayah tersebut. Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang merupakan pusat dari berbagai kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, kesehatan, bisnis dan lain-lain. Hal ini yang mendukung ketiga kota tersebut dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup lengkap dan memadai serta kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan maupun kesehatan juga ditemui pada ketiga kota tersebut. Kondisi sebaliknya dialami oleh kabupaten Mahakam Ulu dimana ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta akses untuk mencapainya relatif terbatas. Hal ini terkait juga dengan kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang relatif sulit sehingga berdampak terhadap akses masyarakat pada sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

2. Belum Terpenuhinya Akses dan Layanan Kesehatan Berkualitas serta Masih Tingginya Prevalensi Stunting

Keterbatasan akses dan layanan kesehatan berkualitas menjadi kendala serius dalam pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya sarana medis, kurangnya tenaga medis yang berkualifikasi, dan akses terbatas terhadap informasi kesehatan menyebabkan tingginya prevalensi stunting dan masalah kesehatan lainnya. Stunting menjadi indikator buruknya akses terhadap gizi yang baik dan layanan kesehatan yang tepat waktu.

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila < 20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7 persen, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9 persen dan sedikit

mengalami penurunan di tahun 2023 mencapai 22,90 persen. Angka ini di atas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5 persen. Secara regional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan ke 16 (enam belas). Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 masih tinggi yaitu di atas 20 persen, kecuali Kabupaten Mahakam Hulu dan Kota Balikpapan yang masing-masing mencapai 14,8 persen dan 19,6 persen.

3. Belum Optimalnya Penyediaan Tenaga Kerja yang Kompetensinya Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Penyediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi dan industri. Kurangnya kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja menghambat produktivitas dan inovasi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas.

Meskipun TPT Kaltim mengindikasikan penurunan, namun peringkat TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada tahun 2023 sebesar 5,31% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Secara Nasional, Kaltim menempati 5 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 5,32%.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai 27,47 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Rasio daya serap memperlihatkan

bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2019-2023, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan skill tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit.

4. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender serta Masih Minimnya Peran Disabilitas dalam Pembangunan Daerah

Ketidaksetaraan gender dan minimnya peran disabilitas dalam pembangunan menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kurangnya kesempatan dan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan kaum disabilitas menyebabkan kesenjangan yang signifikan dalam partisipasi mereka dalam pembangunan. Hal ini mengurangi potensi sumber daya manusia yang tersedia bagi pembangunan berkelanjutan.

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dengan capaian 57,53 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 66,89. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 20,00 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,02 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 49,78 persen.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota

lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 81,11 sedangkan Bontang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 46,12 yang artinya bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur juga menghadapi beberapa permasalahan yang erat kaitannya dengan **Aspek Ekonomi Wilayah**. Berikut penjelasan yang mendalam terkait permasalahan tersebut:

1. Belum Optimalnya Upaya Diversifikasi Ekonomi

Ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan penggalian menyebabkan kerentanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketidakstabilan harga komoditas dan penurunan permintaan global dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk penurunan pendapatan dan kerugian lapangan kerja. Diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap perubahan global.

Berbasis data sampai dengan tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih lambat jika dibandingkan dengan LPE Nasional. Hal tersebut karena lapangan usaha di Kaltim masih didominasi oleh 1 (satu) sektor unggulan yaitu pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan Ekonomi naik namun tidak diiringi dengan kontribusi sektor non ekstraktif, sektor ekstraktif masih mendominasi perekonomian di Kaltim.

Secara umum, perkembangan Perkembangan PDRB Per Kapita (ADHK) provinsi yang ada di Wilayah Kalimantan mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur paling

tinggi diantara provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, yaitu sebesar 4,78%. Kemudian tertinggi kedua Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,55%, selanjutnya Provinsi Kalimantan Utara dengan laju pertumbuhan sebesar 3,51%, diikuti Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,09%. Sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2,77% terendah dibandingkan daerah Kalimantan lainnya. Dilihat dari nilai PDRB per kapita (ADHB) pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan penambahan terbesar hingga mencapai 9,16 juta rupiah, diikuti Provinsi Kalimantan Selatan yang bertambah sekitar 3,53 juta rupiah dan Kalimantan Barat sebesar 2,72 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan kondisi di Kaltim, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 23,16 juta rupiah.

2. Kerentanan Terhadap Ketahanan Pangan dan Ketahanan Air

Meskipun Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam, wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam hal ketahanan pangan dan ketahanan air. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan urbanisasi yang cepat dapat mengancam ketersediaan pangan dan air bersih bagi masyarakat. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko kekeringan dan banjir, yang dapat mengganggu produksi pangan dan menyebabkan kerugian bagi petani dan masyarakat lokal.

Kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur per tahun kurang lebih 456 ribu ton, sedangkan ketersediaan beras lokal hanya mencapai 300 ribu ton pertahun. Berdasarkan kondisi tersebut maka hasil dari beras lokal di Kalimantan Timur masih kurang untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kalimantan Timur. Upaya memenuhi kekurangan ketersediaan beras di Kalimantan Timur ini bergantung kepada *supply* dari daerah lain di luar Provinsi Kalimantan Timur seperti dari daerah Sulawesi.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 luas panen padi sebesar 73.568,44 Hektar dan terus menyusut menjadi 66.269,46 Hektar pada tahun 2021 dan menyusut kembali menjadi 64.970,01 Hektar pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 menjadi 57.080 Hektar. Kondisi ini menyebabkan jumlah produksi beras yang dihasilkan juga semakin berkurang. Pada tahun 2020 produksi beras Kaltim mencapai 151.863,46 Ton, namun berkurang menjadi 142.321,38 Ton pada tahun 2021 dan berkurang lagi menjadi 139.266,10 Ton pada tahun 2022 hingga pada tahun 2023 menjadi 126.970 Ton.

Berkaitan dengan Ketahanan Air, Indeks Ketahanan Air (IKA) adalah ukuran yang penting dalam mengevaluasi kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduknya dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya airnya. Angka IKA menunjukkan seberapa baik suatu wilayah mampu mengelola dan menggunakan sumber daya airnya secara efisien dan berkelanjutan. Adapun Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan skor IKA sebesar 71,9, hal ini menandakan bahwa provinsi tersebut memiliki tingkat ketahanan air yang moderat, dengan batas bawah yang masih cukup stabil. Skor 71,9 menunjukkan bahwa Kaltim memiliki sejumlah tantangan dalam manajemen airnya, namun masih dalam kategori yang dapat dikelola.

Krisis air dan krisis pangan seringkali berjalan beriringan. Ketika suatu wilayah mengalami kekeringan atau pencemaran air yang parah, pasokan pangan lokal dapat terganggu secara signifikan karena penurunan produksi pertanian. Ini dapat memicu peningkatan impor pangan, meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global, dan mengakibatkan ketidakmampuan bagi sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar.

3. Masih Relatif Tingginya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan yang relatif tinggi sering kali menjadi cerminan dari permasalahan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif telah menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu rentan terhadap perubahan harga komoditas atau perubahan dalam permintaan global. Jika sektor ini mengalami penurunan, maka wilayah tersebut bisa mengalami kemerosotan ekonomi yang signifikan dan meningkatkan angka kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, dan peluang kerja serta antara kelompok sosial dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, Angka kemiskinan yang tinggi juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai pembangunan ekonomi.

4. Belum Optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Infrastruktur:

Infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi masih belum merata dan terintegrasi dengan baik di seluruh Kalimantan Timur. Kurangnya aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, investasi, dan mobilitas penduduk. Infrastruktur pendukung ekonomi seperti pelabuhan, bandara, dan pusat logistik juga perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama

Begitu pula permasalahan yang berkaitan erat dengan **Aspek Lingkungan Hidup** menyebabkan pembangunan yang tidak berkelanjutan di Kalimantan Timur telah menimbulkan sejumlah permasalahan. Berikut adalah penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan tersebut:

1. Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Risiko Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor ekstraktif seperti pertambangan dan penggalian, telah meningkatkan tekanan terhadap lingkungan hidup. Deforestasi, degradasi tanah, dan kerusakan ekosistem menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Penurunan kualitas udara dan air, hilangnya habitat satwa liar, serta kerusakan ekosistem hutan merupakan dampak negatif yang signifikan dari aktivitas ekonomi yang tidak terkelola dengan baik.

Dari tahun 2020 hingga 2023, Provinsi Kalimantan Timur menghadapi serangkaian tantangan yang signifikan terkait kondisi lingkungan hidupnya. Pada awal periode ini, provinsi ini masih terus berjuang melawan dampak deforestasi yang telah menggerogoti hutan-hutan tropisnya selama bertahun-tahun. Aktivitas pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan illegal logging serta illegal mining menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang meresahkan.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah upaya mengatasi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan batu bara yang terus meningkat. Ekspansi tambang batu bara yang tidak terkendali telah menimbulkan kerusakan ekosistem yang luas, termasuk pencemaran air dan udara serta hilangnya habitat bagi spesies endemik

2. Peningkatan Emisi dan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan industri telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida dan metana. Hal ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan

dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan dan mengancam kehidupan satwa liar, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan ekonomi lokal.

Peningkatan emisi gas rumah kaca dan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan memang menjadi perhatian utama di wilayah Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, ekspansi industri, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan peningkatan deforestasi dan degradasi lahan, yang pada gilirannya meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk risiko kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 yaitu 75,06, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 75,47. Meskipun pencapaian tersebut masih dalam kategori “Baik”, namun dari 4 (empat) indikator antara lain Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Yang perlu menjadi perhatian yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang mana hasil capaiannya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Rendahnya Implementasi Energi Baru dan Terbarukan

Meskipun Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti energi surya, angin, dan hidro, namun implementasinya masih rendah. Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil, terutama batu bara, telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Rendahnya investasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi kendala utama dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup.

Dari target bauran EBT yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 12,39 persen dan ditargetkan terus meningkat menjadi 28,72 persen

hingga tahun 2050, sampai dengan semester pertama 2023, bauran EBT Kaltim masih berkisar pada angka 10 persen. Artinya, Kaltim perlu menggenjot 2,3 persen penggunaan EBT di sejumlah kabupaten dan kota untuk mencapai target pada tahun 2025.

Selanjutnya permasalahan pembangunan yang terkait dengan **Aspek Tata Kelola**, Pemerintahan di Kalimantan Timur menggambarkan tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Berikut adalah penjelasan yang mendalam terkait permasalahan tersebut:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Meskipun telah ada upaya untuk melakukan reformasi birokrasi, pelaksanaannya masih belum optimal di berbagai aspek penilaian. Capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi belum sepenuhnya tercapai, hal ini tercermin dari proses birokrasi yang masih rumit dan terkadang memakan waktu yang lama. Pembangunan zona integritas juga belum merata di semua unit kerja, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi. Sementara itu, kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi publik.

2. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor

Kualitas data statistik sektor masih menjadi masalah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah. Keterbatasan dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data statistik sektor tertentu menghambat pemahaman yang komprehensif tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kalimantan Timur. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya efektivitas intervensi pembangunan.

3. Belum Optimalnya Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting

Meskipun upaya telah dilakukan untuk melakukan digitalisasi administrasi pemerintahan, terutama dalam fokus penanganan stunting, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya keterampilan digital di kalangan birokrasi, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan utama dalam pengembangan sistem administrasi yang terintegrasi dan efisien.

Tabel II. 1
Permasalahan Pembangunan Indikator Makro

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100.58%	<p>1. Kaltim memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan regional Kalimantan, namun memiliki pertumbuhan IPM yang lebih lambat jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.</p> <p>2. Kaltim memiliki IPM yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM secara nasional. Namun lebih spesifik angka masih terdapat kabupaten yang memerlukan percepatan perkembangan IPM. Yaitu pada wilayah Mahakam Ulu yang kategori IPM nya masih rendah; dan Kabupaten Berau dengan pertumbuhan IPM yang relatif lebih lambat.</p>	<p>1. Pertumbuhan IPM yang Lambat Dibandingkan dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan: Kaltim memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi daripada rata-rata regional Kalimantan. Namun demikian, terdapat kekhawatiran terkait pertumbuhan IPM yang lambat jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Hal ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan IPM di Kaltim dan perbandingannya dengan provinsi lain, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat pertumbuhan IPM tersebut.</p> <p>2. Kabupaten dengan IPM Rendah dan Pertumbuhan Lambat: Meskipun secara keseluruhan IPM Kaltim berada di atas rata-rata nasional, terdapat kabupaten-kabupaten tertentu yang masih memerlukan perhatian khusus. Contohnya, wilayah</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		<p>3. IPM Kaltim masih di dorong oleh komponen pengeluaran masyarakat dimana selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan paling cepat sampai dengan 6.28%, sedangkan pertumbuhan terhadap komponen kesehatan dan pendidikan masih lambat. Kondisi yang perlu diperhatikan adalah TPT yang masih relatif tinggi dan dapat dilihat sebagai indikator rendahnya daya saing pencari kerja.</p>	<p>Mahakam Ulu memiliki kategori IPM yang rendah, sementara Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan IPM yang relatif lebih lambat. Perlu adanya strategi dan program yang terfokus untuk meningkatkan IPM di kedua kabupaten tersebut, dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan IPM di tingkat lokal.</p> <p>3. Ketergantungan IPM Kaltim pada Komponen Pengeluaran Masyarakat: Terdapat kecenderungan bahwa pertumbuhan IPM di Kaltim masih didorong terutama oleh komponen pengeluaran masyarakat, yang mengalami pertumbuhan paling cepat dalam lima tahun terakhir. Namun, pertumbuhan terhadap komponen kesehatan dan pendidikan masih tergolong lambat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan investasi dan fokus pada sektor kesehatan dan pendidikan untuk mencapai pertumbuhan IPM yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh.</p>
Tingkat Kemiskinan (%)	96.44%	<p>1. Secara kumulatif, kemiskinan Provinsi Kaltim masih dibawah angka kemiskinan nasional. Namun selama 5 tahun terakhir, kemiskinan di Kaltim mengalami peningkatan yang berkorelasi dengan TPT.</p> <p>2. Persentase masyarakat</p>	<p>1. Analisis Mendalam Terhadap Penyebab Peningkatan Kemiskinan: Pertama-tama, kami merekomendasikan untuk melakukan analisis mendalam terhadap penyebab peningkatan kemiskinan selama 5 tahun terakhir di Kaltim. Analisis ini harus mencakup berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pembangunan, akses terhadap layanan publik, dan faktor-faktor sosial lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang akar penyebab kemiskinan yang</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		<p>miskin di desa masih lebih tinggi jika dibandingkan kota. Kondisi ini menindikasikan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah.</p> <p>3. Kabupaten Mahulu dan Kutai Barat merupakan wilayah yang Presentase Angka Kemiskinan yang lebih angka kemiskinan nasional, yang diikuti dengan pertumbuhan kemiskinan positif pada beberapa kabupaten/kota di Kaltim.</p>	<p>sedang berkembang, langkah-langkah yang lebih tepat dan efektif dapat dirumuskan.</p> <p>2. Penyusunan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial: Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami merekomendasikan penyusunan program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang terfokus dan berkelanjutan. Program-program ini harus dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan regional. Pemberdayaan ekonomi mikro dan usaha kecil-menengah (UKM) juga harus menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi kemiskinan.</p> <p>3. Penguatan Infrastruktur dan Akses Pelayanan Publik: Upaya untuk meningkatkan infrastruktur dasar dan akses terhadap pelayanan publik juga sangat penting. Ini termasuk pembangunan jaringan transportasi yang memadai, penyediaan air bersih, listrik, dan sanitasi yang layak, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Penguatan infrastruktur ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru dan mengurangi kesenjangan antara wilayah yang terpencil dan pusat perkotaan.</p> <p>4. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil: Dalam implementasi program-</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>program tersebut, penting untuk membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan ini akan memungkinkan penyebaran sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.</p> <p>5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Terakhir, kami merekomendasikan pembentukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau kemajuan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan. Dengan pemantauan yang teratur dan evaluasi yang obyektif, dapat diidentifikasi strategi yang efektif dan perbaikan yang diperlukan dalam upaya penyelesaian masalah kemiskinan di Kaltim.</p>
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	111.50%	<p>1. Tingginya TPT Kaltim dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan menunjukkan adanya indikasi bahwa di Provinsi Kaltim terdapat kurangnya kesempatan kerja yang lebih ditinggi dibanding regional Kalimantan.</p> <p>2. Adanya penyerapan tenaga kerja yang tidak merata di wilayah Kaltim, diperlukan peningkatan daya saing tenaga kerja dengan fokus pada wilayah dengan TPT</p>	<p>1. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Investasi: a. Mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur di sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, seperti sektor industri, pariwisata, pertanian, dan energi. b. Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kecil-menengah (UKM), sehingga dapat menciptakan peluang kerja baru di berbagai sektor ekonomi.</p> <p>2. Pengembangan Keterampilan dan Pendidikan: a.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		<p>tertinggi. Wilayah Kaltim dengan TPT yang lebih tinggi dibanding TPT Kaltim dan TPT Nasional adalah Kutai Barat, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kutai Timur, dan Kota Samarinda.</p>	<p>Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global.</p> <p>b. Mengembangkan program-program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di wilayah-wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi, seperti Kutai Barat, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kutai Timur, dan Kota Samarinda.</p> <p>3. Promosi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal:</p> <p>a. Mendorong pengembangan kewirausahaan di tingkat lokal dengan memberikan dukungan dalam hal pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar.</p> <p>b. Membangun jaringan kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha lokal.</p> <p>4. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung:</p> <p>a. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur, peningkatan regulasi bisnis, serta insentif pajak bagi investor.</p> <p>b. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan melalui upaya-upaya deregulasi dan penguatan tata kelola ekonomi yang baik.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	121.96%	<p>1. Berbasis data sampai dengan 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih lambat jika dibandingkan dengan LPE nasional. Hal tersebut karena lapangan usaha di Kaltim masih didominasi oleh 1 sektor unggulan yaitu pertambangan dan pengalihan.</p> <p>2. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Paser, Kota Bontang dan Mahakam Ulu yang tumbuh kurang dari 3% pada tahun 2022.</p>	<p>1. Diversifikasi Ekonomi dan Hilirisasi: Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya di Kaltim, seperti pariwisata, industri pengolahan, pertanian, dan energi terbarukan. Hal ini dapat dilakukan melalui insentif pajak, fasilitasi perizinan, dan program-program pengembangan ekonomi lokal.</p> <p>2. Investasi dalam Pengembangan Infrastruktur: Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas, termasuk jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing wilayah, mendorong investasi baru, serta membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Kaltim.</p> <p>3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Melakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Kaltim. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal serta meningkatkan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah.</p> <p>4. Pendorong Kewirausahaan dan Industri Kecil-Menengah (IKM): Memberikan dukungan kepada para pengusaha lokal dan industri</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>kecil-menengah (IKM) untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan mereka. Ini bisa dilakukan melalui bantuan teknis, akses ke pembiayaan yang terjangkau, dan promosi pasar lokal dan internasional bagi produk-produk IKM.</p> <p>5. Program Revitalisasi Wilayah Tertinggal: Merancang program revitalisasi khusus untuk wilayah-wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah, seperti Paser, Kota Bontang, dan Mahakam Ulu. Program ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan dan teknologi tepat guna, pemberian insentif investasi, dan pengembangan produk/komoditi unggulan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.</p>
<p>PDRB per Kapita (Juta Rp)</p>	<p>100.00%</p>	<p>1. Provinsi Kalimantan Timur memiliki laju pertumbuhan PDRB Per Kapita yang paling lambat di antara provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, yaitu turun sebesar 0.024%. Terjadi penurunan pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur sebesar -3.274 juta rupiah per tahun.</p>	<p>1. Stimulus Ekonomi dan Investasi: Mendorong investasi dalam sektor-sektor ekonomi potensial di Kaltim, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, industri pengolahan, pertanian, dan energi terbarukan. Hal ini dapat dilakukan melalui insentif pajak, fasilitasi perizinan, dan promosi investasi lokal maupun asing.</p> <p>2. Penguatan Sektor-Sektor Unggulan: Mengembangkan sektor-sektor unggulan yang telah ada, seperti sektor pertambangan, dengan memperbaiki efisiensi operasional, inovasi/industri pengolahan untuk meraih nilai tambah, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk mendiversifikasi pemanfaatan sumber daya</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		<p>2. Secara umum, sebagian besar wilayah di Kaltim mengalami penurunan PDRB per kapita selama 4 tahun terakhir, yaitu pada wilayah Kutim, Mahulu, Kubar, Berau, PPU, Bontang, dan Balikpapan.</p>	<p>alam ke sektor-sektor lain yang berkelanjutan seperti Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.</p> <p>3. Pengembangan Infrastruktur: Melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi, untuk meningkatkan konektivitas antar-wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Kaltim.</p> <p>4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, termasuk industri kecil-menengah (IKM) dan koperasi, untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan teknis, serta akses terhadap pembiayaan yang terjangkau.</p> <p>5. Revitalisasi Wilayah Tertinggal: Merancang program revitalisasi khusus untuk wilayah-wilayah yang mengalami penurunan PDRB per kapita, seperti Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Bontang, dan Balikpapan. Program ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, serta insentif investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>6. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung: Merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam hal regulasi bisnis/kemudahan investasi, insentif pajak, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.</p>
<p>LPE Non Migas dan Batubara (%)</p>	<p>136.67%</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi naik namun tidak diiringi dengan kontribusi sektor non ekstraktif, sektor ekstraktif masih mendominasi perekonomian di Kaltim.</p>	<p>1. Melalui strategi diversifikasi ekonomi, Kaltim dapat mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan menciptakan peluang baru di sektor-sektor non-ekstraktif yang potensial. Pemberdayaan sektor non-ekstraktif menjadi kunci utama dalam upaya ini, dengan memberikan dukungan yang kuat kepada pelaku usaha lokal dan memfasilitasi inovasi serta penelitian untuk meningkatkan daya saing. Promosi investasi dan pengembangan infrastruktur yang terus menerus akan mempercepat pertumbuhan sektor-sektor non-ekstraktif, sementara kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan membantu menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan keberlanjutan lingkungan;</p> <p>2. Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama dalam upaya ini, dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk menghasilkan tenaga</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor non-ekstraktif;</p> <p>3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, termasuk industri kecil-menengah (IKM) dan koperasi, untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan teknis, serta akses terhadap pembiayaan yang terjangkau.</p>
<p>Nilai Tukar Petani</p>	<p>100.81%</p>	<p>Subsektor Tanaman pangan dan perikanan masih memiliki indeks NTP kurang dari 100.</p>	<p>1. Pengembangan Segmen, perluasan akses pasar, Efisiensi Jalur Distribusi dan stabilitas harga: Mendorong pembangunan infrastruktur pasca-panen dan jaringan distribusi yang efisien untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk tanaman pangan dan hasil perikanan. Hal ini akan membantu petani dan nelayan untuk menjual produk-produk pangan dan perikanan dengan harga yang lebih baik. Mendorong pengembangan pasar lokal dan pengolahan produk di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk tanaman pangan dan perikanan. Menjaga pemenuhan kebutuhan pangan dan perikanan untuk pengendalian stabilitas harga. Dengan demikian, petani dan nelayan akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari hasil komoditas.</p> <p>2. Optimalisasi sistem produksi dan industri pengolahan dengan penerapan teknologi tepat guna: penyediaan input, sarana dan prasarana</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>produksi, serta teknologi pasca panen.</p> <p>3. Penguatan keterampilan/ vokasional dan dukungan sistem informasi untuk penyuluhan (cyber extention): Memberikan pelatihan/pendampingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada petani dan nelayan dalam hal teknik bercocok tanam yang modern, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, serta penggunaan teknologi pertanian yang tepat guna. Ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka.</p> <p>4. Pemberian Insentif dan Dukungan Keuangan: Memberikan insentif dan dukungan keuangan kepada petani dan nelayan, seperti subsidi input produksi dan penguatan modal usaha.</p> <p>5. Promosi Kemitraan dan Koordinasi Stakeholder: Mendorong pembentukan kemitraan antara petani, nelayan, pemerintah, dan sektor swasta dalam pengembangan subsektor tanaman pangan dan perikanan. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha yang berdaya saing.</p> <p>6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Mengadopsi praktik-praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini akan memastikan bahwa produksi tanaman pangan dan hasil</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>perikanan dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan.</p>
Indeks Gini	95.45%	<p>1. Pada regional kalimantan, kaltim merupakan wilayah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi.</p> <p>2. Terdapat wilayah dengan ketimpangan lebih besar dari ketimpangan provinsi dan memiliki pertumbuhan gini rasio yang cenderung meningkat, yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan.</p>	<p>1. Penguatan Pendidikan dan Keterampilan vokasi: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, dengan fokus pada penyediaan pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.</p> <p>2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, termasuk pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan promosi kemitraan dengan sektor swasta serta peningkatan akses pasar digital bagi produk-produk lokal.</p> <p>3. Penyediaan Infrastruktur Dasar: Memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan akses telekomunikasi di wilayah-wilayah terpencil atau kurang berkembang untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			<p>4. Pengembangan Sektor Ekonomi Alternatif: Mendorong diversifikasi sektor ekonomi di wilayah-wilayah tersebut dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan, seperti pariwisata berbasis budaya, industri kreatif, pertanian modern, dan pengembangan produk lokal.</p> <p>5. Kebijakan Pembangunan yang Inklusif: Merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat lokal, serta mengurangi disparitas dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik.</p> <p>6. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Menggalakkan program-program informasi dan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan ekonomi dan kesempatan yang adil bagi semua warga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di tingkat lokal.</p> <p>7. Kebijakan khusus untuk daerah 3T: Percepatan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar.</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	99.11%	Capaian indikator Indeks Kualitas Air sungai (IKA) dan Indeks Kualitas air laut (IKAL) belum mencapai target RKPD	<p>1. Pengelolaan Limbah yang Ketat: Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan industri dan domestik untuk memastikan pengelolaan limbah sesuai standar yang ditetapkan sebelum dibuang ke perairan.</p> <p>2. Infrastruktur Pengolahan Limbah yang Memadai: Investasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan limbah yang modern dan efisien untuk mengurangi limbah yang mencemari perairan.</p> <p>3. Monitoring Kualitas Lingkungan Hidup: Peningkatan kapasitas sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara dan lahan/gambut) untuk memperoleh data yang akurat, memetakan titik-titik pencemaran, dan merumuskan kebijakan yang tepat.</p> <p>4. Pendidikan Lingkungan Masyarakat: Pelaksanaan kampanye penyuluhan dan edukasi lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>5. Kolaborasi Stakeholder: Mendorong kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil dalam upaya menjaga kualitas air melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas instansi.</p> <p>6. Implementasi Kebijakan Pro-Lingkungan: Perumusan dan</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			implementasi kebijakan lingkungan yang progresif dan berkesinambungan, termasuk penetapan batasan pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya wilayah tangkapan air. Mendorong kebijakan pemberian reward dan punishment bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Indeks Reformasi Birokrasi	107.35%	<p>Belum optimalnya indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, 2. Pembangunan Zona Integritas, 3. Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 4. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, 5. Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi), 	<p>1. Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi: Perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi.</p> <p>2. Pembangunan Zona Integritas: Perlu dilakukan peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dan budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah. Dapat dilakukan dengan perluasan jangkauan pembentukan untuk kerja zona integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>3. Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Diperlukan penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan review secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital.</p> <p>4. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral: Perlu ditetapkan prosedur baku untuk mengukur akurasi data sektoral yang dihasilkan oleh setiap produsen data</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		<p>6. Realisasi Investasi (Rencana Aksi), dan</p> <p>7. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting</p>	<p>sehingga data sektoral dapat menjelaskan fenomena secara tepat, dilakukan dengan penerapan aspek penilaian akurasi data oleh seluruh produsen data.</p> <p>5. Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi): Memastikan tematik pengentasan kemiskinan telah didukung dengan logical framework yang tepat; Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual; Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur unsur pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>6. Realisasi Investasi (Rencana Aksi): Memastikan tematik peningkatan realisasi investasi ini telah didukung dengan logical framework yang tepat; Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>7. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting: Perlu dirancang program digitalisasi administrasi pemerintahan yang fokus pada penanganan stunting, seperti pendaftaran kelahiran, monitoring gizi</p>

Indikator	Capaian	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			anak, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antarinstansi dan peningkatan literasi digital di kalangan petugas pemerintahan. mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk investasi, memberikan insentif bagi investor, serta memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Selain permasalahan indikator makro Pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula berbagai permasalahan pembangunan sektoran daerah yang cukup menghambat capaian RKPD pada tahun 2023. Berbagai permasalahan tersebut setidaknya dapat dipetakan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan urusan pemerintahan pilihan.

Tabel II.120
Permasalahan Pembangunan Per Urusan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Pendidikan	
1. Basis data belum bersifat menyeluruh serta belum dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan	1. Akurasi data antara data pokok pendidikan pada aplikasi Dapodik yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>prioritas secara akurat baik secara strategis maupun teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pendidikan yang berkualitas prima terstandarkan. 3. Keterbatasan sapsras fisik , sistem pendukung /lab, sistem informasi berbasis internet, perpustakaan dan alat peraga pendidikan pada beberapa wilayah dan/atau sekolah terutama di daerah remote dan layanan pendidikan yang berkualitas prima 4. Ketidak sinkronan wewenang dan manajemen operasional sistem pendidikan di tingkat pusat dan daerah terutama yang berasal dari skema pembiayaan DAK. 5. Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dana beasiswa daerah serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan SDM pada sektor prioritas pembangunan daerah. 6. Proses pengajuan penganggaran belum berjalan optimal karena kompleksitas sistem informasi yang lebih tinggi (SIPD) tetapi kapasitas server data yang terhubung secara nasional belum memadai. 	<p>daya pendidik, substansi pendidikan dan capaian pendidikan terhadap kondisi faktual di lapangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik (rasio antara guru dan murid) serta tidak meratanya distribusi guru antar kabupaten/kota di Provinsi Kaltim. 3. Tidak terpadunya sistem informasi perencanaan untuk mengapomodir program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang mampu menunjang penyelesaian persoalan dasar pada bidang pendidikan serta bidang lainnya (contoh : perpustakaan). 4. Sistem perencanaan penganggaran terhdap anggaran yang berasal dari DAK tidak memungkinkan untuk mengakomodasi program dan/atau kegiatan yang sebelumnya direncanakan pada RKPD yang tidak dianggarkan pada APBD. 5. Transparansi pengelolaan, termasuk alokasi distribusi dana beasiswa. 6. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran
Kesehatan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Medis dan Paramedis belum memenuhi jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan kesehatan dasar pada daerah remote dan layanan kesehatan rujukan yang berkualitas prima. 2. Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kesehatan pada beberapa wilayah dan/atau rumah sakit terutama di daerah remote dan kesehatan rujukan yang berkualitas prima. 3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan rujukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio tempat tidur rumah sakit tidak berkesuaian dengan kebutuhan faktual. 2. Rasio dokter dan dokter spesialis tidak berkesesuaian dengan kebutuhan faktual. 3. Data ketersediaan alat kesehatan tidak diperbaharui secara berkala dan ditemukan keterbatasan sapsras alat kesehatan pada beberapa wilayah dan/atau rumah sakit. 4. Sebaran SDM kesehatan belum merata pada setiap wilayah. 5. Pola kolaborasi antar pemerintah provinsi dan kab/kota dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar belum berjalan maksimal. 6. Data terhadap alat kesehatan tidak terbaharui secara berkala sehingga tidak diketahui secara real bagaimana kebutuhan terhadap alat kesehatan.

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan layanan medis jarak jauh (telemedicine) berbasis spasial (kewilayahan).</p> <p>5. Proses pengajuan penganggaran belum berjalan optimal karena kompleksitas sistem informasi yang lebih tinggi (SIPD) tetapi kapasitas server data yang terhubung secara nasional belum memadai</p>	<p>7. Belum terdapat sistem informasi perencanaan kegiatan pengawasan secara terpadu berbasis spasial (kewilayahan).</p> <p>8. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran.</p>
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
<p>1. Basis data belum sepenuhnya dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis</p> <p>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pembangunan infrastuktur dasar pada daerah remote dan daerah pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan infrastuktur dasar dan daerah pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>4. Belum optimalnya implementasi sistem monitoring dan evaluasi untuk pengawasan pembangunan infrastuktur dasar</p>	<p>1. Proses pembangunan/ penataan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun anggaran.</p> <p>2. Keterbatasan jumlah, kompetensi SDM dan fasilitas kerja dalam pemenuhan standar layanan publik.</p> <p>3. Kondisi di lapangan begitu fleksibel sehingga seringkali tidak berkesesuaian dengan target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>4. Beberapa program dan/atau kegiatan putus kontrak karena hasil evaluasi dan monitoring terhadap pekerjaan menunjukkan kualitas pekerjaan yang tidak baik.</p>
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
<p>1. Belum idealnya rasio ketersediaan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja pada pemberian layanan fasilitas dasar air baku bahkan pada daerah remote ada yang belum terlayani.</p> <p>2. Kendala tenurial lahan yang akan dibebaskan dan digunakan dalam pembangunan sapsras layanan air baku.</p>	<p>Kapasitas Air Baku (L/detik) dan cakupan layanan air minum perpipaan (%) pada dasarnya telah memenuhi target, namun masih terdapat daerah yang belum memiliki PDAM (Kab. Mahakam Ulu)</p>
Trantibumlinmas	
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan penegakan Perda dan Perkada.</p>	<p>1. Rasio antara jumlah anggota Satpol PP saat ini tidak berimbang dengan kebutuhan faktual di lapangan.</p> <p>2. Pola kolaborasi antar stakeholder dalam upaya peningkatan ketentraman/ ketertiban umum,</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> 2. Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis serta terukur. 3. Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja untuk memberikan layanan publik mitigasi dan penanganan bencana. 4. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis. 5. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan pelayanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis 	<p>perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dinamika sosial kemasyarakatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran.
Sosial	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk keberdayaan masyarakat dan sistem pendampingan yang disertai sistem monev berkala untuk mengukur pencapaian target program pada isu sosial prioritas (isu kemiskinan, gizi buruk dan stunting). 2. Proses pengajuan penganggaran belum berjalan optimal karena kompleksitas sistem informasi yang lebih tinggi (SIPD) tetapi kapasitas server data yang terhubung secara nasional belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan masih terbilang minim. 2. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Tenaga Kerja	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis data belum bersifat komprehensif dalam menyusun perencanaan program/kegiatan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan serapan pada Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU) 2. Belum optimalnya pemahaman tentang mandat implementasi Produk Hukum terkait Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) pada urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 3. Pola kolaborasi antar berbasis kewenangan sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi sistem informasi pasar kerja online untuk mengakomodasi pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja belum berjalan baik. 2. Implementasi rencana tenaga kerja kolaboratif antar perangkat daerah belum berjalan baik. 3. Keterbatasan ruang kerja terhadap calon tenaga kerja yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan. 4. Tidak optimalnya job fair/bursa kerja sebagai wadah pencari kerja untuk mendapat pekerjaan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).</p> <p>4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).</p> <p>5. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja yang berdaya saing pada DIDU.</p>	
<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	
<p>1. Belum optimalnya pemahaman tentang relasi dan kesetaraan gender.</p> <p>2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal dalam layanan perlindungan ibu - anak dari kekerasan seksual serta pemberdayaan peran ekonomi perempuan.</p> <p>3. Lemahnya sosialisasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.</p>	<p>1. Fasilitasi terhadap akses layanan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada seluruh wilayah Kaltim belum berjalan optimal.</p> <p>2. Kolaborasi antar Pemerintah Provinsi dan Kab.Kota dengan pihak swasta dan masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak belum berjalan optimal.</p> <p>3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting belum optimal dilakukan.</p> <p>4. Belum masifnya sosialisasi dan/atau promosi terhadap informasi terkait dengan tempat perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Kaltim.</p> <p>5. Lemahnya kordinasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</p>
<p>Pangan</p>	
<p>1. Basis data dan informasi geospasial belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh) - manajerial belum ideal.</p> <p>3. Pola kolaborasi antar sub sektor agribisnis - agroindustri maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal dalam</p>	<p>1. Ketiadaan data geospasial lahan sawah eksisting dan ketersediaan daerah irigasi.</p> <p>2. Ketidaksiapan petani terhadap perubahan musim/cuaca.</p> <p>3. Kurangnya kuantitas dan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/</p> <p>4. Kurangnya kuantitas SDM pengelola kegiatan di DPTPH.</p> <p>5. Kurangnya motivasi pada koperasi untuk melakukan pengembangan bisnis secara profesional.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Keterbatasan saptas fisik, input produksi bersubsidi, sistem pendukung dan alat kerja /alsintan dalam pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing. 5. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha berbasis teknologi informasi (cyber extension). 6. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing Usaha Tani menuju Korporasi Pertanian serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim 7. Proses pengajuan penganggaran belum berjalan optimal karena kompleksitas sistem informasi yang lebih tinggi (SIPD) tetapi kapasitas server data yang terhubung secara nasional belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD menghambat realisasi anggaran. 7. Keterlambatan informasi alokasi DAK bidang urusan pangan yang turun ke K/L sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan
Lingkungan Hidup	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dalam layanan perlindungan, pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup, pengolahan sampah serta adaptasi perubahan iklim. 2. Lemahnya Advokasi Kebijakan terhadap program konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah daerah kab/kota dalam mencegah pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dan masyarakat terkait pengelolaan sampah. 3. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan administrasi kependudukan/pencatatan sipil yang prima dan terintegrasi dengan sektor lain</p>	<p>Keterbatasan SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p>
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis data belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan saptas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi multi stakeholder dan antar perangkat daerah (bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) dalam upaya menekan

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>kerja belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p> <p>3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p> <p>4. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p>	<p>angka desa tertinggal belum berjalan baik.</p> <p>2. Belum kuatnya kapasitas SDM serta saptas spesifik.</p>
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM (penyuluh KB) teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan fasilitasi Keluarga Sejahtera.</p> <p>2. Belum optimalnya dukungan program pendampingan dalam penguatan kapasitas dan pemberdayaan keluarga sejahtera</p>	<p>Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak serta mendorong program keluarga berencana belum optimal dilakukan</p>
Perhubungan	
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah.</p> <p>2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah.</p> <p>3. Lemahnya penegakan terhadap pelaku usaha sektor perhubungan yang belum memiliki izin dan melakukan praktek ODOL.</p>	<p>1. Keterbatasan jumlah SDM pelayanan perhubungan dan penegakan hukum atas pelanggaran fasilitas perhubungan.</p> <p>2. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan kualitas layanan perhubungan belum berjalan baik.</p>
Komunikasi dan Informatika	
<p>1. Pusat basis data belum berfungsi optimal sebagai referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan pembangunan</p>	<p>1. Implementasi pengelolaan pusat data belum berjalan baik.</p> <p>2. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM pelayanan urusan komunikasi dan informatika</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>daerah secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik yang terdigitalisasi, ekosistem bisnis yang akseleratif serta perlindungan data</p>	
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
<p>1. Basis data belum komprehensif sebagai dasar pemetaan target ekspor dari sektor UMKM unggulan</p> <p>2. Pola kolaborasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan sinergis dalam pengembangan ekosistem UMKM, kelembagaan koperasi maupun produk unggulan / potensial ekspor.</p>	<p>1. Data base koperasi dan UMKM belum terbaharui secara berkala.</p> <p>2. Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi.</p> <p>3. Belum dilakukannya inventarisasi kelembagaan koperasi yang dapat dinilai “aktif”.</p> <p>4. Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang berifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik</p>
Penanaman Modal	
<p>1. Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan kemudahan perizinan dan rekomendasi investasi sektor unggulan daerah.</p> <p>3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan kemudahan perizinan dan rekomend kemudahan perizinan dan rekomendasi investasi sektor unggulan daerah melalui sistem OSS dan EPTSP.</p> <p>4. Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dan pengukuran dampak investasi serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.</p>	<p>1. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam implementasi OSS.</p> <p>2. Masih ditemukan beberapa permasalahan yang bersifat teknis terhadap sistem aplikasi OSS dan E-PTSP</p>
Kepemudaan dan Olah Raga	

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sapsras kerja, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kapasitas unggul kepemudaan dan prestasi olahraga. 2. Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kewirausahaan pemuda serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum cukup mampu menunjang pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan pengembangan daya saing keolahragaan. 2. Belum dilakukan evaluasi untuk mengetahui profit impact dan benefit impact dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan peluang keberlanjutan
Statistik	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang statistik sektoral yang valid, mutahir dan ramah akses belum ideal. 2. Belum optimalnya dukungan sistem informasi kebutuhan layanan pengembangan data pembangunan yang valid, mutahir dan ramah akses. 	<p>Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM yang mampu menunjang berbagai program, kegiatan dan/atau pelayanan urusan statistik sektoral</p>
Persandian	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang persandian dan perlindungan data belum ideal untuk memenuhi standar keamanan informasi siber. 2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM yang mampu menunjang berbagai program, kegiatan dan/atau pelayanan urusan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Koordinasi lintas perangkat daerah terhadap pola hubungan komunikasi sandi belum berjalan baik.
Kebudayaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis data dan rencana induk pengelolaan / objek pemajuan kebudayaan belum tersusun secara komprehensif 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan sapsras kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kebudayaan, kesenian dan kearifan lokal belum ideal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ditetapkannya jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. 2. Belum ditetapkannya jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan
Perpustakaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pustakawan secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital. 2. Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah pustakawan dan tenaga teknis pustakawan yang sesuai dengan standar nasional. 2. Terbatasnya sarana prasarana utama, yakni gedung perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim. 3. Belum masifnya sosialisasi dan informasi terkait dengan keberadaan perpustakaan elektronik dan/atau

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>mendukung pemberian layanan perpustakaan secara konvensional dan digital.</p> <p>3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital.</p>	<p>koleksi e-book sebagai salah satu layanan pada urusan perpustakaan</p>
Kearsipan	
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM arsiparis secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan kearsipan secara konvensional maupun digital.</p> <p>2. Keterbatasan spras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan kearsipan secara konvensional dan digital.</p> <p>3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan kearsipan secara konvensional maupun digital.</p>	<p>Mayoritas perangkat daerah belum mampu memenuhi standar arsip dinamis karena keterbatasan SDM fungsional dibidang terkait. Hanya Bappeda dan BPKAD yang saat ini telah memenuhi standar kearsipan yang baik.</p>
Urusan Pemerintahan Pilihan	
Kelautan dan Perikanan	
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh perikanan) - manajerial belum ideal</p> <p>2. Pola kolaborasi antar sub sektor aquabisnis dan agromaritime maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal</p> <p>3. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing Usaha Perikanan menuju Korporasi Nelayan serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.</p>	<p>1. Koordinasi antar tingkat pemerintah dan stakeholder terkait dalam perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan belum berjalan baik.</p> <p>2. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM serta sarana dan prasarana pada unit kerja layanan teknis urusan kelautan dan perikanan</p>
Pariwisata	
<p>1. Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan</p>	<p>1. Koordinasi dalam pengelolaan daya tarik wisata potensial oleh stakeholder terkait belum berjalan baik.</p> <p>2. Implementasi perencanaan pengembangan sektor pariwisata dan ekraf belum berjalan baik.</p> <p>3. Belum kuatnya database pelaku parekraf dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sub sektor pariwisata dan ekraf maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. 4. Keterbatasan saptasapra fisik, sistem pendukung dan alat kerja (aksesibilitas, atraksi, amenitas dan ansilari) dalam mendukung layanan publik pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. 5. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. 6. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif. 	
<p>Pertanian</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis data belum optimal belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh) - manajerial belum memadai. 3. Keterbatasan saptasapra fisik (laboratorium yang berstandar, fasilitas check point berstandar, klinik hewan, RPH), input produksi bersubsidi, sistem pendukung dan alat kerja dalam/ alsintan mendukung pemberian layanan publik pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing. 4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan jumlah penyuluh pertanian berstatus ASN. 2. Koordinasi antar perangkat daerah atau stakeholder yang membidangi urusan pertanian belum berjalan baik. 3. Basis data hasil pertanian (dalam arti luas) belum dimanfaatkan dengan baik. 4. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar pada pelayanan pertanian.

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>layanan penyuluhan dan pendampingan usaha berbasis teknologi informasi (cyber extension).</p> <p>5. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk (1) meningkatkan pendampingan usaha perkebunan rakyat guna meningkatkan daya saing menuju korporasi perkebunan; (2) untuk meningkatkan daya saing usaha tani menuju korporasi Pertanian serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; (3) untuk meningkatkan meningkatkan daya saing usaha peternak menuju korporasi peternak.</p> <p>6. Advokasi kebijakan untuk pengadaan kawasan/pola ruang khusus usaha peternakan untuk mrnvapai stabilitas kebutuhan protein hewani</p>	
Kehutanan	
<p>1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh kehutanan) - manajerial belum ideal</p> <p>2. Pola kolaborasi internal bidang kehutanan belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha produksi, jasa lingkungan serta konservasi kehutanan</p> <p>3. Belum optimalnya untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha perhutanan sosial</p>	<p>1. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM dalam pelaksanaan pelayanan urusan kehutanan.</p> <p>2. Sistem kerja perlindungan hutan (pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan) serta konservasi sumber daya alam belum berjalan baik.</p> <p>3. Belum optimalnya koordinasi antar dinas induk dengan UPTD dalam penyelenggaraan urusan kehutanan.</p> <p>4. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran.</p>
Energi dan Sumber Daya Mineral	
<p>1. Pola kolaborasi dan koordinasi antar sektor berjalan optimal dalam layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi, terutama terkait implementasi Rencana Umum Energi Daerah</p> <p>2. Keterbatasan SDM, saptas fisik (fasilitas konversi energi baru terbarukan), sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi</p>	<p>1. Belum terbangun mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>2. Grand Design (RUED/Rencana Umum Energi Daerah) belum diimplementasikan dengan baik.</p> <p>3. Terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM serta sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan pada urusan energi dan sumber daya mineral.</p>
Perdagangan	
<p>1. Pola kolaborasi antar sektor mapun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan</p>	<p>1. Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>eksositem usaha, jalur distribusi dan perdagangan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>2. Keterbatasan saptas fisik (optimalisasi peran pelabuhan ekspor) dan sistem informasi digital untuk promosi produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor</p>	<p>2. Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang berifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik</p>
Perindustrian	
<p>1. Pola kolaborasi antar sektor maupun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>2. Keterbatasan saptas fisik (fasilitas fabrikasi), sistem informasi digital untuk promosi dan alat kerja dalam mendukung pemberian pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor</p>	<p>Infrastruktur pada sektor industri belum optimal</p>
Transmigrasi	
<p>1. Kolaborasi pengembangan kawasan transmigrasi berbasis kewenangan antar sektor belum berjalan optimal</p> <p>2. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya wilayah transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigran.</p>	<p>Belum masifnya koordinasi antar stakeholder terkait terhadap pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi</p>
Unsur Penujng Urusan Pemerintahan Dan Unsur Pemerintahan Umum	
Sekretariat Derah	
<p>1. Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis</p> <p>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM) teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan birokrasi pembangunan yang</p>	<p>1. Sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik. Hal ini berdampak pada capaian nilai reformasi birokrasi yang saat ini menurun.</p> <p>2. Aplikasi SIJABAT dalam proses perencanaan pemenuhan kuantitas dan kapasitas SDM aparatur belum dimanfaatkan secara optimal.</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
<p>transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>3. Keterbatasan saptas fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi (SIJABAT) untuk pengembangan potensi SDM Pegawai layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>5. Sistem koordinasi dan pembinaan BUMD dalam mendorong pendapatan asli daerah dan daya saing unit BUMD belum berjalan baik.</p> <p>6. Proses pengajuan penganggaran belum berjalan optimal karena kompleksitas sistem informasi yang lebih tinggi (SIPD) tetapi kapasitas server data yang terhubung secara nasional belum memadai</p>	<p>3. Sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik. Hal ini berdampak pada capaian nilai reformasi birokrasi yang saat ini menurun.</p> <p>4. Sistem koordinasi dan pembinaan BUMD dalam mendorong pendapatan asli daerah dan daya saing unit BUMD belum berjalan baik.</p> <p>5. Penatausahaan keuangan aplikasi SIPD yang menghambat realisasi anggaran</p>
Sekretariat DPRD	
<p>1. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar unsur pemerintahan belum berjalan optimal - sinergis dalam fungsi penyelenggaraan / fasilitasi Perundang - Undangan di yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>2. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk prosedur layanan aspirasi pada lembaga parlementer dan penyebarluasan produk peraturan / kebijakan pembangunan daerah</p>	<p>Peran Setwan dalam pengendalian pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang telah direncanakan belum berjalan baik.</p>
Perencanaan	
<p>1. Basis data belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis</p> <p>2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p> <p>3. Pola dan peran sebagai simpul kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah</p>	<p>Peran Bappeda untuk mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan yang berbasis data dan riset (terutama terkait dengan penentuan isu strategis) belum berjalan baik</p>

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan sinergis dalam layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel	
Keuangan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pada lembaga pengelola anggaran dan aset daerah (BPKAD dan Bapenda) belum memadai 2. Jumlah dan fasilitas kerja Lembaga / Unit Teknis penyelenggara layanan pengelolaan aset dan pajak/retribusi daerah belum memadai dan belum berorientasi layanan inklusif 3. Belum terdapat sistem distribusi penganggaran yang secara handal mengatur soal mekanisme kerja bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi ke Kab/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM yang tersertifikasi (khususnya pada BPKAD) 2. Belum terdapat UPTD yang secara khusus berperan dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah. 3. Masih ditemukan beberapa pelayanan keuangan pada unit-unit pelayanan pajak yang belum cukup ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus
Kepegawaian	
Basis data dan rencana induk pemenuhan kebutuhan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pegawai penyelenggara layanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima belum tersusun dengan baik	Koordinasi dalam pemetaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai belum berjalan optimal
Pendidikan dan Pelatihan	
Basis data dan rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan publik yang prima serta belum diikuti implementasi kebijakan dan program Sertifikasi / peningkatan Kompetensi SDM pada pegawai perangkat daerah.	Basis data yang memuat aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan belum dapat dimanfaatkan dengan baik
Penelitian dan Pengembangan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis data dan temuan riset belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Peneliti teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal 3. Belum optimalnya jejaring kerja pengembangan dan pemanfaatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian dan pengembangan kajian belum secara optimal dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM peneliti fungsional

Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
hasil riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal.	
Penghubung	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik. 2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet untuk pengembangan layanan promosi produk – jasa unggulan dan potensi investasi pembangunan daerah 	Keterbatasan kuantitas SDM pelaksana pelayanan.
Inspektorat	
Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pengawas teknis dan auditor belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.	Keterbatasan kuantitas SDM pengawas dan auditor dalam menunjang tugas pokok dan fungsi inspektorat.
Kesatuan Bangsa dan Politik	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor (FORKOMINDA) maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan fasilitasi stabilitas sosial politik masyarakat. 2. Belum optimalnya pemberdayaan modal sosial/ sistem adaptasi sosial berbasis hukum positif dan kearifan lokal dalam menyambut kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara 	Sistem adaptasi sosial belum dimaksimalkan dalam menyambut kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan yang direncanakan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja makro ekonomi yang direncanakan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting dan berpengaruh serta harus dilakukan pencermatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Analisis kerangka pendanaan memberikan analisis terkait perkiraan besaran pendapatan dari berbagai sumber pendapatan pada sektor-sektor potensial, perkiraan belanja daerah yang akan dilakukan pemerintah, dan pembiayaan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada pembangunan perekonomian daerah pada masa pemulihan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021 yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2023 memiliki tren perbaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 yang mencapai 2,55 persen yang merupakan pertumbuhan positif kali pertama semenjak pandemi berlangsung. Capaian ini sebagai salah satu dampak *base effect* mulai membaiknya perekonomian di tengah kasus COVID-19 yang terjadi, mengingat pandemi tersebut menyebabkan penurunan kinerja sektor-sektor di dalam negeri, serta melemahkan permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri serta seiring dengan berbagai konflik yang terjadi timur tengah yang berdampak pada

perekonomian global. Seiring dengan berbagai tantangan yang menahan pertumbuhan ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 tumbuh signifikan mencapai 4,48 persen dan meningkat kembali menjadi 6,22 persen pada tahun 2023.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, hampir seluruh provinsi di Kalimantan melanjutkan tren perbaikan kinerja perekonomian. Berdasarkan pangsaanya, Kalimantan Timur masih menjadi provinsi dengan ekonomi terbesar di Kalimantan dengan pangsa mencapai 48,38 persen terhadap total perekonomian Kalimantan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selaras dengan hal tersebut, Perbaikan perekonomian nasional juga mengalami tren pertumbuhan seperti perekonomian Kalimantan Timur dan Kalimantan. Perekonomian nasional mengalami pertumbuhan di tahun 2023 mencapai 5,05 persen, meskipun melambat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,31 persen.

3.1.1 Kinerja dan Tantangan Perekonomian Global

Dinamika perekonomian global tidak terlepas dari situasi terkini terkait kondisi pasca pandemi Covid-19, situasi perang Rusia-Ukraina, dan situasi geopolitik yang sangat kompleks. Sampai dengan akhir Tahun 2023, kondisi pandemi Covid-19 global terus membaik dan menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Banyak negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang tidak menggunakan kembali kebijakan pembatasan sosial. Meskipun demikian, varian baru Covid-19 EG.5 atau Eris sudah masuk ke beberapa negara termasuk Indonesia. Antisipasi dan tindaklanjut dari adanya varian baru ini secara umum dilakukan baik di Indonesia maupun di wilayah negara lain agar tidak menyebar secara masif seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian sampai dengan akhir tahun 2023. Risiko dan ketidakpastian global ini dipicu dinamika negara-negara maju yang berdampak ke global. Amerika Serikat masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya suku bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya *excess saving* yang membayangi pelemahan ekonomi. Sementara itu, negara maju lainnya yakni RRT masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19 dan Eropa yang kondisi ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh *core inflation* yang masih tinggi.

Kondisi geopolitik juga menunjukkan resiko yang makin tinggi. Adanya kondisi perang di Ukraina maupun di Timur Tengah, terutama Palestina yang tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir menimbulkan *downside risk* terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Sentimen global juga akan dipengaruhi sehingga menimbulkan volatilitas di sektor keuangan dan prospek dari perang yang belum berakhir dan bahkan mungkin akan melebar akan menimbulkan tekanan proteksionisme dan melemahkan perdagangan global. Di sisi lain, prospek pertumbuhan global diperkirakan masih akan lemah dimana pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 direvisi turun oleh IMF menjadi hanya 3 persen dan oleh Bank Dunia hanya 2,1 persen. Inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8 persen, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Kondisi ini pun berdampak hingga nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur khususnya terhadap gejolak ekonomi baik makro maupun mikro daerah.

3.1.2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional

Dinamika perekonomian global tidak terlepas dari situasi terkini terkait kondisi pasca pandemi Covid-19, situasi perang Rusia-Ukraina, dan situasi geopolitik yang sangat kompleks. Sampai dengan akhir Tahun 2023, kondisi pandemi Covid-19 global terus membaik dan menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Banyak negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang tidak menggunakan kembali kebijakan pembatasan sosial. Meskipun demikian, varian baru Covid-19 EG.5 atau Eris sudah masuk ke beberapa negara termasuk Indonesia. Antisipasi dan tindak lanjut dari adanya varian baru ini secara umum dilakukan baik di Indonesia maupun di wilayah negara lain agar tidak menyebar secara masif seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian sampai dengan akhir tahun 2023. Risiko dan ketidakpastian global ini dipicu dinamika negara-negara maju yang berdampak ke global. Amerika Serikat masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya suku bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya *excess saving* yang membayangi pelemahan ekonomi. Sementara itu, negara maju lainnya yakni RRT masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19 dan Eropa yang kondisi ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh *core inflation* yang masih tinggi.

Kondisi geopolitik juga menunjukkan resiko yang makin tinggi. Adanya kondisi perang di Ukraina maupun di Timur Tengah, terutama Palestina yang

tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir menimbulkan *downside risk* terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Sentimen global juga akan dipengaruhi sehingga menimbulkan volatilitas di sektor keuangan dan prospek dari perang yang belum berakhir dan bahkan mungkin akan melebar akan menimbulkan tekanan proteksionisme dan melemahkan perdagangan global. Di sisi lain, prospek pertumbuhan global diperkirakan masih akan lemah dimana pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 direvisi turun oleh IMF menjadi hanya 3 persen dan oleh Bank Dunia hanya 2,1 persen. Inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8 persen, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Kondisi inipun berdampak hingga nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur khususnya terhadap gejolak ekonomi baik makro maupun mikro daerah.

3.1.2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional

Kinerja dan prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga, di tengah makin tingginya ketidakpastian global. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan pemulihan ekonomi terus berlanjut, meskipun saat bersamaan dinamika global berubah cepat dan memburuk. Inflasi telah lebih cepat kembali ke kisaran sasarannya dan terkendali rendah, sementara pertumbuhan ekonomi juga tetap baik. Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari kuatnya sinergi respons bauran kebijakan ekonomi nasional yang prudent dan konsisten untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan.

Sinergi kebijakan fiskal-moneter dan juga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memainkan peran yang sangat krusial. Ke depan, Bank Indonesia optimis bahwa prospek perbaikan ekonomi nasional terus berlanjut dengan stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meskipun demikian, sejumlah risiko dari dinamika ketidakpastian global yang tinggi tetap perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan respons bauran kebijakan ekonomi nasional yang tepat untuk memitigasi dampak rambatannya terhadap ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia 2023 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan

Pergudangan sebesar 13,96 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30 persen dan 4,85 persen.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama tahun 2023 menurut kelompok pulau masih disumbangkan oleh Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,05 persen; diikuti Sumatera 22,01 persen; Kalimantan 8,49 persen; Sulawesi 7,10 persen; Bali dan Nusa Tenggara 2,77 persen; serta Maluku dan Papua 2,58 persen. Sedangkan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di semua kelompok pulau tercatat kondusif walaupun dibayangi pelemahan ekonomi global. Secara kumulatif pertumbuhan (c-to-c) tertinggi terjadi pada kelompok Pulau Maluku dan Papua yang mencatat pertumbuhan sebesar 6,94 persen; diikuti Pulau Sulawesi 6,37 persen; Pulau Kalimantan 5,43 persen; Pulau Jawa 4,96 persen; dan Pulau Sumatera 4,69 persen. Selanjutnya, kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 4,00 persen (c-to-c).

Inflasi turun lebih cepat dan terkendali dalam kisaran sasaran. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2023 tercatat 2,61% (yoy), jauh lebih rendah dari inflasi IHK akhir 2022 sebesar 5,51% (yoy). Kembalinya inflasi ke kisaran sasaran $3,0\pm 1\%$ ini merupakan hasil nyata konsistensi kebijakan moneter pro-stability yang ditempuh sejak tahun lalu serta eratnya sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran $3,0\pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada 2024.

Likuiditas perekonomian dan perbankan tetap memadai. Penempatan giro bank di Bank Indonesia menurun sejalan dengan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makro prudensial (KLM), yang secara keseluruhan mengakibatkan pertumbuhan uang primer (M0) pada Desember 2023 tercatat kontraksi sebesar 1,5% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2023 tercatat sebesar 3,5% (yoy), ditopang oleh pertumbuhan yang cukup kuat pada uang kuasi sebesar 5,2% (yoy) dan uang kartal sebesar 8,7% (yoy). Dari faktor yang

memengaruhinya, pertumbuhan M2 didorong oleh kredit yang tetap kuat dan ekspansi operasi keuangan Pemerintah.

Prospek perbaikan ekonomi nasional akan terus berlanjut dengan stabilitas yang tetap terjaga sehingga mendukung kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju. Respons bauran kebijakan Bank Indonesia yang tersinergi dengan bauran kebijakan nasional saat ini terbukti mampu menjaga stabilitas dari dampak rambatan gejolak global sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Ke depan, bauran kebijakan yang berhati-hati dan konsisten tersebut diyakini akan mampu untuk makin memperkuat ketahanan dan pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam jangka menengah panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus membaik ditopang oleh konsumsi swasta yang meningkat sejalan dengan terjaganya daya beli, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, serta makin besarnya peran generasi muda milenial. Investasi akan meningkat seiring dengan peningkatan ekspor dan juga berlanjutnya PSN. Kinerja ekspor juga akan makin meningkat seiring dengan perbaikan prospek ekonomi global dan makin maraknya program hilirisasi di berbagai sektor.

Konsistensi implementasi reformasi struktural, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, implementasi UU Cipta Kerja, berbagai program hilirisasi, akselerasi digitalisasi, dan penguatan sumber daya manusia akan mampu memperkuat kapasitas perekonomian sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi tanpa memberikan tekanan yang signifikan pada stabilitas.

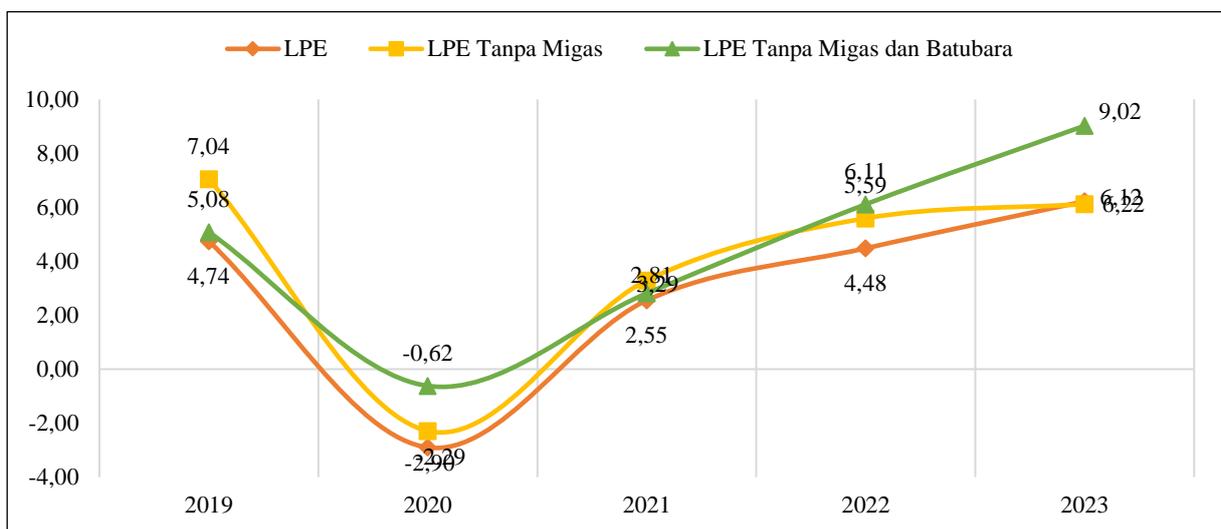
3.1.3 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan Perekonomian Daerah

A. Kinerja Ekonomi Daerah

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami perbaikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 setelah terkontraksi pada tahun 2016. Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi paling dalam hingga 2,85 persen (y-o-y) yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja beberapa lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 seiring

dengan keberhasilan program vaksinasi di seluruh wilayah yang mendorong pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat mencapai 2,55 persen (y-o-y). Seiring dengan pulihnya perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur tumbuh 4,48 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan kemudian meningkat kembali hingga mencapai 6,22 persen pada tahun 2023.

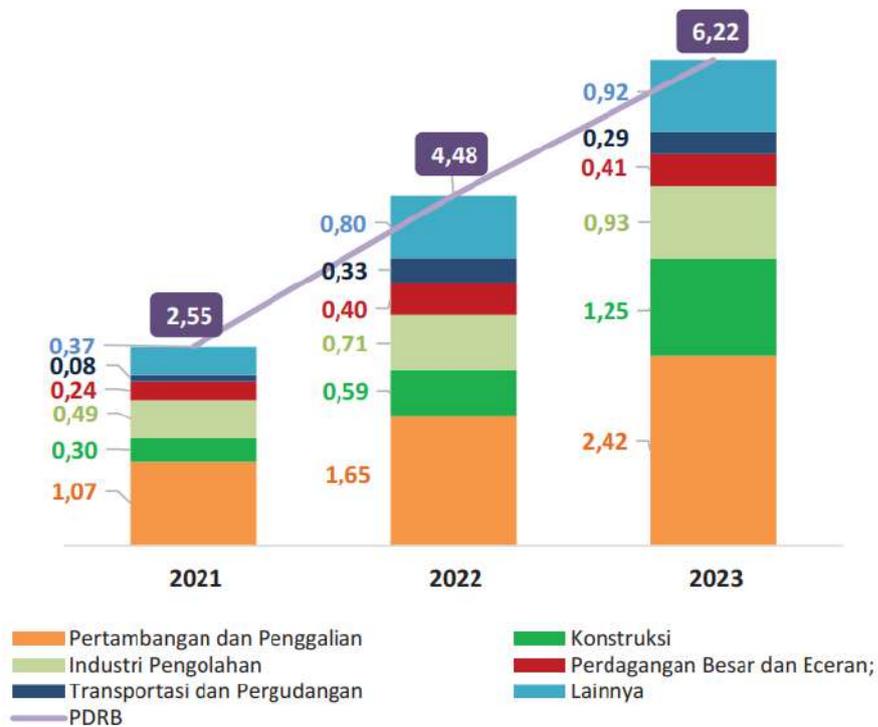


Gambar III.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%) (y-o-y)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 persen, meningkat lebih baik dibandingkan Tahun 2021. Adapun kinerja perekonomian tanpa migas dan batubara juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 6,11 persen di Tahun 2022.

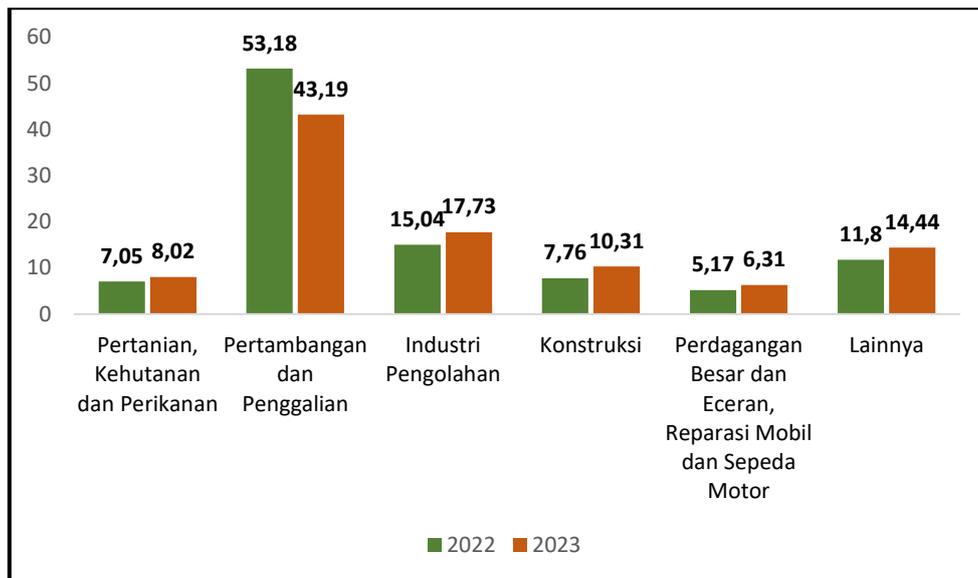
Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,96 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 9,46 persen, dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 9,16 persen. Selain itu, kinerja lapangan usaha utama Kalimantan Timur, yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada periode ini juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,49 persen.



Gambar III.2
Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021-2023 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, Lapangan Usaha Pertambangan dan Peggalian menjadi lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar, yaitu sebesar 2,42 persen. Kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Konstruksi dengan andil positif sebesar 1,25 persen, Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan andil positif sebesar 0,93 persen, dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil positif sebesar 0,41 persen.

Struktur perekonomian Kalimantan Timur belum mengalami perubahan yang berarti. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kalimantan Timur adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Peggalian dengan peranan sebesar 43,19 persen; lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 17,73 persen; Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 10,31 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,02 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,31 persen.



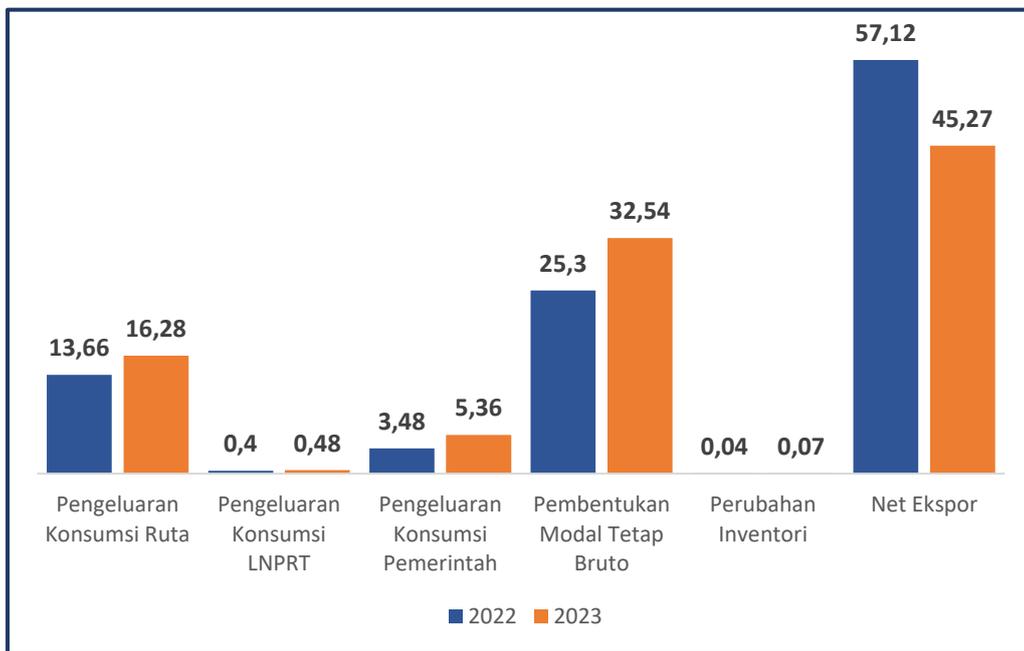
Gambar III.3
Struktur Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (*y-on-y*) (Persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat dinamika struktur perekonomian Kalimantan Timur yang mengalami pemulihan. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2023 mengalami penurunan diakibatkan oleh tren penurunan harga minyak dunia dan penurunan harga batubara acuan. Selain itu, ekspor hasil pertambangan Kalimantan Timur juga merosot cukup tajam pada tahun 2023. Beberapa alasan kinerja ekspor Kalimantan Timur ke ASEAN dan Tiongkok mengalami perlambatan disebabkan oleh perlambatan ekonomi Tiongkok yang diikuti dengan lonjakan pasokan batu bara seiring upaya negara tersebut untuk meningkatkan cadangan batu bara di berbagai power plant yang dimiliki.

Lapangan usaha industri pengolahan juga memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Timur dengan kontribusi pada Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022 dengan capaian 17,73 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan volume ekspor CPO dan meningkatnya produksi pupuk dari tahun sebelumnya.

Distribusi PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Tahun 2023 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor dengan peranan sebesar 45,27 persen meskipun mengalami penurunan cukup tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 57,12 persen. Kemudian, distribusi dari komponen Pembentukan Modal Tetap

Bruto sebesar 32,54 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 16,28 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,36 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga sebesar 0,48 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, meningkatnya aktivitas perdagangan Kalimantan Timur menyebabkan meningkatnya porsi terhadap pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran. Meningkatnya aktivitas pembangunan IKN yang masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur juga menyebabkan kenaikan pada komponen pengeluaran PDRB Kalimantan Timur.

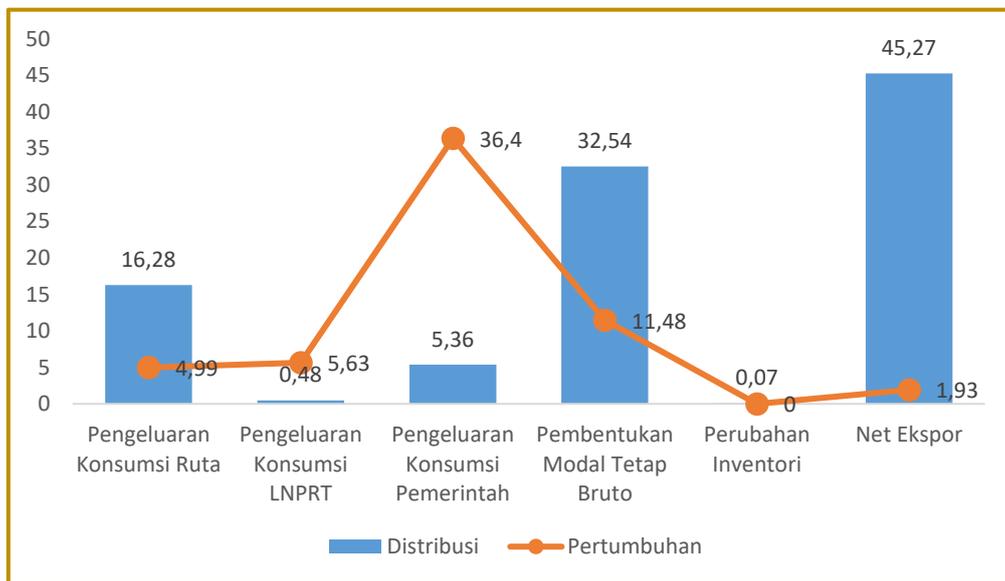


Gambar III.4
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022 dan 2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tumbuh positif mencapai 6,22 persen. Seluruh komponen PDRB menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mencapai 36,40 persen yang disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan pemerintah. Diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 11,48 persen, komponen ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,70 persen, dan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 5,63 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 masih didominasi oleh komponen Ekspor

Barang dan Jasa yaitu sebesar 106,98 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,54 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 16,28 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,36 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga sebesar 0,48 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut Pengeluaran memiliki peran sebesar 61,71 persen, sehingga Net Ekspor memberikan kontribusi sebesar 45,27 persen terhadap total ekonomi Kalimantan Timur.



Gambar III.5

Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Perkembangan PDRB Pengeluaran pada tahun 2023 (y-o-y), komponen konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi dengan capaian 36,40 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada Komponen PMTB sebesar 11,48 persen dan komponen konsumsi LNPRT tumbuh paling rendah sebesar 5,63 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 secara (y-on-y), maka sumbangan dari Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Komponen Net Ekspor masing-masing sebesar 3,21 persen dan 1,04 persen. Selanjutnya, penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Komponen Lainnya memberikan andil positif sebesar 1,97 persen.



Gambar III.6
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (*y-o-y*) (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

2) Ekspor dan Impor

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada Desember 2023 turun sebesar 1,22 persen dibandingkan dengan November 2023, yaitu dari US\$2.186,71 juta menjadi sebesar US\$2.159,99 juta. Penurunan nilai ekspor disebabkan oleh turunnya nilai ekspor migas sebesar 21,83 persen. Nilai ekspor migas Desember 2023 tercatat sebesar US\$192,56 juta, lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai ekspor migas November 2023 yang tercatat sebesar US\$246,34 juta. Sebaliknya, nilai ekspor nonmigas mengalami peningkatan sebesar 1,39 persen. Nilai ekspor nonmigas Desember 2023 tercatat sebesar US\$1.967,44 juta, lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai ekspor nonmigas November 2023 yang tercatat sebesar US\$1.940,38 juta.

Nilai ekspor 10 (sepuluh) golongan barang utama pada Desember 2022 jika dibandingkan November 2022 mengalami penurunan sebesar 8,51 persen. Jika dirinci, penurunan terbesar terjadi pada golongan barang pupuk yang menurun sebesar 81,87 persen, disusul golongan bahan kimia anorganik yang menurun sebesar 42,84 persen dan golongan barang yang memiliki peran paling besar yakni bahan bakar mineral nonmigas menurun sebesar 9,75 persen.



Gambar III.7

Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, nilai impor Januari–Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,82 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya nilai impor migas sebesar 11,12 persen meskipun impor nonmigas turun sebesar 14,61 persen. Kenaikan nilai impor migas dipicu oleh naiknya impor minyak mentah sebesar 20,30 persen dan naiknya nilai impor hasil minyak sebesar 16,26 persen meskipun nilai impor gas turun sebesar 51,44 persen.

Nilai impor nonmigas Desember 2023 untuk 10 golongan barang utama tercatat sebesar US\$103,38 juta, atau turun sebesar 2,44 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dilihat dari perkembangannya terhadap November 2023, kenaikan persentase terbesar adalah berbagai produk kimia yang mengalami kenaikan sebesar 498,69 persen, yaitu dari US\$2,36 juta pada November 2023 menjadi US\$14,15 juta pada Desember 2023. Golongan barang yang mengalami kenaikan terbesar berikutnya adalah kapal, perahu, dan struktur terapung yang mengalami kenaikan sebesar 122,57 persen, yaitu dari US\$4,62 juta pada November 2023 menjadi US\$10,28 juta pada Desember 2023.

Golongan barang yang mengalami penurunan persentase terbesar dialami oleh golongan barang bahan kimia organik sebesar 60,47 persen, dimana pada November 2023 nilai impor golongan barang tersebut sebesar US\$3,55 juta turun menjadi US\$1,40 juta pada Desember 2023. Penurunan persentase terbesar berikutnya terjadi pada impor golongan barang kendaraan dan bagiannya yang turun sebesar 45,37 persen, dimana pada November 2023 tercatat sebesar US\$12,75 juta menjadi sebesar US\$6,97 juta pada Desember 2023.

Neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur pada Desember 2023 mengalami surplus sebesar US\$1.739,93 juta. Neraca perdagangan sektor nonmigas tercatat surplus sebesar US\$1.858,04 juta, sedangkan sektor migas tercatat defisit sebesar US\$118,11 juta.

Selama Januari–Desember 2023, sektor migas mengalami defisit sebesar US\$1.466,34 juta. Sebaliknya, sektor nonmigas mengalami surplus sebesar US\$22.736,16 juta, sehingga secara total kumulatif neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur selama Januari–Desember 2023 mengalami surplus sebesar US\$21.269,82 juta.



Gambar III.8
Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur pada Desember 2023 mengalami surplus sebesar US\$1.739,93 juta. Neraca perdagangan sektor nonmigas tercatat surplus sebesar US\$1.858,04 juta, sedangkan sektor migas tercatat defisit sebesar US\$118,11 juta.

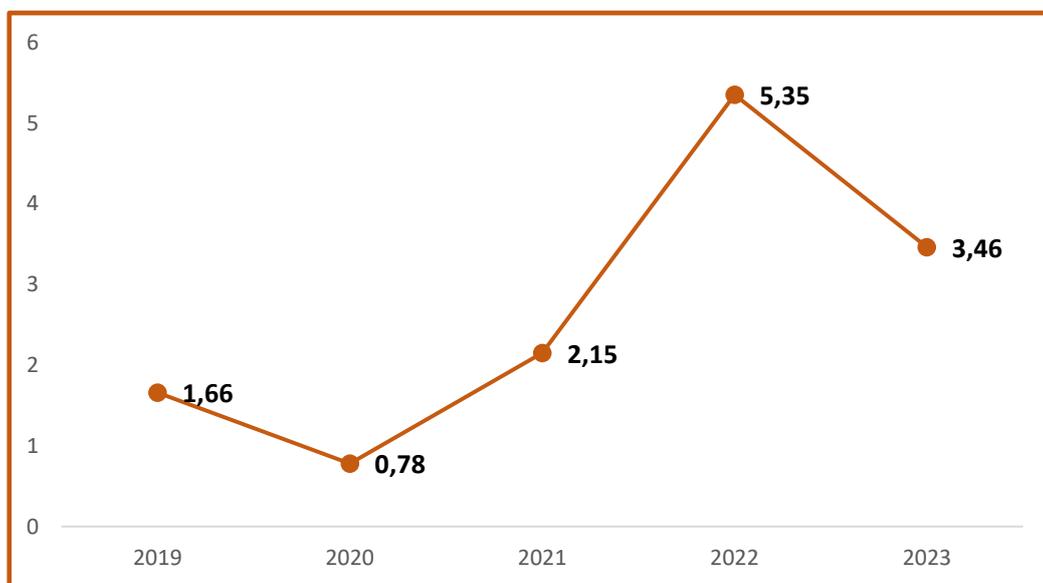
Selama Januari–Desember 2023, sektor migas mengalami defisit sebesar US\$1.466,34 juta. Sebaliknya, sektor nonmigas mengalami surplus sebesar US\$22.736,16 juta, sehingga secara total kumulatif neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur selama Januari–Desember 2023 mengalami surplus sebesar US\$21.269,82 juta.

3) Inflasi

Inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 seiring dengan upaya pemerintah dalam pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat secara masif. Tim

Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltim terus melakukan berbagai upaya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, penambahan pasokan beras oleh Bulog, dan rapat koordinasi rutin. Pada akhir Desember 2023, TPID Kaltim juga menggelar rapat tingkat tinggi di Balikpapan untuk membahas antisipasi kenaikan harga komoditas pada periode Nataru.

Pada Desember 2023, gabungan 2 kota IHK Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,39 persen. Sementara itu, pada periode yang sama dua tahun sebelumnya, yaitu pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,68 persen dan pada Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,23 persen. Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun pada Desember 2023 yang keduanya dihitung dengan membandingkan antara IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022 tercatat sebesar 3,46 persen. Pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 2,15 persen dan pada Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 5,35 persen.



Gambar III.9
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT

hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,31 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5–6 orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,41 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 4,79 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,31 persen. TPT menurut jenis kelamin sama-sama mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022, yaitu TPT laki-laki turun 0,33 persen poin, sedangkan TPT Perempuan turun sebesar 0,59 persen poin. Dibandingkan Agustus 2021, TPT laki-laki turun sebesar 2,43 persen poin dan perempuan naik sebesar 0,18 persen poin.

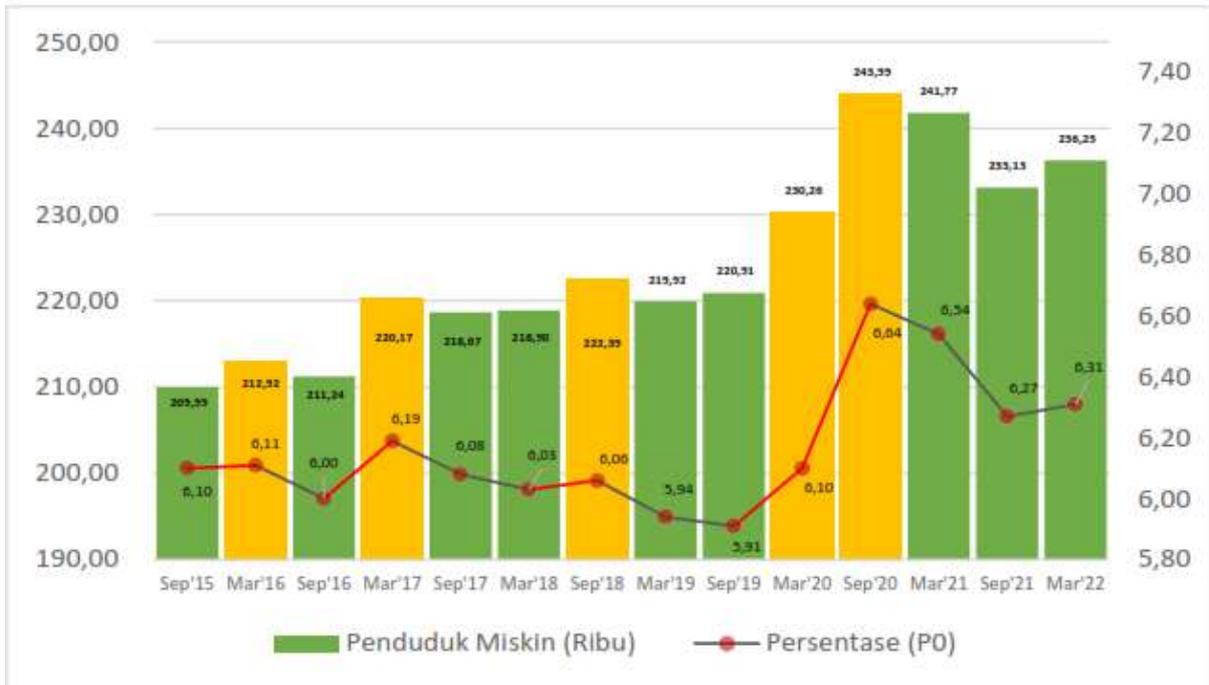
Pada Agustus 2023, TPT perkotaan sebesar 5,71 persen, lebih tinggi dibanding TPT di daerah perdesaan yang sebesar 4,43 persen. TPT menurut daerah tempat tinggal antara Agustus 2023 dengan Agustus 2022 dan Agustus 2021 memiliki pola yang sama. Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,01 persen poin, sedangkan TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,82 persen poin.

TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan periode Agustus 2021 sampai Agustus 2023 mempunyai pola yang selalu menurun pada kategori SD ke bawah, SMK, dan Diploma I/II/III. Sementara pada kategori SMP, SMA, dan Universitas cenderung fluktuatif. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,19 persen. Sementara TPT yang paling rendah terdapat pada jenjang SD ke bawah sebesar 3,31 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT menurut pendidikan mengalami penurunan pada hampir semua kategori kecuali pada kategori SMA dan Universitas. TPT dari tamatan Universitas mengalami peningkatan yang terbesar yaitu 1,59 persen poin dan pada tamatan SMA mengalami peningkatan sebesar 0,58 persen poin.

5) Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada periode Maret 2022 mengalami perbaikan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini menggambarkan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pasca pandemi

Covid-19 pertama kali melanda Indonesia dan secara khusus Kalimantan Timur.



Gambar III.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur September 2015-Maret 2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 236,25 ribu orang. Dibandingkan 2021, jumlah penduduk miskin turun 5,52 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 6,31 persen, turun 0,23 persen poin terhadap Maret.

6) Investasi

Nilai investasi Kalimantan Timur sampai dengan triwulan III Tahun 2022 telah mencapai Rp 41,20 Triliun dengan realisasi PMDN sebesar Rp.28,76 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp 12,44 triliun. Realisasi Investasi PMDN paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 9,35 triliun atau 32,51 persen, dan Kabupaten Kutai Timur dengan realisasi sebesar Rp 8,43 triliun. Sedangkan investasi PMA paling besar berada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu mencacapi US\$ 430,54 juta dan Kabupaten Kutai Barat mencapai US\$ 118,61 juta. Adapun sektor usaha yang mampu menarik investasi PMDN tertinggi adalah Pertambangan, Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi serta Industri Makanan. Sedangkan

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, sub sektor Pertambangan memiliki realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 449,19 juta atau sebesar 51,80 persen dan Industri Mineral Non Logam yaitu sebesar US\$ 100,18 juta atau sebesar 11,55 persen.

B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan 2025

1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- a) Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur yang berpengaruh terhadap permintaan komoditi ekspor;
- b) Isu geopolitik dunia yakni Konflik Rusia – Ukraina dan konflik Israel – Palestina yang menyeret beberapa negara berdampak pada perekonomian global;
- c) Potensi terjadinya krisis ekonomi global akibat gangguan rantai pasok, kerawanan pangan dan tantangan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan memicu stagflasi perekonomian dunia;
- d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan;
- e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara);
- f) Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
- g) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih belum inklusifnya sektor-sektor unggulan.

2) Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2024 dan 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a) Berlanjutnya proyek strategis nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara;
- b) Tumbuhnya minat investasi di sektor hilirisasi produk turunan batubara dan komoditas kelapa sawit bernilai tambah tinggi seperti biodiesel dan minyak goreng;
- c) Realisasi tambahan perolehan pendapatan daerah melalui sumber pendanaan alternatif dari Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca *Forest Carbon Partnership Facilities – Carbon Fund (FCPF-CF)* serta potensi sumber pendanaan dari Dana Bagi Hasil Sawit;
- d) Beroperasinya kilang minyak Balikpapan/ *Refinery Development Master Plan Refinery Unit V (RDMP RU V Pertamina)*;
- e) Meningkatnya kinerja industri pengolahan seperti industri pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya
- f) Masih terjaganya ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Negara Asia lainnya;
- g) Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi seiring dengan berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, pengerjaan proyek strategis *multiyears existing* (Bendungan Sepaku – Semoi, Pabrik Amonium Nitrat, Pabrik Coal-Methanol) dan realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi;
- h) Optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- i) Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

3.1.4 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2025

Selain dengan sederet keberhasilan, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antar wilayah. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Hal inilah yang menjadi dasar ditetapkannya tema pembangunan nasional pada RKP 2025 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan *meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method)* menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Adapun sasaran ekonomi makro nasional tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel III.1 sebagai berikut.

Tabel III.1
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

Uraian		Tahun 2024
1	Laju inflasi, IHK (% ,yoy)	1,5-3,5
	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000-15.400
2	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	49,5-153,7
3	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1-6,1
4	Neraca transaksi berjalan (% PDB)	(0,4)-(0,2)
5	Kontribusi PDB industri pengolahan (%)	19,9-20,0
6	Kontribusi PDB pariwisata (%)	4,60
7	Nilai devisa pariwisata (miliar US\$)	22,10
8	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,70-11,20
9	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,00)–(0,00)*
10	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)–(2,8)
11	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,78-39,98
12	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5-7,8
13	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2-1.905,6
14	Nilai Realisasi PMA dan PMDN sektor sekunder (Triliun Rp)	805,5-842,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024

Keterangan : * perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjadi menjadi tahun awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Arah kebijakan dimaksud mendorong pertumbuhan yang merata dan tidak menimbulkan ketimpangan dan disparitas antar daerah.

Percepatan pembangunan sarana prasarana Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Timur sehingga dapat tumbuh 5,50–6,50 persen pada tahun 2025. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat seiring dengan percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri sawit, penguatan industri dasar, antara lain industri kimia dasar, serta pengembangan industri teknologi menengah tinggi. Pengembangan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, dan bandara yang telah dibangun juga diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan Timur.

3.1.5 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2023 mengalami perbaikan dan tumbuh positif, dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,22 persen. Perbaikan ini disebabkan oleh tingginya produksi dan ekspor dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mendominasi PDRB Kalimantan Timur seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap batu bara meskipun nilai harga batubara acuan yang menurun. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung dengan meningkatnya lapangan usaha konstruksi yang diakibatkan oleh meningkatnya aktivitas pembangunan Ibu Kota Negara Baru yang semakin masif pada tahun 2024 dan meningkatnya volume ekspor hasil dari industri pengolahan.

Peningkatan daya saing daerah perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi standar pasar kerja industri di Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2025 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru.

A. Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Pada Tahun 2025, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian		Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,50
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	280,00
3	Inflasi (persen)	3,00
4	Investasi Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	37,14

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

Pada Tahun 2025, merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2024 yang diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tersebut, diharapkan pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 5,50-6,50 persen dan untuk tahun 2024 juga diharapkan mampu tumbuh positif pada 4,30-5,10 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara dan kelapa sawit, bertambahnya kapasitas dan produk turunan industri CPO, beroperasionalnya *Refinery Development Master Project* (RDMP) RU V Balikpapan, pembangunan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

B. Arah Kebijakan Ekonomi

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2025, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara mencapai 9,50 – 10,0 Persen, yakni melalui :
 - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong produktivitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
 - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian melalui intensifikasi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan ekstensifikasi perkebunan;
 - c) Mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum serta pariwisata dengan menangkap peluang dari hadirnya IKN;
 - d) Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.
2. Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan Meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencapai 6 persen, melalui :
 1. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai superhub ekonomi IKN
 2. Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga
 3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik;
 4. Meningkatkan *nett* ekspor perdagangan antar wilayah terutama pada komoditi non pertambangan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2025 pada RKPD dilakukan dengan berbagai asumsi/pendekatan yang diperkirakan akan terjadi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 akibat berlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan dan asumsi yang terdapat pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yakni sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan pada tiga tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil (DBH) hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing komponen bagi hasil termasuk telah menambahkan komponen pendapatan yang bersumber dari DBH Sawit dan dana *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)*. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diperhitungkan dengan memperhatikan capaian pendapatan pada Tahun 2023 atau disesuaikan dengan kondisi penetapan APBD pada tahun 2025;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah dihitung dengan memprakirakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan penerimaan atas keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2025. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

- 2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Melakukan kajian secara *holistic* untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
- 5) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
- 6) Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7) Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
- 8) Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 9) Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
- 10) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11) Melakukan *cleansing data base* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 12) Pelaksanaan program pemutihan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor;
- 13) Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
- 14) Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
- 15) Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan OP.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan proyeksi tahun 2024 secara umum dapat dilihat pada tabel III.4. Pada kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2024 tren realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 21,26 persen. Peningkatan tren realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah yang signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 akibat meningkatnya pendapatan pada seluruh komponen pendapatan. Proyeksi pendapatan tahun 2025 juga diperhitungkan akan mengalami peningkatan dengan sebesar 0,5 persen dengan peningkatan pada komponen PAD yang meningkat sebesar 2,31 persen dan Lain lain pendapatan daerah yang sah yang meningkat sebesar 23,11 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, peningkatan target pendapatan daerah tahun 2024 dipengaruhi oleh komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,08 persen, pendapatan transfer sebesar 1,85 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 426,09 persen. Peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sangat signifikan dipengaruhi oleh perolehan pendapatan dari keuntungan Perusahaan Pertambangan Batubara (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Tabel III.3
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2022 dan Penetapan Tahun 2023

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Penetapan Tahun 2024* (Rp)
4	Pendapatan Daerah	9.987.385.879.199	10.220.142.967.274	16.804.693.776.013	17.750.987.305.165	20.000.000.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.143.521.676.422	6.111.918.272.284	8.997.262.537.258	10.653.844.690.246	9.808.078.430.519
4.1.01	Pajak Daerah	3.900.431.414.629	4.774.890.855.289	7.623.597.479.496	8.698.162.558.337	8.592.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	10.123.187.099	13.590.719.061	19.980.889.916	68.105.206.998	869.447.412.636
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	110.988.636.348	214.599.338.882	310.262.666.522	260.236.357.306	252.916.355.582
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.121.978.438.346	1.108.837.359.053	1.043.421.501.324	1.627.340.567.605	93.714.662.301
4.2	Pendapatan Transfer	4.831.865.557.777	4.094.319.639.990	7.790.284.158.755	7.006.932.857.919	9.542.874.433.517
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.831.865.557.777	4.094.319.639.990	7.790.284.158.755	7.006.932.857.919	9.542.874.433.517
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.759.526.731.777	4.056.865.328.990	7.753.114.697.755	7.006.932.857.919	9.521.373.973.517
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	3.544.638.973.637	2.591.967.832.399	6.329.446.113.503	5.486.976.401.730	7.736.539.963.517
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	831.404.756.000	828.050.174.361	824.108.986.889	857.319.948.081	1.042.719.353.000
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	212.147.502.140	247.450.542.385	233.206.951.954	185.061.506.345	215.371.296.000
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	171.335.500.000	389.396.779.845	366.352.645.409	477.575.001.763	526.743.361.000

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Penetapan Tahun 2024* (Rp)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	72.338.826.000	37.454.311.000	37.169.461.000	0	0
4.2.01.03	Dana Insentif Fiskal					21.500.460.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.998.645.000	13.905.055.000	17.147.080.000	90.209.757.000	649.047.135.964
4.03.01	Hibah	11.998.645.000	13.905.055.000	17.147.080.000	21.055.277.000	13.861.535.964
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				69.154.480.000	635.185.600.000

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2024

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2024

Tabel III.4
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023 (persen)

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Penetapan Tahun 2024*
4	Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	51,50%	59,80%	53,54%	60,02%	49,04%
4.1.01	Pajak Daerah	75,83%	78,12%	84,73%	81,64%	87,60%
4.1.02	Retribusi Daerah	0,20%	0,22%	0,22%	0,64%	8,86%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	2,16%	3,51%	3,45%	2,44%	2,58%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21,81%	18,14%	11,60%	15,27%	0,96%
4.2	Pendapatan Transfer	48,38%	40,06%	46,36%	39,47%	47,71%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	98,50%	99,09%	99,52%	100,00%	99,77%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	74,47%	63,89%	81,64%	78,31%	81,25%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	17,47%	20,41%	10,63%	12,24%	10,95%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4,46%	6,10%	3,01%	2,64%	2,26%

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Penetapan Tahun 2024*
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3,60%	9,60%	4,73%	6,82%	5,53%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	1,50%	0,91%	0,48%	0,00%	0,00%
4.2.01.03	Dana Insentif Fiskal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,12%	0,14%	0,10%	0,51%	3,25%
4.03.01	Hibah	100,00%	100,00%	100,00%	23,34%	2,14%
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				76,66%	97,86%

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2024

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2024

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar 0,5 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,32 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat sebesar 23,11 persen. Sedangkan Pendapatan Transfer diproyeksikan menurun pada seluruh komponen pendapatan sebesar 2,92 persen. Secara proporsi pada Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 49,94 persen.

Tabel III.5
Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2025		Tahun 2026
		Rp	%	Rp
4	Pendapatan Daerah	20.100.000.000.000	100,00%	21.300.000.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	10.035.157.739.563	49,93%	11.235.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000	83,71%	9.860.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.070.333.040.395	10,67%	16.226.520.210
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	449.309.792.556	4,48%	295.304.934.416
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	115.514.906.612	1,15%	1.063.468.545.374
4.2	Pendapatan Transfer	9.862.791.865.296	49,07%	10.036.927.064.173
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.862.791.865.296	100,00%	10.036.927.064.173
4.2.01.01	Dana Perimbangan	9.862.791.865.296	100,00%	10.026.927.064.173
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	8.322.263.421.296	84,38%	8.448.393.716.128
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	857.919.020.000	8,70%	902.008.583.095
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	190.152.584.000	1,93%	197.938.719.256
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	492.456.838.000	4,99%	478.586.045.693
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)			10.000.000.000

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2025		Tahun 2026
		Rp	%	Rp
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.050.395.141	1,01%	28.072.935.828
4.03.01	Hibah	13.864.392.517	6,86%	28.072.935.828
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624	93,14%	

Sumber: BAPENDA, BPKAD Provinsi KALTIM, 2024

3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel III.6
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2025 (Rp)
A	BELANJA OPERASI	10.820.112.989.184
1	Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP	3.846.875.075.490
2	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH-DPRD	53.018.963.761
3	Belanja Operasional Kantor (Telepon, Listrik, Air, Internet, dan Jasa Kebersihan dan Satpam)	306.209.841.083
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	682.609.422.000
5	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)	190.932.337.000
6	Dana Bagi Hasil Sawit	38.337.604.000
7	Dana FCPF-CF	66.185.600.000

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2025 (Rp)
8	Belanja pajak rokok (JPKM)	70.000.000.000
9	BLUD	1.056.320.450.850
10	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	8.123.695.000
11	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000
12	Belanja Bagi Hasil	4.401.500.000.000
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
1	Pembayaran Pokok Utang	
2	Penyertaan Modal	50.000.000.000
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		12.347.953.868.652

Sumber: *BAPPEDA Provinsi KALTIM, BPKAD Provinsi KALTIM, 2024*

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai yakni belanja Gaji, Tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang diberikan kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK);
- b) Belanja Gaji, Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pj. Gubernur, dianggap belanja mengikat karena merupakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan (seperti belanja pegawai dan tunjangan serta biaya operasional);
- c) Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Kota merupakan transfer pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;
- d) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telepon, internet, dan pajak kendaraan;

- e) Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya;
- f) DBH-DR, dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017;
- g) Belanja pajak rokok, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur (Dinkes untuk JPKN, Satpol untuk Penegakan Perda) PMK Nomor 102/PMK.07/2015;
- h) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;
- i) Bankeu/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;
- j) Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggap belanja mengikat karena bersifat rutin di setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bersifat prioritas, namun bukan menjadi kewenangan provinsi;
- k) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi di daerah;
- l) Penyertaan Modal diberikan kepada BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;
- 3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Belanja daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif namun dengan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 25,03 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dikarenakan terjadinya peningkatan belanja modal, belanja transfer ke pemerintah kabupaten kota akibat peningkatan pendapatan pajak daerah, peningkatan belanja hibah kepada penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan peningkatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7
 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2020-2023 dan Penetapan Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Penetapan Tahun 2024* (Rp)
5	BELANJA	10.683.921.000.001	10.723.529.422.431	12.393.745.833.368	19.724.298.910.866	20.675.000.000.000
5.01	BELANJA OPERASI	5.356.491.717.806	4.983.150.466.273	6.001.780.302.943	8.266.977.895.372	9.273.490.427.777
5.01.01	Belanja Pegawai	2.246.712.057.549	2.105.588.712.918	2.334.585.774.591	2.591.408.921.533	3.181.412.864.768
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.870.659.107.195	2.634.941.566.554	3.184.224.252.607	4.983.933.808.073	4.801.836.994.292
5.01.05	Belanja Hibah	223.050.003.062	228.665.386.800	432.031.575.745	679.755.765.766	1.270.440.568.717
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	16.070.550.000	13.954.800.000	50.938.700.000	11.879.400.000	19.800.000.000
5.02	BELANJA MODAL	1.317.417.909.377	1.514.465.189.715	1.980.010.052.268	5.023.300.274.088	4.462.900.834.540
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000.000	221.409.234.933	6.688.799.413	50.440.679.059	343.263.617.142
5.04	BELANJA TRANSFER	3.510.011.372.818	4.004.504.531.511	4.405.266.678.744	6.383.580.062.346	6.595.345.120.541
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.911.308.336.000	2.455.934.232.318	3.542.721.678.744	5.186.080.062.346	4.792.900.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.598.703.036.818	1.548.570.299.193	862.545.000.000	1.197.500.000.000	1.802.445.120.541

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2024

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2024

Tabel III.8
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2023 dan Penetapan Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Penetapan Tahun 2024*
5	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.01	BELANJA OPERASI	50,14%	46,47%	48,43%	41,91%	44,85%
5.01.01	Belanja Pegawai	41,94%	42,25%	38,90%	31,35%	34,31%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	53,59%	52,88%	53,05%	60,29%	51,78%
5.01.05	Belanja Hibah	4,16%	4,59%	7,20%	8,22%	13,70%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	0,30%	0,28%	0,85%	0,14%	0,21%
5.02	BELANJA MODAL	12,33%	14,12%	15,98%	25,47%	21,59%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,68%	2,06%	0,05%	0,26%	1,66%
5.04	BELANJA TRANSFER	32,85%	37,34%	35,54%	32,36%	31,90%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	54,45%	61,33%	80,42%	81,24%	72,67%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	45,55%	38,67%	19,58%	18,76%	27,33%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2024

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2024

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 sangat diperlukan terlebih dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada tahun 2024 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2025, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah untuk percepatan transformasi ekonomi dan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- 4) Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5) Penguatan perekonomian di berbagai sektor seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat ;
- 6) Pencapaian target, sasaran, dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- 7) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan Sedangkan untuk belanja *mandatory* lainnya seperti belanja peningkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran;
- 8) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, peningkatan kualitas pelayanan publik,

menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, penurunan stunting dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun ke depan. Adapun proyeksi 2024 Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.9
Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026

Kode Rek	Uraian	Proyeksi Tahun 2025		Proyeksi Tahun 2026
		Rp	%	
5	BELANJA	20.950.000.000.000	100,00%	21.500.000.000.000
5.01	BELANJA OPERASI	9.810.556.664.850	47,86%	7.620.621.396.411
5.01.01	Belanja Pegawai	4.412.130.684.749	44,97%	2.894.942.502.187
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	4.670.151.179.801	47,60%	4.300.678.894.224
5.01.05	Belanja Hibah	700.614.300.300	7,14%	375.000.000.000
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	27.660.500.000	0,28%	50.000.000.000
5.02	BELANJA MODAL	4.584.692.185.150	22,36%	7.845.501.480.348
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	100.000.000.000	0,49%	129.877.123.241
5.04	BELANJA TRANSFER	6.454.751.150.000	31,49%	5.904.000.000.000
5.04.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.401.500.000.000	67,96%	
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.053.251.150.000	24,13%	

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

Dalam pemenuhan kebutuhan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan publik terkait pemenuhan belanja mandatori (*mandatory spending*), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja seperti belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi pengawasan dan peningkatan SDM ASN pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.10
Proyeksi Belanja Mandatori (*Mandatory Spending*)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Pagu (Rp)	%
A	Belanja Fungsi Pendidikan	4.465.983.626.356	21,32%
1	Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.902.528.471.000	

No	Uraian	Jumlah Pagu (Rp)	%
2	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	563.455.155.356	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.550.159.956	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	417.143.162.000	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	96.829.433.400	
	Hibah Kepada Lembaga Pendidikan/Sekolah Swasta	96.829.433.400	
	Sekretariat Daerah	5.932.400.000	
	Hibah Kepada Lembaga Pendidikan/Sekolah Swasta	5.932.400.000	
B	Belanja Fungsi Kesehatan	2.198.598.220.628	10,49%
1	Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD	1.928.610.325.128	
	Pagu Belanja Dinkes dan RSUD diluar gaji ASN	1.928.610.325.128	
2	Belanja di luar Dinas Kesehatan/RSUD yang menunjang pelaksanaan fungsi Kesehatan, antara lain:	269.987.895.500	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	237.987.895.500	
	Pembangunan Rumah Sakit	237.987.895.500	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.000.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan bidang Kesehatan)	22.000.000.000	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.000.000.000	
	Hibah kepada Lembaga Vertikal untuk kegiatan kesehatan	10.000.000.000	
C	Belanja Infrastruktur	7.672.029.857.381	52,93%
1	Belanja Modal	4.584.692.185.150	
2	Belanja Pemeliharaan	377.761.721.931	
3	Belanja Hibah	700.614.300.300	
4	Belanja Bantuan Sosial	27.660.500.000	
5	Belanja Bantuan Keuangan	1.981.301.150.000	
D	Belanja Pengawasan	72.472.540.000	0,35%
1	Belanja pada Inspektorat	70.322.540.000	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.150.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan bidang Pengawasan)	2.150.000.000	
E	Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN	71.230.000.000	0,34%
1	Belanja pada BPSDM	71.230.000.000	

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

Sedangkan dalam rangka pemenuhan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah mengalokasikan belanja SPM pada bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, keamanan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan sosial pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.11
 Proyeksi Belanja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Jenis SPM	Jumlah Pagu (Rp)
1	Pelayanan Dasar Pendidikan	941.335.086.519
2	Pelayanan Dasar Kesehatan	3.200.000.000
3	Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.616.840.900
4	Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	356.240.000
5	Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	1.679.550.003
6	Pelayanan Dasar Sosial	53.410.179.207
	Jumlah	1.008.597.896.629

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel III.12
 Penetapan Pembiayaan APBD Tahun 2024 dan Proyeksi Pembiayaan
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026

No	Uraian	Penetapan Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
A	Penerimaan Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	500.000.000.000	900.000.000.000	700.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	500.000.000.000	900.000.000.000	700.000.000.000

No	Uraian	Penetapan Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
B	Pengeluaran Pembiayaan			
1	Penyertaan Modal	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	0	400.000.000.000	200.000.000.000

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2024

Asumsi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.900.000.000.000, diproyeksikan berdasarkan trend Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari penghematan/efisiensi belanja tahun sebelumnya serta tidak terealisasinya beberapa kegiatan yang bersumber dari DBH SDA-DR akibat tidak adanya bencana kebakaran dan lainnya. Asumsi penggunaan penerimaan pembiayaan dalam kerangka keuangan daerah ini dimaksudkan untuk mempercepat pemanfaatan potensi belanja agar dampaknya dapat dirasakan secara optimal dalam upaya pembangunan daerah di pelaksanaan RKPD Tahun 2025. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang mengakibatkan asumsi besaran SiLPA dimaksud tidak sesuai dengan proyeksi pada RKPD Tahun 2025, maka akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada Perubahan RKPD 2025.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.50.000.000.000 untuk penyertaan modal ke BUMD bertujuan peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun kedua dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Secara umum, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2025 dapat di lihat seperti pada Gambar IV.1 berikut.

RKPD Provinsi Kalimantan Tahun 2025	
Fokus Utama	
I. SDM yang Berdaya Saing	II. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ketenagakerjaan 4. Pemberdayaan Gender	1. Diversifikasi Ekonomi 2. Inklusifitas Ekonomi 3. Kemiskinan 4. Infrastruktur Wilayah
Fokus Pendukung/Kondisi Perlu	
III. Lingkungan Hidup	IV. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1. Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK 3. Bauran Energi Baru Terbarukan	1. Reformasi Birokrasi 2. ASN BerAKHLAK

Gambar IV.1

Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2023	Target Tahun 2025
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,20	78,60
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	14,12
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,99	10,21
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,72	74,89
	Prevalensi Stunting	Persen	22,90	19,80
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,31	4,60-5,14
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,97	67,64
Tujuan 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,22	6,28-6,58
	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,11	5,05-5,67
	Indeks Gini	Indeks	0,322	0,310-0,321
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	Persen	8,13	6,40-7,20
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,771	0,740
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,140	0,120
	Tingkat inflasi	Persen	3,46	2,5±1

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2023	Target Tahun 2025
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,39	8,39
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,47	80,19
	Persentase Penurunan Emisi dari BAU	Persen	29,33	27,53
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,64	71,41
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,36	81,47
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,64	84,32
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	83,86	88,43
Sasaran 9: Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	29,33	24,40
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan EBT	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	11,44	12,39
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,87	74,00 (B)
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,82	86,30
	Sistem Merit	Poin	271	275
	Indeks SPBE	Indeks	2,91	3,40
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	77,89	80,01 (A)
	Tingkat maturitas SPIP	Level/Skor	Level 3 Skor 3,030	Level 3 Skor 3,726

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Selain mempedomani RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2025. Tema RKP tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

- Prioritas 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Prioritas 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- Prioritas 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Prioritas 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
- Prioritas 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Prioritas 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Prioritas 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- Prioritas 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi

antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Adapun yang menjadi isu strategis pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Isu strategis transformasi sosial
 - Kesehatan untuk semua
 - Pendidikan berkualitas yang merata
 - Perlindungan sosial yang adaptif
- 2) Isu strategis transformasi ekonomi
 - Produktivitas ekonomi dan inovasi daerah
 - Elastisitas perkotaan terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi rendah
 - Perlunya percepatan transisi energi untuk menjaga daya saing ekonomi
 - Perlunya percepatan transformasi digital untuk menunjang produktivitas ekonomi
- 3) Isu strategis transformasi tata Kelola
 - Integritas partai politik
 - Sistem penggajian tunggal
 - Kualitas regulasi
 - Sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan
 - Transformasi dan digitalisasi pelayanan public
 - Manajemen talenta
 - Integrasi proses bisnis
- 4) Isu strategis transformasi ketahanan sosial, budaya dan ekologi
 - Isu agama
 - Isu budaya
 - Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
 - Kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati
 - Energi
 - Pangan

Adapun arah kebijakan dalam mewujudkan pencapaian tema RKP 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) SDM Berkualitas: SDM berdaya saing dan produktif
Transformasi Sosial

- Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
- Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
- Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan
- Stunting
- Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-sistem

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

2) Infrastruktur Berkualitas: Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas Transformasi Ekonomi

- Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
- Penguatan infrastruktur digital
- Pengembangan infrastruktur transisi energi
- Percepatan infrastruktur IKN

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan: Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan

Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

- Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Pengembangan skema graduasi bansos
- Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
- Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
- Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- Peningkatan produksi industri pengolahan
- Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif

- Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Target sasaran pembangunan nasional pada RKP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3 – 5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,32 ^{a)}	4,5 – 5,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,36 ^{b)}	7,0 – 8,0
4	Rasio Gini (Indeks)	0,388 ^{b)}	0,379 – 0,382
5	Indeks Pembangunan Manusia	0,53	0,56
6	Penurunan Emisi GRK (%)	34,09 ^{c)}	38,6

Keterangan: a) Agustus, b) Maret, c) Angka Sementara per Oktober

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara metodologis, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang. Isu strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2024, arah kebijakan RKP tahun 2025, permasalahan pembangunan dan arah kebijakan dalam RPD tahun 2024-2026, maka isu strategis pembangunan daerah tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM);
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2025

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, isu strategis serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2025, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah “Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”.

Tema RKPD tahun 2025 merupakan upaya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui diversifikasi ekonomi merujuk pada pengembangan beragam sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu, sehingga ekonomi menjadi lebih dinamis dan tangguh terhadap fluktuasi pasar. Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam menjalankan strategi ini, melibatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi baru. SDM yang terampil dan terdidik dapat lebih efektif berkontribusi dalam sektor-sektor ekonomi yang lebih maju dan berbasis pengetahuan. Kemudian dengan dukungan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang berdaya saing memainkan peran krusial dalam mendukung diversifikasi ekonomi. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, telekomunikasi, dan energi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan berbagai sektor ekonomi. Keberlanjutan infrastruktur ini dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memudahkan mobilitas barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang berpotensi tinggi. Dengan mengintegrasikan diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur yang berdaya saing, suatu wilayah dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang dan berkesinambungan, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi.

Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian sasaran utama pada tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, dimana RKPD ini juga perlu memperhatikan upaya pencapaian tujuan pembangunan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan. Dengan memahami isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan tema pembangunan daerah tahun 2025, maka Prioritas

Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya;
4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar;
5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik;
8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan RPD dan permasalahan pembangunan daerah. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2025	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2025
1.	<ul style="list-style-type: none">• Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri• Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN	<ol style="list-style-type: none">a. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilirb. Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industric. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industrid. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digitale. Peningkatan SDM UKM/IKM untuk tumbuh menjadi eksportirf. Peningkatan dukungan kemudahan pengurusan ekspor dan kemudahan memperoleh pinjaman bagi UKM/IKM

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2025	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2025
		<ul style="list-style-type: none"> g. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata h. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan i. Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan. j. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan k. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan l. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak m. Penguatan kelembagaan peternakan n. Peningkatan produksi perikanan o. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan p. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura q. Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian r. Peningkatan iklim usaha dan investasi s. Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis <i>Online Single System</i> (OSS)
2.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus b. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan d. Optimalisasi <i>Boarding School</i> e. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan g. Peningkatan literasi dan numerasi h. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar i. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja j. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2025	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2025
		<ul style="list-style-type: none"> k. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja l. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan m. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja n. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi o. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan p. Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik q. Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
3.	<p>Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan perbaikan gizi masyarakat b. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta d. pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat e. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan f. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya g. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat h. Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan i. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar • Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi b. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi c. Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi d. Peningkatan pelayanan terminal tipe B e. Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air f. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir g. Peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi h. Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) i. Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasan, terluar, dan terpencil

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2025	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2025
		<ul style="list-style-type: none"> j. Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan k. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik l. Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang m. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah n. Pengimplementasian kebijakan satu peta
5.	Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar b. Peningkatan keberfungsian sosial PPKS c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan d. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial e. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi f. Peningkatan Daya Saing UMKM g. Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha h. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting i. Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa j. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak
6.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan b. Pengendalian pencemaran air c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut d. Pengendalian pencemaran udara e. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan f. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan g. Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah Penyedia Jasa LH h. Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan i. Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan j. Peningkatan Peranan Konservasi Hutan k. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) l. Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan) m. Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Rotasi) n. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2025	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2025
		<ul style="list-style-type: none"> o. Peningkatan pengelolaan DAS p. Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan q. Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan r. Pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya s. Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ekonomi masyarakat. t. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan u. Pengembangan infrastruktur EBT v. Peningkatan kerja sama dalam pengelolaan EBT w. Peningkatan edukasi kepada para pihak terutama masyarakat untuk penerapan EBT
7.	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT b. Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi c. Deregulasi Kebijakan d. Penyederhanaan Organisasi e. Perbaikan Tata Laksana f. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur g. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan h. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran i. Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah j. Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur k. Penguatan Pengawasan

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, maka disusun strategi dan arah kebijakan tahunan yang mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV.4
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing			
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1	Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
pendidikan masyarakat		2	Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		3	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan
		4	Optimalisasi <i>Boarding School</i>
		5	Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
		6	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		7	Peningkatan literasi dan numerasi
		8	Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar
		Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu kesehatan
2	Percepatan perbaikan gizi masyarakat		
3	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi		
4	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat		
5	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan		
6	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya		
7	Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		
8	Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan		
9	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan		
Sasaran 3: Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan mutu dan daya saing tenaga kerja	1	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
		2	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri
		3	Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
	Perluasan kesempatan kerja	1	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan	Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan	1	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan
		2	Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik
		3	Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	Peningkatan daya saing investasi dan produktivitas industri	1	Pengembangan hilirisasi industri komoditi hulu agro, aneka, pangan, dan komoditi unggulan eksisting
		2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri
		3	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan Industri
		4	Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri
		5	Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis <i>Online Single System (OSS)</i>
	Peningkatan daya tarik pariwisata	1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Prov. Kaltim
		2	Peningkatan Pemasaran Pariwisata Daerah Berbasis Tematik Unggulan Wilayah
		3	Peningkatan Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi Pariwisata Daerah yang diperkuat dengan event pariwisata berskala nasional/internasional
	Peningkatan produksi dan produktivitas Usaha Kecil dan Menengah	1	Peningkatan Daya Saing UKM
		2	Peningkatan Pemasaran Produk UKM
		3	Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1	Pemetaan Rawan Pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi
		2	Penyaluran bantuan pangan pada daerah rawan pangan / terdampak bencana

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal	1	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam , bergizi, seimbang, aman (B2SA) berbasis pangan lokal
	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan	1	Revitalisasi lahan perkebunan yang tidak produktif
		2	Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
		3	Memperbanyak penggunaan benih perkebunan unggul bersertifikat
		4	Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan
	Peningkatan produksi dan produktivitas ternak	1	Optimalisasi reproduksi ternak
		2	Meningkatkan produksi dan produktivitas pakan ternak
		3	Meningkatkan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak
		4	Pengembangan dan Penguatan kelembagaan peternakan
	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
		2	Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan
	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1	Revitalisasi lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2	Memperbanyak penggunaan benih TPH unggul bersertifikat
3		Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian	
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan	1	Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	1	Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
		2	Peningkatan keberfungsian sosial PMKS
		3	Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
		4	Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		5	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi
		6	Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa
		7	Perbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin/rentan miskin
	Peningkatan lapangan usaha produktif bagi masyarakat miskin	1	Pemberian bantuan sarana pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin terutama di daerah tertinggal dan perbatasan
	2	Pelatihan dan penyuluhan pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin	
	3	Pemberian Akses Legal Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan	
	4	Pelatihan dan stimulus permodalan untuk gabungan kelompok usaha mikro/keompok usaha bersama (KUBE)	
	5	Subsidi ongkos angkut pemasaran produk untuk daerah tertinggal dan perbatasan	
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
	2	Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Optimalisasi penyelenggaraan jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Peningkatan dan pemeliharaan pelayanan jalan provinsi
		2	Pembangunan ruas jalan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi
	Peningkatan infrastruktur sumber daya air	1	Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan pendayagunaan air
		2	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air
	Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang	1	Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang
		2	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
		3	Pengimplementasian kebijakan satu peta
	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur air minum	1	Pembangunan sistem penyediaan air minum skala regional

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	1	Revitalisasi, penanganan, dan penyediaan infrastruktur di permukiman kumuh kewenangan provinsi
	Peningkatan layanan infrastruktur perhubungan	1	Peningkatan pelayanan terminal tipe B
		2	Penyediaan perlengkapan keselamatan jalan
	Peningkatan pemerataan ketersediaan listrik 24 jam	1	Peningkatan ketersediaan jaringan tegangan rendah dan distribusi listrik
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1	Menjaga kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		2	Menjaga kualitas lingkungan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		3	Menjaga kualitas lingkungan melalui pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan	1	Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan
	Optimalisasi perlindungan hutan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting (KBEP) dan konservasi provinsi	1	Meningkatkan upaya pengelolaan TAHURA provinsi
		2	Meningkatkan upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar
		3	Optimalisasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat
		4	Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan
	Optimalisasi penyelenggaraan Rehabilitasi hutan dan lahan serta belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	Optimalisasi Pengelolaan DAS terpadu multipihak
		2	Optimalisasi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan
Optimalisasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan	1	Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial	
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi	Peningkatan cakupan desa yang	1	Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Baru dan Terbarukan	memanfaatkan energi baru terbarukan		menggunakan energi baru terbarukan
	Peningkatan ketersediaan daya listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan	1	Peningkatan penyediaan sarana pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Peningkatan pemenuhan dan penerapan standar pelayanan publik	1	Penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan
		2	Pelaksanaan layanan publik sesuai standar, operasional dan prosedur
		3	Perbaiki budaya kerja di lingkungan pemerintahan
	Optimalisasi pengelolaan administrasi pemerintah dan layanan publik berbasis teknologi informasi	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
		2	Peningkatan pengelolaan <i>e-Government</i>
		3	Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
	Optimalisasi penerapan sistem Merit	1	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan
		2	Peningkatan kualitas penilaian dan evaluasi kinerja ASN
	Pengembangan kompetensi ASN	1	Peningkatan pelatihan ASN berbasis kompetensi
		2	Peningkatan sertifikasi kompetensi ASN
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja
		2	Peningkatan kualitas perencanaan dan penjenjangan kinerja
		3	Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja
	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian intern pemerintah	1	Peningkatan kapabilitas APIP
		2	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3		Peningkatan pembangunan zona integritas	

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran, program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing						
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %	1.893.692.537.669	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,64 %			
		Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %			
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,05 %			
		Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	72,00 %			
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,15 %			
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,00 %			
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91,00 %			
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	83,44 %			
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %	16.359.087.608	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,7 Rasio	148.127.921.389	Dinas Kesehatan	PP-2
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	66,50 Persen	3.148.909.819	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP-1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	60,13 %	15.076.565.326	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-1
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	2.527.267.258	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PP-1
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas						
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1 %	202.799.309.529	Dinas Kehutanan	PP-3
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0.71 %			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	40 UKM	1.690.263.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	10 %	5.343.502.674	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	70 Jenis	1.837.873.610	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	5,56 %	13.226.279.341	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	63,33 %	5.470.407.569	Dinas Pariwisata	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	3.343.635.718	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	100 %			
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	12 Minat	3.044.966.719	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2.776.544.151	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	49.000 Ha	732.112.900	Dinas Perkebunan	PP-3
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	25,41 %	20.336.416.914	Dinas Perkebunan	PP-3
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	23,03 %	3.704.416.939	Dinas Perkebunan	PP-3
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	52,99 %			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	97.75 Skor	4.229.173.741	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3, PP-8
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	86.5 Skor			
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	0 %	1.120.534.907	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3, PP-8
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	1 Kecamatan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	41,76 %	2.546.687.896	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	43,0 %			
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	36 %	27.009.204.884	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	41.57 %			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	35,7 %			
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	11.95 %			
		Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	98 %			
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	50 %			
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	80 %	4.587.478.128	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,72 Skor	15.727.562.222	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	97,29 Skor	43.766.051.962	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	88,00 Skor			
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	92,41 Skor	11.928.802.539	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95,81 Skor			
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	99,18 Skor	2.070.872.486		
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,73 Skor	3.254.022.490	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	195000 Ton	15.911.198.591	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	201000 Ton	11.556.651.781	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	11 Produk	1.340.802.812	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	10.360 Orang	21.108.112.272	Dinas Sosial	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	35 %	5.982.997.693	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	156,59 Ha	122.417.786.239	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	14 %	868.676.243	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP-5
		Persentase kinerja realisasi pupuk	90 %			
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	86,00 %	198.693.120.897	Dinas Perhubungan	PP-4, PP-8
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan	0,005 Angka			
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	165 Kejadian			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan provinsi	86,23 %	2.472.126.229.684	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
		Penambahan Ruas Jalan Baru	2 Ruas			
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9730 Ha	193.668.042.006	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	140 Ha			
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	60 Lt/detik			
		Panjang pantai kritis yang ditangani	0.33 Km			
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	12,76 %	23.864.950.396	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	83.40 %	6.286.770.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	60,13%	15.076.565.326	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,90 %	13.160.866.399	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
42	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	156,59 Ha	122.417.786.239	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
43	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	97,78 %	64.759.950.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-4, PP-8
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100,00 %			
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	300,00 kWp			
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	38,73 %			
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
44	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤5 (tercemar ringan) Indeks	8.230.269.367	Dinas Lingkungan Hidup	PP-6
		Indeks Standar Pencemar Udara	47 (Baik) Indeks			
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
45	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1 %	202.799.309.529	Dinas Kehutanan	PP-6
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0.71 %			
46	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	730.007,98 Ha	12.500.658.192	Dinas Kehutanan	PP-6
47	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196.336 Ha	4.204.318.570	Dinas Kehutanan	PP-6
48	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Ha	70.743.225.230	Dinas Kehutanan	PP-6
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
49	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	5.107.708.743	Dinas Perkebunan	PP-6
Sasaran 10: Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
50	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	38,73 %	64.759.950.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-6
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	300,00 kWp			
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100,00 %			
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	97,78 %			
51	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	484.906,515 Ton CO2e/Tahun	104.903.602.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-6
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	45,76 %			
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	35,78 %			
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi						
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK						
KEPEGAWAIAN						
52	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 indeks	26.342.967.234	Badan Kepegawaian Daerah	PP-7

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
53	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	87 Persen	25.152.765.271	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PP-7
SEKRETARIAT DAERAH						
54	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	73 Indeks	8.019.807.966	Biro Organisasi	PP-7
		Indeks Kematangan Organisasi	45 Indeks			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
55	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	82 %	39.506.416.323	Dinas Komunikasi dan Informatika	PP-7
INSPEKTORAT DAERAH						
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	100 %	7.577.450.600	Inspektorat	PP-7

Dalam upaya penyelesaian permasalahan maupun isu strategis pembangunan daerah, pelaksanaan program pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya melibatkan Perangkat Daerah namun juga dari *stakeholders* lainnya diluar Perangkat Daerah yakni dengan melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau swasta. Dalam mensinergikan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah Kalimantan Timur telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan dibidang usaha dan/atau jasa wajib melaksanakan TJSL dan PKBL. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 terdapat 2 (dua) program prioritas yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah serta berdampak luas pada masyarakat, dalam hal ini adalah program Rumah Layak Huni dan program Pangan Untuk Penghijauan, dimana program tersebut telah terbentuk Badan Pengelola masing-masing yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan pelaksanaan program prioritas tahunan kepada masyarakat;
2. Melakukan validasi dan menyepakati rencana program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan, serta menyinergikan dengan program pembangunan daerah;
3. Melakukan identifikasi lokasi dan calon penerima bantuan;
4. Mengusulkan rencana program dan kegiatan;
5. Melakukan penilaian terhadap perusahaan pelaksana;
6. Mengusulkan pemberian penghargaan pelaksana program prioritas terbaik oleh Gubernur;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kepada Perusahaan;
8. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait program Rumah Layak Huni dan Program Pangan untuk Penghijauan.

Selanjutnya, pelaksanaan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 juga mendukung pencapaian Prioritas Nasional seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.6
Dukungan Program Pembangunan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	1) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan 3) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 4) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 5) Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 6) Program Pengawasan Keamanan Pangan 7) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 8) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 9) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 10) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 11) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 12) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 13) Program Pengelolaan Hutan

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
		<ul style="list-style-type: none">14) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)15) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil16) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan17) Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara18) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya19) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap20) Program Pengelolaan Persampahan21) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)22) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional23) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)24) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian25) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner26) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup27) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat28) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan29) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat30) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum31) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat32) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian33) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
		34) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 35) Program Penyuluhan Pertanian 36) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 37) Program Perizinan Usaha Pertanian
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1) Program Kawasan Permukiman 2) Program Pemasaran Pariwisata 3) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 5) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 6) Program Penataan Bangunan Gedung 7) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 8) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 9) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 10) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 11) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 12) Program Pengelolaan Pelayaran 13) Program Pengelolaan Perkeretaapian 14) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 15) Program Pengembangan Jasa Konstruksi 16) Program Pengembangan Permukiman 17) Program Pengembangan Perumahan 18) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 19) Program Pengembangan Umkm 20) Program Pengendalian Izin Usaha Industri 21) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
		22) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 23) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 24) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 25) Program Penyelenggaraan Jalan 26) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 27) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 28) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 29) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 30) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	1) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 3) Program Pembinaan Perpustakaan 4) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 6) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 7) Program Penempatan Tenaga Kerja 8) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 9) Program Pengawasan Ketenagakerjaan 10) Program Pengelolaan Pendidikan 11) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 12) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 13) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 14) Program Pengembangan Kurikulum 15) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 16) Program Perencanaan Tenaga Kerja

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
		17) Program Perlindungan Khusus Anak 18) Program Perlindungan Perempuan 19) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 2) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 3) Program Pengembangan Ekspor 4) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 7) Program Promosi Penanaman Modal
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1) Program Administrasi Pemerintahan Desa 2) Program Kesejahteraan Rakyat 3) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 4) Program Pemberdayaan Sosial 5) Program Penataan Desa 6) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 7) Program Peningkatan Kerja Sama Desa 8) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 9) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 10) Program Rehabilitasi Sosial
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 2) Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 3) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 4) Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa 5) Program Kepegawaian Daerah

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
		<ol style="list-style-type: none">6) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah7) Program Pelayanan Penghubung8) Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah9) Program Penataan Organisasi10) Program Pencatatan Sipil11) Program Pendaftaran Penduduk12) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah13) Program Pengelolaan Arsip14) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah15) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan16) Program Pengelolaan Keuangan Daerah17) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah18) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia19) Program Pengendalian Penduduk20) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial21) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik22) Program Penyelenggaraan Pengawasan23) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral24) Program Perekonomian Dan Pembangunan25) Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah26) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip27) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 2) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 5) Program Pembinaan Sejarah 6) Program Penanganan Bencana 7) Program Penanggulangan Bencana 8) Program Pengelolaan Permuseuman 9) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 10) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 11) Program Pengembangan Kebudayaan 12) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

4.2.4 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2024-2026), mendukung Prioritas Pembangunan Nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel IV.7
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	<p>a. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri</p> <p>b. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar</p> <p>c. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN</p>
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	<p>a. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri</p> <p>b. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar</p> <p>c. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN</p>
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	<p>a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja</p> <p>b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya</p> <p>c. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN</p>
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	<p>a. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri</p> <p>b. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN</p>
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
	pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan b. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah Tahun 2025 agar target-target pada indikator TPB/SDGs baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan daerah yang mendukung kebijakan pengarusutamaan TPB/SDGs :

Tabel IV.8
 Persandingan Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
Goal 1 Tanpa Kemiskinan Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) • Program Rehabilitasi Sosial • Program Penanganan Bencana • Program Hubungan Industrial • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Kesejahteraan Rakyat • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penanggulangan Bencana

Pengarutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
<p>Goal 2 Tanpa Kelaparan</p> <p>Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p> <p>Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p> <p>Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan <i>input</i> lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.</p> <p>Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian
<p>Goal 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p> <p>Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</p> <p>Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Rehabilitasi Sosial

Pengarutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p> <p>Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p> <p>Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p> <p>Target 3.8 Pada tahun 2030, mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p> <p>Target 3.a Memperkuat pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</p> <p>Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
<p>Goal 4 Pendidikan Berkualitas</p> <p>Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> <p>Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengarutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</p> <p>Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p> <p>Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</p>	
<p>Goal 5 Kesetaraan Gender</p> <p>Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</p> <p>Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</p> <p>Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</p> <p>Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pengendalian Penduduk
<p>Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</p> <p>Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</p> <p>Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Pengarutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p> <p>Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Aspek Kegeologian" • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
<p>Goal 7 Energi Bersih dan Terjangkau</p> <p>Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</p> <p>Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.</p> <p>Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Energi Terbarukan (EBT) • Program Pengelolaan Ketenagalistrikan • Program Pengelolaan Mineral dan Batu bara
<p>Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</p> <p>Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p> <p>Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</p> <p>Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pemasaran Pariwisata

Pengarutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>Goal 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Pengelolaan Pelayaran • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
<p>Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kerja Sama Desa • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Perlindungan Khusus Anak • Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik • Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum • Program Hubungan Industrial
<p>Goal 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kawasan Permukiman • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Pengembangan Perumahan • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan</p> <p>Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penanganan Bencana • Program Penanggulangan Bencana • Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Perencanaan Lingkungan Hidup
<p>Goal 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab</p> <p>Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.</p> <p>Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup • Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Penataan Organisasi • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
<p>Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim</p> <p>Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</p> <p>Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penanganan Bencana • Program Penanggulangan Bencana • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>Goal 14 Ekosistem Lautan Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) • Program Pengelolaan persampahan
<p>Goal 15 Ekosistem Daratan Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Hutan • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian" • Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan • Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
<p>Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik • Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program Perlindungan Perempuan • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Penataan Organisasi

Pengarustamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik • Peran Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pencatatan Sipil • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
<p>Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</p> <p>Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance-ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari oDA/GNI untuk negara kurang berkembang.</p> <p>Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.</p> <p>Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Ekspor • Program Perekonomian dan Pembangunan • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Pengembangan Ekspor • Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah • Program Pencatatan Sipil

Pengarutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.</p> <p>Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.</p> <p>Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitas teknologi global.</p> <p>Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi yang disetujui bersama.</p> <p>Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.</p> <p>Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda</p> <p>Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.</p>	

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
<p>Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.</p> <p>Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Target 17.15 menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan</p> <p>Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.</p> <p>Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.</p> <p>Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</p>	

4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2025. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Timur sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini telah ditelaah dan diinternalisasi kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan memperhatikan keselarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang telah disesuaikan dengan kewenangan dan kedudukan Pemerintahan Daerah. Adapun penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel IV.9
Penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Hasil Penelaahan
1.	<p>Mengupayakan kebijakan dan program pembangunan kedalam perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, yang sinergis antar bidang urusan dan efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur, termasuk menurunkan Tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur</p>	<p>Terhadap pandangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada dokumen RKPD Tahun 2025 telah merumuskan strategi dan arah kebijakan lintas sinergi dan lintas sektor dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka, diantaranya melalui peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, peningkatan lapangan usaha produktif bagi masyarakat miskin, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, penguatan sektor-sektor ekonomi dari sumberdaya terbarukan seperti pertanian dan perikanan, perkebunan, peternakan, pangan dan hortikultura, serta mendorong produksi dan produktivitas UKM. Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka melalui penguatan daya saing sumber daya manusia guna mendorong penyerapan tenaga kerja, perluasan akses jenjang pendidikan, peningkatan mutu satuan pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan, hingga bantuan biaya pendidikan kepada siswa pada semua jenjang pendidikan.</p> <p>Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan memfokuskan pada penguatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga kinerja pembelajaran semakin meningkat. Upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka juga akan dilakukan melalui program-program kerjasama dengan dunia kerja dan industri, perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan.</p>
2.	<p>Mengupayakan kebijakan dan program pembangunan kedalam penyusunan RKPD Tahun 2025 melalui intervensi program dan kegiatan yang mendorong umur harapan hidup, rata-rata lama</p>	<p>Untuk mengurangi ketimpangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berfokus pada pembangunan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas</p>

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Hasil Penelaahan
	<p>sekolah, harapan lama sekolah yang dapat menekan perbedaan capaian nilai IPM antara Kabupaten dengan kota serendah mungkin, sehingga nilai IPM Kabupaten/Kota mendekati rata-rata capaian nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur, yakni capaian nilai IPM Provinsi yang tinggi tapi tidak terkandung capaian nilai IPM Kabupaten yang jauh tertinggal, seperti Kabupaten Mahulu</p>	<p>pelayanan kesehatan, akses yang setara terhadap pendidikan dasar dan menengah bagi setiap anak atau orang dengan tidak memandang status sosial dan ekonominya, menerapkan jaring pengaman sosial, serta akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja. Kualitas kehidupan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, akses transportasi, rumah yang sehat dan layak huni, termasuk koneksi digital (internet) yang berkesinambungan dan tangguh. Dengan memadukan tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat di semua lini dan sinergi antara sektor, maka kesenjangan nilai IPM antara Kabupaten/ Kota dan Provinsi dapat dipersempit.</p>
<p>3.</p>	<p>Mengupayakan kebijakan dan program Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi dalam RKPD Tahun 2025 yang dapat merealisasikan kemantapan jalan provinsi sebesar 90 persen lebih di akhir tahun 2025. Dan mengupayakan melalui belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemantapan jalan Kabupaten/Kota.</p>	<p>Selaras dengan perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi telah merumuskan rencana pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan didukung ketersediaan anggaran yang mencukupi. Selain itu, kemantapan jalan provinsi sebesar 90 persen dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dan pemeliharaan pelayanan jalan serta pembangunan ruas jalan baru. Sementara untuk meningkatkan kemantapan jalan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran dengan sebelumnya memastikan kecukupan alokasi dana dari anggaran nasional atau provinsi yang khusus diperuntukkan bagi pemeliharaan jalan di Kabupaten/Kota, serta melalui rencana alokasi Bantuan Keuangan. Agar tepat sasaran, upaya ini dapat didahului dengan penguatan rencana pemeliharaan jalan, membangun mekanisme terpusat untuk mengawasi dan mendukung pelaksanaan rencana pemeliharaan jalan, pemberian bimbingan teknis mengenai teknik</p>

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Hasil Penelaahan
		pemeliharaan jalan, praktik manajemen, dan penggunaan peralatan.
4.	Mengupayakan kebijakan dan program mendukung penguatan kesehatan melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta program-program inovatif yang mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat	Sebagaimana penelaahan pokok pikiran terhadap upaya menurunkan kesenjangan nilai IPM antar wilayah di Kalimantan Timur diatas, maka upaya penguatan kesehatan telah dirumuskan dalam prioritas pembangunan ketiga yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya, yang selanjutnya dituangkan melalui strategi peningkatan akses dan mutu kesehatan dengan arah kebijakan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi, peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya. Inovasi yang mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat juga telah dituangkan ke dalam arah kebijakan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, penguatan sistem kesehatan dan pembiayaan kesehatan, serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
5.	Mengupayakan kebijakan dan program kedalam penyusunan RKPD Tahun 2025, khususnya program-program prioritas pembangunan yang belum mencapai targetnya, sehingga terjadi percepatan pencapaian target program-program prioritas Pembangunan pada tahun 2025	Untuk mengupayakan kebijakan dan program yang dapat mempercepat pencapaian target program prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja, perencanaan dan penjenjangan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja) dan optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal Pemerintah. Pendekatan lain yang dapat diupayakan adalah meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Hasil Penelaahan
		perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program prioritas, penguatan koordinasi antar unit kerja pada perangkat daerah, secara berkala mengidentifikasi dan memprioritaskan intervensi-intervensi yang mendesak, menerapkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta menyediakan insentif atau dukungan bagi kegiatan-kegiatan inovatif.
6.	Menambah pagu anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan anggaran yang disusun oleh Tim Renja DPRD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana surat permohonan penambahan pagu indikatif nomor 900.1.3/I.267/Set.DPRD.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menindaklanjuti usulan dimaksud guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.4 Penyampaian Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) dan Aspirasi Reses (Pokir)

Usulan *list* aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) dan aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui tautan (<https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah>) adalah sebanyak 3.521 usulan yang terdiri dari aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) sebanyak 2.805 usulan dan aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) sebanyak 716 usulan. Usulan tersebut disampaikan dengan mempedomani Kamus Usulan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas di tahun 2025. Adapun rincian jumlah usulan yang disampaikan melalui Menu Aspirasi dalam aplikasi SIPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.10

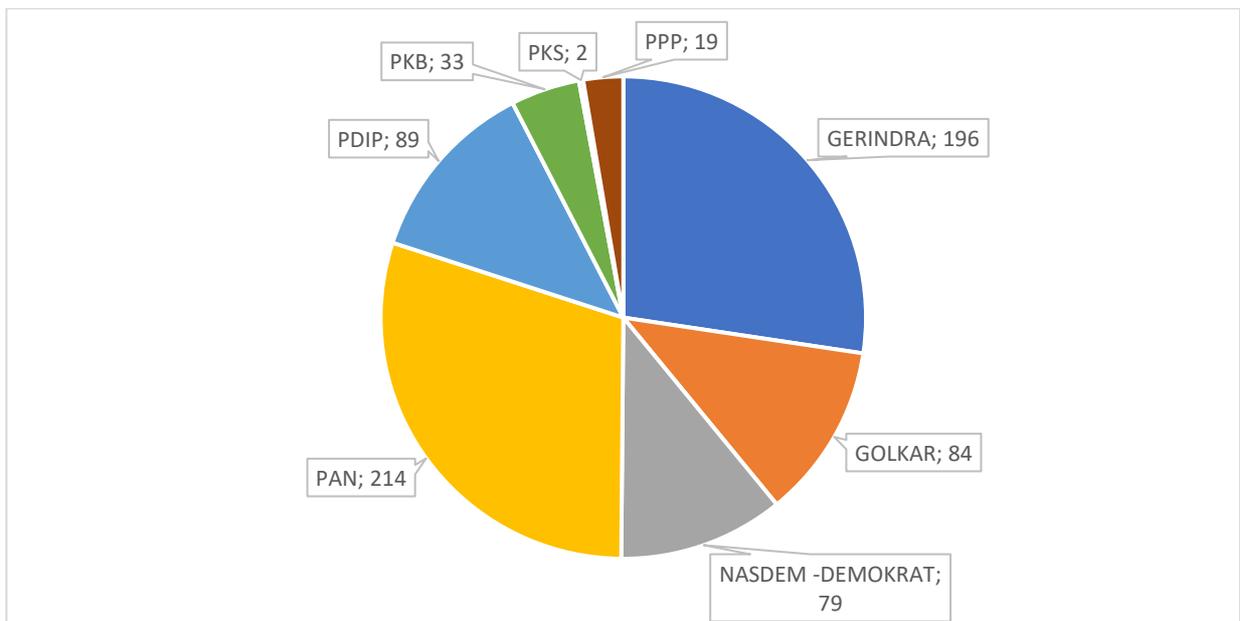
Jumlah Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Usulan
1	Balikpapan	500
2	Berau	160
3	Bontang	102
4	Kutai Barat	314
5	Kutai Kartanegara	283
6	Kutai Timur	181
7	Mahakam Ulu	63

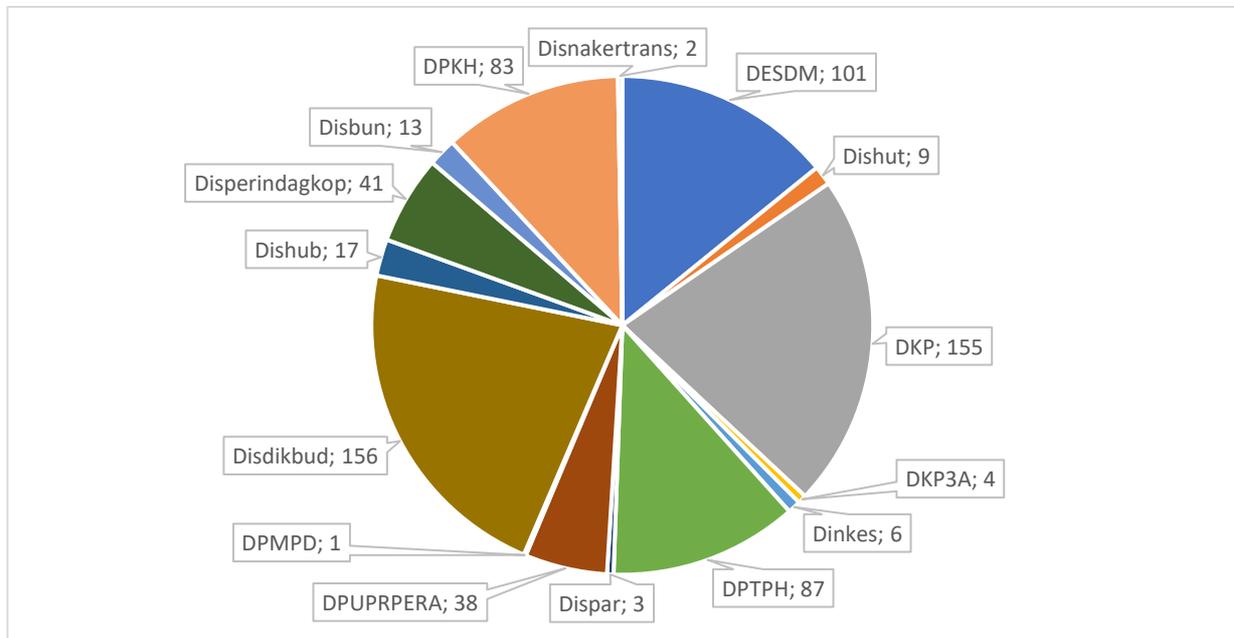
No	Kab/Kota	Usulan
8	Paser	375
9	Penajam Paser Utara	203
10	Samarinda	624
Total		2805

Tabel IV.11
Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD

No	Fraksi	Usulan
1	Demokrat-Nasdem	79
2	Gerindra	196
3	Golkar	84
4	PAN	214
5	PDI-P	89
6	PKB	33
7	PKS	2
8	PPP	19
Total		716



Gambar IV.2
Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD



Gambar IV.3

Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Belanja Langsung Perangkat Daerah

Tabel IV.12

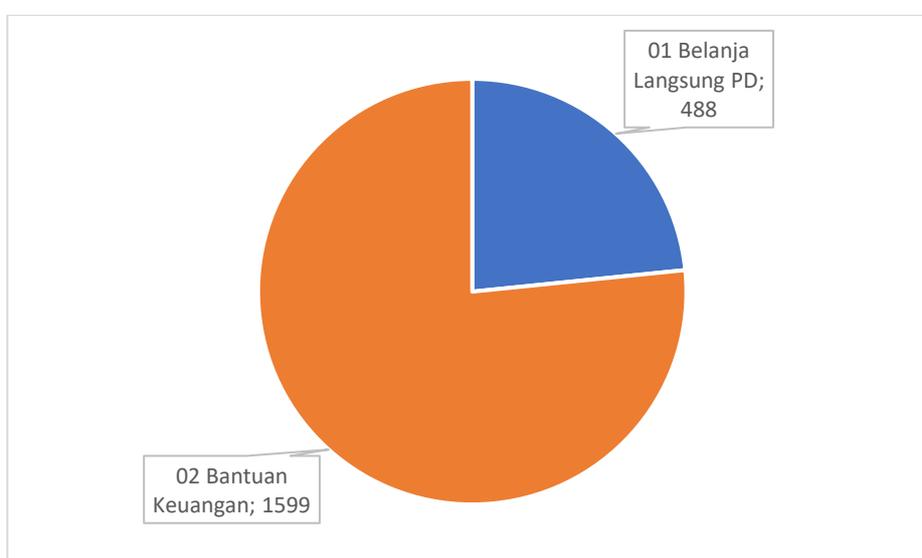
Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Anggota DPRD

No	Anggota DPRD	Usulan
1	Agiel Suwarno, S.E, M.Si	7
2	Ananda Emira Moeis, S.Sn	15
3	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	85
4	Dr. H. Rusman Ya'qub, S.Pd, M.Si	2
5	Dr. Sarkowi V Zahra, S.Hut, M.M, M.Si, M.Ling	5
6	DR. Yusuf Mustafa, S.H, M.H	1
7	Ekti Imanuel, S.H, M.M	24
8	Encik Wardani, S. Hut	1
9	H. A Jawad Sirajuddin, S.H, M.H	1
10	H. Agus Aras	13
11	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	33
12	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	6
13	H. Andi Harahap, S.Sos	9
14	H. Baba	8
15	H. Hasanuddin Mas'ud	10
16	H. Saefuddin Zuhri, S.E, M.M	28
17	Henry Pailan Tandi Payung, S.E	10
18	Herliana Yanti	2
19	Hj. Fitri Maisyaroh, S.T	1
20	Ir. Bagus Susetyo, M.M	21
21	Ir. H. Muhammad Adam	13
22	Ir. Seno Aji, M.Si	108
23	Ismail, S.T	32
24	M. Nasiruddin, S.H	11
25	Marthinus, S.T, M.Si	1

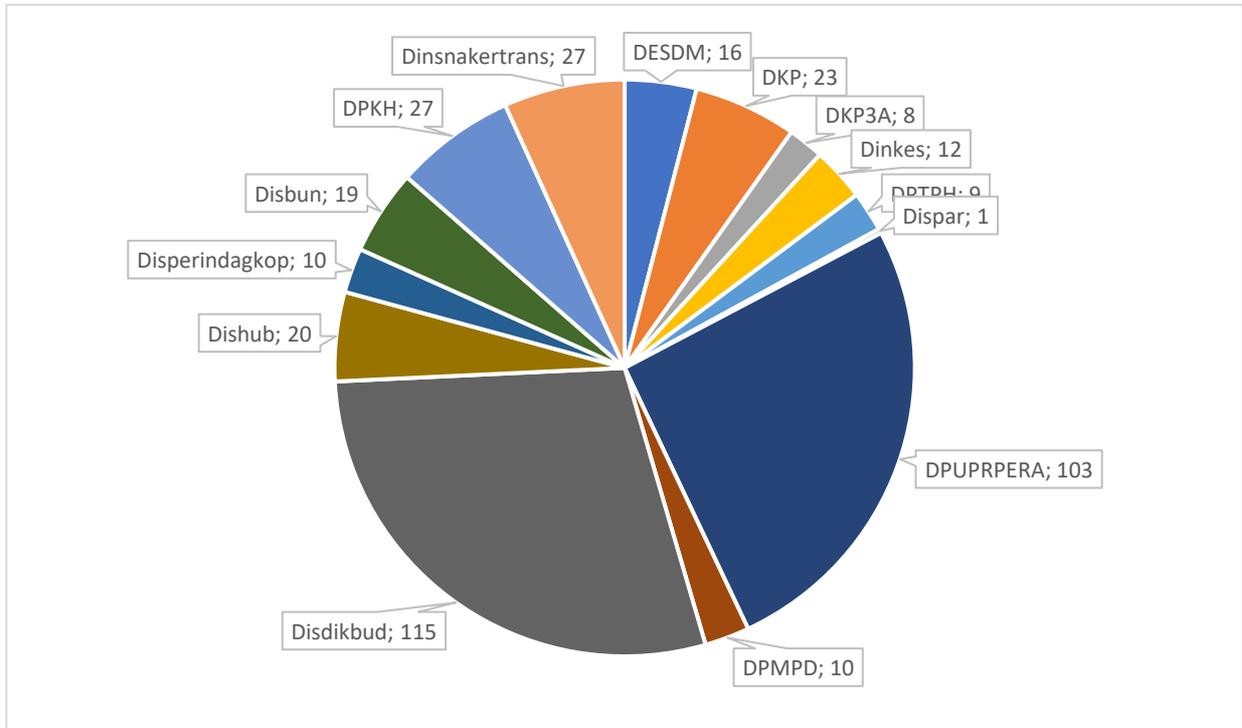
No	Anggota DPRD	Usulan
26	Muhammad Samsun, S.E. M,Si	40
27	Nidya Listiyono, S.E	15
28	Rima Hartati, SE	13
29	Romadhony Putra Pratama	7
30	Safuad, S.E	1
31	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	39
32	Sapto Setyo Pramono, S.T, M.T	5
33	Sigit Wibowo, S.E	110
34	Siti Rizky Amalia, S.E, Ak. C.A	4
35	Sukmawati	7
36	Sutomo Jabir, S.T, M.T	3
37	Veridiana Huraq Wang, S.pd, M.M	8
38	Yenni Eviliana, S.E	17
Total		716

Tabel IV.13
 Status Input Usulan Aspirasi Langsung (Bappeda/Bappedalitbang
 KabupatenKota) Berdasarkan Jenis Belanja

No	Kab/Kota	Usulan Bankeu	Usulan BL PD
1	Balikpapan	349	38
2	Berau	89	44
3	Bontang	37	31
4	Kutai Barat	124	60
5	Kutai Kartanegara	132	60
6	Kutai Timur	87	72
7	Mahakam Ulu	31	25
8	Paser	259	79
9	Penajam Paser Utara	135	48
10	Samarinda	356	31
Total		1599	488



Gambar IV.4
 Status Input Usulan Aspirasi Langsung (Bappeda/Bappedalitbang
 KabupatenKota) Berdasarkan Jenis Belanja



Gambar IV.5

Status Input Usulan Aspirasi Langsung (Bappeda/Bappedalitbang Kabupaten/Kota) Berdasarkan Belanja Langsung Perangkat Daerah

Tabel IV.14

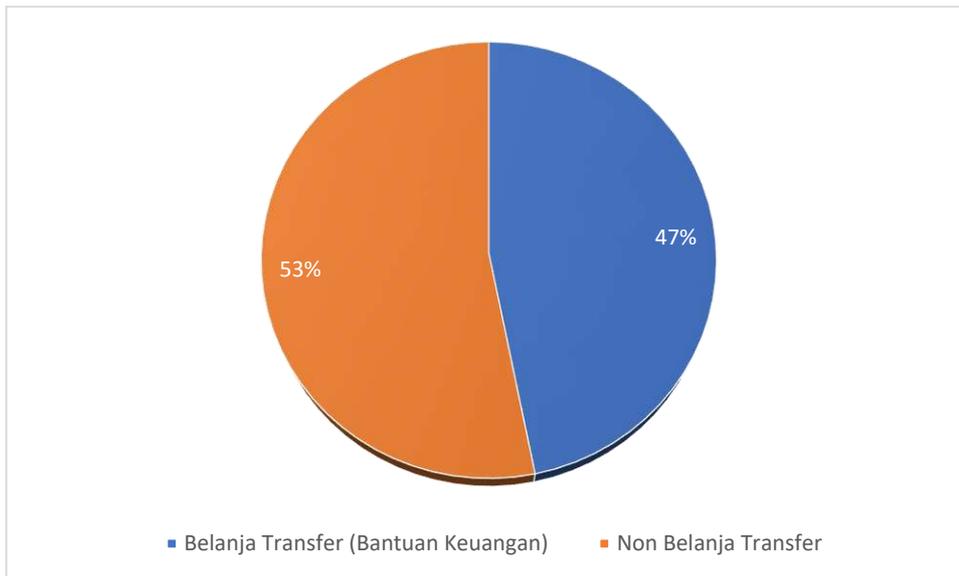
Status Input Usulan Aspirasi Langsung (Bappeda/Bappedalitbang Kabupaten/Kota) Berdasarkan Jenis Belanja

No	Kamus Usulan Hibah/Bantuan Sosial	Jumlah Usulan
1	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Keagamaan	286
2	Hibah Kepada badan/lembaga/ormas yang berbadan hukum	119
3	Hibah kepada instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dan dukungan terhadap Ibu Kota Nusantara	26
4	Hibah Kepada Perguruan Tinggi Negeri	16
5	Hibah Kepada Perguruan Tinggi Swasta	7
6	Hibah Kepada SMA/SMK/SLB swasta	47
7	Hibah sarana peribadatan	81
8	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan sosial	136
Total		718

4.5 Akomodasi Usulan Aspirasi Langsung

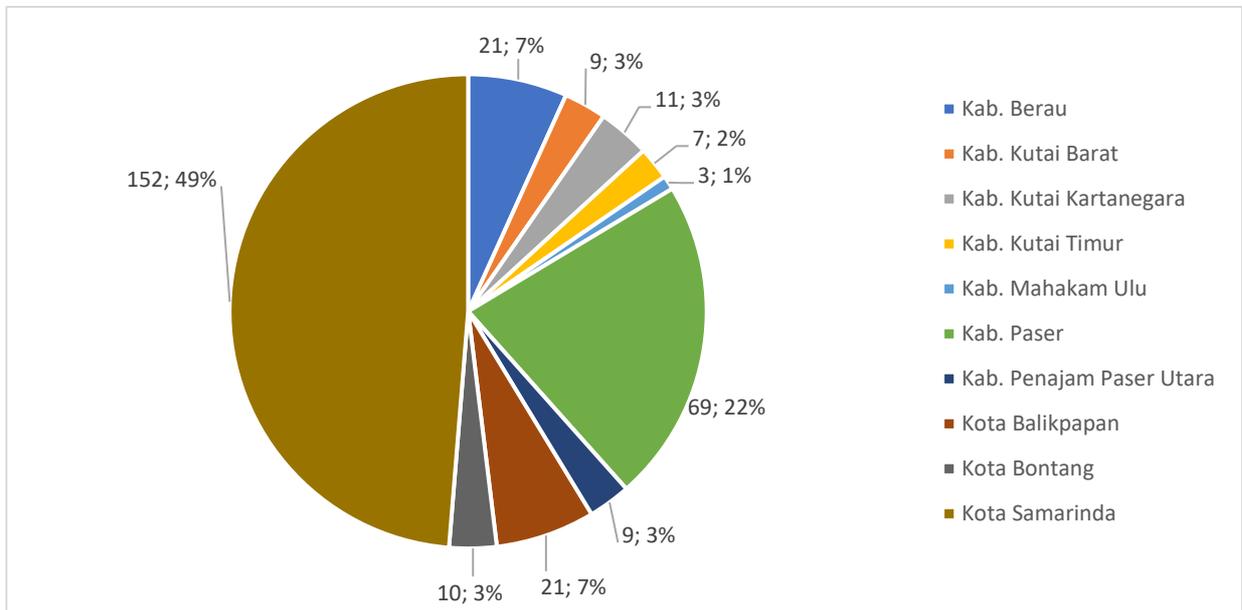
Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 2.805 usulan aspirasi langsung yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dari Lembaga/Institusi/Organisasi melalui aplikasi SIPD. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 666 usulan aspirasi langsung yang disetujui. Usulan

aspirasi langsung yang telah lolos proses verifikasi berdasarkan jenis belanjanya dapat dilihat pada gambar berikut.



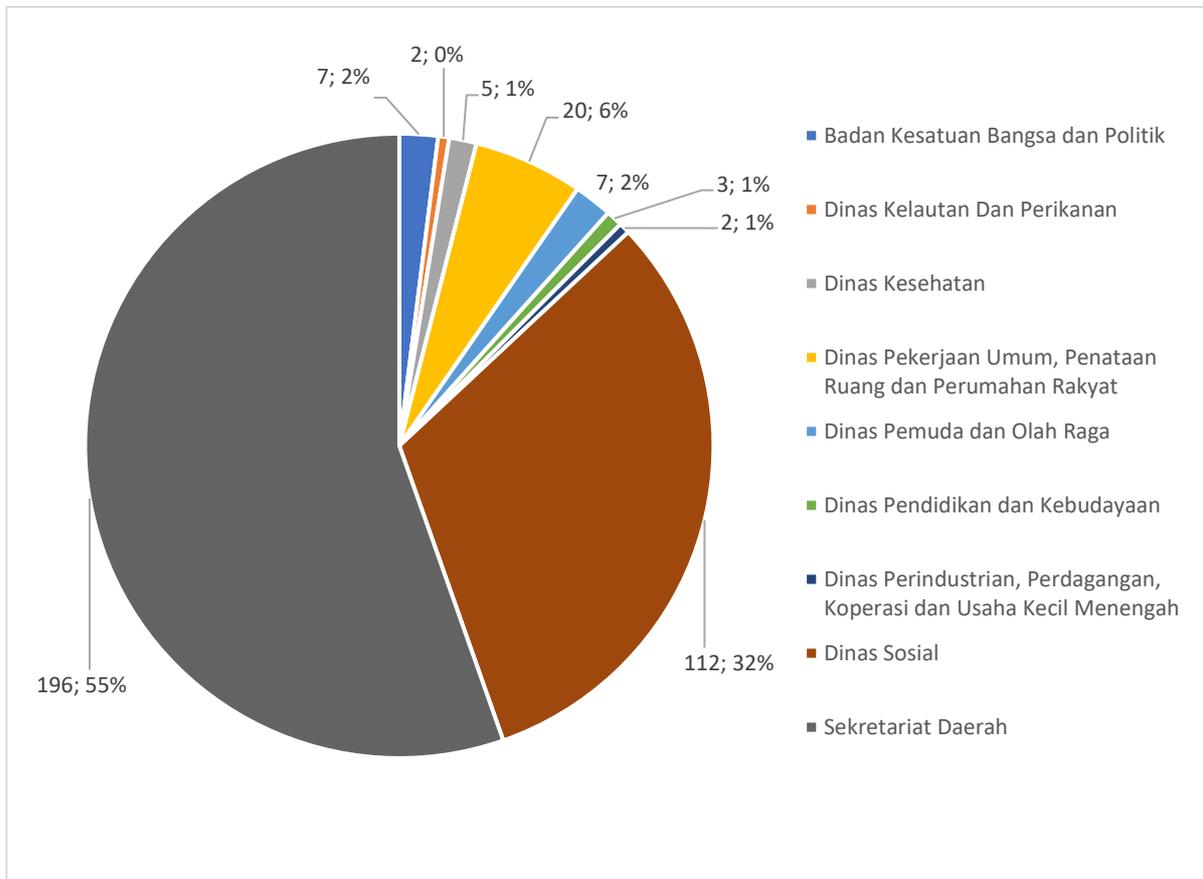
Gambar IV.6
Usulan Aspirasi Langsung yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Jenis Belanja
(Belanja Non Transfer dan Belanja Transfer)

Adapun usulan aspirasi langsung yang disetujui berjenis belanja non transfer, yakni sebanyak 312 usulan. Meskipun berjenis belanja transfer, namun usulan yang disetujui dinilai dapat menunjang pencapaian target dan sasaran pembangunan provinsi. Pola pendanaan terhadap usulan yang berjenis belanja transfer ini adalah melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota yang nilainya telah dirumuskan di dalam kerangka pendanaan. Adapun pemetaan terhadap usulan aspirasi langsung yang berjenis belanja transfer berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar IV.7
Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota

Selain dari kewenangan kabupaten/kota, terdapat pula usulan aspirasi langsung yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi merupakan kewenangan provinsi atau bersifat hibah, yakni total sebanyak 354 usulan. Sebagai informasi, bahwa usulan aspirasi langsung yang menjadi kewenangan provinsi secara umum juga telah dibahas di dalam forum Rakortekrenbang dan Musrenbang. Adapun pemetaan terhadap usulan aspirasi langsung yang berjenis belanja non transfer berdasarkan tujuan Perangkat Daerahnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

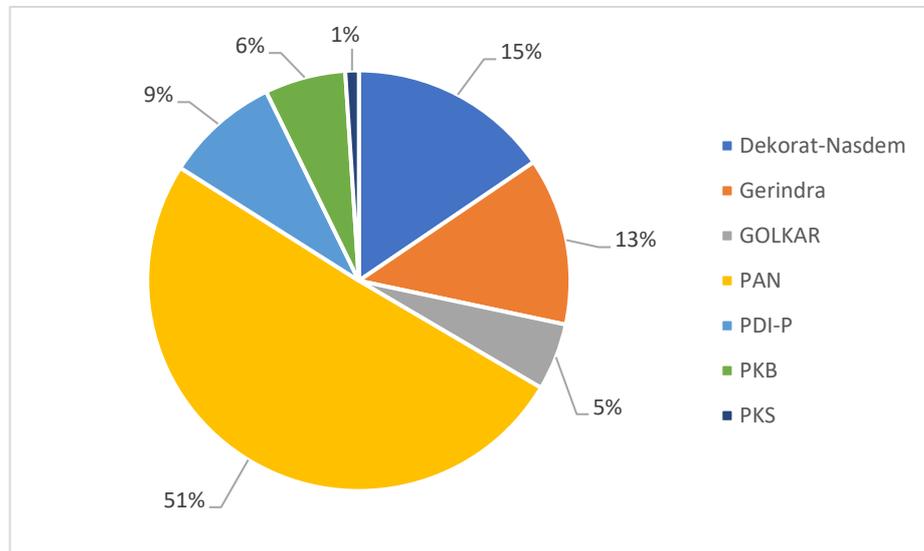


Gambar IV.8

Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Non Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

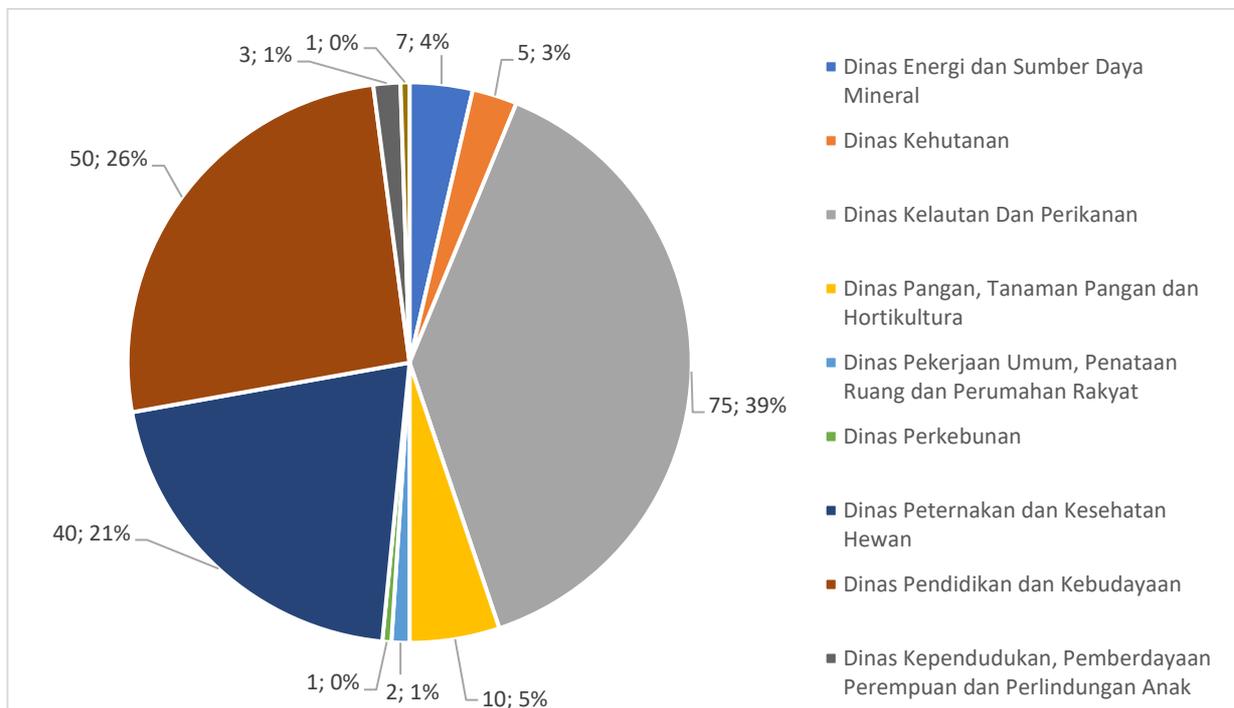
4.6 Akomodasi Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 716 usulan aspirasi pokir yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil reses melalui aplikasi SIPD. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, terdapat 194 usulan yang disetujui. Usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan fraksi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar IV.9
Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Fraksi

Jika dilihat secara lebih rinci, secara kuantitas proporsi usulan aspirasi pokir DPRD yang telah disetujui di dalam tahap penyusunan RKPD paling banyak ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan Perangkat Daerah tujuannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar IV.10
Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

Seluruh usulan aspirasi yang telah lolos proses validasi dan verifikasi (usulan aspirasi langsung dan aspirasi pokir DPRD) kemudian di sinkronisasi dan di internalisasi ke dalam masing-masing rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di Tahun 2025. Adapun informasi terhadap usulan-usulan aspirasi yang telah disetujui di dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat di dalam aplikasi SIPD.

4.7 Inovasi Pembangunan Daerah

Selain program/kegiatan yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan prioritas yang telah diuraikan, dikembangkan pula program-program inovasi daerah, Beberapa program inovasi yang dikembangkan di Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut:

4.7.1 Diversifikasi Inklusif

Pendekatan pembangunan secara inklusi sudah mulai dikembangkan sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional hingga pelaksanaan PUG dan inklusi sosial diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang melaksanakannya dengan menetapkan kebijakan dan peraturan Daerah, salah satunya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, sehingga isu gender dan inklusi sosial menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi dalam mendorong diversifikasi ekonomi daerah yang berasal dari kontribusi perempuan, laki-laki dan kelompok disabilitas. Berdasarkan perkembangan data indeks pembangunan manusia (IPM), Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang memiliki nilai IPM ke-empat tertinggi di Indonesia, namun ketika dipilah ke Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, Provinsi Kalimantan Timur masih berada pada urutan 3 terendah dari 34 Provinsi di tingkat nasional. Selain itu dalam kerangka ini tidak sekedar perempuan dan laki-laki tapi juga meliputi kelompok disabilitas yang perempuan dan menjadi kepala rumah tangga.

Inovasi “ability” merupakan inisiatif progressif yang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya menyeimbangkan kesetaraan gender

dan inklusi sosial dalam transisi pembangunan ekonomi dari *unrenewable energy* ke *renewable energy* dan ekonomi alternatif/kreatif yang berkembang pesat melalui teknologi informasi dan media. Sesuai dengan tema RKPD 2025 “Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggagas program Diversifikasi Inklusif. Inklusifitas yang dimaksud adalah upaya untuk meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi daerah bagi masyarakat (khususnya bagi masyarakat miskin) yang disertai dengan konsep kesetaraan gender yang pada prinsipnya memposisikan perempuan dan laki-laki setara dalam kesempatan dan hak-hak nya. Kesetaraan gender perlu dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama; berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya sebagai hak-hak asasinya, sehingga perempuan dapat menyumbangkan potensinya secara optimal terhadap pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (Ambarsari Dwi C.,et.all.2002), yang selanjutnya menjadi landasan dalam pencapaian visi RPJPD 2025-2045 mendatang.

Diversifikasi inklusif memiliki konsep untuk memberdayakan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (utamanya PEKKA dan disabilitas) agar memiliki akses berusaha disektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah (misalnya UMKM di bidang kuliner) dengan memberikan insentif dan pendampingan mulai dari hulu (pemodalan dan proses produksi) hingga pada proses hilir (pemasaran). Salah satu poin kebaruan (*novelty*) dari Diversifikasi Inklusif adalah pola pelaksanaan yang mempertimbangkan bahwa peran gender khususnya perempuan dan kelompok disabilitas penting dalam berkontribusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur dalam skala mikro, dimana selama ini peran ini masih menjadi isu daerah yang perlu untuk ditindaklanjuti.

4.7.2 Pelajar Penting Penggerak Posyandu

Saat ini peran generasi muda dalam pembangunan wajib diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang, dengan kenyataan bahwa jumlah generasi muda dalam hal ini kelompok pelajar usia 15 – 17 tahun memiliki jumlah yang terbanyak berdasarkan data sensus penduduk BPS 2020. Potensi besar ini dapat menjadi roda penggerak dalam inovasi-inovasi Pembangunan daerah, salah satunya dalam penanganan stunting. Pada tahun 2022, prevalensi

stunting Provinsi Kalimantan Timur sebesar 23,9 persen dan pada tahun 2023 pada posisi 22,9 persen. Hal ini sangat kontradiktif dengan pencapaian kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dimana PDRB perkapita mencapai Rp215,76 juta tertinggi ke-2 se-Indonesia dan IPM Kaltim pada angka 78,20 tertinggi ke-4 se-Indonesia. Oleh karena itu penurunan angka stunting Kalimantan Timur ditargetkan sampai 19,80 persen di tahun 2024. Untuk mencapai target penurunan stunting tersebut memerlukan aksi dan intervensi kuat di Kalimantan Timur secara terintegrasi.

Intervensi yang dilakukan pemerintah dengan 2 (dua) klasifikasi yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Sebagai afirmatif, intervensi gizi spesifik dipilih menjadi upaya penanggulangan stunting melalui intervensi pembelajaran mengenai pencegahan stunting di Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang dilakukan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, serta didukung oleh instansi terkait lainnya. Intervensi melalui pelajar dilakukan atas dasar pertimbangan jumlah total seluruh peserta didik se-Kaltim berjumlah 168.730 orang (BPS Kaltim 2023) dan jumlah posyandu aktif sekitar 1.399 unit dari jumlah total posyandu se-Kaltim sebesar 4.968 unit (Satu Data 2023) sehingga terdapat potensi keduanya untuk dapat dipadukan dalam sebuah gerakan bersama, serta pertimbangan bahwa sekolah memiliki peran yang penting dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

Salah satunya melalui gerakan inovasi Pelajar Penting (Peduli Stunting) di Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 di SMA/SMK. Dalam pengembangannya, inovasi ini terus dioptimalisasi melalui peningkatan peran pelajar SMA/SMK yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur sebagai Duta Penggerak Posyandu untuk menyukseskan Gerakan 100% Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu. Melalui inovasi ini, para siswa SMA/SMK diharapkan dapat membantu mensosialisasikan dan menggerakkan masyarakat (balita, ibu hamil dan calon pengantin) di sekitarnya secara masif agar datang ke Posyandu untuk melakukan pengecekan kesehatan. Selain itu Duta Penggerak Posyandu juga akan dilibatkan dalam kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin. Hasil dari pelaksanaan inovasi ini diharapkan dapat memperluas lingkup deteksi risiko stunting agar dapat segera diantisipasi, yang pada akhirnya dapat mempercepat upaya penurunan angka stunting di Kalimantan Timur.

4.7.3 Pengembangan Desa Korporasi Ternak

Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) merupakan sistem pengembangan ternak yang komprehensif dengan menggabungkan teknologi produksi, teknologi monitoring-evaluasi, digitalisasi, pendekatan terpadu, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan kelembagaan dengan pembentukan korporasi ternak untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, memenuhi kebutuhan daging lokal, dan mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun sistem pengembangan desa korporasi ternak terdiri dari :

a) Pendekatan Holistik

PDKT tidak hanya fokus pada peternakan, tetapi juga mencakup aspek hulu dan hilir, seperti penyediaan pakan, pengolahan hasil, dan pemasaran.

b) Kolaborasi Multi Pihak

PDKT melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah (OPD Terkait), swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat, untuk mewujudkan sinergi dan keberhasilan program.

c) Pemberdayaan Peternak

PDKT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan, PDKT memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus desa korporasi ternak terkait manajemen organisasi, keuangan, dan pemasaran.

d) Penguatan Kelembagaan

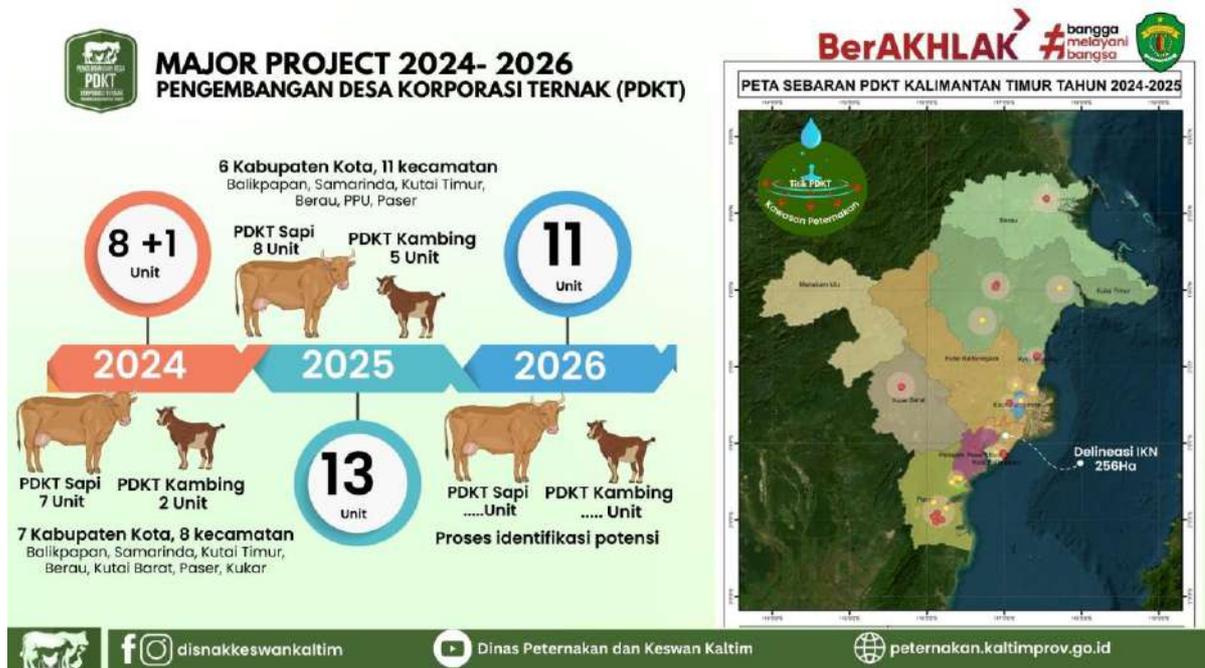
Meningkatkan kapasitas kelembagaan PDKT dalam pengelolaan keuangan, manajemen ternak, dan pemasaran. PDKT memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan petani dalam bentuk desa korporasi. Hal ini meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha, pengambilan keputusan, dan akses permodalan. Koperasi menyediakan wadah bagi petani untuk bersatu dan berkolaborasi, meningkatkan daya saing mereka di pasar.

e) Pengembangan Presisi

Penerapan teknologi presisi untuk optimasi pakan, air, dan obat-obatan, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi ternak.

- f) Pemanfaatan energi terbarukan
Pengolahan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk organik, mendukung ketahanan energi dan kelestarian lingkungan.
- g) Pengembangan produk ternak olahan
Diversifikasi produk ternak, seperti daging olahan, susu, dan produk lainnya, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
- h) Pemanfaatan Teknologi
PDKT mengenalkan dan membagikan teknologi kepada peternak dalam pengelolaan produksi, pengolahan, pemasaran maupun pelaporan, adapun penerapan teknologi yang dimaksud adalah:
- Aplikasi Monitoring Kesehatan Ternak Memantau kondisi kesehatan ternak secara real-time, mendeteksi penyakit dini, dan memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat.
 - Teknologi Pakan Tepat Sasaran, dengan menentukan jenis dan jumlah pakan yang optimal untuk setiap ternak, berdasarkan usia, berat badan, dan kondisi kesehatannya.
 - Teknologi Reproduksi Ternak, sebagai upaya meningkatkan tingkat kesuburan dan produktivitas ternak melalui inseminasi buatan dan teknik reproduksi lainnya.
 - Digitalisasi, Platform Pemasaran Online, dengan menghubungkan peternak dengan pembeli secara langsung melalui aplikasi (si-Ranch Plus), sehingga mampu memotong rantai distribusi dan meningkatkan harga jual ternak.
 - Sistem Informasi kelembagaan online dengan mengelola data aktifitas kelembagaan secara terpusat, dengan memantau kinerja usaha, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.
 - Aplikasi Keuangan Digital online melalui si-ranch plus akan memudahkan transaksi keuangan bagi peternak, seperti pembayaran, transfer, dan pencatatan keuangan.
 - Pelatihan Online sebagai bentuk pengembangan SDM dengan menyediakan akses pelatihan dan edukasi peternakan bagi peternak melalui platform online, seperti video tutorial dan webinar Penguatan Sistem pemasaran dan Branding Produk.

- i) Efisiensi Distribusi dan Logistik
PDKT mengorganisir peternak dalam skala desa korporasi, sehingga memudahkan koordinasi dan pengelolaan logistik. Hal ini memungkinkan pengiriman ternak ke pasar secara lebih efisien dan terencana.
- j) Peningkatan Kualitas Produk Ternak
PDKT mendorong penerapan praktik peternakan yang lebih baik, seperti pemberian pakan berkualitas, pengelolaan kesehatan ternak, dan sanitasi kandang. Hal ini menghasilkan produk ternak yang lebih berkualitas dan aman dikonsumsi.
- k) Akses Pembiayaan dan Permodalan
Desa korporasi ternak memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan akses permodalan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini dikarenakan kelembagaan yang lebih kuat dan adanya agunan kolektif dari para anggota desa korporasi. PDKT memfasilitasi penerapan teknologi dalam kegiatan peternakan, seperti aplikasi monitoring kesehatan ternak dan platform pemasaran online. Hal ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan.
- l) Negosiasi dan Advokasi:
Desa korporasi ternak memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi harga dengan pembeli, dikarenakan Korporasi memiliki volume produk yang lebih besar dan terorganisir. PDKT dalam advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan peternak dengan kemudahan perizinan dan akses pasar.
- m) Jaringan dan Kemitraan:
PDKT juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan peternak dengan pembeli, seperti platform online dan aplikasi mobile. Ini membantu menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan transparansi harga. Desa korporasi ternak dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti perusahaan offtaker, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi. Hal ini membuka peluang untuk mendapatkan akses pasar, pendampingan teknis, dan pengembangan produk. PDKT memfasilitasi terjalinnya jaringan antar desa korporasi ternak, sehingga memungkinkan mereka untuk saling belajar dan berbagi pengalaman.



Gambar IV.11

Sebaran Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)

Pengembangan Desa Korporasi ternak (PDKT) memberikan beberapa dampak diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ternak.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan peternak.
- 3) Memperkuat ketahanan pangan.
- 4) Menciptakan lapangan kerja.
- 5) Mendukung kelestarian lingkungan
- 6) Meningkatnya pendapatan peternak dan kesejahteraan masyarakat desa.
- 7) Berkembangnya industri pengolahan produk ternak di Kalimantan Timur.
- 8) Membuka peluang ekspor produk ternak ke luar daerah.
- 9) Meningkatnya *bergaining power* petani dalam menentukan harga jual ternak.
- 10) Meningkatnya akses petani terhadap permodalan, teknologi, dan informasi pasar.
- 11) Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani dalam mengelola usaha dan bernegosiasi.
- 12) Meningkatnya kesejahteraan petani dan kemandirian ekonomi desa
- 13) Meningkatnya produktivitas dan efisiensi peternakan.
- 14) Menurunnya angka kematian dan penyakit ternak.
- 15) Meningkatnya kualitas produk ternak.
- 16) Memudahkan akses pasar bagi peternak.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025

Capaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2023 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2025.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

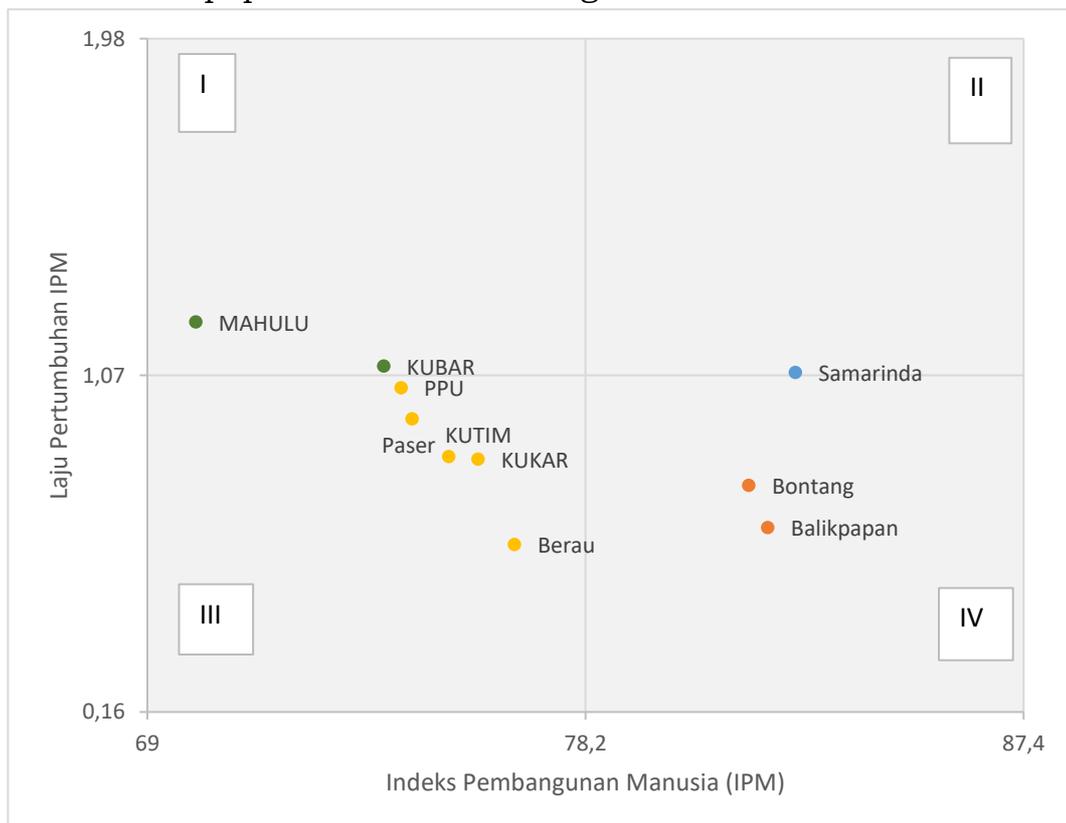
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian IPM Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel V.1
Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih rendah dan Progres Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan Progres Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan progres pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian IPM dan progres pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian IPM dan progres pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan progres pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kota Bontang.



Gambar V.1

Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2023

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 mencapai 78,20 meningkat 0,84 poin dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai 77,36. Perbaikan kemajuan pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2023 ditandai oleh peningkatan angka IPM sebesar 1,07 persen, setelah sebelumnya sempat tumbuh sebesar 0,98 persen pada tahun 2022. Peningkatan IPM tahun 2023 disebabkan oleh peningkatan yang terjadi disemua komponen penyusunnya.

Sebagai upaya dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dalam aspek pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur perlu upaya yang sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tujuan pembangunan mewujudkan SDM berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025 sebesar 78,60 dengan kategori “Tinggi”. Adapun upaya yang dilakukan adalah pemerataan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang melalui penyediaan infrastruktur pendidik, peningkatan kualifikasi pendidik/tenaga kependidikan serta pemberian beasiswa.

Tabel V.2
Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Tahun 2025

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	73,34	73,85	74,56	74,00	75,65
2	KUBAR	72,31	73,16	73,97	73,42	74,50
3	KUKAR	74,69	75,31	75,95	75,51	76,86
4	KUTIM	74,15	74,69	75,33	75,64	76,18
5	Berau	75,69	76,24	76,71	76,53	77,57
6	PPU	73,01	73,56	74,33	73,30	75,00
7	MAHULU	68,36	69,17	70,02	70,80	71,07
8	Balikpapan	81,07	81,49	82,03	81,60	82,50
9	Samarinda	81,05	81,72	82,61	82,77	83,40
10	Bontang	80,65	81,00	81,63	81,53	82,00
Kalimantan Timur		76,60	77,36	78,20	78,32	78,60

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/ daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian LPE dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.3
Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih rendah dan Rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan Rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi

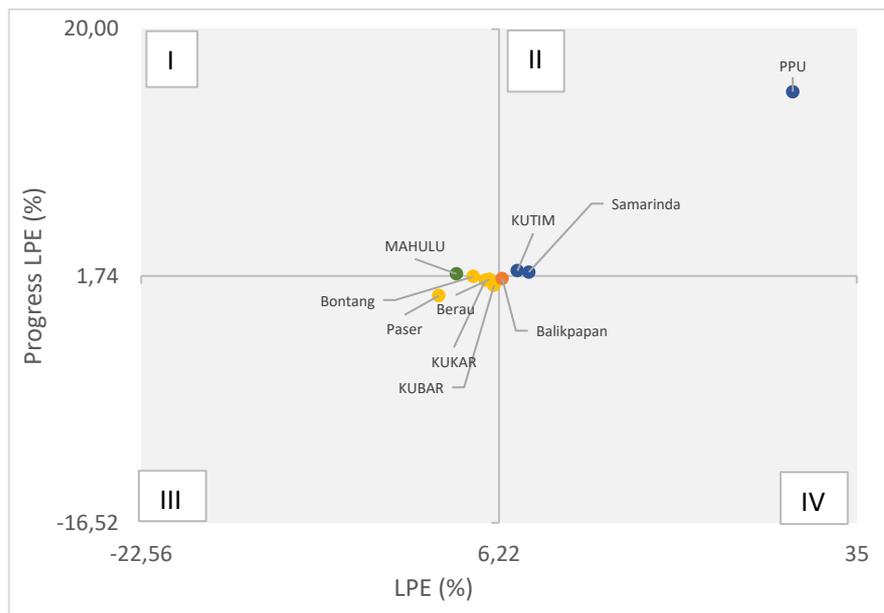
Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian LPE lebih rendah dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kota tersebut adalah Kota Balikpapan.



Gambar V.2
Analisis Kuadran Capaian dan Rata-Rata LPE Kabupaten/Kota
Tahun 2023
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2023 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur menggambarkan bahwa produksi dan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dari 14,49 persen menjadi 29,85 persen.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, upaya yang dilakukan yakni mendorong peningkatan

kualitas infrastruktur yang mendukung tumbuh dan menguatnya sektor perekonomian di Kabupaten/Kota, menjaga iklim investasi daerah dan serta mendorong munculnya hilirisasi industri. Adapun target perekonomian Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Tabel V.4
Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	5,39	1,10	1,38	3,96	3,50
2	KUBAR	4,19	4,78	5,82	4,55	5,00 – 5,50
3	KUKAR	2,68	3,70	5,13	3,50 - 4,00	5,60
4	KUTIM	-0,89	5,58	7,71	5,00	8,00 – 9,00
5	Berau	5,36	3,95	5,44	4,29	5,50 – 6,00
6	PPU	-1,69	14,49	29,85	14,42	10,00 – 11,00
7	MAHULU	1,27	0,91	2,80	3,40	3,00 – 3,50
8	Balikpapan	4,57	4,96	6,49	5,04	6,50 – 7,00
9	Samarinda	2,78	6,60	8,62	6,42	6,28
10	Bontang	1,60	2,46	4,16	2,65	3,50 – 4,50
Kalimantan Timur		2,55	4,48	6,22	4,10 – 4,90	6,28 – 6,58

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024

5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

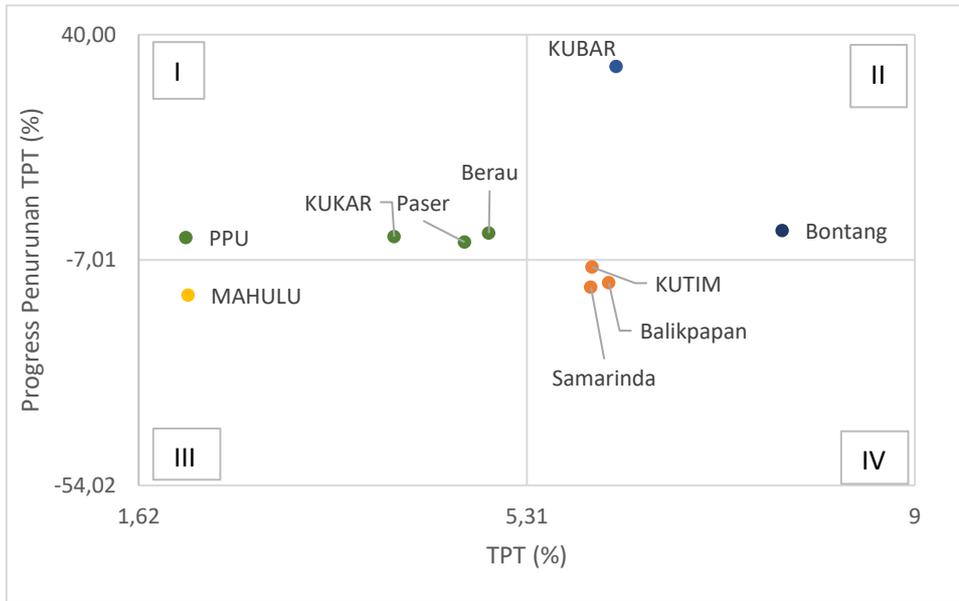
Tabel V.5
Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih rendah dan Progres pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progres pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi

Kuadran	Simbol	Interpretasi
III	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progres pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih tinggi dan Progres pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dan progres pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT dan progres pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT dan progres pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dan progres pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur.



Gambar V.3

Analisis Kuadran Capaian dan Progres Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024)

Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi. Penyelarasan target TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 diselaraskan dengan target Kabupaten/Kota, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

Tabel V.6
Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Tahun 2024

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	5,70	4,88	4,72	4,63	4,50
2	KUBAR	5,14	4,62	6,16	4,31	4,16
3	KUKAR	5,66	4,14	4,05	3,90	3,85
4	KUTIM	5,35	6,48	5,93	5,56	5,30
5	Berau	5,82	5,02	4,95	4,62	4,54
6	PPU	2,95	2,12	2,07	2,05	2,00
7	MAHULU	3,14	2,44	2,09	2,00	1,83
8	Balikpapan	8,94	6,90	6,09	6,53	5,85- 5,90
9	Samarinda	8,16	6,78	5,92	4,72	4,31
10	Bontang	9,92	7,81	7,74	7,35	7,35
Kalimantan Timur		6,83	5,71	5,31	5,44	5,14

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024

5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

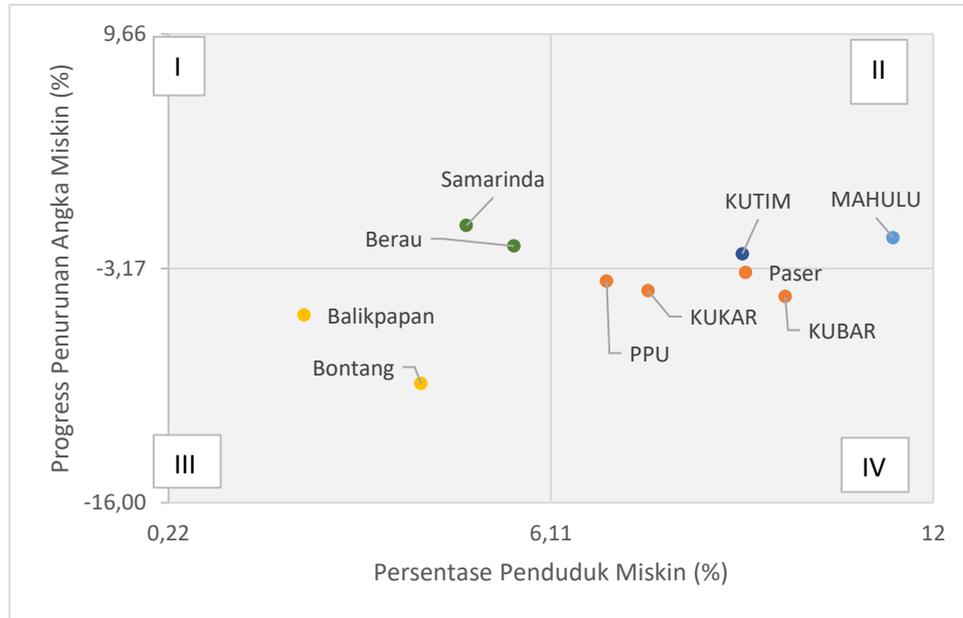
Tabel V.7
Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah dan Progres pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progres pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progres

Kuadran	Simbol	Interpretasi
		pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi dan Progres pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah dan progres pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Berau dan Kota Samarinda.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin dan progres pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan progres pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kota Bontang.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi dan progres pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser.



Gambar V.4

Analisis Kuadran Capaian dan Progres Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024)

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Penurunan ini terjadi merupakan efek dari pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid-19. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Sebagai upaya menurunkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur tahun 2025, penentuan target ditentukan dengan mensinergikan target Kabupaten/Kota tahun 2025 dengan analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Tabel V.8
Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	9,73	9,43	9,11	9,09	8,85
2	KUBAR	10,24	10,20	9,72	9,06	9,00
3	KUKAR	7,99	7,96	7,61	7,50	6,97
4	KUTIM	9,81	9,28	9,06	8,72	7,87
5	Berau	5,88	5,65	5,54	5,32	5,25

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
6	PPU	7,61	7,25	6,97	6,76	5,50
7	MAHULU	11,90	11,55	11,38	10,00	10,09
8	Balikpapan	2,89	2,45	2,31	2,31	2,15- 2,20
9	Samarinda	4,99	4,85	4,81	4,50	4,36
10	Bontang	4,62	4,54	4,11	4,25	3,80
Kalimantan Timur		6,54	6,31	6,11	5,78	5,67

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024

5.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Indeks Gini kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian Indeks Gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.9
Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih rendah dan Progres pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan Progres pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan Progres pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih tinggi dan Progres pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

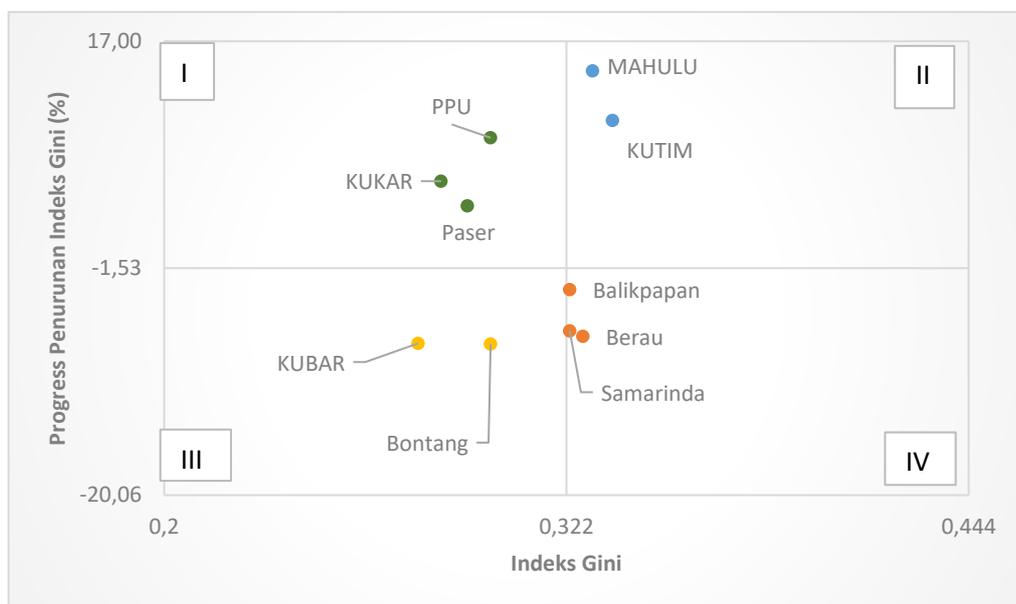
Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian Indeks Gini lebih rendah dan progres pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok

kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian Indeks Gini dan progres pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Timur.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini dan progres pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian persentase Indeks Gini lebih tinggi dan progres pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kabupaten Berau.



Gambar V.5

Analisis Kuadran Capaian dan Progres Pertumbuhan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2023

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024)

Indeks Gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perdesaan. Tercatat, pada tahun 2023 ketimpangan perkotaan mencapai 0,328 sedangkan untuk daerah perdesaan 0,292. Rendahnya Indeks Gini di daerah perdesaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di

daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang mengakibatkan *gap* antar lapisan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Guna pemerataan pendapatan pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dan tidak didominasi oleh golongan tertentu. Penentuan target indeks gini tahun 2025 dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penurunan target indeks gini.

Tabel V.10
Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	0,288	0,282	0,292	0,280	0,275
2	KUBAR	0,317	0,300	0,277	0,299	0,250
3	KUKAR	0,283	0,269	0,284	0,268	0,260
4	KUTIM	0,328	0,304	0,336	0,330	0,300
5	Berau	0,377	0,352	0,327	0,344	0,320
6	PPU	0,263	0,274	0,299	0,260	0,275
7	MAHULU	0,270	0,288	0,330	0,229	0,248
8	Balikpapan	0,325	0,334	0,323	0,320	0,310
9	Samarinda	0,322	0,346	0,323	0,327	0,320
10	Bontang	0,340	0,324	0,299	0,320	0,291
Kalimantan Timur		0,334	0,327	0,322	0,316	0,310

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2024

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten/kota tahun 2025 telah dirumuskan sebagai berikut :

Tabel V.11
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
1	Samarinda	Mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan
2	Balikpapan	Meningkatkan peran sebagai kota pusat MICE yang di-iringi dengan pengembangan sektor UMKM-Ekraf, serta peningkatan investasi industri terutama di KIK
3	Bontang	Mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka membuka lapangan kerja, yang di-iringi dengan peningkatan daya saing SDM tenaga kerja, serta memperkuat peran sektor jasa dan perdagangan
4	Kutai Kartanegara	Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang di-iringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi
5	Kutai Timur	Mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan, perkebunan sawit dan pisang, serta mendukung upaya revitalisasi KEK Maloy
6	Berau	Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekraf dan UMKM, yang di-iringi dengan pengembangan sektor pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan
7	Penajam Paser Utara	Meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN melalui pengembangan Kawasan industri Buluminung, pengembangan sektor pertanian TPH, pariwisata, jasa dan perdagangan, yang di-iringi revitalisasi kawasan yang berbatasan dengan IKN
8	Paser	Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH, perkebunan, perikanan, yang di-iringi dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang profesional
9	Kutai Barat	Mendorong pertumbuhan sektor perkebunan sawit dan karet sebagai hulu rantai pasok agroindustri Kaltim, dengan terus memperkuat infrastruktur ekonomi
10	Mahakam Ulu	Akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur jalan & jembatan untuk membuka akses perdagangan produk-produk hasil pertanian TPH dan perkebunan

Capaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2023 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel V.12
Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	LPE (%)	PDRB per Kapita (Juta Rp)	IPM	Tingkat Kemiskinan (%)	Indeks Gini	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	Samarinda	6,28	118,41	83,40	4,36	0,320	4,31
2	Balikpapan	6,50-7,00	225,56	82,50	2,15-2,20	0,310	5,85-5,90
3	Bontang	3,50-4,50	376,40	82,00	3,80	0,291	7,35
4	Kutai Kartanegara	5,60	306,68	76,86	6,97	0,260	3,85
5	Kutai Timur	8,00-9,00	399,6	76,18	7,87	0,300	5,30
6	Berau	5,50-6,00	210,67	77,57	5,25	0,320	4,54
7	PPU	10,00-11,00	68,46*	75,00	5,50	0,275	2,00
8	Paser	3,50	214,63	75,65	8,85	0,275	4,50
9	Kutai Barat	5,00-5,50	235	74,50	9,00	0,250	4,16
10	Mahakam Ulu	3,00-3,50	113,39	71,07	10,09	0,248	1,83

*) Masih perlu didiskusikan dengan Kabupaten PPU

Hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan di tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat 6 (enam) permasalahan utama pembangunan yang harus diselesaikan, yakni tidak meratanya kualitas pembangunan manusia di kabupaten/kota, terdapat 2 (dua) kabupaten dengan tingkat kemiskinan masih diatas rata-rata nasional, relatif tingginya angka pengangguran, transformasi ekonomi belum optimal, tingginya ketimpangan pendapatan dan kecenderungan penurunan PDRB per kapita di kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan ke enam permasalahan tersebut, maka perlu strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota yang diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berdampak positif pada pengurangan kesenjangan antar wilayah. Hal ini sejalan dengan tema RKPD Tahun 2025, yaitu “Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”, yang menekankan pada optimalisasi diversifikasi ekonomi,

peningkatan kualitas SDM dan daya saing infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pembangunan kabupaten/kota. Adapun arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, target sasaran pembangunan daerah, serta sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel V.13
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
di Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
1	Paser	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
			Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan perempuan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan kawasan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata Kawasan Gunung Embun
		Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan	Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani (komoditi kelapa sawit)
			Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)
Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)		
Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)		
Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan		

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan	Pemanfaatan limbah sawit menjadi bioenergi
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Rekonstruksi jalan provinsi
			Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
			Evaluasi Rencana Tata Ruang
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera serta revitalisasi/penanganan kawasan kumuh
			Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum skala regional
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
			Pengendalian Banjir
			Sambungan Listrik Gratis
			Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan instalasi biogas
		Pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
			Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan
			Rehabilitasi diluar kawasan hutan
			Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
			Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>
			Pemantauan dan penanganan sampah laut
			Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
2	Kutai Barat	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
			Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
		Peningkatan kapasitas perempuan	Pendampingan untuk Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi	Destinasi ekowisata berkelas dunia yang mendorong ekonomi kerakyatan (Pengembangan Danau Kaskade Mahakam)
		Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas Perkebunan Rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Jalan menuju perbatasan
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh
			Sambungan listrik gratis
			Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Revitalisasi PLTS
			Pembangunan biogas
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
			Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
			Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan
			Rehabilitasi diluar kawasan hutan
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
			Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>
			Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
3	Kutai Kartanegara	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan untuk Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi	Destinasi ekowisata berkelas dunia yang mendorong ekonomi kerakyatan (Pengembangan Danau Kaskade Mahakam)
		Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (cabai dan bawang merah)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan	Pemanfaatan limbah sawit menjadi bioenergi
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan koperasi dan UKM
		Pengembangan pengolahan komoditi unggulan	Pembangunan Rumah Produksi Bersama
		Peningkatan layanan infrastruktur	Pemeliharaan Jalan Provinsi
			Rekonstruksi Jalan Provinsi
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Peningkatan akses dan optimalisasi penyediaan air minum di kawasan penyangga IKN
			Penyiapan <i>readiness criteria</i> pengelolaan air limbah domestik skala regional
			Revitalisasi/penanganan kawasan Kumuh
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
			Sambungan listrik gratis

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
			Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
			Penyiapan <i>readiness criteria</i> pengelolaan persampahan regional
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan biogas
			Pemasangan PJUTS
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
			Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
			Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan
			Rehabilitasi diluar kawasan hutan (mangrove)
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
			Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>
			Pemantauan dan penanganan sampah laut
Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup			
4	Kutai Timur		Peningkatan layanan pendidikan
		Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	
		Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	
		Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprasi Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
			Pendampingan untuk Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP) 2	Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi Sangkulirang - Mangkalihat
Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan		
Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)		
Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)		

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan	Pemanfaatan limbah sawit menjadi bioenergi
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan Pengembangan KEK MBTK
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Rekonstruksi Jalan Provinsi
			Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mendukung perekonomian
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Pembangunan jaringan distribusi listrik
			Sambungan listrik gratis
			Pengendalian banjir
			Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PJUTS
			Pembangunan biogas
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
			Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
			Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan
			Rehabilitasi diluar kawasan hutan
			Pengelolaan KBEP Karst Mangkalihat Ulu
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>			
Pemantauan dan penanganan sampah laut			
Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup			
5	Berau		Peningkatan layanan pendidikan
		Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	
		Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	
		Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan untuk Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP) 1	Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi Derawan – Biduk-Biduk
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
		Peningkatan produktivitas perikanan	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan) Pengembangan Perikanan Tangkap
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Pengembangan pengolahan komoditi unggulan	Pembangunan Rumah Produksi Bersama
		Peningkatan layanan infrastruktur	Rekonstruksi Jalan Provinsi Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera Pembangunan pengaman pantai Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan Sambungan listrik gratis Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Revitalisasi PLTS Pembangunan biogas Pembangunan PJUTS
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan Rehabilitasi diluar kawasan hutan Pengelolaan KBEP Karst Mangkalihat Pesisir

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
			<p>Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER</p> <p>Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i></p> <p>Pemantauan dan penanganan sampah laut</p> <p>Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup</p>
6	PPU	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
			Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan untuk Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan kawasan pariwisata penyangga IKN	Pengembangan destinasi pariwisata pendukung IKN
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Buluminung
Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM		
Peningkatan layanan infrastruktur	Rekonstruksi Jalan Provinsi		
	Pemeliharaan Jalan Provinsi		

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera Pembangunan pengaman pantai Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang Peningkatan akses dan optimalisasi penyediaan air minum di kawasan penyangga IKN Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi Penyediaan air baku Pengendalian banjir Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh Sambungan listrik gratis
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan Rehabilitasi diluar kawasan hutan Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i> Pemantauan dan penanganan sampah laut Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
7	Mahakam Ulu	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB Optimalisasi <i>Boarding School</i> Pemberian tambahan insentif bagi seluruh tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di daerah pedalaman dan 3T (GTK)
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pendampingan untuk Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan	
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan	
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	
		Peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Jalan Perbatasan	
			Pembangunan Jembatan Perbatasan	
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera	
			Pembangunan jaringan distribusi listrik	
			Sambungan listrik gratis	
			Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa	
			Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian	
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Terpusat	
		Pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	
			Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan	
			Rehabilitasi diluar kawasan hutan	
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	
			Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, dan udara <i>ambien passive sampler</i>	
			Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	
8	Balikpapan	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	
				Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan untuk Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan	

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan pengembangan Kawasan Industri Kariangau
		Pengembangan kawasan pariwisata penyangga IKN	Pengembangan destinasi pariwisata pendukung IKN
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan
		Peningkatan Produktivitas TPH	Urban Farming
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Rumput Laut dan Kepiting)
		Pengembangan pengolahan komoditi unggulan	Pembangunan Rumah Produksi Bersama
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Rekonstruksi Jalan Provinsi
			Pemeliharaan Jalan Provinsi
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Pembangunan pengaman pantai
			Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
			Peningkatan akses dan optimalisasi penyediaan air minum di kawasan penyangga IKN
			Pengendalian banjir
			Penyediaan air baku
			Sambungan listrik gratis
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
			Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
			Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan
			Rehabilitasi diluar kawasan hutan
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
			Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut udara <i>ambien passive sampler</i>
			Uji emisi kendaraan berkala
			Pemantauan dan penanganan sampah laut
			Melaksanakan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
9	Samarinda	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
			Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan untuk Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi dan Promosi Kampung Ketupat
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan
		Peningkatan Produktivitas Perikanan	Pengembangan Perikanan Tangkap
		Peningkatan Produksi sektor Peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
		Peningkatan sistem distribusi perdagangan	Pengembangan pusat distribusi barang bahan pokok (<i>food station</i>)
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Revitalisasi Terminal Tipe B
			Pembangunan Jalan yang mendukung perekonomian
			Rekonstruksi Jalan Provinsi
			Pemeliharaan jalan Provinsi
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Pengendalian banjir
			Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
			Penyiapan <i>readiness criteria</i> sistem pengelolaan limbah domestik terpusat skala regional
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
			Peningkatan akses dan optimalisasi penyediaan air minum di kawasan penyangga IKN
			Penyiapan <i>readiness criteria</i> pengelolaan persampahan regional
			Sambungan Listrik Gratis
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PJUTS

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, udara <i>ambien passive sampler</i> Uji emisi kendaraan berkala Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
10	Bontang	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLKI Bontang	Pembangunan dan Pengembangan <i>Workshop</i> Las Bawah Air
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan untuk Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh Pengendalian banjir Penyediaan air baku Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi Sambungan listrik gratis

No	Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan Rehabilitasi diluar kawasan hutan Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i> Pemantauan dan penanganan sampah laut Uji emisi kendaraan berkala Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2025 adalah “Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, rencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan *stakeholders* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2025, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Penyusunan kerangka pendanaan daerah pada Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan realisasi belanja perangkat daerah pada tahun 2023 dan rencana belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024. Berdasarkan pendekatan tersebut, rencana belanja perangkat daerah dalam RKPD tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 20.950.000.000.000,- dengan rincian pembagian pagu indikatif per-Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel VI.1
Pagu Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.902.528.471.000
2	Dinas Kesehatan	345.780.574.000
3	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	844.112.601.000
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	623.302.991.850
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	115.450.765.000
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.660.682.368.000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	43.550.149.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.136.000.000

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
9	Dinas Sosial	146.576.140.000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	129.229.471.000
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.767.605.000
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	143.226.002.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	54.060.308.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	49.289.260.000
15	Dinas Perhubungan	246.188.969.000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	132.360.738.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.681.024.000
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	417.143.162.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	47.378.449.000
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	108.052.876.000
20	Dinas Pariwisata	48.478.525.000
21	Dinas Perkebunan	83.495.139.000
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	134.567.158.000
23	Dinas Kehutanan	545.768.865.000
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	207.323.200.000
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100.134.458.000
26	Sekretariat Daerah	453.681.880.000
27	Sekretariat DPRD	446.708.383.000
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73.470.591.000
29	Badan Pendapatan Daerah	326.977.438.000
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.013.094.015.150
31	Badan Kepegawaian Daerah	57.960.614.000
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	71.230.000.000
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	35.918.200.000
34	Badan Penghubung Provinsi	23.000.000.000
35	Inspektorat	70.322.540.000
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	102.371.070.000

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/PD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Data dan informasi rencana kerja Perangkat Daerah pada tahap rancangan telah di-*input* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>. Pengambilan data bersumber dari Menu “Renja” pada aplikasi SIPD di tahap Penetapan RKPD, dimana untuk indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan yang tercantum di dalamnya berasal dari Menu “RPD” dan Menu “RENSTRA” yang didasarkan pada Perubahan RPD dan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah.

Tabel VI.2
Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2					3	4	5	6	7	8
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			3.643.722.942.805		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.614.752.707.468		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			3.614.752.707.468		
1	1	01	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	91,5 Indeks 100 %	1.849.622.574.075		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	6.088.917.700		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.645.101.272	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	373.023.522	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	373.022.488	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	373.022.488	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	373.127.956	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	432.542.290	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	519.077.684	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.575.007.147.518		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6520 Orang/ Bulan	1.513.474.675.701	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.235.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	570.678.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	429.498.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	58.162.490	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	243 Laporan	58.238.653.327	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.451.158.344		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	500.082.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	243 Laporan	951.075.444	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	1.213.452.202		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	507.164.704	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	706.287.498	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	15.439.653.225		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	807.870.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.605.170.035	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	732 Orang	3.811.453.532	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	5.215.159.658	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	8.064.858.925		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.474.537.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	458.597.335	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.084.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	3.047.324.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	134.483.751.146		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	3.988.894.041	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10Paket	88.458.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	2.775.604.645	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	127.630.794.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	94.058.217.455		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	117.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.912.878.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	592.471.454	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	86.435.627.351	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	12.815.417.560		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	130.254.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	1.123.252.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	279.021.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	83.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11.199.388.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri	100 %	1.000.000.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.1	000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	14 Unit Kerja	1.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	79,64 % 100 % 69,05 % 91 % 83,44 % 100 % 77,15 % 77 % 72 %	1.732.802.791.102		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	813.713.926.550		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	56.191.716.672	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	11.209.399.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	001	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2.379.060.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	001	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	21.433.052.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	001	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	63.979.241.074	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	001	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	5.665.483.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0	002	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2.535.013.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	002	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	322.014.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	003	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	42.108.501.130	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	004	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	26.160.913.614	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	004	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20000 Peserta didik	238.677.673.759	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	12.054.169.211	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	650 Orang	1.388.699.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	5.530.386.232	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	145 Satuan Pendidikan	952.894.968	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	145 Satuan Pendidikan	182.007.271.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2270 Orang	27.455.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	3.873.856.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	997.771.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	2.483.399.030	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0	006	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	3.599.055.840	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.588.962.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	5.361.131.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	007	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	35.196.733.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	007	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	207.973.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	007	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	50.472.607.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	007	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	2 Unit	498.347.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	007	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	6.063.399.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	007	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	236 Satuan Pendidikan	3.219.399.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	826.785.260.500		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	83.295.870.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang	35.595.030.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	13 Ruang	27.803.727.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	18 Ruang	13.554.763.200	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	22 Ruang	2.787.224.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	4.069.072.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	20.497.250.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	47 Unit	162.359.788.190	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	21 Ruang	22.461.342.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	2.805.243.600	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	21.259.570.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	7 Unit	4.315.057.178	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	70 Paket	69.387.197.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	39.257.626.952	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.800.906.036	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	500 Orang	1.688.059.836	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	5.688.641.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0	004	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	1.166.502.256	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	004	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	120.158.689.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	004	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2052 Orang	26.285.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1.390.159.730	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1.016.808.223	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1.753.125.518	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	1000 Orang	22.209.783.127	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	35 Unit	15.316.374.680	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1	01	02	1.02	0063			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	3.099.219.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	84 Ruang	77.289.153.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	117 Ruang	25.544.833.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	217 Satuan Pendidikan	7.928.438.434	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	92.303.604.052		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	6.530.674.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	32.029.392.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya Kota Samarinda, Samarinda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Utara, Sempaja Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	
	1	01	0 2	1.0 3	001 0	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0 2	1.0 3	001 4	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.304.004.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0 2	1.0 3	001 5	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.304.004.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0 2	1.0 3	001 6	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.304.004.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0 2	1.0 3	001 7	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.630.005.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	
	1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	572.769.244	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	715.603.713	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta Didik	458.671.271	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	5.888.391.336	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	200 Orang	1.739.698.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.012.085.460	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	119 Satuan Pendidikan	551.646.925	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	11 Satuan Pendidikan	8.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0	005	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	184 Orang	3.289.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	180 Orang	792.613.261	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	772.052.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	005	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	130 Orang	451.399.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	901.959.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Orang	649.546.357	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	572.387.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	006	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	6.106.103.362	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	0	1.0	007	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	20 Ruang	12.566.014.398	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	
	1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	479.263.075	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	981.515.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	15.968.254.683		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	95 %	10.096.374.483		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	1.595.047.885	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1Dokumen	6.919.027.990	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1.582.298.608	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	95 %	5.871.880.200		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	718.868.310	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	30 Buku	1.370.200.846	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	140 Orang	959.188.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	12 Buku	1.144.373.931	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	10 Dokumen	1.305.748.133	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	10 Dokumen	373.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %	16.359.087.608		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	16.359.087.608		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Dokumen	7.782.750.225	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4 Laporan	8.576.337.383	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			28.970.235.337		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			28.970.235.337		
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	89 %	7.530.410.149		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65 %	2.113.973.927		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	2.113.973.927	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75 %	5.416.436.222		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	5.416.436.222	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
6	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71 %	10.973.882.712		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	70 % 75 %	10.973.882.712		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	2.069.808.032	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	1.02	0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	1.039.936.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	7.864.137.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	78,5 %	815.945.684		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	80 %	815.945.684		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	1.03	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	815.945.684	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan Persentase Pelestarian Cagar Budaya	37 OPK 63,5 % 63,5 %	7.147.280.972		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	75 %	5.547.307.485		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	1.02	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	5.547.307.485	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	60 %	1.599.973.487		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	1.03	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	800.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	1.04	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	140 Orang	799.973.487	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	66 %	2.502.715.820		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %	2.502.715.820		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	1.03	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	2.502.715.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						UPTD Taman Budaya			12.020.857.626		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.020.857.626		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			12.020.857.626		
10	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks	7.780.306.896		UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	192.600.000		UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	192.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.613.871.416		UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.334.576	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	63.302.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.874.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.485.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	2.479.726.680		UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	154.049.880	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.325.676.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.671.763.800		UPTD TAMAN BUDAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.498.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.705.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.371.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	822.345.000		UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	253.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	78.535.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	489.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
11	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	89 %	3.560.022.080		UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65 %	2.000.000.000		UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	8 Objek	2.000.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75 %	1.560.022.080		UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	1.560.022.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
12	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71 %	680.528.650		UPTD TAMAN BUDAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	75 %	680.528.650		UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	360 Orang	680.528.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
						UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			60.557.375.034		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.557.375.034		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.557.375.034		
13	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	91,5 Indeks 100 %	35.855.031.394		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	185.640.000		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	185.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	50.316.000		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.316.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.310.330.139		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.887.116	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	466.376.473	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.812.550	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.762.254.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	118.142.955		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	118.142.955	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	32.986.755.300		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.051.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.592.734.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.379.970.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	203.847.000		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	56.862.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	31.785.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
14	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	79,64 % 69,05 % 77,15 % 77 % 72 % 100 % 100 % 83,44 % 91 %	24.702.343.640		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	13.540.805.974		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	10.173.666.824	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	576 Peserta Didik	1.214.263.030	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	1.199.358.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	208.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	745.038.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	9.518.936.032		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	59 Paket	6.508.065.878	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	348 Peserta Didik	857.994.034	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	1.199.358.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	208.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2500 Orang	745.038.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.642.601.634		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	835.703.514	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	66 Orang	494.158.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	11 Konten Digital	61.340.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	33 Orang	251.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
						UPTD Museum Negeri Mulawarman			8.019.159.520		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.019.159.520		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8.019.159.520		
15	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks	5.867.846.698		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	138.120.000		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138.120.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	22.260.458		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22.260.458	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.337.601.762		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.727.159	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	258.814.603	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.652.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	999.408.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	200.000.000		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	3.074.704.478		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	81.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	816.564.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	194.970.970	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.981.619.508	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.095.160.000		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	184.235.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	710.925.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
16	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	66 %	2.151.312.822		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %	2.151.312.822		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	553.820.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	22 Orang	233.312.822	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	988.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	258.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	118.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
						Dinas Pendidikan Wilayah I			41.627.316.725		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.627.316.725		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			41.627.316.725		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
17	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	91,5 Indeks 100 %	4.528.176.550		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	350.600.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	192.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	158.600.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	179.877.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	44.925.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.0 5	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	134.952.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	936.033.250		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	143.033.250	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	793.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.888.996.300		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240.976.300	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.648.020.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	172.670.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	114.878.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	57.792.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
18	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	91 % 79,64 % 77,15 % 77 % 83,44 % 72 % 100 % 100 % 69,05 %	37.099.140.175		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	16.938.261.452		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12973 Peserta didik	13.729.407.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3840 Peserta Didik	1.780.761.284	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	1.428.093.168	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	18.749.084.984		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12784 Peserta didik	15.048.195.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4960 Peserta Didik	2.299.004.816	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	1.401.885.168	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	1.411.793.739		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	525 Peserta Didik	847.032.187	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	48 Peserta Didik	238.920.096	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	325.841.456	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
						Dinas Pendidikan Wilayah II			26.339.766.199		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26.339.766.199		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			26.339.766.199		
19	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	91,5 Indeks 100 %	1.640.559.314		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	167.160.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	167.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	56.646.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	56.646.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	894.203.544		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	115.793.544	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	778.410.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	237.726.870		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	237.726.870	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	131.364.900		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.044.900	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.320.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	153.458.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	140.628.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	12.830.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
20	1	01	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya	72 % 79,64 %	24.699.206.885		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							kerja lulusan SMK Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	91 % 83,44 % 100 % 77,15 % 100 % 69,05 % 77 %			
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	12.649.501.916		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta didik	10.397.422.008	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1.372.376.728	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	165 Orang	879.703.180	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	11.469.372.254		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta didik	9.916.892.808	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	908.977.262	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	123 Orang	643.502.184	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	580.332.715		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	395.426.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	184.906.715	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						Dinas Pendidikan Wilayah III			34.041.357.671		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			34.041.357.671		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			34.041.357.671		
21	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	91,5 Indeks 100 %	2.345.746.513		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	152.040.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	786.390.576		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	46.830.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	739.560.576	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	646.158.909		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	139.888.909	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	506.270.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	127.636.928		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	127.636.928	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	515.538.100		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.317.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	455.221.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	117.982.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	94.922.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.060.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
22	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	69,05 % 100 % 72 % 83,44 % 91 % 100 % 77 % 77,15 % 79,64 %	31.695.611.158		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	19.467.384.317		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.0	004	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta didik	17.139.354.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1.281.139.937	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	480 Orang	966.889.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	80.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,60 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	11.637.061.903		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta didik	9.220.746.113	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	939.912.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	480 Orang	1.100.053.190	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Satuan Pendidikan	376.349.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 %	591.164.938		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %			
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	345.072.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	112.491.438	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	133.601.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
						Dinas Pendidikan Wilayah IV			29.736.561.357		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			29.736.561.357		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			29.736.561.357		
23	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91,5 Indeks	15.807.035.985		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	151.960.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103.560.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	48.400.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	89.972.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	28.752.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kelengkapannya				Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	
	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	61.220.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.128.117.765		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	157.851.765	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	970.266.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	651.559.220		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	76.073.620	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	575.485.600	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	13.620.700.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.100.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.533.600.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	164.727.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	113.579.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.140.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.0	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.008.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
24	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	77 % 69,05 % 100 % 77,15 % 83,44 % 72 % 79,64 % 91 % 100 %	13.929.525.372		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK	100 % 100 % 100 %	9.216.572.096		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %			
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5620 Peserta didik	6.621.690.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	550 Peserta Didik	1.370.410.096	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	327 Orang	1.224.472.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	4.354.930.172		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2278 Peserta didik	3.158.021.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	618.257.172	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	578.652.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %	358.023.104		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	125 Peserta Didik	200.270.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	71.873.104	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	85.880.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
						Dinas Pendidikan Wilayah V			26.910.974.223		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26.910.974.223		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			26.910.974.223		
25	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	91,5 Indeks 100 %	13.162.973.885		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	283.560.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	117.720.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	165.840.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	186.792.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	52.992.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 5	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	133.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	852.076.010		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	168.276.010	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	683.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	723.698.475		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	373.748.475	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	349.950.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	10.988.193.900		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.633.900	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.930.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	128.653.500		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	105.193.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	23.460.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
26	1	01	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	100 % 83,44 % 72 % 91 % 100 % 77 % 69,05 % 77,15 % 79,64 %	13.748.000.338		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	0	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,44 % 79,31 % 65,86 % 82 % 73 %	8.024.648.152		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	0	1.0	004	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	5.928.375.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	773 Peserta Didik	957.023.152	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	248 Orang	1.139.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	5.558.711.834		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4000 Peserta didik	3.431.214.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1478 Peserta Didik	874.777.484	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	255 Orang	1.252.720.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 % 78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 %	164.640.352		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	83 % 70 % 63,47 % 86 %			
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	70 Peserta Didik	92.040.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	39.680.352	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	32.920.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
						Dinas Pendidikan Wilayah VI			19.552.159.840		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.552.159.840		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			19.552.159.840		
27	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	91,5 Indeks 100 %	4.536.240.841		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	139.776.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.776.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.731.995.841		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.054.568	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	697.722.216	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.0	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	22.755.057	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	992.464.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.297.664.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.448.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	91.056.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.192.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	366.805.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	66.805.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.0	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
28	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 % 100 % 72 % 77,15 % 83,44 % 91 % 77 % 79,64 % 69,05 %	15.015.918.999		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	02	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA	100 % 100 % 100 % 84,44 %	9.023.128.714		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	79,31 % 65,86 % 82 % 73 %			
	1	01	0	1.0	004	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	6.787.721.594	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	981.132.320	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0	1.0	005	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	742.705.680	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0	1.0	005	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	511.569.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0	1.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 82,6 % 75,94 % 62,51 % 25000 Orang 77 % 69 %	5.000.421.765		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0	1.0	003	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3000 Peserta didik	3.100.146.545	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	710.632.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0	1.0	004	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	742.705.680	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0	1.0	004	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	446.937.220	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0	1.0	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMP LB	100 % 100 % 83,23 % 81,29 % 85,62 %	992.368.520		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	78,21 % 74,68 % 78 % 68,87 % 75 % 73,03 % 77 % 66,12 % 83 % 70 % 63,47 % 86 %			
	1	01	0 2	1.0 3	004 4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	341.744.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0 2	1.0 3	004 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	372.459.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	0 2	1.0 3	005 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	278.164.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
						Dinas Kesehatan			265.760.245.606		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			265.760.245.606		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			265.760.245.606		
29	1	02	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	90 Indeks 100 %	111.921.761.505		DINAS KESEHATAN
	1	02	0 1	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.727.585.050		DINAS KESEHATAN
	1	02	0 1	1.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	948.574.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0 1	1.0 1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	200.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0 1	1.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	579.011.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	93.212.101.060		DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	92.367.601.060	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	613.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	19.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	26.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	168.180.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	475.940.000		DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	156.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	319.940.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.778.528.824		DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	39.987.072	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	936.960.052	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	272.523.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	29.988.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.499.070.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	768.820.000		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	768.820.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.456.993.272		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19.478.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.465.767.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.971.747.472	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	7.501.793.299		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49 Unit	383.895.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.783.145.840	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	334.751.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan Angka Kesakitan (Dinas Kesehatan) Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (RS Mata) Persentase Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara(UPTD Labkes) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	10,7 rasio 10,7 Rasio 98 % 85 % 93,78 % 88,5 % 89 % 100 %	148.127.921.389		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							(RSJD Atma Husada Mahakam) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS Kanujoso) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (RS AWS) Persentase jumlah fasilitas kesehatan yang dioptimalkan (UPTD Labkes) Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri) Angka Kesakitan	100 % 100 % 80 % 10,7 %			
	1	02	0 2	1.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	15 %	24.601.140.568		DINAS KESEHATAN
	1	02	0 2	1.0 1	000 6	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	4 Layanan	1.660.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0 2	1.0 1	000 7	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	45 Unit	594.634.568	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0 2	1.0 1	001 0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	10.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0 2	1.0 1	001 7	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	28 Unit	11.940.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0 2	1.0 1	002 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	8 Unit	41.726.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	0	1.0	002	DistribusiAlat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minumanke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusiAlat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	2.032.218.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	002	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatanyang disediakan	12 Paket	10.260.122.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	122.279.864.821		DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	1.750.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	1.450.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	3.889.622.404	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	761.930.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	985.689.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	11.345.163.260	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.553.457.829	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	2.552.955.365	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.732.943.228	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6 Dokumen	1.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	16.651.178.310	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	0	1.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	749.920.141	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1.545.762.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	001	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	71.541.554.434	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	001	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	001	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1.899.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	002	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	865.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	002	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4 Unit	204.928.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	002	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	95 %	446.700.000		DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	446.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	80 %	800.216.000		DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	218.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	396.166.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	25 Unit	185.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
31	1	02	0			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	45 %	2.029.860.000		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	726.420.000		DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1620 Orang	726.420.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	5 Kab/Kota	1.303.440.000		DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1000 Orang	1.091.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	211.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
32	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %	493.598.500		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100 %	443.206.500		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	60 Sarana	443.206.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %	50.392.000		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	50.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
33	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	80 %	3.187.104.212		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	80 %	528.404.200		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	528.404.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	80 %	2.223.665.702		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1.656.071.792	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	567.593.910	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	80 %	435.034.310		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	435.034.310	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
						UPTD Balai Latihan Kesehatan			13.004.670.600		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.004.670.600		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			13.004.670.600		
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 98 Indeks	9.945.141.319		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	123.480.000		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	123.480.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	356.682.000		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	136.782.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kelengkapannya					
	1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	219.900.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.145.958.149		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.716.080	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1.161.121.296	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	134.124.574	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	143.232.199	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	629.764.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	119.631.000		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	119.631.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.973.108.400		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.112.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.084.996.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.875.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik	98 %	4.226.281.770		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	88.986.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276 Unit	294.445.270	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	3.842.850.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
35	1	02	0			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	45 %	3.059.529.281		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	0	1.0		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	165Pelatihan	3.059.529.281		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	0	1.0	000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	3.059.529.281	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
						UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim			29.437.833.794		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			29.437.833.794		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			29.437.833.794		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	90 Indeks 100 %	14.207.137.205		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yangmendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	135.000.000		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	135.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	98 %	1.077.930.000		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	1.077.930.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit	100 %	1.772.629.105		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	48.921.551	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	271.707.554	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	1.452.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.510.050.800		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.225.387.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.284.663.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.631.527.300		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	427.118.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	1.204.408.800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	98 %	4.080.000.000		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	4.080.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	14.760.295.589		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	14.491.617.055		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	5.322.789.600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	198.960.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	8.628.893.215	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	80 Unit	340.974.240	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	268.678.534		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	193.478.534	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	75.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
38	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	50 %	470.401.000		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	5 Kab/Kota	470.401.000		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang	470.401.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
						UPTD Laboratorium Kesehatan			11.902.600.000		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.902.600.000		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			11.902.600.000		
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90 Indeks	11.076.142.480		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	12 Bulan	3.576.142.480		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.020.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	2.556.142.480	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD Sesuai Standar	100 %	7.500.000.000		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.500.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,7 %	826.457.520		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan	826.457.520		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	23 Unit	283.656.908	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	38 Unit	542.800.612	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
						Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI			25.675.224.000		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.675.224.000		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			25.675.224.000		
41	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan(RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yangditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	90 Indeks 100 %	15.354.371.116		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan (RSUD KORPRI)	100 %	126.720.000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	126.720.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI)	100 %	1.814.652.867		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	188.391.867	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	102 Orang	1.626.261.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit(RSUD KORPRI)	100 %	2.012.232.706		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	73.980.161	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	338.081.488	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	115.491.795	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	359.164.078	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	224.165.184	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	901.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	747.211.499		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	215.639.107	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	531.572.392	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian LaporanPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	7.843.987.128		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.155.030.400	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.688.956.728	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %	809.566.916		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	389.488.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	420.078.916	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	85 %	2.000.000.000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan RumahSakit yang memenuhi standar (RSUDKORPRI)	80 %	10.320.852.884		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	9.634.152.150		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	158 Unit	5.069.984.932	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	403 Unit	364.238.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkansarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat	1 Unit	1.336.317.444	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				
	1	02	02	1.0	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	2.863.610.874	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	02	1.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan(RSUD KORPRI)	100 %	558.208.234		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	02	1.0	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	290.947.234	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	02	1.0	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	267.261.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	03	1.0		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	95 %	128.492.500		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	03	1.0	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	128.492.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
						RSUD A. Wahab Sjahrane di Samarinda			844.112.601.000		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			844.112.601.000		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			844.112.601.000		
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82 Indeks	822.339.531.979		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	51 Dokumen	651.359.783		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.0	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	464.558.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	186.801.783	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	88 %	270.316.250.589		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1401 Orang/ Bulan	269.616.233.879	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	309.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	195.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	194.816.710	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen	5.300.000		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.300.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuh Rumah Sakit	45 Kegiatan	127.073.820		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	61.573.820	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	550 Orang	34.700.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	26.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	90 Paket	2.950.911.624		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	86 Paket	1.543.533.071	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	366.474.473	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	229.754.080	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	811.150.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersediaan dari Pengadaan Barang dan Penunjang milikRumah Sakit	286 Unit	2.152.061.463		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Paket	278.208.104	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	207 Unit	1.456.115.579	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	417.737.780	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	77 Unit	1.136.574.700		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	279.921.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	293.506.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	563.147.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	0	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	89 %	545.000.000.000		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	0	1.1	000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	545.000.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
44	1	02	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	89 %	19.918.662.671		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	0	1.0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	18.343.661.403		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	0	1.0	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	59 Unit	17.170.400.283	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	0	1.0	001	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2260 Unit	1.173.261.120	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	0	1.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	100 %	1.274.282.741		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	519.732.741	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16 Dokumen	754.550.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase layanan RS terintegrasi secara sistem	60 %	300.718.527		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	26 Dokumen	300.718.527	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
45	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	68 %	1.854.406.350		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	66 %	1.854.406.350		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	814 Orang	1.854.406.350	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
						RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan			623.302.991.850		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			623.302.991.850		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			623.302.991.850		
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Indeks kualitas layanan kesekretariatan - Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %	608.498.385.842		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	135.177.934.992		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1152 Orang/ Bulan	135.177.934.992	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	0	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	473.320.450.850		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	0	1.1	000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	473.320.450.850	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
47	1	02	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88.5 %	14.774.606.008		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	0	1.0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1701 Unit	14.774.606.008		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	0	1.0	000	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	8.305.020	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	0	1.0	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	199 Unit	14.444.944.396	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	0	1.0	001	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	319.136.592	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	0	1.0	001	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1500 Unit	2.220.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
48	1	02	0			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %	30.000.000		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	0	1.0		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	30.000.000		RSUD DR. KANUJOSO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4 Orang	30.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
						Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam			115.450.765.000		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			115.414.158.278		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			115.414.158.278		
49	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 84 Indeks	109.750.265.703		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	443.138.000		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	140.058.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	303.080.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji danpelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	70.584.150.337		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	430 Orang/ Bulan	70.155.070.337	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	253.080.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	176.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	832.963.050		RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	832.963.050	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen	1.681.324.272		RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	120.178.412	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	218.799.260	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.346.600	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161 Laporan	1.307.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	7.487.327.495		RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	5.323.048.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	367.650.887	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	432 Unit	1.796.628.608	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam)	78,4 %	5.156.354.050		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1.794.374.050	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3.354.480.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfungsi Dengan Baik	72,21 %	565.008.499		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.319.999	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	522.688.500	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	23.000.000.000		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	23.000.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %	4.210.876.575		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	02	1.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	95 %	3.453.797.055		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.0	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit	148.964.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.0	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	485.359.080	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.0	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	37 Unit	1.896.366.725	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.0	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2410 Unit	617.383.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.0	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	305 Unit	182.172.300	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.0	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	123.551.700	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	28950 Orang	750.838.000		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.0	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen	750.838.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.0	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %	6.241.520		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.0	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	6.241.520	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
51	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	93 %	1.453.016.000		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM	
	1	02	03	1.0	2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	57 Laporan	1.453.016.000		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM	
	1	02	03	1.0	000	2	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	430 Orang	1.453.016.000	Kota Samarinda, Samarinda Iilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	X						NON URUSAN			36.606.722		
	X	X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			36.606.722		
52	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)	100 %	36.606.722		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM	
	X	X	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen	36.606.722		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM	
	X	X	01	1.0	000	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	36.606.722	Kota Samarinda, Samarinda Iilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II			84.673.722.124		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			84.673.722.124		
	1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			84.673.722.124		
53	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74.6 indeks	26.338.645.874		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	532.160.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	478.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	17.442.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	6.436.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	17.922.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	11.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	8.020.448.187		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	10.494.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	7.992.772.187	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.182.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	487.238.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	15.282.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	21.956.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	240.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	210.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.420.681.357		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.261.532	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	406.964.911	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	291.936.466	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	37.258.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1477 Dokumen	11.520.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	632.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	13.594.648	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	14.645.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	13.425.717.090		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	593.516.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	14 Unit	12.832.201.090	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	312.982.200		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	301.482.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	2.139.419.040		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	247.934.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	32 Unit	1.104.402.240	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	49.520.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	13.812.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	723.750.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
54	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi	60 Lt/detik 140 Ha 9730 Ha	5.840.177.100		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	4801,86 meter	499.991.700		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	499.991.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	20 km	5.340.185.400		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21 KM	5.340.185.400	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
55	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	12,76 %	5.999.922.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	710 meter	5.999.922.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	5.999.922.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
56	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	86,23%	46.494.977.150		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792.61 Km	46.494.977.150		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	60 Jembatan	6.879.209.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 KM	28.111.331.650	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	11 KM	11.504.435.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
						UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi			5.893.949.998		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.893.949.998		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			5.893.949.998		
57	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74.6 indeks	5.421.466.398		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	181.232.000		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	104.040.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	24.384.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	24.306.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	18.282.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	41.648.000		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.162.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	18.256.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.230.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara,	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	461.396.986		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	126.246.986	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	23.188.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	962.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	311.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3.346.830.568		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.167.021	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.349.780	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	161.503.091	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.490.354.825	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.659.760	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	18.682.091	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	566.294.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	19.196.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	624.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	502.381.744		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	39.877.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	462.504.744	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	337.949.800		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18.008.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	319.941.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	550.027.300		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	165.533.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	73.028.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	311.465.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
58	1	03	1			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	71.11 %	472.483.600		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	1	1.0		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	472.483.600		UPTD LABORATORIUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	1	1.0	000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	3 Bangunan Konstruksi	472.483.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			3.421.817.483.984		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.421.817.483.984		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.265.919.439.745		
59	1	03	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	74,60indeks 100 %	141.828.550.712		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	1.602.629.283		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	661.015.687	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	199.999.698	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	49.999.795	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	191.614.412	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	499.999.691	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	123.737.585.095		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11648 Orang/ Bulan	121.960.121.470	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1.573.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	59.146.340	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	41.876.505	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	64.236.710	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	38.884.070	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	882.840.381		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.405.525	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	853.509.331	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.925.525	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						SKPD					PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.135.118.440		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	528.129.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	33.464.720	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	34.964.720	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	450.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	88.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	5.468.052.528		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.999.948	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.006.168.295	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	99.212.620	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	243.140.005	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	221.911.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.716.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	46.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	34.359.760	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	104.746.420		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	39.877.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	64.869.420	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.986.051.100		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	89.637.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.896.413.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	5.911.527.465		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	1.484.167.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	786.601.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	3.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	588.992.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3.048.126.965	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
60	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani ** Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	0.33 Km 140 Ha 9730 Ha 60 lt/detik	172.827.858.706		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86meter 6 Lokasi	154.759.190.386		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	283.051.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	3,129 KM	35.318.689.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	203.811.640	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	4.616.271.157	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,52 KM	17.615.449.614	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	12 Dokumen	1.718.835.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	2 Titik	7.104.859.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	10.006.373	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	11.736.218.902	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	8 Dokumen	4.593.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	9 Unit	71.558.096.620	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara,	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3,838.46Km	18.068.668.320		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,056 KM	11.032.978.320	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0,18 KM	2.214.690.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	10 Dokumen	4.821.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
61	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	83.40%	6.286.770.600		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	5 unit	6.286.770.600		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	1.0	001	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	544.814.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	1.0	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	5.498.910.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	1.0	001	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Liter/Detik	20.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	1.0	002	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	223.046.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
62	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	25 %	1.513.523.900		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	04	1.0		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen	1.513.523.900		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	30 Orang	353.183.900	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1.160.340.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
63	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	42 %	2.330.070.300		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	2.330.070.300		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30 Orang	353.183.900	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	1.340.930.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten/kota	635.956.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
64	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	12,76 %	17.865.028.396		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	710 meter	17.865.028.396		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	16.294.828.396	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Dokumen	1.570.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
65	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	75 %	55.409.724.300		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	2 Kawasan	55.409.724.300		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	07	1.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	5 Unit	55.409.724.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
66	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	83,58%	528.438.341.868		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.0		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	9 unit	528.438.341.868		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.0	001	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	30 Orang	48.537.268	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.0	001	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	0 Rumah Negara	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.0	001	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	0 Bangunan Gedung Negara	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.0	001	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	23 Bangunan Gedung	509.051.817.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.0	001	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	10 Lisensi	101.875.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	4 Kabupaten/Kota	226.147.200	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	23 Dokumen	18.969.964.500	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
67	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	66,67 %	7.949.967.934		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	7.949.967.934		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	3.624.863.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1.094.340.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	0	1.0	001	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	2 Dokumen	3.185.750.134	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	0	1.0	001	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 kabupaten/kota	45.014.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
68	1	03	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	2 ruas 86,23 %	2.303.232.171.304		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km	2.303.232.171.304		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	002	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	88.29 KM	62.529.606.532	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	003	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	88.29 KM	1.057.782.413.780	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	6 Jembatan	267.503.550.980	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	10 KM	73.119.470.980	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	37 Dokumen	38.755.668.316	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	23.07 KM	798.684.329.030	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	938.85 KM	3.156.765.490	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1.700.366.196	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
69	1	03	1	1		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	60,13 %	15.076.565.326		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang	11.468.511.480		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	000	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	120 Orang	1.268.439.340	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	001	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	64.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	001	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1000 Orang	3.706.494.016	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	03	1	1.0	001	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	2.172.578.120	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	001	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	64.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	001	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1000 Orang	3.991.000.004	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	03	1	1.0	001	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	750 Orang	129.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	001	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	10 Lembaga	73.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	335.306.128		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	000	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	73.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	138.108.416	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	60.509.040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	63.688.672	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	1	1.0		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	3.272.747.718		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket Pekerjaan	530.975.368	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	50 Bangunan Konstruksi	241.421.010	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	000	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	1.942.136.820	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	231.301.010	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0	000	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	326.913.510	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
70	1	03	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83,90 %	13.160.866.399		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1	1.0		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13,35 %	2.046.786.628		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 1	000 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	1.824.166.128	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 1	000 9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 Orang	222.620.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,88 %	4.045.653.673		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 2	000 4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	491.479.790	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 2	000 5	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	80 Orang	311.384.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 2	000 6	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	372.100.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 2	000 8	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	929.118.763	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 2	001 1	Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	3 Berita Acara	349.538.210	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 2	001 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1 Dokumen	1.592.032.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,73 %	3.587.202.455		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 3	000 3	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	313.999.542	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 3	000 4	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	685.684.122	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 3	000 5	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	275.599.830	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	1 2	1.0 3	000 6	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4 Dokumen	819.479.445	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 3	000 7	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1.492.439.516	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,94 %	3.481.223.643		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 4	000 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	912.599.119	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 4	000 5	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	441.079.853	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 4	000 6	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	282.968.035	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 4	000 8	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	283.791.833	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 4	001 1	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	2 Dokumen	914.786.137	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 4	001 2	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara	346.999.333	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	1 2	1.0 4	001 4	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	298.999.333	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			155.898.044.239		
71	1	04	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan	47,89 %	356.240.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	0 2	1.0 1		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	336.240.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	0 2	1.0 1	000 7	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	336.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	0 2	1.0 3		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	100 Unit	10.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	0 2	1.0 3	001 1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	0 Unit Rumah	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	10.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
72	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	156,59Ha	122.417.786.239		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	1.03		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	1.571.019.476		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	1.03	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4 Laporan	1.571.019.476	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	1.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	48,58 Ha	120.846.766.763		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3 Laporan	1.276.918.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					
	1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	28.927.462.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	89,66 Ha	90.642.386.763	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
73	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman	52.57 %	33.124.018.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	6 Lokasi	33.124.018.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	05	1.01	0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	9 Lokasi	33.124.018.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I			68.159.362.686		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			68.159.362.686		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			68.159.362.686		
74	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74,60 indeks	6.838.397.786		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	339.886.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	323.880.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	16.006.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	45.104.588		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.860.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16.299.088	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.945.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	377.861.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	62.721.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.140.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.290.298.308		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	129.893.789	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	449.619.187	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	46.060.360	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.696.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	597.330.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	53.500.972	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.198.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	2.255.745.790		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1.477.064.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	778.681.790	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	495.836.400		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.954.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	477.882.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	2.033.665.700		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	165.682.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	19 Unit	935.139.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	79.680.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	6.409.900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	846.754.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
75	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	60 lt/detik 9730 Ha 140 Ha	8.000.009.100		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	4.801,86meter	2.500.012.400		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	500.001.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1.2 KM	1.499.996.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,179 KM	500.015.100	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3.838,46meter	5.499.996.700		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5,78 KM	5.499.996.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
76	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	83,58 %	653.065.900		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	1 unit	653.065.900		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	653.065.900	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
77	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	86,23 %	52.667.889.900		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61Km	52.667.889.900		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	1.502.948.790	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8,5 KM	7.998.835.910	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM	43.166.105.200	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III			80.137.849.208		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			80.137.849.208		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			80.137.849.208		
78	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	72,20 % 100 %	3.406.660.778		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	356.449.500		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	327.240.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4.820.760	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.407.600	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8.910.380	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.070.760	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	207.878.760		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.820.760	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	198.033.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.025.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	261.387.120		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	38.487.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kelengkapannya				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.950.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.950.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	75.000.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	138.000.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	873.887.962		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	31.112.030	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	63.434.016	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.742.756	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	54.896.565	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	56.603.794	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.878.400	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	636.862.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7.758.570	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.599.831	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	42.098.908		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	42.098.908	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	292.522.540		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	32.502.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	226.269.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.751.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.372.435.988		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	70.900.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	16 Unit	693.601.800	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	63.480.676	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	533.754.812	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	10.698.700	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
79	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9730 Ha	6.999.997.100		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	33,30 meter	6.999.997.100		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.215 KM	2.333.456.700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	87 KM	4.666.540.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
80	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	86,23 %	69.731.191.330		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 km	69.731.191.330		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	1.999.996.320	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.9 KM	3.410.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	74 KM	64.320.755.010	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Satuan Polisi Pamong Praja			43.550.149.000		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			43.036.808.482		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			43.036.808.482		
81	1	05	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	40.362.061.575		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	921.167.576		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	485.357.226	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	435.810.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	37.289.618.720		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/ Bulan	36.833.716.620	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	348.950.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	106.952.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	408.243.700		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	339.383.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.660.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	53.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %	683.082.439		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.875.742	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.192.697	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	647.014.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 %	4.322.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4.322.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu	100 %	484.790.140		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	261.625.340	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	223.164.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik	100 %	570.837.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	23.136.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	420.557.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	29.860.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.284.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
82	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	2.277.661.924		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4 Kasus 150 Orang	1.679.550.003		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	425.362.652	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	136.123.590	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	572.126.630	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 laporan	545.237.131	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	5 Perda dan Perkada	549.511.921		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	325.324.440	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	61.583.375	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	5 Laporan	66.659.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	95.945.106	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS	1 Orang	48.600.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	48.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
83	1	05	0	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	222 Jumlah	397.084.983		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	0	4	1.0	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	397.084.983		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	0	4	1.0	000 2	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	129.492.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	4	1.0	000 4	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	129.868.205	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	4	1.0	001 9	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	83.145.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	0	4	1.0	002 3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	54.579.678	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X					NON URUSAN				513.340.518		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				513.340.518		
84	X	X	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	513.340.518		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	X	X	0	1	1.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	112.165.988		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	X	X	0	1	1.0	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.554.570	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	X	0	1	1.0	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.554.570	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	X	0	1	1.0	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	95.056.848	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	X	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	146.905.140		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	X	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	146.905.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	X	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %	254.269.390		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	254.269.390	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			58.136.000.000		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			58.136.000.000		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			58.136.000.000		
85	1	05	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 % 85 Indeks	22.106.416.375		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.244.381.231		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	324.549.164	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	63.830.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	67.359.671	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.620.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.539.671	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	555.745.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	225.737.725	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	17.547.494.555		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	16.953.815.985	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	378.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	83.559.710	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	85.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	5.607.944	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											N BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	21.253.944	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	19.536.972	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	9.340.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	460.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	15.233.027		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	10.408.247	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	3.844.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.135.320.789		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.848.563	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	134.297.165	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	171.752.951	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	30.527.470	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 Laporan	790.196.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	5.218.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											N BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	32.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	32.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.566.593.700		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.590.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.017.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.135.986.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Saranadan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	588.021.073		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	469.000.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	66.822.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2.933.333	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	49.265.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
86	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemulihan Pasca Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 % 100 % 100 %	36.029.583.625		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	125.254.975		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	40 Orang	125.254.975	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	21.314.304.415		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	385.368.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1000 Orang	197.518.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	165.312.074	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Keluarga	136.666.150	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Dokumen	20.251.339.391	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	178.100.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.041.169.330		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	81.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	543.059.330	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	417.110.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	13.548.854.905		BADAN PENANGGULANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											N BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	124.942.790	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	7 Dokumen	13.093.780.795	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	2.289.470	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2 Dokumen	781.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	42.152.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	36.497.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	10 kabupaten/kota	248.411.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Dinas Sosial			118.370.364.984		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.531.218.504		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			117.531.218.504		
87	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	62.118.112.111		DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	594.529.900		DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	17.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	577.129.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	52.632.012.218		DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/ Bulan	51.614.545.844	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	502.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	201.943.660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	11.553.019	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	216.413.357	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	85.236.338	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	3 Laporan	12.090.358		DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.067.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.956.318	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.067.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	344.433.723		DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	118.170.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	58.183.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	168.080.723	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	3.568.720.933		DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.189.245	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.528.397.990	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	330.873.880	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.319.692.838	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	110.804.980	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	204.762.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.260.195.533		DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	766.404.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	86.332.103	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	407.459.430	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	2.125.871.446		DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46.566.224	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	624.964.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.994.730	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.448.345.892	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.580.258.000		DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	483.424.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	174.344.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	623.460.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	28.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.310.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	245.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
88	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64 %	2.634.874.132		DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	157.510.048		DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	157.510.048	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	2.477.364.084		DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	40 Orang	394.111.940	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	105 Orang	1.093.847.410	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	119.053.940	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	870.350.794	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
89	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	21.344.454.223		DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1.804.028.330		DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.193.309.530	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	245.096.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	20 Orang	26.905.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang	2.450.760	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	22.822.215	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	139.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	94.785.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	8.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	42.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	16.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	9.858.275	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	8000 Orang	19.540.425.893		DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7500 Orang	15.251.851.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang	374.947.890	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	175 Orang	305.187.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	368.365.480	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang	472.292.075	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dokumen	2.767.780.898	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA					
90	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	10360 Orang	21.108.112.272		DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.0	1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	164.961.500		DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.0	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	146.681.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.0	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	18.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.0	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	10342 Orang	20.943.150.772		DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.0	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9042 Keluarga	13.060.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.0	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	9418 Keluarga	673.790.737	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.0	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	7.208.860.035	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
91	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	9.472.597.558		DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.0	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17870Orang	9.472.597.558		DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.0	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17000 Orang	6.353.887.210	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.0	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	300 Orang	349.591.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.0	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	290 Unit	692.818.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.0	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	275 Orang	222.035.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.0	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	235 Orang	1.854.264.348	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
92	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 lokasi	853.068.208		DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	0	1.0		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 lokasi	853.068.208		DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	559.034.319	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	76.593.889	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	0	1.0	000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	217.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	X					NON URUSAN			839.146.480		
	X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			839.146.480		
93	X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	839.146.480		DINAS SOSIAL
	X	X	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	777.821.480		DINAS SOSIAL
	X	X	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	547.708.012	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	X	X	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	67.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	X	X	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	162.313.468	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	X	X	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	61.325.000		DINAS SOSIAL
	X	X	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	61.325.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
						UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri			7.473.677.016		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.473.677.016		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			7.473.677.016		
94	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan(UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	84 % 100 %	1.705.576.269		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 laporan	79.320.000		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	79.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	66.560.000		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	66.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	469.091.971		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.402.765	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	191.531.676	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	39.207.530	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	206.950.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	179.104.698		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	168.678.335	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	10.426.363	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	599.711.600		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	386.462.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	213.249.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	305 Unit	311.788.000		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	180.550.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290 Unit	101.238.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	30.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
95	1	06	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	5.768.100.747		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	0	1.0		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	5.768.100.747		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	2.753.225.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	134.820.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	126 Orang	1.045.024.830	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	30 Orang	29.680.080	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	61.015.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	579.739.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	1.011.737.660	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	126 Orang	1.582.577	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	6.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 Orang	50.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang	12.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	82.276.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
						UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma			4.999.998.000		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.999.998.000		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4.999.998.000		
96	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	84 % 100 %	1.934.691.425		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	75.800.000		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	75.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	38.184.000		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	38.184.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	400.712.201		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.513.224	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	170.471.157	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.839.820	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	203.888.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Laporan	124.415.964		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	124.415.835	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	129	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.013.408.921		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.372.170	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	344.756.751	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	665.280.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	41 Unit	282.170.339		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	194.989.250	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	57.931.089	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	29.250.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
97	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	3.065.306.575		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	3.065.306.575		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	19.872.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.737.108.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	771.811.180	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	123.659.290	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	9.636.470	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	62.534.770	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	114.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	80 Orang	6.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	161.104.865	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	16.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	16.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	80 Orang	8.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	20 Dokumen	17.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
						UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan			6.500.000.000		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.500.000.000		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			6.500.000.000		
98	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan(UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	84 % 100 %	1.918.938.242		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	76.680.000		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	76.680.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	55.449.000		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	55.449.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	711.463.706		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.876.957	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	497.108.549	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.302.200	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	160.176.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	7.475.228		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6.123.228	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.352.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	779.621.808		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.874.808	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	239.740.800	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	112.831.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	420.175.200	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	51 Unit	288.248.500		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	224.880.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	24.370.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.998.500	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
99	1	06	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	4.581.061.758		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial(UPTD PSAAH)	100 Orang	4.581.061.758		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	5.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2.274.966.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	598.050.500	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	450.396.397	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	420.335.883	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	163.882.109	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	12.002.175	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	2.372.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	509.449.694	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	56.410.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	11 Orang	39.714.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	12.850.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	35.433.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
						UPTD Panti Sosial Bina Remaja			5.800.000.000		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.105.790.555		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.105.790.555		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
100	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	84 % 100 %	1.284.201.405		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	84.840.000		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.840.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	77.403.300		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	77.403.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	544.223.969		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.145.602	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	252.078.367	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	245.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Laporan	1.546.346		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.546.346	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	208.730.100		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.956.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	198.774.100	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	60 Unit	367.457.690		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	105.320.290	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	69.747.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Pinang, Sungai Pinang Dalam	
	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	192.390.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
101	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %	3.821.589.150		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	3.821.589.150		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	85 Orang	30.866.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	85 Orang	1.532.418.530	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	85 Orang	570.088.630	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	85 Orang	375.634.530	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	85 Orang	32.900.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	85 Orang	421.751.630	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	85 Orang	758.268.140	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	0	1.0	000	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	3 Orang	8.917.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	0	1.0	000	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	2.144.690	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	0	1.0	001	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	54.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	0	1.0	001	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang	34.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	X					NON URUSAN			694.209.445		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			694.209.445		
102	X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	84 % 100 %	694.209.445		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	X	X	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	24.796.845		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.796.845	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	X	X	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	668.866.600		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	668.866.600	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	X	X	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	60 Unit	546.000		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	X	X	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	546.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
						UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia			3.432.100.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.432.100.000		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			3.432.100.000		
103	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	84 % 100 %	1.396.536.877		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	69.960.000		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	69.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	32.935.800		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32.935.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	290.485.427		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.777.456	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.267.859	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.558.192	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	188.881.920	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	735.000.400		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	104.737.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	630.262.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	268.155.250		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	98.229.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	67.142.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	102.783.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
104	1	06	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di dalam Panti	100 %	2.035.563.123		UPTD PANTI SOSIAL KARYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	2.035.563.123		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	1.416.613.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	235.083.070	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	19.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	8.870.328	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	82.900.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	21.355.325	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	194.162.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	60 Orang	10.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	21.668.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	60 Orang	24.910.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			88.973.714.371		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			87.973.714.449		
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			87.973.714.449		
105	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 84 Indeks	75.194.689.027		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.329.582.547		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.418.562.621	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	87.318.226	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	823.701.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	48.660.540.862		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	229 Orang/ Bulan	47.698.601.862	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	605.103.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	305.715.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	23.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	337.110.500		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	244.114.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.829.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	77.017.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	149.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.623.697.232		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.954.864	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	664.918.114	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	460.756.112	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	74.966.022	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	1.742.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.787.778.120	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.608.581.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam, Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	558.693.357		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	362.776.231	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	149.500	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	195.618.126	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit Unit	149.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	17.600.795.992		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.719.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	544.551.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	149.500	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.048.376.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.084.268.537		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	45.831.999	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	269.913.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	108.437.238	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	659.787.300	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.500	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.500	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
106	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja	70 Persen	1.380.420.208		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	8 Dokumen	1.380.420.208		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	7 Dokumen	930.672.240	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	20 Orang	449.747.968	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
107	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	66,50 Persen	3.148.909.819		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	60 Orang	2.795.669.695		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	352 Orang	2.634.915.423	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	160.754.272	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	15 Laporan	85.752.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	15 LPK	85.752.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.03		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	115.406.834		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	23 Perusahaan	115.406.834	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	152.081.290		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	152.081.290	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
108	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,60 Persen	1.993.866.790		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	270 Orang	1.029.275.637		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	285 Orang	205.550.955	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	270 Orang	248.150.955	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	
	2	07	04	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	12000 Orang	93.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	180 Orang	482.573.727	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	16 Lembaga	71.360.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	16 Lembaga	71.360.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar kerja	2 event	782.266.925		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	127.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	55000 Orang	160.870.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	230 Orang	494.096.925	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	30 Orang	110.964.228		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	30 Orang	110.964.228	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
109	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	72 Persen	2.762.598.859		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	105 SK	772.073.940		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	450.915.960	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	50 Perusahaan	240.157.980	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	
	2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	81.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 Perusahaan	1.056.158.694		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	655.865.126	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara,	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	
	2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	47.200.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	05	1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	107.220.985	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga	245.872.583	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Pinang, Sungai Pinang Dalam	
	2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 SK	934.366.225		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	407.136.265	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	9 Surat Keputusan	368.658.975	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	
	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	11000 Orang	158.570.985	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
110	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	18,23 Persen	3.493.229.746		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	4000 Perusahaan	3.493.229.746		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	325 Perusahaan	1.444.291.524	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	345.162.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Pinang, Sungai Pinang Dalam	
	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	547 Perusahaan	1.703.775.822	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			999.999.922		
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			999.999.922		
111	3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi	1 Kawasan	783.503.370		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Dokumen	783.503.370		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	341.650.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	80.385.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	277645.24 Hektar	13.500.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	347.967.770	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
112	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	1 Kawasan	72.750.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	72.750.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	31.500.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	32	0	1.0	000	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	9.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	0	1.0	000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	70 Kepala Keluarga	8.400.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	0	1.0	000	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	50 Orang	150.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	0	1.0	001	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	9.900.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	0	1.0	001	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	13.500.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
113	3	32	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan	100 Persen	143.746.552		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	0	1.0		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitas, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	143.746.552		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	0	1.0	000	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	111.596.552	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	0	1.0	000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	32.150.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan			26.661.171.948		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26.661.171.948		
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			26.661.171.948		
114	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan) Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti(UPTD BLKI Balikpapan)	84 Indeks 100 Persen	4.717.547.844		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD.BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	167.469.380		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.169.380	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	47.300.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	311.716.473		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	26.366.473	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	285.350.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	846.900.791		UPTD BALAI LATIHAN KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.029.373	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	248.477.774	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	167.317.142	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	57.667.302	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.799.200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	355.610.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	119.631.000		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	119.631.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	1.900.465.000		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	452.625.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	156.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.284.840.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	1.371.365.200		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	65.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	677.080.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	364.034.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	263.250.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
115	2	07	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	76,50 Persen	21.943.624.104		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	0	1.0		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten (UPTD. BLKI. Balikpapan)	80 Persen	21.943.624.104		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	0	1.0	000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	18.756.592.104	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	0	1.0	000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	579.012.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	0	1.0	000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	2.608.020.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
						UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang			13.594.584.681		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.594.584.681		
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			13.594.584.681		
116	2	07	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan(UPTD BLKI Bontang) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Bontang)	84 Indeks 100 Persen	3.569.892.980		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	138.881.670		UPTD BALAI LATIHAN KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138.881.670	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	18.800.760		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	18.800.760	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	893.872.042		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.489.654	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	347.489.112	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.676.096	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.429.180	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	501.788.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	2.137.673.508		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.954.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	545.999.500	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	367.160.008	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.216.560.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	380.665.000		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.565.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	97.500.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.600.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
117	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)	77 Persen	10.024.691.701		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	80 Persen	10.024.691.701		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	672 Orang	8.843.668.303	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	454.102.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	18 Unit	726.921.398	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
						Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			41.767.605.000		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.767.605.000		
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			37.468.453.789		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
118	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesektarian	84 %	26.494.666.928		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %	994.815.101		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	126.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	175.597.068	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	166.999.610	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	286.549.943	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	215.108.480	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94.50 %	16.585.614.124		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	16.116.374.124	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	261.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	40.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	59.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	79.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	82 Orang	987.429.861		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	284.373.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	526.627.901	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	176.428.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 Unit	2.612.085.937		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.478.425	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	57.186.964	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	853.471.714	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	15.791.600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Perundang-Undangan					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	68.352.922	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.481.172.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	110.632.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 Unit	1.649.365.310		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	581.662.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	1.067.703.310	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	3.066.160.176		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.902.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	809.182.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.360.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.236.715.976	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	87 Unit	599.196.419		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	56.004.999	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	288.655.420	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	94.332.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.09	0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	160.204.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
119	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	2.527.267.258		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 Lembaga	563.730.648		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	337.599.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	126.131.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlahpesertasosialisasi kebijakan penyelenggaraanPUG tingkat Provinsi	30 Orang	99.999.588	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1 lembaga undefined	658.937.430		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 Orang	260.999.568	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.02	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	397.937.862	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	1.304.599.180		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga	139.040.455	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	100 Orang	999.559.157	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	165.999.568	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
120	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	24.96 %	3.066.626.186		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 lembaga	1.596.900.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1Dokumen	829.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah	767.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Layanan	1.111.658.820		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	868.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	243.378.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan bagi SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	60 Orang	358.067.366		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60 Orang	358.067.366	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
121	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian data gender dan anak	80 %	1.006.499.454		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 Data	1.006.499.454		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	4 Dokumen	505.249.714	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	6 Dokumen	501.249.740	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
122	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten / kota layak anak	90 Persen	1.592.898.889		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yangmendapatkan Penguatan pelembagaanPHA	10 Lembaga	634.899.068		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1Dokumen	303.899.539	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	3 perangkat daerah	330.999.529	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 Lembaga	957.999.821		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1Kegiatan	563.999.910	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 Kegiatan	393.999.911	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
123	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	3.88 %	2.780.495.074		DINAS KEPENDUDUKAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	1.600.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1Dokumen	900.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	1Kebijakan	700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	50 Layanan	486.735.074		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 Orang	172.716.590	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	314.018.484	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 dokumen	693.760.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1Dokumen	693.760.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1.930.713.873		
124	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80 Persen	705.455.220		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	550.712.216		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	461.805.112	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	12	0 2	1.0 2	000 2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	88.907.104	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	0 2	1.0 3		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	154.743.004		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	0 2	1.0 3	000 1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	82.913.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	0 2	1.0 3	000 2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	71.829.704	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
125	2	12	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 Persen	724.664.060		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	0 3	1.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	380.172.620		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	0 3	1.0 2	000 1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	297.004.620	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	03	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	83.168.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	344.491.440		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	88.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	255.571.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
126	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 Kali	500.594.593		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	28 Persen	309.785.413		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	81.644.927	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	36.125.496	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	3 Dokumen	192.014.990	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	190.809.180		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	37.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	60 Orang	153.049.180	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.368.437.338		
127	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total	60 %	607.890.285		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	607.890.285		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 Laporan	277.901.588	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	1.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	2 Laporan	329.988.697	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
128	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern	68,42 %	641.647.945		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio akseptor KB	0,76 %	641.647.945		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	1.01	0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	99.999.613	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	170.648.532	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	370.999.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
129	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,54 %	1.118.899.108		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Organisasi	1.019.899.556		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	1.01	0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	920.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	1.01	0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	2 Organisasi	98.999.556	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase organisasi pemberdayaan dan peningkatan organisasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan keluarga	40 %	98.999.552		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	1.02	0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	98.999.552	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			103.961.129.740		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.375.215.089		
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			6.375.215.089		
130	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	97.75 Skor 86.5 Skor	4.229.173.741		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	1.139.149.413		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	243.137.409	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	288.815.851	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	105.525.490	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	5 Laporan	98.355.202	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.01	0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	152.405.230	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	151.641.632	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	99.268.599	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	92.07 %	648.545.176		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	50 Ton	335.314.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	226.599.076	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	86.632.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	2.441.479.152		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	586.298.166	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan	1.387.371.543	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	467.809.443	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
131	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangnya	0 % 1 Kecamatan	1.120.534.907		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	1 Laporan	166.339.285		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	166.339.285	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	954.195.622		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	364.851.756	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	473.431.958	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	115.911.908	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
132	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	86 %	1.025.506.441		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	18 Dokumen	1.025.506.441		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanandan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Sertifikat	101.120.712	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	74.845.518	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	82.677.977	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	462.840.522	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	236.828.804	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dansinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	67.192.908	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			97.585.914.651		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			97.585.914.651		
133	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH)	82.7 Indeks 100 %	71.910.238.569		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	90 %	1.226.099.184		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	901.775.556	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.215.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.215.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	52.370.544	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	259.521.684	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	91.27 %	65.341.162.352		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352 Orang/ Bulan	64.585.633.232	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	540.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	97.182.258	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	6.280.530	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	103.337.908	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	8.248.424	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas)	45.7 %	56.928.424		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.562.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	28.202.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	24.162.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)	85 %	215.286.040		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	98.172.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.107.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	14.607.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Pegawai					DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	92.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90 %	1.128.203.959		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	19.497.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	132.134.669	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	32.021.840	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.756.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	906.630.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	30.163.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (Dinas)	90 %	1.705.638.510		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	119.631.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	1.586.007.510	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	90 % 100 % 95 % 90 % 88.95 %	1.498.956.800		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.390.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	388.926.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.088.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	90 %	737.963.300		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	138.750.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	246.903.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	133.825.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	21.078.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	131.406.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	66.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
134	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,7 % 41.57 %	23.128.988.186		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)	840 Ha 9000 Ha	23.128.988.186		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1Laporan	20.241.555.512	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	1.797.737.846	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan laporan	8.365.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	681.200.838	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	400.128.610	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
135	3	27	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	43 % 41.76 %	2.546.687.896		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitasi Hortikultura yang diberikan (Dinas) Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas)	3 Unit 210 Unit	2.546.687.896		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	449.687.908	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	51.620.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	51.620.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	805.520.748	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	001	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	74.318.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	001	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1Dokumen	999.658.360	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	002	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit Unit	114.260.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			3.261.119.848		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.261.119.848		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.261.119.848		
136	3	27	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)	82 Indeks 100 %	1.730.702.249		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PSBTPH)	91.27 %	81.000.000		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	81.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas) Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD BBITPH) Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PSBTPH)	85 % 100 % 85 % 83 %	231.375.000		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)				
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	231.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)	90 %	239.760.419		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.885.698	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.654.721	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	166.470.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PSBTPH)	90 %	269.665.130		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	269.665.130	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)	90 %	775.765.000		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	199.105.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	572.160.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PSBTPH)	90 %	133.136.700		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	58.600.500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	28.996.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	45.540.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
137	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	98 %	1.530.417.599		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH)	215 Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	1.471.892.599		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	95 Sertifikat	763.104.006	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhstandar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	120 laporan	708.788.593	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai (UPTD PSBTPH)	3 Varietas	58.525.000		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.03	0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	58.525.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			5.389.388.950		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.389.388.950		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			5.389.388.950		
138	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH)	82 Indeks 100 %	3.543.707.499		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PTPH)	88 %	88.560.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						ASN				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)	83 %	134.082.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	89.082.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	82.35 %	547.959.661		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.959.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	140.630.914	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.782.456	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.878.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	383.708.091	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PTPH)	83.5 %	279.159.178		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	279.159.178	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	88.95 %	1.401.910.720		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	325.150.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.073.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PTPH)	88.6 %	1.092.035.940		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	111.852.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	980.183.440	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
139	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan PeredaranPestisida dan Pupuk	36 %	503.981.155		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	45 Kios	151.794.012		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	45 Laporan	151.794.012	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi (UPTD PTPH)	11 Laporan	352.187.143		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	352.187.143	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
140	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75.9 %	1.341.700.296		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI (UPTD PTPH)	15155 Ha	1.341.700.296		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15100 Ha	921.909.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	55 Ha	419.791.016	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura			23.898.180.301		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.467.862.335		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.467.862.335		
141	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)	100 % 82 Indeks	1.622.044.391		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD BBITPH)	100 %	105.960.000		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	255.903.000		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.903.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	195.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Batuah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)	100 %	290.229.394		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.996.355	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.977.317	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.499.722	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	257.756.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)	100 %	26.848.697		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.848.697	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH)	100 %	563.480.300		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	337.160.300	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	223.320.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	379.623.000		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	149.995.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	79.628.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
142	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	11.95 % 50 %	1.845.817.944		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH)	960 Ha	1.845.817.944		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	50000 Batang	1.171.834.379	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	25 Ton	673.983.565	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X					NON URUSAN			20.430.317.966		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			20.430.317.966		
143	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH)	82 Indeks 100 %	20.430.317.966		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	X	X	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)	100 %	20.430.317.966		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	X	X	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	167 Unit	20.430.317.966	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian			6.716.183.161		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.716.183.161		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			6.716.183.161		
144	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP)	100 % 82 Indeks	2.128.705.033		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD BPPSDMP)	90 %	93.000.000		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	93.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPPSDMP)	90 %	144.232.915		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.312.915	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	130.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (BPPSDMP)	90 %	103.209.360		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	103.209.360	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)	95 %	1.154.173.242		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.333.480	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.180.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.019.262	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	896.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BPPSDMP)	90 %	634.089.516		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	107.811.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	526.278.016	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
145	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	80 %	4.587.478.128		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP)	300 Orang	1.367.427.700		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Unit	143.390.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	300 Orang	1.224.036.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)	9 Laporan	2.941.462.428		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2.691.102.372	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MANUSIA PERTANIAN
	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	9 Kelompok	250.360.056	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya (UPTD BPPSDMP)	11 Unit	278.588.000		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	5 Unit	244.670.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	33.918.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
						Dinas Lingkungan Hidup			54.060.308.000		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			54.060.308.000		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			54.060.308.000		
146	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	88,5 Indeks 100 %	33.162.600.106		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 %	861.904.571		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	497.455.438	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	51.594.937	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	23.199.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	197.397.586	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	92.256.970	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	23.600.152.419		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/ Bulan	22.584.780.872	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	475.964.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	308.357.547	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	80.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	60.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	89.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 %	58.808.520		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	2.599.010	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	27.740.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	28.469.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	591.205.617		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	191.848.167	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	91.067.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	24.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	284.290.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %	1.865.320.983		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.831.938	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	315.804.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	98.819.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.414.865.525	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %	1.344.543.300		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	85.770.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1.258.773.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa kantor	100 %	3.625.218.700		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.946.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.699.991.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.913.281.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	67 %	1.215.445.996		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	513.895.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	248.080.946	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	49.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	403.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	2	11	0			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)	100 %	1.982.881.342		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	100 %	1.508.082.369		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	731.710.621	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	776.371.748	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 %	474.798.973		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	167.247.973	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	307.551.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	2	11	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran Indeks Standar Pencemar Udara	≤5 (tercemar ringan) Indeks 47 (Baik) Indeks	8.230.269.367		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	6.156.790.922		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	216 Dokumen	2.452.881.187	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	3.703.909.735	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	81 Persen	1.247.311.425		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	146.027.799	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	1.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	275 Lokasi	1.101.283.626	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	45 %	826.167.020		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	1.03	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	437.387.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	1.03	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	243.080.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	11	03	1.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasilitas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	145.700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
149	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	319.286 Ha	1.149.999.900		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	60 %	1.149.999.900		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	499.999.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	240.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	1.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	159.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	1.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
150	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)	52 %	696.650.139		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	25 Usaha	696.650.139		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	302.450.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	394.199.647	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
151	2	11	0	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	55 %	2.398.467.258		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	6	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	67,50 %	2.398.467.258		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	46 Dokumen	675.799.582	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	145.590.884	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	160 Badan Usaha	1.577.076.792	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
152	2	11	0	8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	120 Kelompok	1.763.704.760		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	8	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	50 %	1.763.704.760		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	0	1.0	000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	135 Dokumen	1.763.704.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
153	2	11	0	9		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)	84,42 %	744.976.131		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	9	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	20 %	744.976.131		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	0	1.0	000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	65 Entitas	744.976.131	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
154	2	11	1	0		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)	100 %	1.695.759.728		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	1.0	0	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 %	1.695.759.728		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	1.0	000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	15 Perkara	178.719.431	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	1.0	000	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	8 Perkara	533.382.262	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	1.0	000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	983.658.035	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
155	2	11	1	1		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola (%)	89 %	2.234.999.269		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	1.0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	70 %	2.234.999.269		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	1.0	000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	273.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	1	1.0	001	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	1.961.399.269	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			49.289.260.000		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			32.654.696.930		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			32.654.696.930		
156	2	13	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Presentase Keluhan yang di tindaklanjuti	84 Indeks 100 %	12.806.533.376		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	981.803.373		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	311.884.637	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	129.794.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	109.982.166	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	142.510.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	287.631.790	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	954.867.784		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	457.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	153.542.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	61.956.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	31.776.784	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	243.663.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.609.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	66.917.990		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.503.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	61.414.190	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	25 orang	1.367.951.197		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	204.775.777	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	598.985.260	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	13	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	173.075.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	391.114.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah	2.583.387.770		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	66.349.698	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.628.647	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	108.469.708	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	620.833.107	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	137.838.610	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.449.570.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	69.782.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	54.916.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	300.858.363		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6.631.390	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	293.726.973	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	3.208.366.700		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	994.506.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	427.417.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.786.443.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	20 Unit	3.342.380.199		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	131.241.999	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	415.772.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	553.967.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	114.885.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	2.126.514.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
157	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya	2,14 %	704.749.342		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Desanya	18 Desa	704.749.342		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	02	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	149.999.342	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	554.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
158	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase peningkatanstatus desa yang menjadi maju	2,97 %	6.662.525.436		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	6.662.525.436		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	6.073.591.480	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	85.084.660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	503.849.296	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
159	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal	35 %	5.982.997.693		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	5.982.997.693		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50.865.289	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	1.846.999.174	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	586.895.756	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	203.749.992	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	185 Orang	70.124.749	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	467.499.865	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	50 Orang	650.782.416	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	352.374.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	1.220.404.982	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	533.300.710	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
160	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	3,25 %	6.497.891.083		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	6.497.891.083		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.609.589.944	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	423.393.649	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	4 Lembaga	1.004.075.852	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Unit	480.599.302	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1.071.599.935	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	123.999.829	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1.416.633.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	147.999.865	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	35 Keluarga	144.999.607	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					PEMERINTAHAN DESA
	X					NON URUSAN			16.634.563.070		
	X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			16.634.563.070		
16 1	X	X	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	84 Indeks 100 %	16.634.563.070		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	X	X	0 1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	16.634.563.070		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	X	X	0 1	1.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	16.634.563.070	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
						Dinas Perhubungan			197.642.957.949		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			194.827.019.369		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			194.827.019.369		
16 2	2	15	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74 Indeks	32.026.607.559		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	92 %	975.040.852		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	458.846.984	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	104.713.445	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	0 1	1.0 1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	39.910.912	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	143.811.970	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	227.757.541	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94 %	26.665.933.599		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ Bulan	25.832.738.573	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	667.920.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	80.150.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 2	000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.730.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	77.538.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 2	000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4.856.526	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 1	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	73.528.900		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	47.053.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7.070.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	19.405.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %	73.402.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	73.402.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 %	463.157.450		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	183.348.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.999.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kepegawaian					
	2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	56.339.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	213.470.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	579.357.943		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	49.999.716	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	309.963.436	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	201.333.127	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	15.424.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2.637.664	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.997.023.815		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	991.999.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.005.024.315	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	92 %	199.163.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	84.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	111.843.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	2.600.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
163	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan	86,00 % 165 Kejadian 0,005 Angka	156.787.444.877		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	85 %	150.660.899.335		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	22060 Unit	150.660.899.335	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi	4 Dokumen	598.467.080		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	304.999.580	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	293.467.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	74 %	797.166.335		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	3 Laporan	283.807.275	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	424.359.620	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	15	0 2	1.0 7	001 5	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	88.999.440	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 2	1.0 8		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	17 Unit	1.911.205.650		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 2	1.0 8	000 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	76.206.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	17 Unit	1.834.999.650	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	1.999.399.637		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	1.908.480.085	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.09	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	90.919.552	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	120 Unit	521.307.960		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	120 Unit	215.483.670	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	15	0 2	1.1 3	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	305.824.290	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 2	1.1 4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	310 Unit	298.998.880		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 2	1.1 4	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	148.999.440	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	15	0 2	1.1 4	000 4	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	310 Unit	149.999.440	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
164	2	15	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP	0,98 Angka	4.866.287.846		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	0 3	1.0 3		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	105 Unit	330.699.252		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan					
	2	15	03	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	105 Unit	191.598.544	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	139.100.708	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	1 Dokumen	840.985.995		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Dokumen	840.985.995	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	65 Badan Usaha	251.906.738		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	118.800.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan	2 Laporan	133.106.738	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi	1 Unit	3.442.695.861		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	3.442.695.861	Kab. Kutai Barat, Tering, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
165	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	45 %	1.146.679.087		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	45 %	1.146.679.087		DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1.146.679.087	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	X					NON URUSAN			2.815.938.580		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.815.938.580		
166	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	74 Indeks 100 %	2.815.938.580		DINAS PERHUBUNGAN
	X	X	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	1.091.513.580		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	X	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.091.513.580	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	X	X	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	24.994.000		DINAS PERHUBUNGAN
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.994.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	X	X	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	92 %	1.699.431.000		DINAS PERHUBUNGAN
	X	X	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	214 Unit	1.699.431.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
						UPTD Terminal			48.546.011.051		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			47.438.733.051		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			47.438.733.051		
167	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	74 Indeks 100 %	5.533.057.031		UPTD TERMINAL
	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	63 %	1.833.865.594		UPTD TERMINAL
	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.840.082	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	766.855.840	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	78.463.672	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	962.706.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.750.538.437		UPTD TERMINAL
	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.999.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	233.991.850	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.507.546.588	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	40 %	948.653.000		UPTD TERMINAL
	2	15	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	83.703.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39 Unit	864.950.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
168	2	15	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	165 Kejadian 0,005 Angka 86,00 %	41.905.676.020		UPTD TERMINAL
	2	15	0	1.0		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal)	58 %	41.905.676.020		UPTD TERMINAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	0	1.0	000	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	37.773.814.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	0	1.0	000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	7 Unit	1.349.684.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	6 Orang	82.850.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	0	1.0	001	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	3 Unit	2.699.327.420	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	X					NON URUSAN			1.107.278.000		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.107.278.000		
169	X	X	X	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74 Indeks	1.107.278.000		UPTD TERMINAL
	X	X	X	0	1.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	60 %	1.107.278.000		UPTD TERMINAL
	X	X	X	0	1.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.107.278.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Dinas Komunikasi dan Informatika			132.360.738.000		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			132.360.738.000		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			126.525.408.497		
170	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	40.857.982.558		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen	815.401.300		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	289.080.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	107.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.120.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	232.060.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	177.260.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen	29.896.935.200		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	28.995.353.874	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.146.964	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	778.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	8.834.756	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	49.999.606	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	16	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	62.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 persen	50.893.680		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.964.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.964.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.964.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen	358.448.760		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	194.748.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.820.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	78.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	74.380.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	2.375.285.934		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.437.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	16	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.649.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	98.794.464	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.986.884.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	161.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 persen	4.765.347.897		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	39.877.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	378.214.775	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	4.347.088.222	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	167.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.203.966.988		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.736.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	515.995.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	186.310.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	489.925.488	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen	1.391.702.799		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	659.447.999	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	2	16	0 1	1.0 9	000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	28.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 1	1.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.650.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 1	1.0 9	001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	504.004.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17 1	2	16	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpaparinformasi program kebijakan pemerintah daerah	70 %	46.161.009.616		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	46.161.009.616		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1	001 4	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	756.096.075	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1	001 5	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	250 Konten	6.726.156.730	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1	001 6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	208.097.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1	001 7	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkaitperaturan bidang informasi dan komunikasi publik	88 Persentase	675.414.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1	001 8	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	88 Persentase	2.595.287.198	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1	001 9	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 Dokumen	200.799.522	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1	002 0	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	2.292.438.451	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1	002 1	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	30 Komunitas	563.740.730	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1	002 2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	15 Permohonan	5.233.401.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0 2	1.0 1	002 3	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	336.349.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	16	0	1.0	002	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	125 Media	26.573.228.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	2	16	0			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	82 %	39.506.416.323		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah ProvinsiKaltim	100 %	199.978.280		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	199.978.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E- government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah ProvinsiKaltim	85 %	39.306.438.043		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	001	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	644.922.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	001	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	326.435.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	001	Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBEPemerintah Daerah yang memuat6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	495.817.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	001	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	599.928.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	001	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	1.530.706.221	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	001	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	10 unit	399.999.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	001	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	10 kabupaten/kota	3.888.012.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	002	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 Aplikasi	141.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	16	0	1.0	002	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	1.299.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	002	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	235.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	002	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	392.968.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	002	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	355.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	002	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	296.672.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	002	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	37 Perangkat Daerah	3.796.661.466	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	002	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	1 Aplikasi	99.511.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	002	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	602.597.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	002	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	12.566.725.202	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	0	1.0	003	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	37 perangkat daerah	11.632.850.194	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			4.840.976.943		
173	2	20	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	85 %	4.840.976.943		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	0	1.0		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	85 persen	4.840.976.943		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	1.224.863.361	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	20	0	1.0	000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	70 Persentase	720.290.702	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	0	1.0	000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	1.319.564.392	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	0	1.0	001	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	800.459.872	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	0	1.0	001	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	775.798.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			994.352.560		
174	2	21	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	994.352.560		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	0	1.0		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	796.610.411		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	0	1.0	000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	116.049.788	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	0	1.0	000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	226.684.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	0	1.0	000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	383.644.623	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	0	1.0	000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	70.232.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	0	1.0		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	85 %	197.742.149		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	0	1.0	000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	197.742.149	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			46.681.024.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			46.681.024.000		
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			46.681.024.000		
175	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	34.557.908.261		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.004.459.380		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	473.793.180	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.367.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.367.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	504.731.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	17.277.002.312		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	16.626.182.202	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	386.160.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	259.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.682.100	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.978.010	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	1 Orang	30.200.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.300.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	27.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	461.854.555		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	305.180.615	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	33.163.940	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	18	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.210.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	113.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	3.439.133.257		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	27.359.391	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.196.974.308	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	53.245.858	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	11.635.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233 Laporan	1.687.588.628	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	181.702.092	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	280.627.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	87 Unit/ Tahun	3.595.640.854		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.123.776.924	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.034.402.528	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	437.461.402	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	2.418.643.380		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.807.930	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	597.592.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.443.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.777.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	6.330.974.523		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	271.970.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	244 Unit	144.794.203	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	45.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	688.032.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.181.178.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
176	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2.776.544.151		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensi Investasi	2.776.544.151		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	2 Dokumen	695.479.607	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	3 Dokumen	2.081.064.544	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
177	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	12 Minat	3.044.966.719		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	12 Kegiatan	3.044.966.719		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	1.720.244.459	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	1.324.722.260	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
178	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 % 100 %	3.343.635.718		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	7500 (Izin & Non Izin)	3.343.635.718		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	9 Dokumen	851.547.568	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	488.613.680	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	110 Pelaku Usaha	900.000.006	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha	1.103.474.464	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
179	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara	100 %	2.130.120.293		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1614 Laporan	2.130.120.293		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7.865 Kegiatan usaha	556.999.648	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 Kegiatan usaha	637.157.586	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	935.963.059	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
180	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %	827.848.858		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi	210 Data	827.848.858		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	827.848.858	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Pemuda dan Olah Raga			340.107.541.248		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			340.107.541.248		
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			340.107.541.248		
181	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	90.488.100.266		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen	1.071.955.400		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	438.460.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	75.351.400	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	56.340.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	19	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	334.212.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	167.592.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	30.165.254.514		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan	29.291.898.514	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	714.480.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	47.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	39.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	72.036.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	95 %	97.193.600		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	33.853.600	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.140.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	43.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 %	447.444.672		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	23.215.612	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	19	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	344.355.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	56.889.460	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	22.984.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasaranakantor yang berfungsi dengan baik	95 %	16.015.550.749		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.244.212	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.096.716.033	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.937.632	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	509.688.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	312.293.722	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	39.883.810	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	399.960.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	2.396.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	149.977.040	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	19	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD	95 %	62.236.287		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	62.236.287	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	20.696.463.600		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.030.613.600	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.665.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	21.932.001.444		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	112.270.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	571.942.744	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	841.156.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	156.952.600	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	618.301.200	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.513.428.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	117.950.400	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
182	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,31 % 27,32 %	41.786.938.467		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang	36.597.415.727		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1470 Orang	1.661.529.155	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	23.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	1.282.924.200	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	6 Dokumen	3.429.871.343	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	28 Persentase	3.239.770.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	543.837.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	02	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	5938 Orang	9.057.488.079	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5000 Orang	17.358.995.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi					
	2	19	0 2	1.0 2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	170 Organisasi	5.189.522.740		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0 2	1.0 2	000 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	6 Persentase	395.201.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0 2	1.0 2	000 4	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	120 Organisasi	4.794.321.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
183	2	19	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	135 Keping Medali	193.110.502.515		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0 3	1.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	2.548.292.077		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0 3	1.0 1	000 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	1.560.707.613	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0 3	1.0 1	000 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	987.584.464	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0 3	1.0 2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	600 Orang	5.349.421.497		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0 3	1.0 2	000 4	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	600 Orang	3.737.926.584	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	19	0	1.0	000	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	911.198.205	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5 Kegiatan	700.296.708	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	85.532.315.236		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	350 Orang	344.986.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	3.310.305.162	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	3.420.162.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1.132.717.549	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	77.324.143.525	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan	150 Orang 7000 Orang	99.680.473.705		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	99.367.382.215	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	313.091.490	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
184	2	19	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	8,66 %	14.722.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4500 Orang	14.722.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	40 Laporan	14.722.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
						UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga			77.035.620.752		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			77.035.620.752		
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			77.035.620.752		
185	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	77.035.620.752		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasaranakantor yang berfungsi denganbaik	95 %	2.682.412.980		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	263.150.213	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.026.289.900	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.955.975	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	81.599.092	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.220.417.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 %	41.025.232.422		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	19	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	246.428.422	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40.778.804.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasapenunjang tepat waktu	95 %	7.301.547.950		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.740.895.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	560.652.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	26.026.427.400		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	223.110.800	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	22.525.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	25.780.791.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			47.378.449.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			47.378.449.000		
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			43.550.159.956		
186	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	82 Indeks 96 %	33.423.500.900		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	282.773.830		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	109.382.730	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	92.871.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	80.520.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	26.813.146.524		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 Orang/ Bulan	26.177.666.524	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	435.480.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	23	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.058.645	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	49.927.175	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	100.014.180	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	85 %	45.380.058		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	45.380.058	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	208.800.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	135.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	73.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Air Hitam Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.110.504.057		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49.970.355	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.507.850.305	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	13.511.562	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	43.918.348	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	51.731.387	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	443.522.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Unit	402.503.731		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	402.503.731	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.057.560.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.780.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	987.860.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.059.920.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	502.832.700		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	284.292.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	124.430.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	94.110.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
187	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	40 indeks 47 nilai	10.126.659.056		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	23	0	1.0		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	70 Perpustakaan 240000 Orang 3100 Eksemplar	4.308.670.976		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0	1.0	000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30 Perpustakaan	1.644.351.806	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0	1.0	000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	300 Eksemplar	232.799.870	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	80 Orang	450.399.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0	1.0	000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	333.985.330	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0	1.0	000	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	99.999.393	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0	1.0	000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2900 Eksemplar	787.962.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0	1.0	001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	434.773.293	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0	1.0	001	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	118.999.704	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	23	0 2	1.0 1	001 7	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	21 Perpustakaan	205.399.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0 2	1.0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	18 Kegiatan	5.817.988.080		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0 2	1.0 2	000 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Lokus	279.399.859	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0 2	1.0 2	000 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	11 Perpustakaan	474.799.736	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0 2	1.0 2	000 3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	25 Orang	356.399.992	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0 2	1.0 2	000 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	6 Perpustakaan	4.508.188.968	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	0 2	1.0 2	000 6	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	199.199.525	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			3.828.289.044		
188	2	24	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik	7 OPD	2.617.097.787		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0 2	1.0 1		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	80 %	1.107.849.328		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	24	0	1.0	000	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2500 Arsip	130.069.512	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1500 Arsip	59.982.305	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	38 Instansi	531.600.008	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	001	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	15 Lembaga	386.197.503	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	96,5 %	337.595.201		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	150 Arsip	41.599.318	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	300 Arsip	295.995.883	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	6 %	1.171.653.258		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1150 Pengguna	472.766.893	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	24	0	1.0	000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	698.886.365	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
189	2	24	0			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	77,00 %	1.211.191.257		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5200 Berkas	339.953.013		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1750 Berkas	155.588.885	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2500 Arsip	184.364.128	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	6 Kegiatan	73.192.622		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	750Arsip	29.975.287	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	750Arsip	43.217.335	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	277.560.423		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	24	0	1.0	000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	125.389.533	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	94.799.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	3 Arsip	57.371.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	1300 Arsip	239.400.207		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	200 Arsip	147.960.136	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	850 Arsip	91.440.071	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	281.084.992		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	8 Arsip	72.112.686	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	135.997.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	0	1.0	000	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	72.975.286	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAN KEARSIPAN DAERAH
						Dinas Kelautan Dan Perikanan			95.455.766.075		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			95.455.766.075		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN			95.455.766.075		
190	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks	58.227.477.997		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.632.112.186		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	559.703.423	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	189.906.540	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	148.071.372	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	0 1	1.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	492.535.340	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0 1	1.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	241.895.511	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0 1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	48.279.683.166		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0 1	1.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	282 Orang/ Bulan	46.615.419.621	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	726.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	275.027.474	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	273.149.675	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	194.523.708	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	40.203.510	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	54.399.568	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	99.999.610	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	215.922.414		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.964.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	89.976.414	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	74.982.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	0	1	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	518.438.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	5	0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	61.782.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	5	0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	66.656.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	5	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	390.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.295.507.231		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	6	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.490.585	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	6	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	6	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.977.976	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	6	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	102.878.670	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	6	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	28.240.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	6	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.996.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	481.048.794		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	7	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1	7	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	286.597.205	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	44.451.589	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.407.653.840		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.386.533.840	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.397.112.366		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	726.647.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	169.313.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	37 Unit	34.351.766	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.466.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
191	3	25	0			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	75.45 %	4.846.263.014		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	2.550.406.488		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	327819.31 Ha	1.143.690.584	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	0 2	1.0 1	000 3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	6 Ha	689.599.562	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0 2	1.0 1	000 4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	60 Orang	91.399.552	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	120 Pelaku Usaha	392.532.660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen	162.987.338	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	70.196.792	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	0 2	1.0 2		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	8 Rekomendasi	949.911.270		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0 2	1.0 2	000 4	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	80.554.941	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0 2	1.0 2	000 6	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	344.519.497	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	524.836.832	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	1.345.945.256		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	90 Orang	385.500.066	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	0 2	1.0 3	000 2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	138.008.854	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0 2	1.0 3	000 3	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	407.594.473	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0 2	1.0 3	000 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	414.841.863	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara,	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
192	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	195000 Ton	15.911.198.591		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	8.090.526.046		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	122.332.896	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	282 Unit	7.968.193.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	0 3	1.0 2		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	2.884.919.650		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0 3	1.0 2	000 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	89.513.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	20 Unit	2.795.406.650	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	185 Rekomendasi	426.388.996		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	185 Dokumen	426.388.996	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	820 Dokumen	1.301.256.010		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	03	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	820 Dokumen	1.301.256.010	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan	2.713.930.890		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	2.038.654.962	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	675.275.928	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	15 Rekomendasi	425.246.677		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.09	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	125 Rekomendasi	425.246.677	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen	68.930.322		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
	3	25	03	1.10	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	15 Rekomendasi	68.930.322	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
193	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	201000 Ton	11.556.651.781		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	4 Rekomendasi	217.486.726		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	4 Rekomendasi	217.486.726	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	4.049.025.172		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	317.219.128	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	462.281.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	0	1.0	000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	2.247.849.689	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	80 Orang	466.279.073	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	001	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90 Dokumen	555.396.282	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	7.290.139.883		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	6.659.672.463	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	630.467.420	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
194	3	25	0			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	3.573.371.880		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	0	1.0		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2.589.368.807		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	4 Perkara	844.280.891	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	001	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	13 Pelaku Usaha	280.884.978	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	001	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikansampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 milyang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	153 Pelaku Usaha	979.790.388	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	001	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	244.802.913	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	001	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	20 Kelompok Masyarakat	239.609.637	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	984.003.073		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	65 Pelaku Usaha	406.856.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksakepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	259.575.879	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	0	1.0	000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksakepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	27 Pelaku Usaha	317.570.614	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
195	3	25	0			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	11 Produk	1.340.802.812		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	145.428.376		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	145.428.376	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 UMKM	1.158.323.656		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	6 Kegiatan	1.158.323.656	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	37.050.780		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	1 Unit Usaha	37.050.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan			1.390.418.555		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.390.418.555		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.390.418.555		
196	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks	950.695.347		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	69.480.000		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	137.410.000		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	137.410.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	437.266.523		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.176.202	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.013.870	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.287.249	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.638.002	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	369.212.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	73.038.724		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	73.038.724	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	138.718.800		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	834.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137.884.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	94.781.300		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	34.930.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	59.851.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
197	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	80 %	439.723.208		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	80 %	439.723.208		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	439.723.208	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
						UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar			4.368.533.907		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.368.533.907		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN			4.368.533.907		
198	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks	2.039.412.475		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	89.160.000		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	89.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	89.500.000		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	89.500.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.085.689.525		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.140.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	498.599.701	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.999.194	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.733.470	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.878.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	554.338.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	474.558.000		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.224.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	472.334.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	300.504.950		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	63.210.250	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	137.294.700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
199	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor 1100000000	2.329.121.432		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor 1100000000	2.329.121.432		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17 Unit	2.103.387.752	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	225.733.680	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
						UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu			6.838.157.463		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.838.157.463		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN			6.838.157.463		
200	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 91.4 Indeks	3.264.029.085		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100.630.000		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100.630.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	229.200.000		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	229.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	745.932.214		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.744.336	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.793.563	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.718.715	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.999.600	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	577.676.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	224.886.871		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	37.417.717	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	187.469.154	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	186.375.600		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	945.200	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	185.430.400	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1.777.004.400		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	132.077.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	97.505.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.547.421.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
201	3	25	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/lkan Air Laut/Payau/Tawar	4393750 Ekor	3.574.128.378		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar	4393750 Ekor	3.574.128.378		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1.276.837.449	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	2.297.290.929	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
						Dinas Pariwisata			48.478.525.000		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			48.478.525.000		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			48.478.525.000		
202	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 81 Indeks	25.343.542.380		DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	90 %	1.498.200.000		DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	200.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	298.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	82 %	14.333.287.048		DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	13.861.087.048	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	26	0 1	1.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	472.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 %	4.487.944		DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 5	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	4.487.944	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	12 Bulan	5.898.310.488		DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	50.029.411	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4.047.308.244	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	90.021.833	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	1.700.630.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.197.558.900		DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	735.878.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	513.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.947.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0 1	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	80 %	411.698.000		DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	26	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	411.698.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
203	3	26	0			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	63,33 %	5.470.407.569		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	66,67 %	1.806.321.190		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	344.996.190	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	2 Dokumen	1.461.325.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola	100 %	923.353.134		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	923.353.134	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	2.190.733.245		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	807.488.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	001	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	120 Orang	1.109.505.748	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	001	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	273.739.497	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Diterbitkan	100 %	550.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	10 Usaha	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	26	0	1.0	000	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	175.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	001	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	175.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
204	3	26	0			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara	2,70 Hari 1,65 Hari	4.949.848.966		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	4.949.848.966		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen	3.136.618.356	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6 Dokumen	822.143.430	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	991.087.180	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
205	3	26	0			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	88 %	5.964.912.031		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik	88 %	3.734.227.431		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Laporan	249.984.728	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	254.769.213	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	26	0	1.0	000	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	3 Dokumen	3.229.473.490	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	80 %	2.230.684.600		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	99.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	001	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	838.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	001	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	99.999.620	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	001	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Produk	223.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	001	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	969.064.980	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
206	3	26	0		5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekras yang Tersertifikasi	66 %	6.749.814.054		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	64 %	5.555.614.054		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	590 Orang	2.718.376.918	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	001	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	1.232.528.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	001	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	754.806.456	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	001	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	349.902.680	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang Berkembang Kapasitasnya	66 %	1.194.200.000		DINAS PARIWISATA
	3	26	0	1.0	000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	60 Orang	1.194.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Dinas Perkebunan			68.462.842.375		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			68.462.842.375		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			68.462.842.375		
207	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)	84,88 Indeks 100 %	37.325.683.917		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	2.220.857.726		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	861.732.144	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	96.277.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.207.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	703.634.256	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	553.006.146	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	27.339.906.414		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	26.600.937.884	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	547.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	128.325.552	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	11.499.514	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	28.370.612	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	22.852.852	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	173.195.602		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	17.857.156	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	145.200.579	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.137.867	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan	100 %	9.060.580		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	9.060.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59,52 %	750.608.623		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	228.925.295	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	38.748.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	24.735.328	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	458.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	2.649.012.373		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.009.830	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	771.144.891	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	432.462.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	84.525.652	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	11.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.294.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	7 Jenis	1.395.458.331		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	1.395.458.331	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	2.154.303.538		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.540.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	708.411.948	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	143.471.590	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.265.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	633.280.730		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	368.152.730	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	176.418.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	88.710.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
208	3	27	0	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,41 %	20.336.416.914		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	10 Jenis	20.336.416.914		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	20.246.416.914	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	57.886.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan	32.113.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
209	3	27	0	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun	49000 Ha	732.112.900		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata	2 Jenis	732.112.900		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	449.035.260	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	193.033.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	002	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	90.044.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
210	3	27	0	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	5.107.708.743		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	225 Pelaku Usaha	5.107.708.743		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	124000 Ha	3.104.031.670	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	725 Ha	2.003.677.073	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
21	3	27	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	55,45 %	1.256.502.962		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	75 Pelaku Usaha	1.256.502.962		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	1.256.502.962	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
21	3	27	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	52,99 % 23,03 %	3.704.416.939		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN yang dilaksanakan	2 Kegiatan	589.005.471		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	42 Orang	589.005.471	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	1.786.587.652		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	952.522.332	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	21 Kelompok	834.065.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga	1.328.823.816		DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	624.720.888	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	0	1.0	000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	704.102.928	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
						UPTD Pengawasan Benih Pekebunan			2.886.301.654		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.886.301.654		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2.886.301.654		
21	3	27	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	86,20 Indeks 100 %	1.625.496.035		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100 %	84.960.000		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100 %	2.565.220		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.565.220	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	62 %	174.000.000		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	174.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit	433.976.359		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.027.485	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	149.462.323	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.712.731	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.713.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.756.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Perundang-Undangan					
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	189.304.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	2 Jenis	22.705.756		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	22.705.756	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	4 Jenis	792.972.700		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.830.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	145.422.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	642.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50 %	114.316.000		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	24.406.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	39.910.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
214	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih	1.260.805.619		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	1.260.805.619		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	200 Sertifikat	756.973.942	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhistandar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	503.831.677	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
						UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan			3.004.893.623		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.004.893.623		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.004.893.623		
215	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	83.75 Indeks 100 %	1.801.663.432		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100 %	84.960.000		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium	100 %	1.000.000		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	53 %	96.000.000		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	96.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit	487.333.764		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.080.076	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	154.292.950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.478.270	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	21.500.068	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.878.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	262.104.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	3 Jenis	99.145.668		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	39.025.668	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	4 Jenis	804.490.000		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	227.130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	572.160.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	70 %	228.734.000		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.350.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	174.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	29.984.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
216	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	60 %	1.203.230.191		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	28 Pelaku Usaha	1.203.230.191		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1120 Ha	1.203.230.191	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
						UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan			9.141.101.348		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.141.101.348		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			9.141.101.348		
217	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100 % 82.75 Indeks	4.641.101.994		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100 %	84.960.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100 %	49.927.263		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	49.927.263	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	50 %	120.000.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	120.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit	565.833.151		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.987.738	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	274.792.445	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.880.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	33.825.768	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	211.408.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	6 Jenis	2.427.038.400		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Urusan Pemerintah Daerah					
	3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	2.277.038.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	4 Jenis	886.258.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.630.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	209.508.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	672.120.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	65 %	507.085.180		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	45.684.700	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	163.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	297.600.480	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
218	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	96,50 %	4.499.999.354		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	50000 Benih	4.499.999.354		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhstandar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 laporan	4.499.999.354	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			117.333.677.686		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			117.333.677.686		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			117.333.677.686		
219	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 95,17 %	42.397.366.433		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	92 %	1.781.554.677		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	548.090.512	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.638.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	12.083.264	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	101.397.391	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	1.089.344.710	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	32.982.245.841		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan	31.965.778.615	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	720.783.625	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7.709.856	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	11.964.952	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	252.742.919	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	23.265.874	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	143.599.900		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.477.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	80.405.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	52.717.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	668.142.443		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	268.939.656	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	136.100.723	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	247.422.064	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	1.238.499.345		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.134.806	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	217.162.113	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	130.350.426	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 Dokumen	33.252.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	826.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %	1.894.439.236		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	1.894.439.236	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	1.690.132.036		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	16.668.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.259.180	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.238.204.856	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	1.998.752.955		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	319.453.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 Unit	125.061.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	23.024.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.531.214.005	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
220	3	27	0	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	88 Skor 97,29 Skor	43.766.051.962		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	660 KK 920 Rupiah 410000 Ton 47,62 % 27 %	2.995.563.353		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	1.838.561.446	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen	1.157.001.907	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	0 2	1.0 4		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate	225 Ekor 119 Unit Usaha 1,85 % 13 % 61,5 %	3.243.163.352		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0 2	1.0 4	000 1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.881.588.247	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	0 2	1.0 4	000 4	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	1.361.575.105	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0 2	1.0 5		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT	31 Unit 1225 Ha	4.711.894.924		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0 2	1.0 5	000 4	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	2.751.279.055	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	1.960.615.869	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	47 %	743.219.568		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	743.219.568	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	4700 Indukan/Bibit	32.072.210.765		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	3773 Ekor	32.072.210.765	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara,	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
221	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,72 Skor	15.727.562.222		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Akses pembiayaan Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	120 Milyar Rupiah 147 Ha	15.727.562.222		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	15.727.562.222	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
22 2	3	27	0 4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	92,41 Skor 95,81 Skor	11.928.802.539		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0 4	1.0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	68 Kecamatan 45,8 % 22,5 % 80 %	6.410.364.433		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	0 4	1.0 1	000 3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	2.176.928.353	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	04	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	35 Wilayah	586.051.428	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	3.230.451.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	04	1.01	0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	416.932.732	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi danteknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	80 % 2,85 %	1.812.464.494		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.02	0004	PengawasandanPemeriksaanKesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	12 Laporan	1.472.267.649	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	04	1.02	0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	340.196.845	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	30,5 Gram/Hari 36 Unit 86 % 23,5 % 1,41 %	3.439.895.012		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	13 Unit	728.732.704	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	418.226.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	04	1.03	0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	9 Unit Usaha	314.665.683	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.03	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	896.019.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	04	1.03	0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit Usaha	798.833.532	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.03	0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	283.417.693	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	60 %	266.078.600		DINAS PETERNAKAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	60 Dokumen	266.078.600	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
223	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,59 Skor	259.872.040		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	126 Unit Usaha 65,80 %	259.872.040		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	790 Dokumen	123.303.460	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	136.568.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
224	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	99,73 Skor	3.254.022.490		DINAS PETERNAKAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KESEHATAN HEWAN
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas jumlah peternak millennial Rasio SD komoditas/ produk peternakan	49310 RTUP 100 Orang 1,146 rasio	614.175.878		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	280.980.382	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	15 Kelompok	333.195.496	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	13 Unit	2.639.846.612		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	22 Unit	1.956.093.952	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	13 Unit	683.752.660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak			11.567.368.092		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.567.368.092		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			11.567.368.092		
225	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	95,17 Skor 100 %	8.663.528.153		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	147.070.380		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	145.200.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.870.380	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	50.879.625		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.870.380	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	43.248.865	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.760.380	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	112.972.300		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	49.300.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	63.672.300	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	383.431.644		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	20.338.395	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.660.679	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	24.232.570	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	313.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %	162.038.546		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	162.038.546	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	958.989.200		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	14.780.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.132.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	790.076.400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	6.848.146.458		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	141.945.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	168.735.200	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	6.537.465.758	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
226	3	27	0	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	98,73 Skor	2.903.839.939		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Angaka Mortalitas atau Kematian Ternak/Hewan angka kelahiran Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	2,05 % 26,10 % 16,66 Bulan 120000000 Rupiah 194 ST 15000 Stek/pols 1800 Ton 20 Ton 0,05 %	2.903.839.939		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0	000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	1.420.271.920	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	0	1.0	000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	1.483.568.019	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
						UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			5.666.112.222		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.666.112.222		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			5.666.112.222		
227	3	27	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	95,17 Skor 100 %	3.595.239.736		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	91 Skor	124.791.000		UPTD LABORATORIUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.920.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.871.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	31.954.300		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.301.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	15.531.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	11.122.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	109.737.000		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	37.737.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	72.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	299.090.881		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.344.647	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	36.754.568	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	33.171.666	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	214.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %	1.993.167.358		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	1.993.167.358	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	704.867.700		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	17.356.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	196.454.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	491.057.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	331.631.497		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	101.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	160.631.497	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	46.900.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.980.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
228	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	99,18 Skor	2.070.872.486		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah PAD Jumlah Ruang lingkup pengujian Nilai Kepuasan pelanggan	212000000 Rupiah 45 Absolut 86 Skor	2.070.872.486		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500 Dokumen	2.070.872.486	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
						Dinas Kehutanan			285.283.995.961		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			285.283.995.961		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			285.283.995.961		
229	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	191.636.278.204		DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	2.684.333.108		DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	783.653.644	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	174.904.762	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	90.138.682	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	622.570.304	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.013.065.716	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PresentasePenatausahaanKeuangan	100 %	160.327.874.683		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	771 Orang/ Bulan	158.550.358.655	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	934.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	134.534.282	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	83.628.382	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	267.928.474	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	357.344.890	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0 1	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	770.535.752		DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 1	1.0 3	000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	44.440.443	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 1	1.0 3	000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	179.500.000	Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 1	1.0 3	000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	252.354.550	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 1	1.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	294.240.759	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 1	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	1.314.642.960		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	499.266.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	83.000.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	191.115.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	541.260.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	4.926.976.873		DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.346.370	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.859.958.917	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	44.923.426	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.635.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.474.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	282.796.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	217.555.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.496.251.885		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Urusan Pemerintah Daerah					
	3	28	01	107	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.504.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	107	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	495 Unit	1.991.451.885	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.561.531.500		DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	108	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.780.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	842.911.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	108	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	405.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.310.840.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	14.554.131.443		DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	109	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	59.920.804	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	109	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	964.874.019	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	161 Unit	111.764.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	109	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	195.604.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	13.221.968.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
230	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase luas kerusakan kawasan hutan Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0.71 %	46.864.755.134		DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	812.139.319		DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	812.139.319	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	7.305.016.642		DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	1.213.353.347	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	1.004.315.406	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0 3	1.0 3	001 0	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	1.424.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 3	1.0 3	001 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	26 Dokumen	3.662.747.889	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 3	1.0 4		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Ha	13.241.213.540		DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 3	1.0 4	000 1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen	458.362.550	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 3	1.0 4	000 4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	524 Ha	10.832.561.274	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 3	1.0 4	000 8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	1.950.289.716	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 3	1.0 5		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Ha	21.285.002.220		DINAS KEHUTANAN
	3	28	0 3	1.0 5	000 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	9.129.446.634	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	10.548.617.988	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7929179 Ha	1.195.373.408	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	2 Operasi	411.564.190	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif	16499 M3	1.469.519.299		DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanjutrnya berupa pengenaan Sanksi Admnsitratif	29 Unit Managemen	341.004.198	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	48 Unit Managemen	1.128.515.101	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	105 SK; Sertifika	2.751.864.114		DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	12 Sertifikat	373.119.800	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	25 Laporan	518.893.074	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	95626 Batang	1.491.836.012	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	35 Unit Usaha	368.015.228	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
231	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	730007.98 Ha	2.591.130.890		DINAS KEHUTANAN
	3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	665142 Ha	2.591.130.890		DINAS KEHUTANAN
	3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	570 Orang	1.417.280.890	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	665193 Ha	1.173.850.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
232	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok	40.402.556.733		DINAS KEHUTANAN
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 Kelompok	40.402.556.733		DINAS KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	2.464.900.150	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	1.519.272.295	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	7.871.350.303	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	350 Orang	25.890.505.683	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Hektar	2.656.528.302	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
233	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196336 Ha	3.789.275.000		DINAS KEHUTANAN
	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.789.275.000		DINAS KEHUTANAN
	3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.428.275.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	650.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasidan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	8 Dokumen	1.411.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto			14.445.070.307		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			14.445.070.307		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			14.445.070.307		
234	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	3.599.712.706		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	140.640.000		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	140.640.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	313.602.000		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	118.602.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	195.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	192.848.258		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.572.146	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.539.635	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.839.023	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	37.119.054	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	72.900.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.319.565.718		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	91 Unit	1.288.790.493	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.775.225	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	769.742.600		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	245.650.600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	524.092.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	863.314.130		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	336.401.930	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	27.240.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	499.672.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
235	3	28	0			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	186.868.048		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	186.868.048		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	186.868.048	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
236	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	LuasKawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Hektar	9.738.727.302		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64.814,98 Hektar	9.473.372.240		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	136.432.537	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	04	1.01	0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha	7.552.321.949	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	64.814,98 Ha	1.784.617.754	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yangdikelola	1 Hektar	265.355.062		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	60 Orang	142.600.418	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0	000	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	25 Ha	122.754.644	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
23	3	28	0	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelolamasyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 20 Kelompok	919.762.251		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	919.762.251		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	691.066.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	0	1.0	000	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10 Hektar	228.695.551	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat			15.584.233.699		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			15.584.233.699		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			15.584.233.699		
23	3	28	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	2.145.739.358		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	143.280.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	134.015.327		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	81.865.327	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	52.150.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	605.875.691		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.808.600	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	83.565.749	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	514.501.342	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	88.728.336		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	88.728.336	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	757.748.324		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.164.724	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.218.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	601.365.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	416.091.680		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	149.238.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	46.950.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.903.680	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
239	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0,71 %	12.129.291.062		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	6.389.253.387		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	6 Unit	6.389.253.387	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Segah, Bukit Makmur Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Berau, Tanjung Redeb, Karang Ambun Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	320.129.365		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	320.129.365	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	305.980.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	305.980.000	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	202 Ha	4.107.854.826		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	202 Ha	4.038.714.189	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	69.140.637	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	1.006.073.484		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	321.404.346	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	341.221.728	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	247.584 Ha	343.447.410	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
240	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok	1.309.203.279		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.309.203.279		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	380.290.935	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	0	1.0	000	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	532.652.162	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	146.318.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	0	1.0	000	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	249.941.782	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan			11.943.807.850		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.943.807.850		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11.943.807.850		
24	3	28	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	3.548.610.610		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	199.176.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						ASN					HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	50.376.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	50.376.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	50.376.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	302.464.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	168.144.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	134.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	778.412.767		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.008.533	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	65.606.853	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	39.522.718	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	40.515.563	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	618.819.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	872.464.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.180.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	174.393.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	686.890.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.345.717.443		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	709.844.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	57.986.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	577.886.143	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
242	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0,71 %	6.551.455.722		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.160.248.248		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	1.160.248.248	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Jelmu Sibak Kab. Paser, Long Kali, Long Kali Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	183.593.990		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	183.593.990	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	233.018.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	233.018.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.438.357.151		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	111 Ha	3.438.357.151	Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	1.536.238.333		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	132.889.848	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.129.181.118	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	335746 Ha	274.167.367	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
243	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Kelompok 20.000 Ha	1.843.741.518		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.843.741.518		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	608.327.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	12.998.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.067.782.793	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	25 Hektar	154.632.829	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus			13.133.411.786		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			12.814.024.716		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			12.814.024.716		
244	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	1.947.445.478		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	148.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	34.659.100		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	34.659.100	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	432.499.464		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.202.020	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	218.710.770	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.396.674	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	198.190.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	918.706.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	108	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.170.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.016.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	753.520.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	412.780.914		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	109	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	307.330.914	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	30.450.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	109	0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
245	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0,71 %	9.618.099.991		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.487.255.332		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	7 Unit	1.487.255.332	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	807.512.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	599.983.800	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	207.528.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	6.220.245.058		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	244.558.504	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	260 Ha	5.975.686.554	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	853.087.601		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	132.640.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	652.225.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0 3	1.0 5	000 7	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	24449 Ha	68.221.701	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
24 6	3	28	0 5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok	1.248.479.247		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	0 5	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	1.248.479.247		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	0 5	1.0 1	000 2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	1.103.391.247	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	0 5	1.0 1	000 6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	72.904.724	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	0 5	1.0 1	000 8	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	72.183.276	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	HUTAN PRODUKSI MERATUS
	X					NON URUSAN			319.387.070		
	X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			319.387.070		
24 7	X	X	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	319.387.070		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	X	X	0 1	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	319.387.070		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	X	X	0 1	1.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	319.387.070	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo			13.631.496.032		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			13.631.496.032		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			13.631.496.032		
24 8	3	28	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas LayananKesekretariatan Persentase keluhan pengguna layananyang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	3.301.694.350		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	0 1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	144.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	0 1	1.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	144.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						ASN					HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	154.844.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	46.944.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	32.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	22.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	53.600.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	673.957.325		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.429.964	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	73.657.670	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	107.799.128	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	48.490.563	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	379.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	506.572.115		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	129.121.422	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	377.450.693	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	698.769.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	303.403.200	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	395.366.400	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.123.551.310		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34Unit	451.274.290	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanah Grogot Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.450.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	641.827.020	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
249	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	7.999.240.652		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan KPH yang disusun	1 Dokumen	200.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	10 Unit	200.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	249.213.502		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	249.213.502	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	375.225.900		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	300.225.900	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	6.122.801.250		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	70.000.000	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	6.052.801.250	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Hektar	1.052.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	400.400.000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12Laporan	551.600.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	137.495 Ha	100.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
250	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelolamasyarakat Jumlah kelompokusaha masyarakatyang ditingkatkankapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok	2.330.561.030		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	2.330.561.030		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	191.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	1.848.561.030	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	9 Orang	100.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	191.000.000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan			14.036.060.488		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			14.018.417.190		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			14.018.417.190		
251	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 % 100 %	2.889.754.071		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	154.200.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	154.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	125.668.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	47.268.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	78.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	367.610.571		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.059.920	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	179.673.280	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.277.371	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	911.834.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	911.834.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	940.556.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.816.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809.740.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Bai	100 %	389.885.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	315.165.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	74.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
252	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %	9.214.672.556		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	326.128.371		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	27 Unit	326.128.371	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	187.782.819		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	187.782.819	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407Ha	43.480.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	43.480.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	60 Ha	6.893.456.944		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	690 Ha	6.893.456.944	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179Ha	1.763.824.422		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	359.608.532	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.254.781.480	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	264805 Ha	149.434.410	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
253	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok	1.913.990.563		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	1.913.990.563		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	83.599.250	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	1.702.597.313	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	127.794.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	X					NON URUSAN			17.643.298		
	X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			17.643.298		
254	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 % 100 %	17.643.298		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	X	X	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	17.643.298		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	X	X	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.643.298	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan			10.486.358.730		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.486.358.730		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10.486.358.730		
255	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	3.217.415.424		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	141.240.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	22.595.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22.595.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	424.568.264		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	51.140.304	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	233.227.960	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	544.250.060		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	544.250.060	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.634.418.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216.978.600	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.417.440.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	450.343.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	367.147.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	83.196.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
256	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0,71 %	5.122.698.299		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	346.391.326		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	3 Unit	225.391.326	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	5 Unit	121.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	244.882.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	244.882.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	561.512.794		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	460.064.824	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	101.447.970	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	2.921.068.144		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	111.243.720	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	58 Ha	2.809.824.424	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	1.048.844.035		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	295.053.176	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	753.790.859	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
257	3	28	0	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Kelompok 20.000 Ha	2.146.245.007		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	2.146.245.007		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	414.707.864	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0	000	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	1.292.084.243	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	295.227.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	0	1.0	000	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	144.225.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon			10.234.333.600		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.234.333.600		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10.234.333.600		
258	3	28	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %	4.289.201.770		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	177.200.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	139.200.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	38.000.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	123.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	123.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 %	608.972.800		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	117.916.329	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.850.471	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	457.206.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	2.082.349.416		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	114.500.216	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.967.849.200	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	757.976.800		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215.980.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	541.996.800	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	539.702.754		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	459.552.754	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	80.150.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
259	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0.71 %	5.209.900.449		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	712.284.022		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	5 Unit	712.284.022	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Karangany, Batu Lepoq Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	158.924.975		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	158.924.975	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	127.465.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	127.465.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				Kab. Kutai Timur, Karangas, Batu Lepoq Kab. Kutai Timur, Karangas, Karangas Dalam Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	219 Ha	3.340.978.120		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	58.320.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	219 Ha	3.282.658.120	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	870.248.332		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	69.120.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	550.281.847	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangany, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	671.068 Ha	250.846.485	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangany, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
260	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok	735.231.381		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	735.231.381		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	222.331.815	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Rantau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangany, Semua Kel/Desa	
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	52.640.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	278.590.458	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangany, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	181.669.108	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangany, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau			19.457.872.613		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			18.648.956.863		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			18.648.956.863		
261	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas LayananKeseekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	3.579.091.610		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	180.009.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.828.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	18.021.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	52.718.314		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	34.463.314	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	18.255.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	101.375.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	105	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	38.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	105	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	36.675.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	105	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	26.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	286.985.060		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	106	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.135.385	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	71.013.730	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	12.579.174	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.271.771	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	186.985.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	1.441.708.101		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	144.487.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	1.297.221.081	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.371.994.216		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	195.702.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.176.292.216	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	144.301.919		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	11.451.919	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	57.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
262	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Persentase LuasLahan yangdirehabilitasi terhadapluas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0.71 %	14.366.627.480		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah DokumenRencana Tata Hutanyang disusun	1 Dokumen	3.312.365.291		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	119.773.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	99.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaanSarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	3.093.471.491	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada	Jumlah Dokumen Rencana PengelolaanKesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	137.202.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	137.202.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	686.786.796		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	162.310.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	135.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	9 Dokumen	388.636.696	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutannegara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	9.406.941.329		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	112.626.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	224 Ha	9.157.035.089	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	137.280.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	823.331.664		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	185.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	390.229.060	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111283 Ha	247.152.604	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
263	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Kelompok 20000 Ha	703.237.773		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	703.237.773		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	454.199.403	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	68.380.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	8 Orang	110.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	70.058.370	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	X					NON URUSAN			808.915.750		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			808.915.750		
264	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %	808.915.750		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	X	X	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	808.915.750		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	X	X	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	808.915.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara			10.133.223.202		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.133.223.202		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10.133.223.202		
265	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	2.107.170.609		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	231.654.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.160.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.494.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	47.462.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	47.462.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	150.767.365		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	10.967.365	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	139.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	473.938.399		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.759.083	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	106.985.882	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.102.934	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.997.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	237.093.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	212.370.445		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	84.843.958	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	127.526.487	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	576.488.300		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.030.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.348.300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	370.110.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	414.490.100		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	327.590.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	47.900.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
266	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	7.010.557.918		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.379.931.975		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	0	1.0	000	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	3 Unit	1.379.931.975	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	98.612.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	98.612.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 M3	150.746.900		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	101.106.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	0	1.0	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	49.640.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	185 Ha	4.021.098.889		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	45.248.246	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	185 Ha	3.975.850.643	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	1.360.168.154		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	149.989.794	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	768.477.670	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	44126 Ha	441.700.690	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
267	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Kelompok 20000 Ha	1.015.494.675		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	1.015.494.675		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	348.024.759	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	43.920.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	374.999.148	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Hektar	248.550.768	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah			11.235.111.644		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.235.111.644		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11.235.111.644		
268	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	2.636.294.694		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	198.920.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129.480.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.440.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 % 100 %	44.240.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	44.240.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	156.900.698		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	105	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	65.140.698	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	105	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	91.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	218.609.856		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	57.737.856	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	106	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.872.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	411.376.718		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	107	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	154.545.960	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	107	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	256.830.758	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	813.277.320		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.219.120	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.681.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	692.377.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	792.970.102		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	257.062.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	535.908.102	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
269	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	7.386.562.631		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.289.534.415		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	1.289.534.415	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	337.312.573		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	337.312.573	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	243.709.715		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	139.807.127	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	103.902.588	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	70 Ha	3.856.291.120		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	3.856.291.120	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	1.659.714.808		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	611.108.988	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	925.987.092	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	0	1.0	000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	84151,7 Ha	122.618.728	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
270	3	28	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 Kelompok	1.212.254.319		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.212.254.319		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	612.692.639	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	0	1.0	000	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	471.491.680	Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Sambaliung, Pilanjau Kab. Berau, Sambaliung, Pesayan Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	0	1.0	000	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	128.070.000	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai			11.750.969.674		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.750.969.674		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11.750.969.674		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
271	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	2.512.060.191		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	124.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	57.888.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	29.088.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	28.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	330.276.235		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	18.594.467	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.951.768	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	261.730.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.040.695.798		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	58.335.960	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	172.904.838	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	809.455.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	714.448.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.950.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	123.425.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	22.740.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	561.333.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	243.951.658		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	194.955.658	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.996.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
272	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0,71 %	6.806.609.312		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1.343.866.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	2 Unit	1.343.866.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	247.186.320		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	247.186.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	198.700.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	144.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	0	1.0	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	54.100.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	156 Ha	3.597.495.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	76.950.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	156 Ha	3.520.545.600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	1.419.361.192		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	735.710.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	598.700.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	0	1.0	000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20000 Ha	84.950.392	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
273	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok	2.432.300.171		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	2.432.300.171		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	101.280.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	81.779.943	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	2.249.240.228	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar			10.364.826.136		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.364.826.136		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10.364.826.136		
274	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %	2.106.153.928		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	139.200.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	80.076.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	41.076.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	39.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	497.034.314		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.956.471	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	94.079.361	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	12.453.974	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.474.920	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.469.588	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	317.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	446.511.414		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	152.436.402	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	294.075.012	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	625.567.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.320.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	474.247.200	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	317.765.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	269.715.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	48.050.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
275	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0.71 %	6.807.355.057		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.016.319.020		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit	47.200.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	969.119.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	310.741.834		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	310.741.834	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	181 Ha	4.353.768.716		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	152.319.304	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	181 Ha	4.201.449.412	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179Ha	1.126.525.487		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	415.194.346	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karang, Batu Lepoq	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	711.331.141	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
276	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Kelompok 20.000 Ha	1.451.317.151		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.451.317.151		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	709.372.559	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	649.172.321	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	92.772.271	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau			11.480.024.000		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.480.024.000		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11.480.024.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
277	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %	2.391.212.959		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	178.140.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	102.150.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	75.990.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	364.971.440		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	176.520.763	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.818.677	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	169.632.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	680.646.095		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	35.050.077	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	645.596.018	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	671.945.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	239.848.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	432.097.600	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	346.709.824		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	316.029.824	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	30.680.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
278	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0.71 %	7.642.843.668		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.719.714.960		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	6 Unit	1.719.714.960	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.963.176		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.963.176	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407Ha	185.580.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	185.580.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	385 Ha	4.698.197.320		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	345 Ha	4.698.197.320	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179Ha	725.128.212		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	189.441.640	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	409.204.408	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Senyuir Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000 Ha	126.482.164	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Senyuir Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Dabeq Kab. Kutai Timur, Telen, Lung Melah Kab. Kutai Timur, Kombeng, Miau Baru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	4.500 M3	63.260.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	2 Laporan	63.260.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
279	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20 Kelompok 20.000 Ha	1.445.967.373		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	1.445.967.373		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	230.914.287	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	975.906.870	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3 Orang	148.240.122	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	90.906.094	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam			12.003.524.400		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			12.003.524.400		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			12.003.524.400		
280	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 % 100 %	1.963.278.868		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	243.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	95.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	57.600.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	57.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	70.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	70.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	288.438.896		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.353.600	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	67.231.718	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.962.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	173.891.578	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	900.876.090		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.158.490	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	696.717.600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	402.563.882		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	153.198.968	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	51.764.914	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	197.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
281	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 % 1 %	5.826.686.232		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	812.150.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	11 Unit	812.150.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	270.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	270.800.000	Kab. Berau, Maratua, Teluk Harapan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	78.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	78.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.279.086.232		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen Dokumen	95.286.232	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	225 Ha	1.605.542.600	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	100 Ha	1.578.257.400	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	1.386.650.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan Dokumen	415.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12Laporan	887.450.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang dilakukan pengamanan hutan	108.707, 29 Ha	84.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
282	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	LuasKawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98Hektar	70.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektar	70.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	70.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
283	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasanhutan yang dikelolamasyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok	4.142.759.300		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	4.142.759.300		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	9 Unit	3.645.143.300	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	287.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	210.616.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai			13.111.766.974		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			13.111.766.974		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			13.111.766.974		
284	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 Indeks	4.178.413.111		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	342.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	52.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	290.800.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	878.358.441		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.316.897	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	261.002.061	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	26.702.595	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	55.052.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	528.284.388	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.525.094.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1.525.094.400	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	668.683.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.784.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	572.899.200	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	614.677.070		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	614.677.070	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
285	3	28	0			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %	7.477.329.356		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	2.226.602.016		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	0	1.0	000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	138.413.494	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	0	1.0	000	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	85 Unit	326.363.522	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	0	1.0	000	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit	1.761.825.000	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Muara Ratah	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	268.999.794		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	268.999.794	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	451.236.340		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	219.540.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	8 Dokumen	231.696.140	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	60 Hektar	2.822.097.206		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	170 Ha	2.670.894.912	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	151.202.294	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Hektar	1.708.394.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	716.933.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	848.800.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	123793 Ha	142.661.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
286	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	6 Unit 20000 Hektar	1.456.024.507		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	1.456.024.507		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	134.652.507	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	1.076.890.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	244.482.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn			11.523.722.360		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.523.722.360		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11.523.722.360		
287	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas LayananKeseekretariatn Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	2.461.051.684		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	330.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	191.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 % 100 %	80.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	80.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	204.984.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.624.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	51.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	110.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	494.126.924		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	83.190.481	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	100.321.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.574.943	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	305.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	446.583.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	446.583.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	455.894.800		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	97.832.800	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	358.062.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	448.662.960		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	448.662.960	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
288	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 % 1 %	7.556.396.214		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.556.258.168		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	185.067.600	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	MOOK MANOR BULATN
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit	1.371.190.568	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	256.905.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	256.905.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	603.844.476		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	218.298.076	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	385.546.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutannegara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	4.422.663.970		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	229.653.832	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	4.193.010.138	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	25000 Ha	716.724.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	154.380.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	477.600.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	0	1.0	000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	410.738.46 Ha	84.744.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
289	3	28	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelolamasyarakat Jumlah kelompokusaha masyarakatyang ditingkatkankapasitasnya	20000 Ha 20 kelompok	1.506.274.462		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 kelompok	1.506.274.462		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MOOK MANOR BULATN
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	254.023.750	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	904.267.712	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	100.973.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Hektar	247.010.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake			12.467.634.840		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			12.467.634.840		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			12.467.634.840		
290	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 83 %	1.559.381.855		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						ASN					HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	112.797.920		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	43.997.920	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	68.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	363.458.980		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.495.864	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	71.240.437	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	29.962.479	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.455.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.939.200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	228.366.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	80.005.455		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	27.258.106	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	52.747.349	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	593.808.100		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	161.186.500	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	432.621.600	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	260.511.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	235.571.400	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	24.940.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI TELAKE
29 1	3	28	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0,71 %	9.658.252.985		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 3	1.0 1		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.812.114.708		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 3	1.0 1	000 2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	278.216.060	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 3	1.0 1	000 6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	43 Unit	3.533.898.648	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 3	1.0 2		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	143.809.091		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 3	1.0 2	000 1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	143.809.091	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 3	1.0 3		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	456.014.940		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 3	1.0 3	000 1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	300.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 3	1.0 3	001 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	156.014.940	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutannegara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.453.769.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	122.746.920	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	177 Ha	3.157.762.680	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	173.260.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179Hektar	1.792.544.646		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	170.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.292.544.646	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	75948 Ha	330.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
29 2	3	28	0 5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok	1.250.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 5	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	1.250.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 5	1.0 1	000 2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	574.189.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 5	1.0 1	000 6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	602.911.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	0 5	1.0 1	000 8	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	72.900.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan			21.566.127.254		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			21.566.127.254		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			21.566.127.254		
29 3	3	28	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	5.087.810.921		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	0 1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	253.384.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.440.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	104.944.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	382.273.029		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	158.950.179	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	156 Orang	223.322.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.176.146.338		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	50.760.723	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	381.417.898	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	90.342.863	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	75.752.854	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	577.872.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.266.743.459		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	429.241.949	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	837.501.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.070.163.595		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.524.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	281.919.595	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	783.720.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	939.100.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	431.782.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	66.990.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	440.328.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
294	3	28	0		3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	1 % 0,71 %	15.469.272.763		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	13.361.474.163		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	0	1.0	000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	429.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	0	1.0	000	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	25 Unit	12.932.474.163	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	324.356.100		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	324.356.100	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	161.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	161.800.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	808.642.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	808.642.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	813.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	412.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16.378 Ha	301.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
295	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	LuasKawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98Ha	100.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies	100.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
296	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Ha 20 kelompok	494.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2 Kelompok	494.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	297.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	197.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
297	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196.336 Ha	415.043.570		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	415.043.570		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasidan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	415.043.570	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook			11.895.293.450		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.895.293.450		
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11.895.293.450		
298	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100 %	7.217.634.960		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	186.590.693		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12Dokumen	133.440.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	53.150.693	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	48.950.693		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	48.950.693	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	368.251.967		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	72.101.274	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	53.150.693	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	243.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	579.451.110		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	19.584.082	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	179.316.861	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	36.876.962	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.813.205	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	295.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	5.470.748.228		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6.123.228	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.364.270.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.100.355.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	318.688.700		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.851.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	226.837.200	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	244.953.569		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	144.476.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18.070.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	82.406.819	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
299	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	0.71 % 1 %	3.893.834.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	536.701.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	126.701.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	8 Unit	410.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	100.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	850.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	750.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar	1.860.133.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	1.710.133.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	75.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	547.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	225.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	222.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	557.621,65 Ha	100.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	HUTAN LINDUNG BATU ROOK
300	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Hektar 2 unit	783.824.490		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	783.824.490		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	491.044.490	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	42.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
						Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			207.323.200.000		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			207.323.200.000		
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			207.323.200.000		
301	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 86,51 Indeks	32.880.101.600		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.365.790.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	0 1	1.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	304.040.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Swarga Bara Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0 1	1.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.370.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0 1	1.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.655.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0 1	1.0 1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.655.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0 1	1.0 1	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.770.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0 1	1.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	62.000.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0 1	1.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	958.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Kelay, Long Sului Kab. Berau, Pulau Derawan, Pegat Batumbuk Kab. Berau, Biduk-Biduk, Biduk-Biduk Kab. Kutai Barat, Siluq Ngurai, Kendisiq Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tadoan	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Wana Pariq Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Tri Pariq Makmur	
	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	87,00 %	24.622.795.259		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/ Bulan	23.850.755.259	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	697.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.160.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	66.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 %	35.937.700		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.464.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21.473.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61,64 %	319.480.600		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	138.362.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.780.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.304.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	169.034.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	2.289.739.779		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	23.079.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	187.895.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.019.244	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	70.861.135	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23.270.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.147.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	74.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	1.826.668.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1 Unit	1.300.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.300.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	1.756.035.800		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.830.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	232.933.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.498.272.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.190.322.462		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	505.632.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	20.930.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	1.010.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	662.750.462	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
302	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan	53,38 %	2.439.598.400		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	2 CAT	2.314.598.400		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	779.898.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	294.900.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Laporan	1.239.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	1 Dokumen	125.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
303	3	29	0			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	2.339.948.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Peta	187.800.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	100 Laporan	187.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	50 Laporan	541.573.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	30 Dokumen	177.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
	3	29	03	1.03	0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	40 Laporan	364.373.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen	176.600.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.06	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen	176.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	908.400.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.07	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	460.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan	447.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.12		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 Dokumen	525.575.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
	3	29	03	1.12	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10 Dokumen	166.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.12	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	40 Laporan	358.975.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
304	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	484.906,515 Ton CO2e/Tahun 45,76 % 35,78 %	104.903.602.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.517.388.524		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.05	0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	128.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.05	0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	6 Laporan	210.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	05	1.05	0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	202.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.05	0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	6 Laporan	2.975.988.524	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.06		Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1 Laporan	244.200.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.06	0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	244.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	100.046.213.476		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.07	0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	1 laporan	290.504.365	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	492.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.07	0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	2 Unit	18.683.152.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	05	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	4 Dokumen	3.816.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	28189 unit	76.485.785.111	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	277.472.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	193.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.08	0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	96.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	96.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	558.404.300		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	73.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.09	0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	485.204.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	344.395.700		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.10	0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 laporan	146.154.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	0	1.1	000	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	3 laporan	94.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.1	000	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	2 Laporan	103.841.084	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
305	3	29	0			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT	38,73 % 97,78 % 100,00 % 300,00 kWp	64.759.950.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	40 Perusahaan	808.200.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	40 Dokumen	499.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	309.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	20 Perusahaan	152.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	152.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1 Dokumen	63.799.750.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	252.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	491.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	0	1.0	000	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2 Unit	63.055.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			90.281.642.676		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			66.270.945.813		
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			66.270.945.813		
306	2	17	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 88,8 Indeks	57.234.468.397		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	1.606.735.966		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	661.378.966	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	152.884.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	64.884.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	593.661.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	133.928.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	33.147.981.823		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	32.076.281.749	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	648.840.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	102.229.667	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	249.087.303	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.790.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.750.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	68.003.104	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	157.395.925		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	33.156.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	49.942.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.577.925	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	47.220.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	189 orang	2.181.499.550		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7 Unit	36.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	502.055.342	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	499.809.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	25.642.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	159.899.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	957.692.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.202.010.340		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	73.430.398	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1.135.403.630	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.675.130	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.693.963.833	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	238.099.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23.270.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	122.881.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	742.739.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	133.626.840	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	33.919.709	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	7.649.924.112		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	889.962.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	420.769.965	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	120.643.907	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	488.528.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.287.265.720	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	3.126.166.520	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	316.588.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Kegiatan	5.379.581.800		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	39.885.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.592.230.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.747.466.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	2.909.338.881		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	43.986.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	380.546.565	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	416 Unit	258.024.916	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	52.730.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	88.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.848.418.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	236.832.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
307	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	35 %	812.542.184		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	54 %	325.550.926		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	30 Unit Usaha	325.550.926	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20 %	486.991.258		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	486.991.258	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
308	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi	66 %	1.190.169.275		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kopersiprovinci yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %	1.190.169.275		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	690.172.835	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	29 Unit Usaha	499.996.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
309	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	10 %	5.343.502.674		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %	5.343.502.674		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	120 Unit Usaha	4.252.979.224	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang	279.265.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	1.01	0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 Unit Usaha	317.895.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	07	1.01	0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	493.362.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
310	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	40 UKM	1.690.263.283		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	455 UKM	1.690.263.283		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	1.390.619.451	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	299.643.832	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			24.010.696.863		
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			9.831.210.973		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
311	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu Persentase Surat Rekomendasi yang Tepat Waktu	85 % 100 % 100 %	354.877.500		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlahpelaku usahayang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu	9 pelaku Usaha 100 %	108.401.500		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	02	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	10 Dokumen	63.002.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	02	1.03	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	45.399.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	265 Eksportir	246.476.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	4000 Dokumen	246.476.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											USAHA KECIL MENENGAH
312	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	50 %	1.199.856.800		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	7 Kegiatan	1.199.856.800		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 Unit	1.199.856.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
313	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	90 % 14 %	868.676.243		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	279.404.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	191.024.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	88.380.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau	80 %	519.642.443		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	38.478.878	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Laporan	481.163.565	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 laporan	69.629.800		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	36.319.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	04	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	33.310.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
314	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	70 Jenis	1.837.873.610		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	1.837.873.610		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	442.574.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	05	1.01	0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	343.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	295.206.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	756.212.410	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
315	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	79 %	4.850.569.077		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usahayang tereduksi	1000 Orang	3.738.773.052		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	3.004.164.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	243.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25 Pengaduan	491.088.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	1.111.796.025		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	434.654.646	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	06	1.03	0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	677.141.379	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
316	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri	90 %	719.357.743		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	33,3 %	208.677.127		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	8 UMKM	208.677.127	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	23,43 %	63.544.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	63.544.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Yang di Sosialisasi	800 orang	447.136.616		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	07	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	447.136.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			14.179.485.890		
317	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5,56 %	13.226.279.341		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	13.226.279.341		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	25.434.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	31	0 2	1.0 1	000 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	20.076.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	0 2	1.0 1	000 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	28.136.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	0 2	1.0 1	000 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	10.090.773.809	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	0 2	1.0 1	000 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	3.025.541.532	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	0 2	1.0 1	000 6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	33.822.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	0 2	1.0 1	000 7	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	2.496.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
318	3	31	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	10 %	574.691.552		DINAS PERINDUSTRIAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan	25,5 %	574.691.552		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	374.737.202	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	3 Dokumen	199.954.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
319	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PersentaseJumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	19,02 %	378.514.997		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi BerbasisSIINAS	3 Industri	378.514.997		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	145.391.873	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	95.345.923	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	137.777.201	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
						UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			4.026.545.213		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.026.545.213		
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			4.026.545.213		
320	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPSMB) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BPSMB)	88,8 Indeks 100 %	2.811.727.433		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD BPSMB)	13 Dokumen	84.120.000		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	84.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah DokumenPendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	5 Dokumen	90.582.106		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	17.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	17.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	17.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	18.382.106	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTDBPSMB)	20 orang	194.050.000		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	194.050.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	7 Dokumen	1.280.841.575		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.226.640	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	513.528.578	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	262.197.701	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	44.213.856	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.344.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	441.130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)	11 unit	121.723.160		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	121.723.160	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(UPTD BPSMB)	38 kegiatan	768.262.292		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.035.796	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	186.168.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	571.058.496	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPSMB)	58 unit	272.148.300		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	77.012.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	148.257.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	46.879.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
321	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Mutu Layanan UPTD BPSMB Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	(A) 83 % 74 %	1.214.817.780		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	0	1.0		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP Jumlah keluhan pelanggan Jumlah laporan mutu akreditasi Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	12 IKM ≤ 2%(P) & ≤ 0,5%(K) 12 laporan 100 %	1.214.817.780		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2600 Sertifikat	607.903.802	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	180 laporan	255.078.670	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	6 Produk	57.087.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	0	1.0	000	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	294.747.708	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
						UPTD Pelatihan Koperasi			5.826.270.111		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.826.270.111		
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5.826.270.111		
32	2	17	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pelatihan Koperasi)	88,8 Indeks 100 %	3.890.632.126		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 Dokumen	87.960.000		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	87.960.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	5 Dokumen	79.966.947		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	11.621.021	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	19.999.594	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	8.433.696	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	19.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	19.992.636	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTDPelatihan Koperasi)	20 orang	89.796.000		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	89.796.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen	579.380.505		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.991.517	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	89.707.837	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	61.027.747	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	39.797.942	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	43.899.900	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	106.927.712	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	209.927.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 unit	415.131.106		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	97.417.390	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	317.713.716	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(UPTD Pelatihan Koperasi)	12 kegiatan	1.143.804.200		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	5.980.200	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.501.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.922.400	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	902.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	18 Unit	1.494.593.368		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.203.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	33.987.300	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	9.040.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	70.750.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	14.620.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.355.993.068	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	UPTD PELATIHAN KOPERASI
32	2	17	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	4,97 %	1.935.637.985		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM Yang Mengikuti Pelatihan	260 Koperasi 480 UKM	1.935.637.985		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	0	1.0	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	740 Orang	1.935.637.985	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
						Biro Umum			247.457.871.000		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			247.457.871.000		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			247.457.871.000		
32	4	01	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	247.457.871.000		BIRO UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 Persentase	126.972.340.725		BIRO UMUM
	4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	683 Orang/ Bulan	124.762.071.313	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.210.269.412	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 Persentase	1.275.187.205		BIRO UMUM
	4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	617.384.240	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	657.802.965	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persentase	3.158.103.000		BIRO UMUM
	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	876.192.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.494.591.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	787.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	31.247.936.279		BIRO UMUM
	4	01	01	1.0	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	283.750.882	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.0	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	479.989.178	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.0	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	219 Paket	9.180.997.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.0	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	769.950.305	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.0	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.033.965.314	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2209 Laporan	18.513.777.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.0	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	615.129.520	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.0	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	370.376.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	8.663.287.942		BIRO UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.266.350.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	4.035.810.771	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	2.358.564.908	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	304 Unit	1.002.561.863	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	24.072.567.210		BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	51.730.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.446.027.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.798.568.460	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.776.241.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	19.929.968.562		BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	275.178.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	211 Unit	6.174.314.930	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500 Unit	1.015.427.632	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	12.183.698.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	325 Unit	281.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase	13.706.966.354		BIRO UMUM
	4	01	0	1.1	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	250.252.232	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.1	000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	152.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.1	000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	870.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.1	000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	12.434.014.122	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.1		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase	18.431.513.723		BIRO UMUM
	4	01	0	1.1	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	7.263.673.528	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.1	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	6.004.240.125	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	0	1.1	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	5.163.600.070	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
						Biro Administrasi Pimpinan			28.401.080.000		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			28.401.080.000		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			28.401.080.000		
32	4	01	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 Indeks 100 % 100 Indeks	28.401.080.000		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 persen	1.048.860.000		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	663.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	385.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	609.763.500		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	609.763.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	610.370.000		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	372.770.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	237.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.756.682.449		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	155.043.449	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	119 Paket	88.082.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	46.557.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291 Laporan	1.467.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	380.092.458		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	380.092.458	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.922.119.380		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.359.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.877.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	156.107.704		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	145.727.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10.380.704	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.1		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	19.888.078.830		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.1	000	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	513.420.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	0	1.1	000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	11.103.765.054	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.1	000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	8.270.892.826	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.1		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	2.029.005.679		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.1	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	954.855.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.1	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	474.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.1	000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	600.149.739	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Biro Hukum			6.514.545.000		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			6.514.545.000		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			6.514.545.000		
326	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	89 %	1.867.554.126		BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	104.362.808		BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	104.362.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Hukum)	100 %	8.122.808		BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.122.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum)	100 %	30.000.000		BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	772.320.214		BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	81.440.743	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12.799.471	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	678.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	126.667.000		BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	126.667.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	806.081.296		BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	801.081.296	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Hukum)	100 %	20.000.000		BIRO HUKUM
	4	01	01	1.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
327	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	4.646.990.874		BIRO HUKUM
	4	01	05	1.0		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	2.638.910.874		BIRO HUKUM
	4	01	05	1.0	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	35 Dokumen	828.221.828	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	05	1.0	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	500 Dokumen	299.999.934	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	05	10	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600 Dokumen	657.689.112	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	05	10	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	853.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	05	10	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	2.008.080.000		BIRO HUKUM
	4	01	05	10	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	1.254.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	05	10	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	753.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
						Biro Organisasi			11.081.773.000		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			11.081.773.000		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			11.081.773.000		
328	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	83 Indeks	3.061.965.034		BIRO ORGANISASI
	4	01	01	10	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)	100 %	136.473.425		BIRO ORGANISASI
	4	01	01	10	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	136.473.425	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	10	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi)	100 %	9.835.308		BIRO ORGANISASI
	4	01	01	10	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.835.308	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	10	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %	258.298.380		BIRO ORGANISASI
	4	01	01	10	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	258.298.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	10	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	92 %	1.443.868.834		BIRO ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	83.714.859	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	273.610.782	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.292.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	239.045.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	712.152.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	118.053.413	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)	100 %	719.634.187		BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81 Unit	719.634.187	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %	419.322.900		BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	992.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	418.330.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)	100 %	74.532.000		BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	56.832.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	17.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
329	4	01	0	2		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan Indeks Kematangan Organisasi	73 Indeks 45 Indeks	8.019.807.966		BIRO ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 % 100 %	5.089.804.107		BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	766.900.913	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.604.004.854	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	718.898.340	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90,00 %	2.930.003.859		BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	808.459.805	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	826.277.771	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	269.993.186	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	483.270.485	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	542.002.612	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
						Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			7.148.430.000		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			7.148.430.000		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			7.148.430.000		
330	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87 Indeks	2.434.480.163		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	95 %	136.800.000		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	136.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	26.963.488		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	26.963.488	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	1.224.659.446		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	69.988.358	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	54.671.328	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.099.999.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi pada Biro POD	100 %	40.982.057		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	40.982.057	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	4	01	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	100 %	955.575.172		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
	4	01	01	1.0	8	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.091.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.0	8	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	950.483.672	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)	100 %	49.500.000		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.0	9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	36.566.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.0	9	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.934.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
331	4	01	03				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase LPPD yang dilaporkan Persentase perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah	100 % 100 % 100 %	4.713.949.837		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.0	1		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di bidang Pemerintahan	100 %	1.305.007.150		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.0	1	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	805.007.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.0	1	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	499.999.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	1.849.956.718		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	449.996.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	799.981.406	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	599.979.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	1.558.985.969		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	608.996.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	449.992.771	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	499.997.198	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Biro Kesejahteraan Rakyat			106.806.266.000		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			106.806.266.000		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			106.806.266.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
332	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	2.928.846.788		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93 %	319.047.430		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	299.127.430	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	19.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	36.967.320		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	36.967.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1.150.240.482		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	472.518.647	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	58.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	619.721.835	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	1.248.963.956		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.228.963.956	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	173.627.600		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	133.838.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	39.789.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
333	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 % 100 %	103.877.419.212		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	95.555.932.006		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	250 Unit	93.387.625.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	2.168.306.086	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	4.599.322.025		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	3.199.904.405	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	699.530.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	0	1.0	000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	699.887.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	0	1.0		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	3.722.165.181		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	1.705.985.984	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	1.337.150.297	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	679.028.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Biro Perekonomian			17.585.423.000		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			17.585.423.000		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			17.585.423.000		
33	4	01	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	2.566.169.898		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	130.914.000		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.914.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	99.361.985		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	36.457.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kelengkapannya					
	4	01	0	1	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	5.397.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	57.506.985	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	699.611.784		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	47.580.346	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.479.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.089.198	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.806.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	605.656.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	190.034.617		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	7.134.234	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	182.900.383	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	1.394.095.312		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.425.264	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	0	1	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.379.670.048	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	4	01	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	52.152.200		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	01	1.0	9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	28.712.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	01	1.0	9	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	23.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
335	4	01	06				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	15.019.253.102		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.0	1		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	1.073.891.105		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.0	1	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	5 Dokumen	755.885.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.0	2	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	318.006.105	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.0	2		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	95 %	11.972.951.583		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.0	2	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	11.500.604.990	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.0	2	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	240.163.455	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.0	3	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	232.183.138	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.0	3		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	95 %	1.972.410.414		BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.0	3	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1.310.382.420	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.0	3	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	296.997.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	365.030.874	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
						Biro Administrasi Pembangunan			13.972.278.000		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			13.680.129.543		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			13.680.129.543		
336	4	01	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	83 Indeks	5.873.899.408		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %	260.000.000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	260.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %	238.218.487		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	72.115.050	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	153.453.437	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	12.650.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %	2.959.154.465		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	140.729.464	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.808.425.001	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %	2.156.550.456		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	324.727.100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.829.823.356	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	259.976.000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	55.136.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	176.440.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	28.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
337	4	01	0			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85 %	7.806.230.135		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	0	1.0		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	85 % 85 %	4.720.253.928		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	777.829.520	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	600.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	3.342.424.408	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85 %	3.085.976.207		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	599.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.141.714.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.345.262.207	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	X					NON URUSAN			292.148.457			
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			292.148.457			
338	X	X	X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	83 Indeks	292.148.457		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	X	X	X	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan)	92 %	292.148.457		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	X	X	X	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	292.148.457	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Biro Pengadaan Barang dan Jasa			14.714.214.000			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			14.714.214.000			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			14.714.214.000			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
339	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	78 Indeks	5.782.263.297		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan (Biro PBJ)	88 %	141.980.013		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	136.554.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.426.013	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra) Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi) Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Biro Kesra Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian) Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian) Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah (Biro POD) Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah pada Biro Perekonomian Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 persen 60 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 %	334.971.414		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro POD				
	4	01	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	86.121.414	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	184.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	63.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ)	83 %	944.013.830		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	193.735.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49.369.730	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	700.908.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantoryang terpenuhi (Biro PBJ)	88 %	2.436.208.652		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	2.436.208.652	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	83 %	1.732.461.388		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.884.424	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	199.184.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.521.392.264	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)	83 %	192.628.000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	13.568.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	122.260.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	56.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
340	4	01	0			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	3 Level 35 %	8.931.950.703		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	3.911.195.488		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	417.849.176	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	2.495.400.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	997.946.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 variabel	2.259.112.600		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	815.673.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	604.086.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	839.352.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	2.761.642.615		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	869.315.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	0	1.0	000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1.185.339.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	0	1.0	000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	706.987.315	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Sekretariat DPRD			446.708.383.000		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			446.708.383.000		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			446.708.383.000		
34	4	02	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	163.270.489.072		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.085.968.033		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	375.792.779	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	277.334.186	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.577.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	212.855.279	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	211.408.289	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	36.168.486.817		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	35.146.359.332	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	470.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	227.656.985	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	14.416.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	309.334.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %	952.084.400		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	74.923.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	773.214.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	103.946.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.023.734.371		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	135.465.751	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	722.889.880	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	198.096.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	41.849.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	26.229.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	487.832.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	257.237.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	154.134.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Perundang-Undangan					
	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.928.948.827		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31 Paket	191.991.328	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.668.034.421	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.345.257.175	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	453.291.749	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	461.772.715	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.481.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	537.345.779	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	264.774.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10.188.179.440		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2.659.819.178	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	869.952.214	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	4.091.623.748	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.566.784.300	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	02	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	14.998.293.220		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	55.626.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.675.763.200	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	198.983.620	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.067.920.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	9.213.758.725		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	723.356.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	1.899.405.500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	9.750.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1456 Unit	2.793.674.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.728.044.825	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.166.434.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	740.094.400	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	153.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.1		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	53.963.588.879		SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	02	0	1.1	000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	52.768.711.529	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.1	000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	618.927.350	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.1	000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	575.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.1		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	29.747.446.360		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.1	000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	882.347.260	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.1	000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	187.474.500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.1	000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	14.580.524.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.1	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	14.097.100.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
342	4	02	0			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang- undangan	84 Indeks 100 % 84 Indeks 84 Indeks	283.437.893.928		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	41.857.362.986		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	6.976.149.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	2.350.801.620	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	501.002.364	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	590.577.822	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	364.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	02	0	1.0	000	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	31.074.331.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100 %	8.343.318.500		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.113.510.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	948.363.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	3.870.030.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	965.041.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	8.964.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.437.410.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	34.239.669.502		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	6.171.813.336	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	6.998.542.352	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	4.320.142.352	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	5.441.542.352	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	2.040.025.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	6.031.340.680	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	3.236.263.430	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	112.392.246.888		SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	02	0	1.0	000	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	4.290.444.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang	2.146.569.288	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	684.069.288	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	32.027.603.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	2.663.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	70.579.710.512	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	34.477.763.636		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	5.464.074.576	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	2.999.888.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	26.013.801.060	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	2.686.142.478		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	527.032.784	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	2.159.109.694	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	2.108.745.570		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	678.908.382	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	1.429.837.188	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	02	0	1.0	8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	47.332.644.368		SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	18.476.438.576	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	77.018.400	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	6.905.517.288	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	749.517.288	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	0	1.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6 Dokumen	21.124.152.816	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			73.470.591.000		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			73.470.591.000		
	5	01				PERENCANAAN			73.470.591.000		
343	5	01	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	82 Indeks 100 %	50.773.541.288		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	98 %	843.734.038		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	343.734.438	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	54.999.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	220.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	170.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	33.079.919.491		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/ Bulan	31.904.444.944	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.140.541.305	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.993.696	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.984.252	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31 Laporan	9.991.034	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.964.260	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	156.161.520		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.312.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	57.210.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	73.370.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.268.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.653.426.104		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	46.510.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	48.310.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	48.054.584	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	22.510.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Melaksanakan Tugas					PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	116 Orang	1.488.040.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	2.693.173.667		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	101.087.407	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	220.573.079	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7.601.785	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.945.874	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	176.056.353	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.310.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.312.649	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.452.310.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	108.940.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	124.035.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.826.161.971		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	29.085.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	554.830.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	36.310.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.155.810.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.125.151	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	01	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	4.167.192.386		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.312.080	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.560.488.796	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.591.391.510	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %	4.353.772.111		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.0	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	65.661.820	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	863.740.271	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.0	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	19.310.380	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	144.675.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.0	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	20 Unit	106.161.880	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.743.512.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	130 Unit	410.710.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
344	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100 % 100 % 100 %	9.036.581.629		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	4.292.153.752		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	351.174.055	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	1.155.694.120	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2.785.285.577	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	120 Data dan Informasi	1.271.266.011		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	01	0	1.0	000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	528.162.365	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	414.975.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	232.575.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	95.552.346	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	3.473.161.866		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	791.800.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	1.770.999.562	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen	910.361.544	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
345	5	01	0	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 % 100 %	13.660.468.083		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %	4.299.399.841		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	545.422.715	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	538.848.965	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	460.491.224	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	586.988.987	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	514.531.833	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	646.333.271	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	378.199.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	628.583.146	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	6.018.402.498		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	386.162.369	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	179.771.871	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	203.487.631	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	763.527.231	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	373.599.770	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	138.938.673	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	385.665.786	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	3.587.249.167	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	01	0	1.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	3.342.665.744		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1.528.756.119	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	417.077.625	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	850.467.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	546.364.460	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah			274.451.079.263		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			36.673.841.848		
	5	02				KEUANGAN			36.673.841.848		
346	5	02	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah	76 Indeks 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 76 Indeks	24.079.921.448		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	100 % 100 % 100 % 76 Indeks 100 % 100 %			
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	852.542.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	279.547.800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	175.335.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.510.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	273.830.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	108.319.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	627.920.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415 Dokumen	345.720.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	63.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	219.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	310.944.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	181.844.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	129.100.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	1.676.688.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	318.092.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	159.508.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	364.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	352.276.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	302.284.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	180.528.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	1.909.783.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	644.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	389.100.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	180.268.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 Orang	436.215.300	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	259.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	9.194.610.122		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.993.057	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.945.059.040	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.431.070.875	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	19.392.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.678.095.150	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	2.466.664.666		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	746.110.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6.603.852	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	222 Unit	1.713.950.814	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.657.652.860		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.727.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.049.750.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.595.175.660	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	1.383.116.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	362.674.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	617.942.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	402.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
347	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 % 100 % 100 % 100 %	1.238.370.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	264,373 Miliar Rupiah 1.005,591 Miliar Rupiah 28,070 Milyar Rupiah	463.994.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	463.994.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7,505 Triliun Rupiah	774.376.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	774.376.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
348	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU)	100 % 100 %	11.355.550.400		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	11.355.550.400		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	243.010.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	285.432.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	394.270.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	1.357.130.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	555.700.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	9 Laporan	7.081.247.700	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	284.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	162.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	13 Laporan	347.740.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	210.120.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	434.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X					NON URUSAN			237.777.237.415		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			237.777.237.415		
349	X	X	X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 100 %	237.777.237.415		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks			
	X	X	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	237.777.237.415		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	498 Orang/ Bulan	237.777.237.415	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda			9.245.290.570		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.245.290.570		
	5	02				KEUANGAN			9.245.290.570		
350	5	02	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD	100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks	7.874.496.570		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 %			
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	42.800.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	42.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	127.320.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	127.320.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	28.788.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.240.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Daerah					DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	5.240.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	18.308.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	259.200.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	259.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	1.330.258.225		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.311.580	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	632.995.085	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	222.812.360	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	437.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	900.185.831		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	85.388.556	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	814.797.275	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	4.259.162.414		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.997.118	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.145.212.996	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.108.952.300	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	926.782.100		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	275.670.500	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	105.090.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	546.021.600	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
351	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.370.794.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem			
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	179.410.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	755.364.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1000 Dokumen SSPD	436.020.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara			7.102.824.352		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.057.932.812		
	5	02				KEUANGAN			4.057.932.812		
352	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 100 %	3.184.684.812		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 76 Indeks			
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	17.840.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.840.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	109.080.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	109.080.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	79.982.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	28.346.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.272.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	32.364.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	902.802.684		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.690.477	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	264.690.207	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	625.422.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	1.191.865.388		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.450.500	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.180.414.888	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	883.114.740		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	469.039.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	152.715.740	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	261.360.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
353	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	873.248.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem			
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	244.012.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	326.868.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	82 Dokumen SSPD	302.368.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	X					NON URUSAN			3.044.891.540		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.044.891.540		
354	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD	100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks	3.044.891.540		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	76 Indeks 100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 %			
	X	X	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	96.600.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	X	X	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	96.600.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	X	X	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	243.510.548		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	239.252.148	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.258.400	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	X	X	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	299.020.692		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Urusan Pemerintah Daerah					KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	128.503.527	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	170.517.165	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	X	X	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.405.760.300		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.405.760.300	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur			4.869.394.757		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.714.422.757		
	5	02				KEUANGAN			4.714.422.757		
35	5	02	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks	4.056.756.757		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 %			
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	66.677.500		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	66.677.500	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	97.920.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	97.920.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	128.328.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	73.144.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	55.184.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	710.375.935		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.821.090	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	192.260.357	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.393.688	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.020.800	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	416.880.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											KALTIM DI KUTAI TIMUR	
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	115.977.396			UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	40.521.986	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	75.455.410	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.275.622.938			UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.095.600	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	838.738.300	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.432.789.038	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	661.854.988		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	320.874.788	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	145.180.200	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195.800.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
356	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 % 100 %	657.666.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	100 % 100 %			
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	657.666.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	487.228.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	74.996.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	300 Dokumen SSPD	95.442.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	X					NON URUSAN			154.972.000		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			154.972.000		
357	X	X	X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 % 76 Indeks 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 76 Indeks	154.972.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	X	X	X	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	93.772.000		UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	X	X	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	93.772.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	X	X	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	61.200.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	X	X	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	61.200.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat			5.362.483.163		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.333.470.363		
	5	02				KEUANGAN			5.333.470.363		
358	5	02	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.541.430.363		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks			
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	54.612.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	54.612.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	109.080.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	109.080.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	97.534.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	41.544.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.790.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	36.200.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	89.400.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang	89.400.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	812.623.540		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	32.809.244	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	150.388.768	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	218.307.128	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	407.240.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	159.518.223		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	159.518.223	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.319.767.800		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	806.590.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.513.177.800	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	898.894.800		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	461.494.700	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	129.985.100	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	307.415.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
359	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP	100 % 100 %	792.040.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							<p>Wil. Bontang Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda</p>	<p>100 % 100 %</p>			
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<p>Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat</p>	<p>22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem</p>	792.040.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<p>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</p>	12 Laporan	227.720.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	240.020.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	760 Dokumen SSPD	324.300.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	X					NON URUSAN			29.012.800		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			29.012.800		
360	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 100 % 76 Indeks	29.012.800		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	X	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	29.012.800		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	29.012.800	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan			6.519.060.285		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.519.060.285		
	5	02				KEUANGAN			6.519.060.285		
36 1	5	02	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 76 Indeks	5.598.640.285		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	27.920.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	27.920.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	108.586.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84 Dokumen	108.586.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	112.272.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	21 Dokumen	51.600.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	8 Laporan	43.200.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	17.472.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	60.360.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	60.360.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	1.255.245.836		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.926.829	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	194.017.757	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	118.469.250	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.472.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	915.360.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	474.928.309		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	62.229.333	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	412.698.976	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.807.393.640		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.885.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.094.428.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.707.080.640	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											KALTIM DI BALIKPAPAN	
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	751.934.500			UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	337.544.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	134.600.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	279.790.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
362	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 % 100 %	920.420.000			UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 % 100 % 100 %			
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	920.420.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	63 Laporan	99.320.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	346 Laporan	434.950.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	103 Dokumen SSPD	386.150.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang			4.785.557.352		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.785.557.352		
	5	02				KEUANGAN			4.785.557.352		
363	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan	76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 76 Indeks 100 % 100 %	3.977.673.352		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)				
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	26.760.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.760.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	96.000.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57 Dokumen	96.000.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	40.100.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	15.980.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	9.180.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	14.940.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	69.000.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	69.000.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	863.341.610		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.225.978	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	238.517.932	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	140.799.300	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Perundang-Undangan					KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	470.920.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	745.267.061		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	193.081.369	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	552.185.692	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	1.477.421.681		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.853.900	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	415.571.693	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1.056.996.088	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	659.783.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	249.168.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	134.119.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	276.496.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
364	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	807.884.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda) Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)	100 % 100 %			
	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	807.884.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	159.690.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	10 Laporan	357.360.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	290.834.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara			4.714.270.161		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.714.270.161		
	5	02				KEUANGAN			4.714.270.161		
365	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks	3.965.736.161		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Indeks kualitas layanan sekretariat (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan sekretariat (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan sekretariat Indeks kualitas layanan sekretariat (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah	76 Indeks 100 %			
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	26.630.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.630.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	96.000.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	96.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	41.898.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.468.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Daerah					KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	14.128.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	13.302.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	75.000.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	75.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	697.122.065		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.501.700	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	185.196.758	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	194.637.607	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.960.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	293.826.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	432.788.266		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	62.376.995	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	370.411.271	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	1.586.857.330		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.469.580	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	443.876.600	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.129.511.150	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	1.009.440.500		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	247.517.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	82.494.500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	679.429.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
366	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	100 % 100 %	748.534.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda) Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser				
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	748.534.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	83.496.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	319.998.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENAJAM PASER UTARA
	5	02	04	10	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	5500 Dokumen SSPD	345.040.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser			4.427.478.097		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.427.478.097		
	5	02				KEUANGAN			4.427.478.097		
367	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)	76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 100 % 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3.635.648.097		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	10		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	22.879.000		UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	22.879.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	96.000.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	96.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	70.260.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	16.800.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.860.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	33.600.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	49.200.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	49.200.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	826.120.331		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.572.131	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	171.715.448	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	134.308.752	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	500.544.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	143.474.762		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20.536.080	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	122.938.682	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	1.993.846.704		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.448.800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	773.240.948	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.208.156.956	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	433.867.300		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	271.199.900	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	62.667.400	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
368	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target Pajak Daerah Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	791.830.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 % 100 %			
	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah	791.830.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem			
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	158.880.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	391.100.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	116 Dokumen SSPD	241.850.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau			5.500.000.000		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.469.150.000		
	5	02				KEUANGAN			5.469.150.000		
369	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)	100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.765.770.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks			
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	51.570.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	51.570.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	111.120.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84 Dokumen	111.120.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	98.566.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	38.816.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	6 Laporan	47.240.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12.510.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	75.596.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	75.596.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	916.016.516		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.716.689	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	160.232.170	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	146.667.657	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.920.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 Laporan	587.480.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	1.038.401.919		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Paket	333.113.056	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	705.288.863	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	1.684.579.985		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	691.577.748	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	993.002.237	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	789.919.580		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	293.059.580	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	189.360.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	307.500.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
370	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar) Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Persentasetercapainyatarget penerimaan PKB, BBNKB dan AP	100 % 100 %	703.380.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Wil. Samarinda Persentase tercapainya target Pajak Daerah				
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 9,050 Triliun Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 129,07 Miliar Rupiah 453,188 Miliar Rupiah 325,752 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 99,968 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 2 Aplikasi / Sistem	703.380.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	113.320.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	15 Laporan	342.580.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	247.480.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X					NON URUSAN			30.850.000		
	X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			30.850.000		
371	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD	100 % 76 Indeks 100 % 100 % 76 Indeks 100 %	30.850.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 % 100 % 100 % 100 % 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 76 Indeks 100 % 76 Indeks 76 Indeks			
	X	X	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	30.850.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.850.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			7.013.094.015.150		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.013.094.015.150		
	5	02				KEUANGAN			7.013.094.015.150		
37 2	5	02	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 86 Indeks	425.805.499.683		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.096.510.020		BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	883.556.259	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	159.296.091	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	68.390.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	160.706.611	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	73.250.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	466.049.290	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	285.261.769	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	384.396.969.251		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	381.598.951.351	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	2.000.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	307.947.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	99.780.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	124.736.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	111.644.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	91.536.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	62.374.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan LaporanAdministrasi BMD pada SKPD	100 %	307.901.969		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	307.901.969	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasn Dokumen AdministrasiKepegawaian	100 %	1.907.022.974		BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	496.387.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	124.751.014	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	1.027.666.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	258.218.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	10.869.330.325		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	215.510.045	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.434.680.518	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.942.972.198	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	372.587.870	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	450.764.644	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.093.985.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.358.830.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.118.712.427		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.097.960.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1.020.751.727	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.959.343.852		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	92.165.544	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.025.904.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	134.594.308	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.706.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	15.149.708.865		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	166.338.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	1.351.769.573	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	831.284.976	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	12.800.315.416	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
373	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan PergubTentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %	6.577.888.888.086		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	9.761.361.119		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	309.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	308.170.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	1.797.052.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	1.451.530.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	675.310.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	642.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	566.569.834	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	220.130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	212.410.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	001	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	3.513.529.285	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	0	1.0	001	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	65.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	1.240.104.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	268.610.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	268.610.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	274.936.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	3 Laporan	427.948.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.798.372.908		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	880.279.974	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	0	1.0	000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	38.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	163.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	48.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	1.052.078.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	686.259.360	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	907.909.546	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	330.424.628	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	732.335.965	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	0	1.0	001	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	507.978.276	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	001	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	450.926.399	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	4.965.514.461		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	182.934.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	1.602.372.390	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	112.512.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	182.972.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	689.505.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	0	1.0	000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	256.403.165	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	224.556.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	207.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	001	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	139.741.902	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	001	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	1.081.192.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	001	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	285.405.484	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	6.555.570.060.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	139.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	2.053.930.210.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	0	1.0	000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	100.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	4.401.500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %	553.475.598		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	553.475.598	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
374	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPP Sebelumnya (t-1) yang Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Sesuai pada Tahun Ini (t-0)	60 %	9.399.627.381		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	9.399.627.381		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	962.810.179	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	152.955.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	166.340.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	167.490.660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	634.841.248	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	415.850.888	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2.392.885.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	861.629.220	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	124.764.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	2.546.123.546	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	499.007.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	279.740.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	195.190.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Kepegawaian Daerah			52.951.247.927		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			30.276.806.745		
	5	03				KEPEGAWAIAN			30.276.806.745		
375	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 87 Indeks	5.792.438.611		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	589.242.674		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	146.889.144	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	56.138.853	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.954.746	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	335.259.931	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97 %	764.943.268		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	701.280.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	63.663.268	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90 %	5.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81 %	329.212.500		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	299.212.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	657.563.997		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	629.566.932	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	27.997.065	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.450.384.799		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	19.999.692	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.430.385.107	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	996.091.373		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	349.999.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	646.091.873	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	
376	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 indeks	24.484.368.134		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	6.290.538.025		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	944.463.433	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	569.016.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	892.239.402	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	3.349.999.889	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	134.822.845	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	399.996.456	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	86 %	1.456.982.023		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	349.990.026	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan	359.999.033	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	746.992.964	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85 %	6.675.686.624		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen	896.865.199	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	5 Dokumen	5.205.999.834	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	241.518.813	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	3 Dokumen	331.302.778	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	10.061.161.462		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	299.980.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500 Orang	9.072.087.349	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	570 Orang	160.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	248.306.113	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	160.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	119.988.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	X					NON URUSAN			22.674.441.182		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			22.674.441.182		
377	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 87 Indeks	22.674.441.182		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	X	X	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	80.814.043		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	X	X	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	80.814.043	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	X	X	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97 %	20.482.834.140		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	X	X	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	20.482.834.140	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	X	X	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	954.420.024		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	X	X	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	954.420.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	X	X	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.156.372.975		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1.156.372.975	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai			5.009.366.073		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.893.316.873		
	5	03				KEPEGAWAIAN			4.893.316.873		
378	5	03	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 87 Indeks	3.034.717.773		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.187.467.603		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	573.133.321	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	91.214.282	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	523.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.213.164.100		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.680.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	510.886.100	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	698.598.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	634.086.070		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	63.479.750	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	570.606.320	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
379	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 Indeks	1.858.599.100		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	10 %	1.858.599.100		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	8 Dokumen	1.858.599.100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	X					NON URUSAN			116.049.200		
	X	X	X			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			116.049.200		
380	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	87 Indeks 100 %	116.049.200		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	X	X	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70 %	116.049.200		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	X	X	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	116.049.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
						Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			71.230.000.000		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			71.230.000.000		
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			71.230.000.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
381	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Persen	46.077.234.729		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang ditetapkan tepat waktu	85 Persen	607.234.839		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	428.105.753	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	19.153.086	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	159.976.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	17.597.373.166		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	17.211.911.866	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	379.440.000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	6.021.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persenrase Penatausahaan Barang Milik Daerah	80 Persen	6.310.000		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.310.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	70 Persen	28.136.250		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	28.136.250	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	60 Persen	385.136.483		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	251.933.454	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	133.203.029	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 Persen	6.537.468.978		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	173.944.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	74.173.964	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	985.484.554	Kota Samarinda, Loa Janan Iilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33.737.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	4.983.598.550	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.394.500	Kota Samarinda, Loa Janan Iilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	256.135.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	90 Persen	8.511.205.663		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.437.868.000	Kota Samarinda, Loa Janan Iilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	3.079.812.242	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Iilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	565 Unit	3.993.525.421	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Loa Janan Iilir, Harapan Baru	SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	82 Persen	5.547.650.450		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.093.600	Kota Samarinda, Loa Janan Iilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.726.664.550	Kota Samarinda, Loa Janan Iilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.813.892.300	Kota Samarinda, Loa Janan Iilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 Persen	6.856.718.900		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	56.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	136.300.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	796 Unit	650.370.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	40.720.000	Kota Samarinda, Loa Janan Iilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	5.972.528.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
382	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	87 Persen	25.152.765.271		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	88 Persen	7.034.808.055		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1800 Orang	7.034.808.055	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi PersentaseSDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	86 Persen 86 Persen	18.117.957.216		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	91.303.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	127.078.098	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	518.331.690	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	54 Laporan	3.994.028.976	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	22.688.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6954 Orang	13.364.525.902	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			35.918.200.000		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			21.243.494.201		
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			21.243.494.201		
383	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Balitbangda	84 Indeks 77,50 Nilai/Predikat	7.572.312.018		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	68.741.656		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.799.828	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.941.828	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	53.192.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.808.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0.08 % 0,08 %	281.633.424		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	242.040.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	723.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	29.979.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.894.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	4.996.924	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	15 %	33.910.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	26.110.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50 %	208.720.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	70.720.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	90.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	48.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	3.242.051.321		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	646.128.495	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	58.024.876	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.479.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	118.707.100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.201.711.350	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	17.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	70 %	430.949.714		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	376.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	52.143.840	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	5.874	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	2.529.298.905		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	560.241.705	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	390.412.800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	1.563.644.400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70 %	777.006.998		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	152.087.998	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	198.655.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	49.302.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	44.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	233.772.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.150.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	88.640.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
384	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Presentase Hasil Inovasi yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	9 % 9 %	13.671.182.183		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	2.277.506.894		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	860.519.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	489.300.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	05	0	1.0	000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	183.081.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	184.307.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	245.229.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	001	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	105.153.274	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	001	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	2 Rekomendasi	209.917.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	1.616.369.770		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	317.772.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	266.688.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	284.436.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	253.170.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	257.787.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	236.516.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	3.883.574.474		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	274.999.816	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	171.178.134	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	157.481.112	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	295.999.877	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	273.000.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	270.999.619	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	938.780.180	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	239.999.506	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	280.999.805	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	285.999.835	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	279.999.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	276.499.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	137.636.830	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.893.731.045		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	4.086.569.328	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	05	0	1.0	000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	199.966.044	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1.156.939.335	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	299.984.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	0	1.0	000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	150.272.318	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X					NON URUSAN			14.674.705.799		
	X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.674.705.799		
38	X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Balitbangda	84 Indeks 77,50 Nilai/Predikat	14.674.705.799		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	435.119.656		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	426.378.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.799.828	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.941.828	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0.08 % 0,08 %	14.155.477.402		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	14.155.477.402	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50 %	11.180.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.180.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	72.928.741		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.528.741	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	X	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	31.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Badan Penghubung Provinsi			23.000.000.000		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			23.000.000.000		
	5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG			23.000.000.000		
38	5	07	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Poin	18.465.249.518		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	07	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	577.549.482		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	247.531.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	50.527.042	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	40.611.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	7.795.010.332		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	7.204.953.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	216.249.399	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	180.271.873	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	07	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.136.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	92.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	99.399.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	41.714.746		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.646.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.999.326	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	38.068.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	277.257.500		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	63.937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29 Dokumen	68.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19 Dokumen	9.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	07	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	135.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	1.669.906.985		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.246.248	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	642.851.373	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	95.622.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	88.694.941	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	658.304.623	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	78.187.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	733.302.925		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	479.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit	566.684.673	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	166.139.252	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.604.864.448		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61 Laporan	1.832.882.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.760.421.848	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.765.643.100		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	531.330.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	798.224.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	117.051.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	25.322.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	954.414.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154 Unit	339.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
387	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga yang ditindaklanjuti Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan	100 % 100 % 100 %	4.534.750.482		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Informasi yang ditindaklanjuti Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess yang ditindaklanjuti				
	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100 %	4.534.750.482		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	986.579.005	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	876.615.341	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	947.546.890	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	1.370.253.472	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3 Laporan	353.755.774	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
						Inspektorat			70.322.540.000		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			64.429.766.242		
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			64.429.766.242		
388	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 Indeks 100 %	54.226.128.138		INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.480.400.000		INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	6	01	01	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	350.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	680.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	28.738.655.636		INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	27.988.655.636	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	350.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	6	01	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik	100 %	300.000.000		INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	6.570.107.980		INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	108 Paket	350.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	250.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	118 Orang	5.870.107.980	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %	1.628.408.542		INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	49.967.340	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	505.039.762	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	113.747.203	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	6	01	01	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	159.663.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	249.991.037	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	400.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	149.999.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	10.186.830.480		INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122 Paket	9.887.284.040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	299.546.440	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	100 %	3.749.511.000		INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.224.699.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.465.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.413.346.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	1.572.214.500		INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	81.460.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	
	6	01	01	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	285.994.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	877.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	17.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	310.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
389	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	7.577.450.600		INSPEKTORAT
	6	01	02	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 100 % 80 %	3.037.450.800		INSPEKTORAT
	6	01	02	1.0	000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Laporan	350.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.0	000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	550.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.0	000	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	589.999.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.0	000	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	32 Laporan	815.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.0	000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	732.450.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	6	01	0	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	4.539.999.800		INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	14 Laporan	540.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	88 Laporan	3.999.999.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
390	6	01	0			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	85 %	2.626.187.504		INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.626.187.504		INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 Perangkat Daerah	660.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	0	1.0	000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	21 Kegiatan	1.966.187.504	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	X					NON URUSAN			5.892.773.758		
	X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			5.892.773.758		
391	X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 Indeks 100 %	5.892.773.758		INSPEKTORAT
	X	X	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	435.728.400		INSPEKTORAT
	X	X	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	435.728.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	X	X	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	5.457.045.358		INSPEKTORAT
						Urusan Pemerintah Daerah					
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	81.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	INSPEKTORAT
	X	X	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	5.376.045.358	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			102.371.070.000		
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			102.371.070.000		
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			102.371.070.000		
39	8	01	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	78,68 Indeks 100 %	24.451.349.609		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	961.007.944		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	39.315.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.942.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.742.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.742.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	619.589.536	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	01	0	1.0	000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	280.674.368	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,75 %	13.024.450.277		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	12.424.050.965	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	432.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	5.776.848	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	962.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	159.696.848	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.482.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	35 %	185.295.444		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	962.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	180.481.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	01	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.925.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.925.616	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	30 %	180.729.116		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	59.323.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	481.404	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	481.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	120.442.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	96 %	4.213.882.376		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.329.336	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1.000.206.801	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	222.915.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2.310.707.606	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	289.521.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	385.201.329	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.517.510.797		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	4.237.750.702	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	279.760.095	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.019.158.656		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.034.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	217.579.840	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	771.544.816	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	349.314.999		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	72.741.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	201.173.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	46.700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	28.700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
393	8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	12.246.582.456		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	12.246.582.456		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2845 Orang	1.511.616.314	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	331.268.424	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	218.634.006	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	300 Orang	776.787.716	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	3.714.517.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	4.254.128.384	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	54.905.980	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	401.469.006	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40 Orang	983.255.346	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
394	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,32 %	57.260.236.464		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	5 Dokumen	57.260.236.464		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1725 Orang	56.718.647.463	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
	8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	541.589.001	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
395	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	33,58 %	1.704.194.395		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	1.704.194.395		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1270 Orang	1.489.125.009	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	215.069.386	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
396	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %	1.756.110.267		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	1.756.110.267		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1380 Orang	1.605.454.285	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
	8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	150.655.982	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
397	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	4.952.596.809		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	4.952.596.809		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1230 Orang	2.242.760.269	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	241.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	2.468.636.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								JUMLAH	20.950.000.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian kinerja pembangunan yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta turunannya, yakni tujuan dan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun

output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja daerah ini selanjutnya dirumuskan kedalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan sebagai ukuran utama pencapaian kinerja pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Pada subbab ini memuat beberapa indikator kinerja yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025. Rincian masing-masing indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

7.1. Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja makro dan indikator kinerja utama (IKU) memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja makro dapat diartikan sebagai indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Pencapaian indikator makro didorong oleh pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah dengan melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Makro Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Nomenklatur	Capaian 2023	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,22	6,28-6,58
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,31	4,60-5,14
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,11	5,05-5,67
4	Rasio Gini	0,322	0,310-0,321
5	Indeks Modal Manusia	-	0,57
6	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	29,33	40,82

Sumber: Kesepakatan Forum Pemutakhiran Indikator Makro Daerah, 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Indikator kinerja tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Tabel VII.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir Periode RPD
INDIKATOR KINERJA TUJUAN					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,20	78,60	78,92
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,22	6,28-6,58	4,50-5,30
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,11	5,05-5,67	5,55
4	Indeks Gini	Indeks	0,322	0,310-0,321	0,305
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,47	80,19	75,20
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	29,33	27,53	32,03
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,87	74,00 (B)	70,01(BB)
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
8	Prevalensi Stunting	Persen	22,90	19,80	10
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,31	4,60-5,14	5,14
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,97	67,64	67,98
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,39	8,39	9,05
12	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	11,44	12,39	14,68

7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang termasuk ke dalam Indikator Kinerja Urusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Adapun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel VII.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
01.01	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	96,35	100,00	100,00
01.02	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	89,03	100,00	100,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
02.01	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1,73	1,91	1,96
02.02	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00
02.03	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100,00	100,00
02.04	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100,00	100,00	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
03.01	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	62,02	82,60	94,43
03.02	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan Provinsi	%	63,23	77,06	97,65
03.03	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	23,57	62,97	64,91
03.04	Rasio kemandapan jalan provinsi	%	79,19	86,23	93,53
03.05	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	88,57	60,13	62,62
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
04.01	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	20,33	76,87	100
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
05.01	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100,00	100,00
05.02	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1	2	3	4	5	6
05.03	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100,00	100,00
05.04	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100,00	100,00
05.05	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100,00	100,00
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
06.01	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100,00	100,00
06.02	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100	100,00	100,00
06.03	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100,00	100,00
06.04	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100,00	100,00
06.05	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100,00	100,00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
07.01	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	80	90,00	90,00
07.02	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	1,988	50,00	55,00
07.03	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	29,10	7,00	7,50
07.04	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	91,49	20,00	21,00
07.05	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	27,61	27,60	28,00
07.06	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	87,73	85,00	86,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
08.01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	14,31	15,00	16,00
08.02	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	5,76	1,99	1,98
08.03	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 anak	%	5,19	23,23	23,11
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1	2	3	4	5	6
09.01	Persentase Cadangan Pangan	%	89,60	92,07	96,91
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
10.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	75,47	80,19	75,20
10.02	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	7,60	98,00	98,00
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
11.01	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100,00	100,00
11.02	Pemanfaatan data kependudukan	%	60	44,11	50,00
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
12.01	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	70,58	50,00	0,00
12.02	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	28,02	8,50	11,36
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
13.01	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,18	2,02	2,01
13.02	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	62,46	68,01	68,23
13.03	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	25,18	7,38	7,24
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
14.01	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,55	0,864	0,882
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
15.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100,00	100,00
15.02	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	94,59	56,00	57,00
15.03	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	64,00	65,00
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
16.01	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	38,83	40,00	40,00
16.02	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	100	75,00	75,00
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
17.01	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	24,46	1,00	3,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1	2	3	4	5	6
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
18.01	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	1,31	1,45
18.02	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,16	27,32	34,97
18.03	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	237	135	135
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
19.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
19.02	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
20.01	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	64,34	54,00	55,00
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
21.01	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	63,50	65,00
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
22.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	68,46	47,00	48,00
22.02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	68,77	40,00	45,00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
23.01	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	74,88	77,00	78,00
23.02	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	6,55	4,50	4,70
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
24.01.00	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	111,38	376.000	382.000
24.02.00	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	94,12	100,00	100,00
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
25.01.00	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	129,16	12	12,10

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1	2	3	4	5	6
25.02.00	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	46,81	63,00	64,00
25.03.00	Tingkat hunian akomodasi	%	16,10	1,68	1,70
25.04.00	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,74	0,84	0,85
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
26.01.00	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	465	3,69	4,00
26.02.00	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-89	-2,75	-3,64
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
27.01.00	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	62,06	75,75	78,78
27.02.00	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0,16	1,00	1,00
27.03.00	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	94,97	93,07	97,14
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
28.01.00	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100	100,00	100,00
28.02.00	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	100,00	100,00
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
29.01.00	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-21,17	55,77	55,80
29.02.00	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100,00
29.03.00	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	15,78	74,00	75,00
29.04.00	Tertib Usaha	%	100	100,00	100,00
29.05.00	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	62,02	90,00	92,00
29.06.00	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	21,95	79,00	80,00
29.07.00	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,07	1,15	1,15
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
30.01.00	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	12,29	16,00	15,00
30.02.00	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	116,78	118,00	120,00
30.03.00	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	%	100	25,50	26,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1	2	3	4	5	6
	dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
30.04.00	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95	95,00	95,00
31	PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
31.01.00	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	2,25*	9,67	9,69
31.02.00	Rasio PAD	%	60,02*	53,14	52,75
31.03.00	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i>)	%	63,88*	64,93	64,80
31.04.00	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP*	WTP	WTP
31.05.00	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	15,44*	100,00	100,00
31.06.00	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	32,41*	100,00	100,00
31.07.00	<i>Assets Management</i>	Aspek	4*	4	4
31.08.00	<i>Cash Management</i> : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,88*	15,51	15,52
32	PENGADAAN				
32.01.00	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	38,72*	3,80	3,70
32.02.00	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	73,42*	75,00	75,00
32.03.00	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	143,07*	35,00	40,00
33	KEPEGAWAIAN				
33.01.00	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	62,53*	90,00	90,00
33.02.00	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,94*	87	88,00
33.03.00	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60,83*	87,00	88,00
34	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK				
34.01.00	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3*	Level 3	Level 4
34.02.00	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP)	Level	Level 3*	Level 3	Level 4

Sumber: hasil proyeksi, 2024

Ket *) Capaian Kinerja Tahun 2022

BAB VIII

P E N U T U P

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tema pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah “Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”. Tema ini mengandung makna bahwa pembangunan Kalimantan Timur di tahun 2025 berfokus pada upaya mengakselerasi diversifikasi ekonomi, baik secara vertikal maupun horizontal untuk mendorong pertumbuhan sektor non-pertambangan dan penggalian yang didukung dengan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah yang andal, serta sumber daya manusia yang berdaya saing dalam rangka peningkatan inklusifitas pembangunan.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dilakukan melalui berbagai tahapan pembahasan dalam berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik dengan Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 juga bergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat dokumen ini disusun. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 akan terwujud apabila seluruh pelaku pembangunan berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing serta turut mengawal pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RKPD tahun 2025 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2025 yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini antara lain :

1. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
3. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mempedomani RKPD Tahun 2025 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan RENJA K/L 2025 dan RENJA Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2025;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
7. Gubernur melalui Kepala Bappeda mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur periode berikutnya;
8. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.



B. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

AKMAL MALIK